

TAUFIK AL MUBARAK

ACEH PUNGO

TAUFIK MENCATAT GELIAT MANUSIA ACEH
KONTEMPORER DENGAN DINGIN. TAK BERTERIAK,
TAPI MENUSUK.

—NEZAR PATRIA, KETUA AJI PUSAT

PENGANTAR: MUHAMMAD NAZAR

**ACEH
PUNGO**

TAUFIK AL MUBARAK

ACEH PUNGO



Aceh Pungo

Penulis

Taufik Al Mubarak

Pengantar

Muhammad Nazar

Desain Cover

Fauzan Yusuf

Tata Letak

bangpozan.com

Ilustrasi

Tauris Mustafa

Cetakan I, Februari 2009

Penerbit

BANDAR Publishing

Ds. Rukoh, Lr. Lhok Bangka. Darussalam. Banda Aceh.

Aceh. Indonesia. Mobile Phone 08126999020.

E-mail: bandar.publishing@gmail.com

Dicetak dan Distributor

CV. Diandra Primamitra Media

Jl. Tasura 31, Pugeran, Maguwoharjo, Depok,

Yogyakarta 55282

Telp. 0274-7151049, fax, 0274-881133

ISBN :

*Untuk kedua orang tuaku yang
sudah mengajarkan indahnyanya hidup
dalam kesederhanaan.*

Pengantar Penerbit

Benarkah (orang) Aceh itu “pungo”?

Jika anda penikmat sejarah Aceh, pasti tidak asing dengan istilah Aceh Moorden. Sebutan tersebut dipopulerkan oleh R.A. Kern, salah seorang penulis berkebangsaan Belanda. Kern memang ingin menggambarkan dalam penelitian tersebut bahwa orang Aceh itu “gila” alias “pungo”, atau crazy (Inggris), berdasarkan bukti-bukti yang diamati dan analisisnya tersendiri.

Kosa kata “pungo” sudah sangat tua, setua masyarakat Aceh sendiri. Sebagian orang luar Aceh mengerti kata ini. Sehingga kalau bertemu dengan orang Aceh yang melakukan hal-hal di luar batas kewajaran menurut akal sehat, mereka spontan berujar, “Aceh Pungo” sambil geleng-geleng kepala keheranan.

Benarkah (orang) Aceh itu “pungo”? Ada beberapa catatan kami tentang hal ini. *Pertama*, sikap ke-pungo-an orang Aceh yang ditunjukkan dalam sejarahnya yang heroik. Betapa daerah ini tak pernah menyerah di hadapan kolonialis, Belanda, sepanjang sejarah kolonialisme. Rentang waktu yang memadai untuk mengalami “belandaisasi” sebagaimana daerah lain di nusantara. Banyak serdadu Belanda direkrut dari penduduk Jawa, lalu dikirim ke Aceh. Konon Aceh adalah satu-satunya kawasan Hindia-Belanda yang tidak takluk kepada kompeni. Oleh sebab itu, Soekarno menjadikannya sebagai bukti bahwa Indonesia masih tetap berdaulat. Itu pula alasannya mengapa Aceh disebut sebagai daerah modal. Ternyata pungonya orang Aceh menjadi modal kedaulatan bagi Indonesia.

Kedua, mujahid Aceh terkenal Teuku Umar, pernah bersikap gila dalam perjalanan jihadnya melawan “kaphe” (kafir) Belanda. Ia dianggap “pungo” karena membelot kepada Belanda, yang be-

rarti mengkhianati bangsa sendiri. Bagai ketiban durian runtuh, Belandapun menghadihinya gelar Johan Pahlawan. Tetapi yang terjadi, Umar malah melarikan senjata Belanda yang kemudian digunakan para pejuang Aceh untuk menembaki tuannya (Belanda). 'Senjata makan tuan'.

Ketiga, Tjut Nyak Dhien, isteri Teuku Umar, tak kalah berani dengan suaminya. Beliau salah satu dari sederet wanita yang menjadi komando jihad yang ditakuti Belanda pasca kepulangan Teuku Umar ke pangkuan ilahi. Tjut Nyak Dhien adalah salah satu di antara sekian perempuan "pungo" yang pernah dimiliki Aceh. Karena lazimnya keberanian seperti itu dimiliki laki-laki. Beliau berjuang sampai matanya buta. Bahkan Belanda merasa perlu membuang beliau ke Sumedang, karena meskipun telah uzur, kehadiran beliau di tengah-tengah rakyat Aceh dapat terus menyuburkan semangat juang mujahid Aceh. Kondisi yang menggambarkan betapa beliau merupakan sosok penting dalam perjuangan mengusir Belanda. Dunia secara umum kala itu masih alergi dengan kepemimpinan perempuan. Aceh justru telah membuka pintu lebar-lebar kepada perempuan untuk menjadi pemimpin. Tak heran bila artis ibukota, Tamara Geraldin, lebih mengagumi Tjut Nyak Dhien daripada Kartini yang notabene didapuk sebagai ibu emansipasi wanita Indonesia. Tamara beralasan perjuangan Tjut Nyak Dhien lebih nyata dan menantang. Ternyata wanita Aceh tempoe doeloe lebih "pungo" dalam hal emansipasi.

Kempat, perang Aceh melawan Belanda kadangkala berbeda dengan perlawanan yang ditunjukkan oleh daerah lain. Aceh adalah bansa (bangsa) para ulama besar. Di sini begitu banyak cerita perjuangan yang unik, untuk tidak dikatakan mistik. Tapi sayangnya, banyak yang terlanjur jadi mitos, karena kealpaan "endatu" (nenek moyang) orang Aceh yang cenderung mencukupkan proses transformasi sejarah melalui hikayat oral. Alkisah, salah seorang ulama kharismatik, Tgk. Chiek Abdul Wahab Tanoh Abee, berperang melawan Belanda hanya dengan membabat talas di pekarangan depan rumahnya, lalu di medan pertempuran sana, sejumlah "kaphe" mendadak bertumbangan. Pasukan Aceh yang sebelumnya terdesak berhasil memukul mundur Belanda. Cerita yang tidak masuk akal. Benar atau tidak, ini jelas sebuah mitos yang paling "gila".

Kelima, demi *peng griek* (uang receh) yang dimuntahkan meriam Belanda ke dalam "peureude trieng" (perdu bambu), orang Aceh sibuk membabat rumpun-rumpun bambu. Padahal "peureude trieng" tersebut merupakan benteng pertahanan rakyat Aceh sendiri.

Akal-akalan Belanda ini ternyata berhasil memperdaya rakyat Aceh untuk membuka pertahanan mereka. Tindakan pungo *peng griek* ini menguntungkan Belanda melebihi *peng griek* yang dihamburkannya.

Keenam, hikayat *prang sabi* melejitkan semangat juang rakyat Aceh. Mereka tidak takut mati demi membela tanah air. Hikayat ini pernah dilarang pada masa Orba. Soeharto dan anteknya takut pada magis hikayat yang dikarang oleh Tgk. Chiek Pante Kulu ini. Ternyata hikayat *prang sabi* menggema kembali di tanah seribu mesjid ini pada tahun 1998, ketika sedang gencar-gencarnya demonstrasi melengserkan "keurajeun" (kekuasaan) Soeharto. Sejak saat itu hikayat "aneh" ini kembali merakyat dalam masyarakat Aceh di setiap demonstrasi. Termasuk pada saat tumpah-ruahnya jutaan masyarakat Aceh ke Koeta Raja (baca: Banda Aceh) untuk menuntut referendum sebagai solusi bagi konflik Aceh yang berkepanjangan.

Ketujuh, perjuangan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang tidak kenal lelah menuntut kemerdekaan Aceh (baca: Aceh yang lebih baik). Ibarat syair salah satu lagu nasional Indonesia, "gugur satu tumbuh seribu". Begitulah mata rantai perjuangan mereka dalam mencari keadilan. Hanya *ureung pungo* yang mampu bertahan sampai 30 tahun perjuangan tanpa ciut oleh *shock therapy* ala TNI yang menebar korban secara sadis di setiap jengkal tanah rencong. Entah berapa perundingan damai yang telah gagal. Jakarta pun pusing tujuh keliling, terutama karena isu Aceh yang sudah mendunia. Sampai akhirnya GAM berdamai dengan R.I. via MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Ada politisi Jakarta yang menganggap capaian perdamaian tersebut sebagai demokrasi yang kebablasan. Kasian Bapak Presiden, Susilo Bambang Yudoyono juga sering "dilededin" oleh seniorinya yang tidak pro-perdamaian Aceh. Padahal, pungonya SBYlah yang berhasil meredam pungonya pejuang GAM.

Kedelapan, sejumlah anak muda Aceh yang tergabung dalam SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh) mampu menghadirkan jutaan massa ke Banda Aceh untuk menuntut referendum. Desa-desa di seluruh Aceh menjadi lengang. Yang tersisa hanya perempuan, orang uzur, dan anak-anak saja. Tindakan "pungo" ini hampir saja membuat Aceh merdeka. Jakarta ketar-ketir oleh sikap "gila" mereka. Hanya Gus Dur, presiden saat itu, yang menganggap massa yang hadir cuma lima ratusan orang. Maklumlah, Gus Dur tidak melihat kenyataan.

Kesembilan, pada November 2008, pungonya rakyat Aceh terlihat dalam penyambutan kedatangan Wali Nanggroe, Hasan Tiro, deklarator GAM yang sudah bermukim di Swedia selama 29 tahun. Mereka

menyambut beliau laksana panglima perang yang baru pulang dari medan laga. Wali terharu menyaksikan antusiasme rakyatnya. Padahal, tidak banyak yang sempat menjabat tangan orang yang beberapa kali pernah diisukan telah meninggal pada masa Orde Baru.

Kesepuluh, rakyat Aceh sekarang “pungo” dengan kegemilangan sejarah masa lalu. Mereka mengulanginya saban hari di warung kopi melalui *oral history*. Sayangnya, generasi Aceh belum mengambil pelajaran dari sejarah untuk bangkit dari berbagai keterpurukan yang melanda tanah leluhur. Mereka hanya bangga dengan sejarah masa lalu yang tertuang dalam ingatan sosial. Bukan dalam bentuk kesadaran sejarah. Sehingga banyak orang Aceh kadang tidak siap untuk menerima kepahitan sejarah mereka sendiri.

Tidak terlalu sulit untuk menelusuri mengapa orang Aceh demikian gila dalam banyak hal. Beberapa falsafah hidup (hadih maja) mereka dapat dijadikan sebagai jawabannya. “Endatu” orang Aceh mengajarkan, “*singet bek, ro bah meuruah*”. Falsafah tersebut mengajari orang Aceh bersikap idealis pada kebenaran, sehingga memberi kesan watak mereka itu keras. Orang Aceh tidak akan puas pada sesuatu yang belum ideal. Mereka tidak mau diperlakukan tidak adil. Al Bajabir, anggota DPRA periode 1999-2004 pernah berujar, orang Aceh adalah etnis yang berwatak paling keras. Mereka hanya kalah dengan Yahudi dalam hal yang satu ini.

Orang Aceh suka tantangan. Makin kuat musuh di depan, makin bergairah mereka menghadapinya. “*Nyou ureung Aceh, bek macam-macam*” (ini orang Aceh, jangan coba macam-macam), gertak mereka terhadap siapa saja yang dianggap sebagai musuh. “*Haroh ta udep, wajej ta matee*” (kita harus hidup, tapi wajib mati), begitu tetua mengajari mereka. Makanya mereka tidak takut pada ancaman mati sekalipun. Sebab mati itu rahasia ilahi. Kemanapun orang pergi, kematian akan menghampirinya. Misalnya kenekatan yang ditunjukkan oleh pengedar ganja asal Aceh di Malaysia. Semua orang tahu menjadi pengedar ganja di sana sama halnya “bercanda dengan maut”. Konsekuensinya adalah kematian. Tetapi bagi orang Aceh, resiko tinggi merupakan tantangan sekaligus peluang meraup ringgit. Begitulah orang Aceh, watak dagangnya kadang mengalahkan rasa takut pada kematian. Anthony Reid, sejarawan asal Australia, mengakui orang Aceh memiliki watak dagang yang sangat kuat. Reid tentu saja merujuk pada situasi Aceh sebagai pusat perdagangan pada masa silam. Bukan pada perdagangan ganja yang terjadi pada era modern.

Namun demikian, sikap idealis mereka yang kadang tidak masuk

akal menurut etnis lain, dibarengi dengan kebaikan pada orang yang tidak mengganggu hak mereka. “*Hadih maja*” mengatakan “*ureung Aceh meunyou ka teupeh, bu leubeu han geupeutaba, tapi meunyo hana teupeh, boh kreh jeut ta raba*”. Pengertiannya lebih kurang adalah orang Aceh sangat mengerti pada siapa saja yang tidak berkonflik dengan mereka. Untuk mereka, orang Aceh rela berkorban apapun. Tetapi sebaliknya, jika ada orang yang mengkhianati dan berkonflik dengan mereka, kapan dan apapun alasannya, orang Aceh tidak akan membantu mereka lagi.

Orang Aceh itu transparan dan *gentlemen*. “*Lagee crah, meunan beukah*”. Sikap *gentlemen* mereka tercermin dari asesoris yang dipakai pada pakaian adat pengantin laki-laki. Rencong khas Aceh disematkan dengan gagah di pinggang bagian depan. Seolah ingin menegaskan pada khalayak ramai bahwa yang bersangkutan membawa senjata. Hanya orang licik saja yang menyembunyikan senjata di punggung, agar musuh tidak mewaspadainya.

Taufik Al Mubarak

Sebagai orang Aceh, Taufik Al Mubarak mewarisi sifat “gila” para endatunya. Nilai-nilai perjuangan yang mengalir dalam tubuh mungilnya diaktualisasikan dalam forum perjuangan para intelektual muda Aceh, SIRA, yang memperjuangkan referendum untuk mengakhiri konflik klasik yang mendera “bansa” Aceh. Tetapi, forum tersebut kemudian dicurigai mendukung perjuangan GAM. Para aktivisnya terpaksa menghilang dari peredaran karena “diuber” oleh aparat keamanan. Muhammad Nazar (Wagub Aceh sekarang) sendiri sebagai pemimpin SIRA diamankan ke dalam hotel prodeo oleh aparat keamanan. Seluruh aktivis SIRA menjadi DPO.

Namun demikian, Taufik dkk. tidak menyerah begitu saja pada aparat. Jika GAM bergerilya di hutan-hutan, aktivis SIRA bergerilya di kota-kota yang dianggap aman dari pemantauan. Ketika keamanan mulai terusik, mereka siap berpindah ke kota yang lebih aman. Tetapi, aktifitas lembaga mereka tetap berjalan lancar. Seperti halnya GAM, aktivis SIRA baru dapat menghirup udara segar yang dipancarkan hutan Leuser setelah tercapainya MoU Helsinki.

Menariknya, pascaperdamaian, Taufik menarik diri dari kancah politik. Ia sama sekali tidak terlibat dalam partai lokal manapun. Pilihan ini mendatangkan cemoohan dari sebagian rekan seperjuangan. Mereka mengira Taufik sudah berhenti berjuang. Padahal, pria ramah itu memahami betul makna sebuah perjuangan. Hanya saja ia memilih berjuang melalui tulisan, dunia yang tidak diminati oleh

kebanyakan rekannya.

Koran Harian Aceh (HA) menampung bakat jurnalistik yang dimiliki Taufik. Dia dipercayakan sebagai salah satu redaktur yang membidangi politik dan keamanan. Selama keberadaan Taufik, HA terus berbenah dalam usaha mencari jati dirinya. Salah satunya adalah kehadiran halaman fokus yang pada awalnya dikelola dengan manis oleh Taufik. Halaman tersebut ternyata sekarang telah menjadi *trade mark* HA. Belakangan, manajemen HA mempercayakannya sebagai Redaktur Pelaksana (Redpel) dan mengelola rubrik *pojok gampong*, supaya alumnus Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry ini bebas mengeksplorasi ide dan pemikirannya, yang ternyata mendapat respon positif dari masyarakat luas.

Taufik memiliki ide-ide “gila” (baca: kritis) dalam merespon berbagai persoalan dan fenomena yang ada dalam kehidupan sosial bansa Aceh. Misalnya respon terhadap situasi Pemerintah Aceh yang kalang kabut di setiap akhir tahun, terkait minimnya dana serapan dari APBD Aceh yang melimpah, 8,5 Triliun Rupiah. Pemerintah Aceh terkesan tidak tahu bagaimana memanfaatkan anggaran semaksimal mungkin agar tidak perlu dikembalikan lagi ke kas negara. Menurut data yang ditemukan Taufik, setidaknya 5 Triliun Rupiah kemungkinan besar akan dikembalikan ke Jakarta. Situasi yang aneh, sebab biasanya manusia paling pintar menghabiskan uang.

Taufik punya solusi “nakal” untuk mengatasi masalah tersebut. Ia menawarkan pemerintah Aceh untuk membeli salah satu klub sepakbola di liga Inggris sebagai investasi daerah di luar negeri. Secara hukum, ia beralasan bahwa Pemerintah Aceh boleh melakukan investasi di luar negeri secara mandiri, sebagaimana amanat pasal 165 ayat 1 UU PA (Undang-undang Pemerintah Aceh). Sedangkan secara logika ekonomis, ia berargumen bahwa klub sepakbola di Inggris sudah merupakan ladang bisnis yang menjanjikan keuntungan secara finansial. Bukan seperti klub sepakbola di Indonesia, hidup segan mati pun tak mau. Apalagi harga sebuah klub liga Inggris, Manchester City misalnya, yang dibeli Al-Fahim cs., hanya sekitar 200 juta Pound-sterling (3,4 Triliun). Dana yang tidak besar bagi pemerintah Aceh. Dengan prediksi sisa Kas tahun ini saja, 5 Triliun Rupiah, Aceh sudah mendapatkan satu klub sepakbola di negara Ratu Elizabeth itu. Dengan demikian anggaran Aceh tidak perlu dikembalikan ke negara.

Contoh di atas hanyalah satu dari sekian pemikiran Taufik tentang situasi ril yang terjadi dalam masyarakat Aceh. Idenya yang ka-

dang aneh tapi logis tersebut sayang jika dibiarkan tercecer. Apalagi masyarakat begitu antusias menunggu *pojok gampong*. Suatu ketika, Taufik pernah ditelepon oleh pelanggan HA, karena tidak hadirnya rubrik tersebut. Menyahuti respon semacam itu, muncullah ide penulisnya untuk mengumpulkan ceceran goresan tersebut menjadi buku agar masyarakat dapat menikmati *pojok gampong* secara tuntas.

Bandar Publishing mengucapkan ribuan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pengerjaan buku ini. Terutama kepada Bapak Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, S. Ag. yang telah bersedia memberi pengantarnya di tengah kesibukan beliau yang luar biasa. Terima kasih juga atas kepercayaan penulisnya untuk bekerjasama dengan **Bandar Publishing**. Kami selalu bangga pada generasi muda Aceh yang kreatif dan mampu memberikan warisan bagi generasi selanjutnya. Tugas kami lah merekam seluruh pemikiran dan peradaban Aceh. Krue Seumangat...Taufik Al Mubarak.

Kepada pembaca, selamat membaca.

Darussalam, Januari 2008
Manager BANDAR *Publishing*

Lukman Emha

Dari Penulis

SEBUAH provokasi kadang-kala bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Setidaknya hal tersebut penulis rasakan saat mulai menulis kata pengantar untuk buku ini. Boleh dibilang, buku yang sedang pembaca pegang ini lahir dari sebuah provokasi. “Anda adalah penulis, buktikan itu?” begitu bunyi provokasi tersebut. “Buktikan itu” yang dimaksud si ‘provokator’ ini, berarti penulis harus menerbitkan buku. Jika belum lahir sebuah buku, berarti belum ‘sah’ dan ‘layak’ menyebut diri penulis.

Tak hanya itu, di berbagai kesempatan si ‘provokator’ itu selalu memberondong penulis dengan pertanyaan, “Mana karyamu?”. Di setiap kesempatan tersebut, penulis mampu mengelaknya, bahwa masih banyak tugas yang harus diselesaikan, seperti menyelesaikan kuliah, fokus pada pekerjaan. Pokoknya, provokasi tersebut selalu penulis jawab belum ada kesempatan untuk mengumpulkan tulisan yang berserak tersebut (maklum penulis bukan seorang yang patut dibanggakan dalam soal arsip dokumen penting). Namun, kali ini, penulis tak dapat mengelak lagi, maka lahirlah karya sederhana yang sedang anda bolak-balik ini.

Judul buku ini adalah *Aceh Pungo*. Sebuah judul yang sangat provokatif dan memvonis, seperti Aceh sudah Pungo (Gila), seperti gelar yang pernah diberikan oleh penulis Belanda, R.A. Kern. Kita boleh saja setuju atau tidak dengan kesimpulan tersebut. Pemberian judul buku ini ‘Aceh Pungo’ sama sekali tak berhubungan dengan gelar yang diberikan si penulis Belanda itu, melainkan lahir dari proses mengamati fenomena Aceh sehari-hari, yang lebih menjurus ke hal-hal yang menurut kita sudah dikategorikan sebagai perilaku Pungo.

Pembaca boleh saja sepakat atau tidak dengan judul ini. Sebab,

isi buku ini bukan membahas secara panjang lebar asal-muasal gelar Aceh Pungo (Aceh Moorden), siapa yang pertama kali menyebutkan kata tersebut, atas latar belakang apa, dan fakta-fakta sejarah lainnya. Buku ini hanya kumpulan tulisan, dengan beragam masalah yang terjadi di sekitar kita namun kita sering melupakannya. Tulisan-tulisan dalam buku ini juga kadang-kadang diselip dengan kritikan halus atau sindiran, dengan harapan setiap kebijakan yang salah dapat dikoreksi. Selanjutnya, dengan harapan agar hal-hal yang sebenarnya kecil dan sepele tidak begitu saja dilupakan, karena kadang-kala sangat menentukan.

Karenanya, tulisan di dalam buku ini bisa dibaca secara terpisah, tanpa terikat dengan judul-judul lainnya. Banyak tulisan yang berdiri sendiri tanpa berhubungan satu sama lain, meski ada beberapa tulisan yang memiliki hubungan. Namun, maknanya tidak akan hilang jika dibaca tersendiri, tetapi jika dibaca kedua-duanya akan jauh lebih baik.

Tulisan-tulisan di dalam buku ini juga kadang-kadang tidak konsisten, di mana ada yang berisi pembelaan terhadap suatu institusi atau di lain kesempatan menghantamnya. Sama sekali bukan berarti penulis *plin-plan*, melainkan disesuaikan dengan situasi dan persoalan yang dibahas. Sebab, saat menulis, bisa jadi ada suatu kebijakan yang dalam kacamata penulis bagus dan patut dibela, namun dalam soal lain, institusi tersebut harus dikritik. Jadi, kritik dan pembelaan di sini lebih berkait pada konteks, bukan pada kepentingan.

Dalam buku ini sering juga berisi makian atau sumpah serapah atas kondisi yang terjadi. Tetapi, sumpah serapah dan makian ini masih dalam batas kewajaran. Sebab, dalam menulis tidak ada sikap lunak yang perlu diperlihatkan, karena memang lebih cocok dicaci-maki kondisi yang ada. Karena itu, mohon dimaklumi juga, itulah ciri khas penulis, selalu meledak-ledak, dan menyampaikan apa adanya. Sikap penulis seperti ini juga sering mengundang 'eje-kan' dari teman-teman, bahwa penulis adalah pelopor jurnalisme propaganda. Entahlah, penulis sendiri tidak mengerti apa maksud 'genre' jurnalisme propaganda itu.

Nah, karena itu, pembaca boleh sepakat sebagian atau seluruhnya atas isi buku atau tidak sepakat sama sekali. Tetapi, seperti sering disampaikan teman penulis, sebuah karya tetaplah sebuah karya. Dan buku ini, meski sangat sederhana, juga merupakan sebuah karya yang perlu diberi apresiasi, dalam arti menghargai sejelek apapun sebuah karya. Sebab, keberanian menerbitkan karya dalam bentuk

sebuah buku adalah sikap yang perlu dihormati, khususnya di tengah budaya oral masyarakat kita, yang lebih senang menyampaikan sesuatu melalui lisan. Buku ini, hanyalah salah satu usaha merawat sesuatu melalui tulisan, khususnya tentang fenomena kekinian yang terjadi di Aceh, bahwa ada suatu masa di mana Aceh diwarnai dengan hal-hal 'pungo' yang tidak dapat dijelaskan dengan penjelasan biasa, melainkan dengan contoh-contoh yang dekat di sekitar kita.

Jadi, terimalah karya ini dengan segenap kelebihan dan kekurangannya. Karena kelebihan atau kekurangan sebuah karya tidak bisa diketahui jika belum membacanya. Saya percaya, sebagian pembaca sudah pernah membaca tulisan di buku ini yang terhimpung di kolom 'pojok gampong' Harian Aceh atau di blog penulis <http://jumpueng.blogspot.com>, bagi yang berdomisili di luar Aceh. Namun, tak semua isi tulisan yang dirangkum di dalam buku ini berasal dari kolom pojok, karena ada sebagian juga editorial Harian Aceh dan dari Tabloid SUWA yang pernah penulis pimpin. Penulis sengaja menambahkan tulisan dari SUWA karena memiliki nada dan relevansi dengan semua tulisan yang ada di kolom pojok. Mudah-mudahan, bisa saling melengkapi.

Terakhir tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah ikut mendorong dan membantu lahirnya karya ini. Pertama kepada Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar yang sudi membaca dan memberikan kata pengantarnya, Nezar Patria, Jaleswari Pramodhawardani, Azhari, dan Linda Tangdialla yang sudah membaca dan memberikan komentarnya. Tak lupa juga kepada Mukhlisuddin Ilyas, yang jika tidak ada provokasi darinya, mungkin tulisan ini masih tersimpan di blog, termasuk juga kawan-kawan dari Bandar Publishing terutama Lukman Emha, yang menulis pengantar dari penerbit dengan sangat bagus, melebihi penjelasan penulis dalam buku ini. Terima kasih juga atas kesediaannya menunggu untuk waktu yang cukup lama sehingga buku ini dapat dibaca. Kemudian kepada Fauzan Yusuf, yang membuat buku ini menjadi enak dibaca, serta Tauris Mustafa atas beberapa ilustrasi yang membuat buku ini 'lebih' semarak.

Ucapan terima juga penulis sampaikan kepada kawan-kawan yang telah memberi inspirasi, menjadi kawan diskusi atau juga kawan ngobrol, yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Andil mereka juga tidak dapat dianggap kecil. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah membimbing dan membesarkan penulis sehingga menjadi seperti ini. Tanpa pengorbanan mereka, penulis tidak bisa menghasilkan

sebuah karya seperti buku ini.

Mudah-mudahan buku yang sangat ringan dan sederhana ini menambah daftar pustaka koleksi buku pembaca. Kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan isi buku ini pada edisi mendatang. *“pat ranup yang hana mirah, pat peuneurah nyang hana bajoe, pane tuto nyang hana salah, hana bak awai teunte na bak lu-doe.”* Selamat membaca!

Banda Aceh, 21 September 2008

Penulis

Taufik Al Mubarak

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT — vii

PENGANTAR PENULIS — xv

DAFTAR ISI —xix

KATA PENGANTAR: Muhammad Nazar — xxi

BAGIAN PERTAMA

POLITEK URUENG GAMPONG — 1

BAGIAN KEDUA

POLITEK PUNGO — 105

BAGIAN KETIGA

POLITEK HANA TITEK — 185

TENTANG PENULIS — 283

KATA PENGANTAR

“**PUNGO**” adalah kata ekspresif yang membuat orang-orang Aceh marah atau bangga ketika mendengarkannya. Secara etimologi, *Pungo* itu memang kata biasa, tetapi kata-kata “*Aceh Pungo*” dalam realita sosiologis Aceh telah tercipta secara alami dan melekat hingga kapan pun. Orang-orang akan segera marah serta bereaksi apabila kata *Pungo* (gila) itu ditujukan karena sinisme, seperti senjaja melakabkan *pungo* dalam artian gila atau sakit jiwa kepada seseorang atau sebuah keluarga, meskipun pada kenyataannya mereka sedang gila atau sakit jiwa. Apalagi jika mereka tidak dalam keadaan gila atau sakit jiwa, tentu kemarahan mereka semakin memuncak. Hal itu, karena *Pungo* dalam pengertian gila atau sakit jiwa adalah sesuatu yang aib dalam pandangan banyak orang dan sulit disembuhkan. Ini salah satu kenyataan sosial di Aceh (mungkin di daerah lain hampir sama juga), sehingga mereka sering memasung keluarga mereka yang sedang berpenyakit gila atau sakit jiwa, meskipun secara kemanusiaan dan medik sebenarnya tidak boleh seperti itu, sebab semua penyakit ada obat dan terapinya.

Sebaliknya orang-orang Aceh bangga juga dengan sebutan *Pungo* yang mengesankan makna kelebihan atau sesuatu yang luar biasa (abnormal dalam pengertian positif). Orang-orang Aceh yang terlalu berani, terlalu cerdas atau terlalu hebat dalam melakukan sesuatu atau meraih sesuatu kesuksesan sering mendapatkan lakab *Pungo* juga. Sebagai contoh, ini tergambar manakala pejuang-pejuang Aceh berhadapan jarak dekat melawan *marsose* (komando pasukan khusus Tentara Belanda) dengan bermodalkan ilmu beladiri, semangat jihad dan strategi menjebak musuh. Bahkan ada juga di antara mereka yang tidak memiliki kemampuan apa-apa tetapi hanya bermodalkan keberanian saja, bilamana sekarang di Aceh sering disebut “*ka putoh urat yo*” (tidak ada lagi saraf penakut). Perilaku dan pekerjaan tersebut langka dan terlalu sulit dilakukan oleh orang-orang lain, tetapi umum di Aceh, padahal itu adalah sesuatu yang amat sangat berisiko dan sama dengan menyumbangkan nyawa kepada musuh. Karena itu pula kemudian lahir istilah dan

dibuatlah buku *Aceh Moorden* (Aceh Pungo/Aceh Gila) oleh penulis Belanda yang telah melihat atau menghadapi langsung kenyataan Aceh tersebut. Demikian pula apabila mereka mendapatkan kesuksesan-kesuksesan lainnya yang tidak diperkirakan atau tidak diperhitungkan orang lain—juga orang-orang menilainya *Pungo*.

Dalam fenomena zaman sekarang yang juga semakin gila, kata-kata *Pungo* atau *Aceh Pungo* terus melekat pada berbagai perilaku serta pekerjaan orang-orang Aceh, sehingga sekali lagi kata-kata itu telah menjadi salah satu istilah sosiologis Aceh yang sangat khas. Dari anak-anak hingga orang-orang dewasa pun masih menggunakannya karena marah, mengejek maupun senang dan bangga dengan sesuatu atau seseorang. Konsekwensinya bahwa karena *Pungo* mereka akan benar-benar menjauhkan sesuatu atau seseorang, sebaliknya akan menghabiskan segenap tenaga, pikiran dan uang untuk dapat meraihnya atau meniru sang orang sukses yang dinilai *Pungo*.

Dalam buku hasil karya Taufik Al Mubarak sebanyak 115 judul tulisan yang dibagi dalam 3 BAB telah dikumpulkan berbagai fenomena dan realitas sosiologis yang dibungkus dengan judul besar "*Aceh Pungo*." Di dalamnya ada banyak manfaat dan kritik sosial yang menggelitik para pembaca dan menghadirkan kata *Pungo* bukan hanya untuk dibenci, tetapi sebuah kultur sosial yang patut dimiliki karena lahir dari kesungguhan, kepintaran dan keberanian melakukan atau memiliki sesuatu. Tulisan-tulisan yang ditulisnya dalam rubrik Pojok Gampong Harian Aceh, Tabloid SUWA dan lain-lain sebelumnya telah dikodifikasi kembali dalam sebuah buku *Aceh Pungo* tersebut.

Meskipun sang penulis baru berusia 27 tahun, tetapi mulai menulis sejak sekolah di tingkat SMA serta terus berkembang manakala keterlibatan seriusnya dalam pergerakan sipil SIRA. Karena itu layaklah karya-karya di dalamnya sangat merangsang pikiran dan meningkatkan inspirasi para pembaca. Sebab, muatan buku Aceh Pungo bukan sebuah dogmatis dan teori belaka melainkan didapatkan dari berbagai kenyataan sosiologis Aceh yang senantiasa berkembang. Semoga buku ini akan bermanfaat bagi para pembaca dan mengantarkan penulis untuk semakin serius menggeluti kritik-kritik sosial yang progresif dan konstruktif.

Banda Aceh, 17 Januari 2009
Muhammad Nazar

BAGIAN PERTAMA
POLTEK UREUNG CAMPONG

Catok

BANYAK hal menarik yang patut kita simak dari sebuah *catok*. Sebuah *catok* (cangkul atau pacul), misalnya, tak semata-mata sebuah benda dan alat yang akrab dengan petani. *Catok*, bisa menceritakan banyak hal, seperti kerja keras, kemandirian, kehidupan orang kecil dan juga keikhlasan berbuat. Meskipun sekarang ini, alat produksi berupa cangkul tergusur setelah hadirnya traktor, namun tak membuat cangkul dilupakan. Cangkul tetap tak tergantikan, meskipun banyak alat cangkih lainnya terus bermunculan. Bukankah, banyak hal yang dapat kita pelajari di sini khususnya terkait *catok*?

Saya jadi ingat epigram Heraklitus, seorang filsuf Yunani yang hidup sezaman dengan pemikir China Laozi dan Confusius, petapa India Sidharta Gautama, dan lebih muda dari Zarathustra, nama Nabi orang Persia. *"Bila tidak ada matahari, kita bisa melihat bintang-bintang petang."* Demikian petuah kebijaksanaan Heraklitus. Petuah yang penuh teka-teki, dan butuh energi untuk mengerti maknanya.

Seperti ditulis Roger von Oech dalam buku *"Expect the Unexpected"* (Harapkan yang tak terduga!), matahari yang dimaksudkan itu hanya perumpamaan saja, yang melambangkan sifat dominan dari situasi hal atau suatu situasi. Sebut saja, seseorang yang membayangkan sebuah kelompok, suatu bunyi yang menenggelamkan bunyi-bunyi yang lain, bumbu tertentu yang menenggelamkan cita rasa lain dalam sebuah hidangan, atau suatu kegiatan yang tidak menyisakan waktu untuk melakukan apa pun yang lain. Sementara bintang-bintang petang, melambangkan segi-segi yang kurang jelas dari sebuah situasi. Bintang-bintang petang itu tak terlihat karena mataharinya begitu cemerlang. Jika matahari tak ada, 'bintang-bintang' ini dapat dilihat.

Catok, dewasa ini sudah diperlakukan sebagai 'bintang-bintang' petang yang tak terlihat itu. Sementara mesin produksi modern

seperti traktor, laksana matahari. Perannya begitu dominan. Orang-orang kemudian meremehkan para petani yang masih menggunakan *catok*, dan menyebut mereka tidak modern. Kita begitu mudah melupakan sesuatu, setelah memiliki yang lain. Seolah-olah sesuatu itu tak pernah hadir dalam kehidupan kita dan kita tak pernah mengetahuinya. Tapi, apakah orang-orang akan berpikir bagaimana membuat traktor jika sebelumnya tidak ada petani yang membajak sawah menggunakan cangkul? Namun, itulah dunia kita sekarang. Kita selalu lupa pada apapun, setelah memiliki sesuatu yang lebih sempurna. “Seperti kacang lupa pada kulitnya,” demikian orang-orang menyebutnya. Tapi, tahukah kita, bahwa hasil dari keringat mereka ternyata tak semata-mata hanya dinikmati oleh mereka saja. Banyak orang yang mampu tersenyum, berkat jerih petani. Namun, adakah kita menghargai pengorbanan mereka? Apakah kita pernah merasa bahwa satu biji padi begitu berharga dan sangat menentukan satu biji padi yang lain? Coba kita renungkan, pernah tidak dalam kehidupan kita tak membuang sisa makanan? Tidak pernahkah kita menjatuhkan satu beras yang sudah jadi nasi saat kita makan? Saya yakin, semua orang pernah melakukannya.

Namun, meski banyak hal positif dari sebuah *catok*, bukan berarti semua dari filosofi *catok* harus ditiru. Sebab, ada juga sifat-sifat dari *catok* yang tidak terpuji. *Catok*, misalnya, selalu mementingkan diri sendiri. Lihat saja, setiap kali *catok* digunakan petani mencangkul, selalu hasilnya ditarik ke belakang, untuk dirinya. Hal ini menyerupai salah satu tabiat manusia, yang mengumpulkan sesuatu untuk memperkaya diri. Sebagai perilaku, filosofi *catok* tak seharusnya kita tiru. Tapi, bukankah sekarang banyak dari kita yang mempraktikkan filosofi *catok* dengan tujuan memperkaya diri? (HA 181108)

Penjilat

SELAMAT datang para penjilat. Anda berada di negeri yang tepat. Di sini, tabiat anda sebagai penjilat dihargai. Anda tak perlu takut tak mendapatkan penghargaan, sebab di sini, penjilat memperoleh tempat terhormat. Saya jamin, Anda tidak akan sendirian, karena bisa bergabung dengan para penjilat lainnya yang lebih jago dan lihai.

Namun, sebagai penjilat, anda juga harus pintar-pintar. Jika tidak, para penjilat lainnya akan menggusur anda. Karena itu, anda tak cukup hanya bermodal lidah yang panjang, melainkan juga harus terlihat seperti mafia. Anda harus selalu berhati-hati, sebab, sedikit lengah, penjilat lain akan menjatuhkan anda. Meski saya percaya, di komunitas penjilat berlaku rumus umum, seperti halnya di jalan raya. Bahwa, “sesama penjilat tidak boleh saling menjatuhkan.” Tetapi rumus ini tak pernah jadi aturan baku, karena bisa diubah setiap saat, tergantung apakah kepentingan masing-masing para penjilat terpelihara atau tidak.

Tapi, saya bukan berniat menakuti anda. Anda tak perlu takut jika posisi anda sebagai penjilat tergusur. Sebab, menjadi penjilat juga memiliki keasyikan tersendiri, meski anda lebih mirip sebagai lembu yang dicokok lehernya. Namun, soal kesejahteraan, anda tak perlu ragu. Banyak penjilat yang bisa menikmati hidup mewah, dan berkelas. Anda hanya cukup menghidupkan mesin ‘iya, siap pak!’. Itu kunci sukses anda sebagai penjilat.

Selain itu, saya juga ingin memberi saran, agar anda tidak menjadi penjilat kelas teri. Jika ingin sukses berprofesi sebagai penjilat, maka anda musti menjadi penjilat kelas kakap. Dalam menjilat anda harus selalu menggunakan kacamata, agar anda tidak salah dalam menjilat. Menjilat pejabat kecil, tak punya kuasa, dan miskin, bisa menuntun anda jadi seperti mereka. Karena dalam menjilat juga

butuh seni. Itu yang penting. Makanya, anda harus menjilat orang atau pejabat yang punya kedudukan tinggi dan dihormati semua orang. Dengan begitu, anda akan punya nilai tawar. Orang-orang pasti akan memberi hormat pada anda.

Jika anda masih ragu bahwa profesi penjilat tidak menjanjikan masa depan anda, anda tak perlu resah. Saya ingin menceritakan kisah seorang penjilat. Sebut saja namanya *Dokaha*. Dia sudah jadi pegawai sebuah kantor selama 15 tahun. Namun, di rumah dia selalu dimarahi isterinya, karena tak mampu membeli sebuah mobil. Belum lagi, isterinya selalu merepet minta agar diberikan jatah untuk mempercantik diri di salon, minimal sebulan sekali.

Isterinya selalu membandingkan rumah tangganya dengan para tetangga. “*Bapak gimana sih? Lihat tetangga kita, setiap bulan selalu saja ada benda baru yang dibeli,*” ujar isterinya. *Dokaha* hanya diam saja. Karena meski sudah bekerja 15 tahun, sepeda motornya pun belum diganti. “*Bapak nggak bisa diandalkan. Bapak lemah,*” gugat isterinya.

Karena tak tahan terus menerus mendengar omelan isterinya, *Dokaha* pun mencari jalan pintas. Apalagi, sejak dua bulan terakhir, jatah dari isterinya juga sudah jarang didapatkan. *Dokaha* hanya bisa pasrah. Mau jajan di luar, *Dokaha* jelas tak mampu. Jika pun coba nekat, polisi syariat tak segan-segan meringkusnya. Sementara untuk ke luar daerah, pakai uang dari mana. Bukan hanya karena ongkos ke luar daerah sudah mahal, melainkan juga tarif wanita penghibur sudah naik. Sejak harga BBM naik, tarif mereka juga dinaikkan. Menurut para penghibur, mereka terpaksa menaikkan tarif, karena biaya make-up sudah ikut naik.

Bingungkah *Dokaha*? Ternyata tidak. “Jika ada kemauan, pasti ada jalan,” begitu gumamnya dalam hati. Jurus maut jadi penjilat pun dimainkan. Di kantor, atasannya didekati. Di depan karyawan lainnya, *Dokaha* memuji atasannya. Para karyawan pun bingung. Karena biasanya, *Dokaha* yang paling kritis dan vocal mengkritik atasan. Pujian *Dokaha* tersebut ternyata sampai ke telinga atasannya. *Dokaha* pun dipanggil. *Dokaha* sudah menduga, jika atasannya akan memanggilnya. Di dalam ruang, *Dokaha* memasang wajah semanis dan seramah mungkin. Dengan seksama, disimak pembicaraan atasannya, tanpa protes sedikit pun.

“Sejak hari ini, kamu saya pecat!” Ucapan atasannya membuyarkan lamunannya tentang jabatan yang bakal disandangnya. “Saya tidak butuh karyawan yang pandai menjilat. Saya butuh karyawan yang punya kemampuan dan bukan penjilat,” sambung atasannya. *Dokaha* tertunduk lesu, sambil teringat wajah seram isterinya. Nah! (HA 191108)

Catok Brok

KETIKA kita tidak senang dengan seseorang, kita langsung bilang ke orang itu ‘*kah lagee catok brok*’. Ucapan seperti ini tentu saja berhubungan dengan perilaku. Lalu, apa hubungannya antara *catok brok* dengan perilaku? Bukankah ada yang janggal menyebutkan seseorang dengan lakab atau sebutan seperti ini. Sangat tidak tepat mengatakan untuk seseorang dengan istilah *catok brok*.

Ada juga istilah lain yang sama membingungkan seperti kata *catok brok*, yaitu *lagee sure kumong*. Seperti halnya istilah *catok brok*, kata *sure kumong* juga menunjukkan tentang perilaku. Istilah-istilah ini—meski terdengar cukup aneh—masih tetap hidup di tengah masyarakat yang katanya sudah *modern* ini. Yang pasti—kita yakin—istilah begini sudah muncul sejak dulu, meski tidak bisa dilacak dari sumber-sumber tertulis. Karena, budaya masyarakat Aceh lebih senang mengingat saja, ketimbang mencatat.

Kita bisa mengatakan, jika istilah seperti ini juga lahir dari budaya politik *keude kupa* atau *politek blukoh* (*balee jaga*). Lahir begitu saja, tanpa bisa dilacak asal-muasalnya. Namun, kata-kata seperti itu tetap hidup, selama masyarakat merawatnya dengan sangat baik.

Lalu, apa hubungannya dengan bahasan kita? *Catok brok* dan *suree kumong*, suatu istilah untuk menyebutkan kondisi ketidaksempurnaan. Ketika dilakabkan untuk orang, berarti ada sifat ketidaksempurnaan dalam diri orang tersebut.

Catok brok atau kalau diterjemahkan berarti ‘cangkul rusak (buruk)’ menandakan cangkul tersebut tak sempurna lagi sebagai cangkul. Tak dapat digunakan layaknya cangkul. Sebab, kalau cangkul sempurna, berarti hanya disebut ‘cangkul’ saja. Tidak ada embel-embel di depannya. Istilah *catok brok* sering dilekatkan untuk orang-orang yang tidak punya kemampuan, tapi ingin memegang posisi-posisi penting, baik dalam organisasi, pemerintahan atau

suatu perkumpulan.

Demikian juga halnya istilah *sure kumong* (ikan tongkol yang kembung). Istilah ini berarti ikan tongkol yang sudah membusuk dan mengembung. Ketika tak ada embel-embel di depannya, ikan tongkol masih dianggap sempurna, dan bisa dikonsumsi, tanpa menimbulkan efek seperti rasa yang berubah atau menimbulkan gatal-gatal jika dimakan. Sementara kalau sudah ada embel-embel di depan seperti *kumong*, berarti ikan tersebut tak bisa dimakan lagi. Sebutan ini sering ditabalkan untuk orang-orang yang mengambil bukan haknya, suka korupsi dan menipu orang lain.

Kalau *catok* (cangkul) tidak ada embel-embel di depan, masih bisa dipergunakan secara sempurna. Bisa digunakan untuk mencangkul atau bercocok tanam, menggali tanah atau untuk kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat kecil. Di kampung, dulunya, semua masyarakat menyimpan cangkul. Jika tidak digunakan untuk bercocok tanam, biasa digunakan untuk menggali kuburan orang. Artinya, *catok* tersebut masih bisa dimanfaatkan. Tapi, begitu disebut *brok*, cangkul tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi.

Disebut *brok* mungkin juga karena sudah karatan, tua, tumpul, dan gagangnya patah. Jika pun diperbaiki mungkin juga tidak bakal sempurna lagi, atau tak berfungsi sebagai layaknya cangkul. Hampir sama seperti orang yang sudah memegang suatu jabatan dalam waktu lama, pasti tak muncul lagi inovasi, kreasi dan terobosan. Stagnan.

Agar lebih mudah, istilah *catok brok* dan *suree kumong* harus seperti bunyi dalam satu pepatah Aceh (saya tidak tahu apakah masuk dalam kategori *hadih maja* atau tidak), "*Tayue jak dikue ditoh geuntot, tayue jak dilikot disipak gaki* (Disuruh jalan di depan dikeluarkan kentut, diminta jalan di belakang menyepak kaki orang)." Pepatah ini menunjukkan suatu perilaku tidak baik dari seseorang baik sebagai pimpinan maupun bawahan. Sama-sama tak memberi manfaat untuk orang lain, malah menyusahkan dan menyakiti.

Ada contoh menarik memahami dua istilah yang membingungkan ini: hari-hari ini (saat tulisan ini ditulis), media lokal di Aceh intens memuat berita tentang kinerja buruk BRR, dan juga aparat pemerintahan. BRR disorot karena tak mampu menyelesaikan pembangunan rumah para korban tsunami, sementara pemerintah dianggap belum mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, serta banyak pejabat yang tersandung kasus korupsi (*kan* banyak pejabat yang sudah kembung-kembung perutnya).

Kenapa kedua institusi ini tidak mampu melaksanakan tugas dan mandatnya secara sempurna? Jawabannya sederhana saja,

pastilah karena di kedua lembaga itu dihuni oleh orang-orang yang bermental *catok brok* dan *suree kumong*. Artinya, orang-orang yang menempati posisi-posisi penting bukanlah orang yang *qualified*, dan mampu di bidangnya. Apalagi jika banyak orang-orang yang sudah tua (bukan karena tua dalam hal kepakarannya), karena itu sering tidak berfungsi atau tidak mampu menjalankan tugas dengan baik sesuai fungsinya. Bayangkan saja kalau di BRR dan pemerintahan masih dihuni oleh orang-orang bermental *catok brok* dan *suree kumong*, pastilah setiap hari kita akan menyaksikan parade kemurkaan rakyat. Setiap hari, rakyat menggugat mereka! (HA 10.04.08)

Silang

*Di setiap persimpangan // di setiap rumah // ada tanda silang
berwarna merah // setelah berpaling tanda itu tak juga hilang*

PUISI itu dikirim seorang kawan (kini almarhum). Semula saya tidak begitu paham akan makna dari puisi singkatnya tersebut. Namun, setelah saya coba cerna dan mengaitkan dengan situasi Aceh sebelum damai diteken, saya jadi mengerti tujuan dari puisi tersebut. Pun begitu, saya tak lekas membalasnya, bahkan hingga dia ‘kembali’.

Baiklah, saya ingin mengajak anda kembali ke tahun 2003-2005, ketika di seluruh Aceh diberlakukan keadaan darurat dengan status Darurat Militer (DM). Puluhan ribu tentara dan juga Brimob dikirim ke Aceh untuk menumpas para pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan juga para ‘penyokong’ perjuangan GAM tersebut seperti SIRA, Kontras dan SMUR. Para tentara dan Brimob tersebut tunduk di bawah Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD).

Aceh saat itu digambarkan sebagai wilayah perang yang sama sekali tidak menganut sistem perang yang beradab. Sebab, tak sedikit warga sipil (termasuk anak-anak) yang menjadi korban. Kampung atau desa yang menjadi basis GAM diseragamkan sebagai wilayah hitam. Beberapa rumah penduduk yang ada anggota keluarganya menjadi GAM diberikan tanda silang (X), sebagai penanda bahwa rumah tersebut sebagai musuh dan bisa dibumihanguskan kapan saja, jika dikehendaki.

Melalui tanda X tersebut masyarakat dibuat hidup dalam bayang-bayang kematian. Sebab, dalam setiap operasi-operasi militer yang digelar, pasukan tidak perlu bertanya lagi apakah pemilik rumah tersebut *pro* republik atau *pro* GAM? Dari tanda di dinding rumah sudah bisa ditebak. Akibatnya, penghuni rumah tersebut kerap

menerima perlakuan tidak wajar. Sebagiannya malah bernasib tragis, menemui ajalnya.

Memberi tanda silang sebenarnya juga akrab dan kerap dilakukan oleh masyarakat Aceh, lebih-lebih untuk orang yang bermasalah pada masa lalu. Karena bagi masyarakat Aceh, mengingat dan melupakan hampir dilakukan secara bersamaan dan sangat cepat. Secepat mengingat begitu juga halnya ketika melupakan. Orang Aceh mudah mengingat sesuatu, dan juga cepat melupakannya.

Saya teringat saat awal-awal reformasi, ketika di Aceh muncul fenomena politik yang meminta status Aceh diperjelas. Orang Aceh sangat membenci sesuatu yang berbau Jakarta. Di mana-mana demo menghujat TNI digelar, karena dalam otak orang Aceh, TNI sudah diberi tanda silang sebagai musuh. Situasi itu dimanfaatkan secara baik oleh aktivis GAM untuk menanamkan pengaruhnya di Aceh. GAM dianggap sebagai penyelamat rakyat Aceh. Kematian anggota GAM ditangisi dan berbondong-bondong orang melayat ke rumah duka. Namun, situasi tersebut tak bertahan lama, karena medio Mei 2003, Pemerintah Pusat memberlakukan status Darurat Militer di Aceh. Satu persatu pendukung GAM ditangkap, dibunuh atau ditembak.

Apa yang terjadi kemudian? Aceh mirip parade kekuasaan. Siapa yang berkuasa, dialah yang didukung. Di berbagai daerah kemudian dibentuk front perlawanan GAM, yang memobilisasi masyarakat untuk menyatakan ikrar setia NKRI. Para pengurus front perlawanan GAM tersebut sebagian malah berasal dari para simpatisan GAM atau para aktivis yang membelot. Mereka-mereka lah kemudian yang menciptakan tanda untuk para pendukung GAM lainnya.

Kini setelah perdamaian tercipta, bukan tidak ada para pengurus front perlawanan GAM yang mengubah haluan dan menjadi pendukung GAM sejati. Mereka terlihat lebih GAM daripada GAM asli. Malah, mereka juga berani memberi tanda silang untuk orang lain berupa cap pengkhianat. Jika dulu mereka memberi tanda silang warna merah pada rumah-rumah penduduk, kini mereka banyak yang berlindung di bawah tanda berwarna merah.

Selain itu, memberi tanda juga kerap dilakukan orang Aceh untuk tokoh publik atau orang yang dihormati. Misalnya saja Ibrahim Hasan, mantan Gubernur Aceh. Setelah namanya tercemar karena terlibat DOM, Ibrahim Hasan hilang dari memori orang Aceh karena sudah diberi tanda silang. Kini, banyak orang mengeluh elukan Wali Nanggroe Hasan Tiro, dan disambut dengan gegap gempita, karena 30 tahun orang Aceh penasaran dengan sosok

pendiri GAM tersebut. Akankah setelah Wali kembali ke Swedia, Wali akan kembali hilang dalam memori orang Aceh, karena sudah pernah melihatnya dari dekat? Jawabannya terpulang pada kita masing-masing. (HA 251008)

Melon

TIBA-TIBA saya teringat pada buah melon. Sebab, di warung-warung kopi sebelah kampung saya, orang-orang ramai membicarakannya. Kata mereka, seorang pengusaha di *Gampong* tersebut sedang panen melon. Selain pengusaha melon, ada juga tokoh di sana yang tiba-tiba anjlok pamornya, karena masyarakat tidak mau lagi memberi atau menjawab salam dari tokoh yang ingin membangun kerajaan baru di *Gampongnya*.

Dalam sebuah obrolan santai di *keude kupa*, seorang pemuda bercerita tentang nasib pengusaha melon. Menurutnya, sang pengusaha sudah merintis usaha bertani melon cukup lama dan baru kini dia mendapatkan hasilnya. Dulu, ketika melonnya baru *keumang*, dia berharap bisa memanen hasilnya. Namun, dia sempat gagal, karena pohon melonnya membusuk dimakan kambing ketika berusia beberapa minggu. Kegagalan itu disebut oleh orang-orang di *Gampongnya*, karena dia menanam melon di kebun orang lain. Kini, cita-citanya menjadi pengusaha melon hampir tercapai. Kerja kerasnya untuk menjadi pengusaha melon tidak sia-sia. Sebab, sekarang ini, semua orang memanggilnya pengusaha melon.

Menurut cerita warga di kampung itu, selain munculnya pengusaha melon, di sana juga terdapat mantan pejabat yang mendadak bangkrut. Rakyat di sana sudah tidak mau memberi 'salam' untuk dia. Modal untuk keperluan ikut tender sudah banyak diberikan untuk warga, akibatnya, dia kehabisan modal. Sementara ke depan, perjuangannya masih sangat berat, banyak tender yang dibuka di dinas-dinas. Jika modal tidak kembali, dia bakal sulit bertarung dengan para kontraktor muda yang muncul bak jamur di musim hujan.

Dia harus bekerja keras untuk mendapatkan simpati warga, termasuk memulihkan kepercayaan masyarakat, sehingga mau

memberi salam lagi untuknya. Sebab, di *Gampong* kita yang besar ini, sudah lazim berlaku rumus, penghormatan dan penghargaan hanya untuk mereka yang punya banyak uang. Memiliki banyak uang, tak sulit mencari teman, baik teman lama maupun teman baru. Malah, kita tak perlu bersusah payah, karena teman-teman tersebut datang sendiri, dengan berbagai basa-basi. Tetapi, teman seperti itu biasanya tak langgeng, dan juga tak pernah tulus. Teman seperti itu layaknya jelangkung, datang tak diundang, pergi tak diantar.

Selain dua tipe manusia tersebut, masyarakat tetangga *Gampong* saya juga bercerita, jika warga di sana sudah tak mau mengkeramatkan gambar 'ka'bah' lagi. Padahal, dulunya gambar tersebut begitu sakral, sangat ideologis, dalam pemikiran politik. Namun, kini, mereka lebih memilih berpaling dari 'ka'bah' dan bangga jadi petani melon saja. Menurut mereka, bertani melon lebih menjanjikan untuk mempertahankan *kanot bu*, ketimbang ilusi-ilusi yang dibawa para pendakwah, tentang hal-hal yang belum pasti. Manusia sudah bosan diajak terbuai dengan mimpi-mimpi indah yang membuat mereka lupa pada misi awal sebagai manusia bumi.

Dua sisi manusia, yang satu pengusaha melon, dan satu lagi lebih banyak bergelut dengan tender, kerap mengundang kontradiksi. Keduanya sangat jauh bertolak belakang. Jika pengusaha melon lebih banyak bergaul dengan masyarakat bawah, maka pejabat yang berhubungan dengan tender, pergaulannya dengan orang-orang yang selevel dengannya atau masyarakat kelas menengah atas. Mereka berdua akan bergulat untuk merajut mimpi, siapa sebenarnya yang paling dibutuhkan warga, pengusaha melon yang memperkerjakan petani, atau pejabat yang hanya melayani segilintir tokoh yang punya pengaruh di *Gampong* tersebut. Kita tunggu saja hasilnya. (HA 011108)

Mazhab Hana Fee

JIKA ada yang bertanya, mazhab apa yang dianut oleh umat Islam di Aceh sekarang ini, ulama dayah atau intelektual Islam pasti akan langsung menjawab, mazhab Syafii. Jika ada yang bilang bukan mazhab Syafii, orang tersebut langsung dicap salah minum obat. Kita akui, jika mayoritas umat Islam, bukan hanya di Aceh, tapi di seluruh dunia, lebih banyak menganut mazhab Syafii, sebagian mazhab Hanafi, Hambali atau Maliki.

Jawaban di atas memang benar, meski tak seluruhnya benar. Sebab, belakangan ini, orang Aceh punya mazhab lain yang dianut, yaitu mazhab *hana fee* (baca: hanafi). Setidaknya demikian menurut seorang kawan saya, mengutip pernyataan almarhum RHM. "*Jinoo mazhab yang hidup di Aceh kon le Syafii, tapi mazhab Hanafi (dari kata hana fee).*" Pernyataan itu sekilas seperti sebuah humor yang tidak lucu. Sebab, semua orang tahu kalau di Aceh, yang berlaku adalah Syafii.

Saya sendiri jadi bertanya-tanya, apa *sih* mazhab *hana fee* tersebut? Apakah mazhab tersebut sama seperti mazhab yang merujuk kepada pemikiran fiqih Imam Abu Hanifah? Ternyata tidak. Karena, setelah mendengar penjelasan si kawan yang panjang lebar, saya sedikit mengerti apalagi ketika dipadankan dengan realita yang kita lihat sehari-hari, memang begitulah adanya. Di mana-mana orang selalu berbicara mazhab tersebut, seperti di warung kopi, kantor pemerintahan, di balai desa, atau di mana saja yang aman untuk membicarakannya. Sebab, mazhab *hana fee* tersebut seperti aib, karena hanya menjadi pembicaraan tingkat elit: seperti orang berduit, punya kuasa, punya rumah mewah, atau orang-orang yang *matahu su meutaga*. Kita sebut mazhab ini aib, karena jika pembicaraan soal mazhab ini diketahui orang ramai, pasti akan jadi polemik, dan ketika tak hati-hati, orang tersebut bisa tersangkut

perkara hukum.

Makanya, sang pemangku kepentingan sangat berhati-hati, dan selalu bermain secantik mungkin. Meski kita akui, jika di luar, dia ingin terlihat sangat bersih, tanpa cela, dan tak pernah menganut mazhab tersebut. Padahal, di belakang, dia menggunakan jurus mazhab tersebut untuk kaya mendadak. Sebab, jika ingin kaya di Aceh, maka kita musti harus menganut mazhab Hanafi (bunyi vokal dari kata *hana fee*). Mazhab lain sama sekali tak berlaku, lebih-lebih menuruti apa yang sudah tertulis di dalam aturan agama yang kita anut. “*Misue tadungo haba kitab, u tupe kap han tateumueng rasa*” begitu orang-orang sering mengatakannya. Makanya, aturan seperti itu tak laku di Aceh. Di sini orang maunya jalan pintas, menggunakan mazhab *hana fee*.

Lalu, apa *sih* mazhab *hana fee* tersebut? Hana fee, berarti tidak ada bayaran (ongkos). Mazhab *hana fee* (baca: hanafi) berarti jika seseorang tak mampu memberikan *fee* atau bayaran, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan proyek. Bicara proyek sekarang, lebih banyak bergulat dengan *fee*. Seorang pejabat boleh saja bergaji kecil, tetapi bukan berarti mereka tidak bisa kaya. Jika menempuh jalan pintas berupa korupsi, hal tersebut berbahaya bagi karir, sebab akan tercium publik, dan ujung-ujungnya berakhir di penjara. Dan, ternyata sekarang ada cara mudah untuk cepat kaya yaitu melalui mazhab *hana fee*. Seorang pejabat akan memenangkan tender jika mereka diberikan *fee* yang jelas.

Jika mereka diminta memenangkan suatu proyek, mereka akan bertanya, berapa *fee* yang akan saya dapatkan jika saya memenangkan proyek untuk anda? Dengan kata lain, mereka ingin mengatakan, *hana fee* berarti *hana* proyek. *Hana* proyek, berarti impian menjadi orang kaya baru tak akan kesampaian. Orang akhirnya mau membayar seberapa pun *fee* yang diminta, asal cocok dengan angka rasional, dan tidak saling memberatkan. Senang sama senang.

Inilah fenomena yang terjadi di Aceh. Kita jadi takut untuk mengatakan, jika para pejabat kita bersih dari mazhab *hana fee*. Sebab, mazhab tersebut lebih banyak berlangsung di belakang meja, dan jauh dari pantauan. Makanya, saya ingin menyarankan kepada para kontraktor, baik lokal maupun nasional, berilah *fee* yang banyak kepada para pejabat, agar anda dimudahkan dalam urusan proyek atau tender. Semakin besar nilai *fee* yang anda tawarkan, semakin besar peluang anda memenangkan proyek semakin besar. Tapi jangan sampai, *mangat si pade, saket si berandang*. Jika akhirnya harus berurusan dengan hukum. Mari kita sambut mazhab *hana fee*! (HA 151108)

Mie Aceh

SEORANG kawan yang baru tiba dari Jakarta, sebut saja namanya *DoKaHa*, mengaku kecewa setelah melihat Aceh dari dekat. Menurutnyanya, apa yang dia dengar dan kenyataan yang dia lihat, sangat jauh berbeda. Katanya, Aceh tak seperti yang sering diceritakan orang. Karena penasaran, saya mencoba bertanya, apa yang membuatnya kecewa?

“Di Jakarta atau di Medan, saya begitu gampang menemukan orang yang menjual Mie Aceh, tapi di Aceh sendiri saya sulit menemukannya,” begitu jawaban *DoKaHa*. Saya cuma tersenyum kecil mendengar jawabannya.

Bukan apa-apa, yang dipersoalkan oleh saya kawan benar-benar persoalan sepele, dan mungkin sangat tidak layak jadi obrolan serius, yang menyita lebih banyak waktu. Sebab, banyak hal lain yang lebih penting yang musti diperdebatkan atau dipersoalkan. Katakanlah, soal kepulauan pendiri Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Hasan Tiro, yang menyita hampir semua halaman depan Koran lokal. Bukankah sosok Tgk Hasan Tiro (HT) masih banyak dibalut misteri, sama seperti cerita puluhan tahun lalu?

Soalnya, hampir di setiap kesempatan, Wali cuma mengucapkan beberapa kata yang sangat mudah diingat, dan diprediksikan, seperti *ulon ka troh u Aceh* (Saya sudah tiba di Aceh), *thank you* atau *lon ka meugilho tanoh Pidie* (Saya sudah menginjak tanah Pidie). Menyimak ucapan tersebut, jelas sekali berbeda dengan HT yang kita kenal selama ini: seorang orator dan ideolog yang membuat pendengar ‘bergetar hatinya’ atau ‘terpikat dengan ajakannya’.

Selain itu, kawan saya juga bisa mendiskusikan kenapa ada sejumlah pengikut Wali yang tidak tampak batang hidungnya, padahal mereka dulu bersama-sama dengan Wali dan menjadi pendukung setia Wali. Apakah ini suatu isyarat bahwa sudah terjadi

lagi keretakan di tubuh GAM? Soalnya, sejak gerakan ini dibangun, pernah beberapa kali diisukan retak, dan ada sejumlah pengikut yang dipecat. “Apakah hal itu sudah terjadi lagi sekarang?” Saya mencoba bertanya.

“Kemana Tgk Bakhtiar Abdullah dan Tgk Sofyan Dawood?” tanya Apa Maun yang duduk di samping saya, setelah bergabung bersama kami untuk sebuah obrolan ringan yang ‘tidak’ terlalu penting. Saya yang dari tadi penasaran dengan pernyataan *DoKaHa* menjadi bertambah bingung. *DoKaHa* juga bingung, dan memandang lama ke arah saya, seperti menunggu pernyataan apa yang bakal keluar dari mulut saya. Padahal, saya sendiri juga bungkam, tak tahu harus berkata apa.

“Iya, kemana Bakhtiar Abdullah dan Sofyan Dawood?” saya mengulang pertanyaan Apa Maun. Soalnya, sejak Wali tiba di Malaysia, wajah Bakhtiar Abdullah dan Sofyan Dawood sama sekali tak terekam di Media. Hal yang sama juga terjadi di depan Masjid Raya Banda Aceh, di Kuburan Tgk Syik Di Tiro atau di Pendopo Gubernur. Kemana mereka?

Padahal dulu, setiap ada Wali, sosok Bakhtiar Abdullah selalu di samping Wali. Banyak media di luar negeri juga sering mengutip pernyataan Bakhtiar seputar perjuangan GAM. Bukan hanya karena posisi Bakhtiar Abdullah saat itu sebagai Juru Bicara GAM di Sweden, melainkan juga orang yang dididik oleh Wali secara langsung. Sementara Sofyan Dawood, kita kenal sebagai sosok militer GAM yang sangat disegani dan ditakuti saat Darurat Militer. Setiap hari pernyataannya kita baca di Koran. Sekarang, ketika Aceh damai, dan Wali pulang ke Aceh, kenapa mereka tidak bersama Wali? Apa yang terjadi?

Pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat kami penasaran, dan tak tahu harus bertanya kemana? Sama seperti rasa penasaran saya terhadap *DoKaHa* yang bertanya kenapa di Aceh tidak ada Mie Aceh?

Untuk pertanyaan ini, saya bisa mereka-reka jawabannya, dan (mungkin) masuk akal. “Di Aceh bukan tidak ada Mie Aceh, tapi malah sangat banyak. Di setiap warung kopi ada penjual Mie Aceh. Masalahnya, di sini orang Aceh tak perlu menulis Mie Aceh di rak Mie-nya, karena orang sudah tahu kalau itu Mie Aceh,” jawab saya sekenanya.

Sementara di Jawa, atau di mana saja di luar Aceh, orang Aceh perlu menampakkan identitasnya, agar orang-orang tahu bahwa itu Mie Aceh. “Coba jika tak ditulis Mie Aceh, apakah orang akan tahu kalau yang dijual itu adalah Mie Aceh?” saya menjelaskan.

DoKaHa hanya mengangguk-angguk saja. Saya yakin dia menerima argumentasi konyol saya.

“Kok bisa begitu ya? Lalu, kenapa di sini ada orang menggunakan nama partai dengan Partai Aceh? Padahal ini *kan* di Aceh?” tanya *DoKaHa* lagi. Sekarang giliran saya yang bertambah bingung, dan tak selera menjawabnya. (HA 161008)

HT

DULU, saat duduk di kelas II MTs (Madrasah Tsanawiyah), saya sama sekali tak mengerti ketika orang-orang di *Gampong* menyebutkan pengikut HT dengan sebutan *awak ateuh* atau dengan *awak Aceh Merdeka* (AM). *Awak ateuh* mewakili kelompok minoritas yang memperjuangkan hak dan martabat orang Aceh. Mereka sangat misterius, tertutup, dan tidak seramai sekarang. Jika sesekali turun ke *Gampong*, mereka jadi pembicaraan masyarakat. Setelah mereka pergi, secepat itu pula cerita tentang mereka menghilang.

Sebab, mengenal *awak ateuh* mendatangkan duka dan bala. Potret mereka ditempel di mana-mana: di sekolah, di kantor Camat, Polsek, Koramil, dan di pos jaga. Mereka adalah *sang Hero* bagi warga yang simpati pada perjuangannya. Sementara bagi kelompok lain, yang berseberangan, mereka adalah racun kehidupan. Perlu ditumpas sampai tuntas. Di mana-mana spanduk yang mengutuk mereka dipajang, dan jadi bacaan sehari-hari, terutama bagi kami anak-anak sekolah yang selalu ingin mengetahui apa saja.

Saya sendiri, dulunya, tidak pernah tahu, kenapa pengikut HT disebut *awak ateuh*. Belakangan saya baru tahu. Sebutan itu karena mereka mendiami *Gle* (gunung) yang ada di Aceh. Jumlah mereka sedikit, dan jarang turun ke *Gampong*, kecuali jika ada keperluan. Itu pun secara sembunyi-sembunyi. Informasi tentang mereka sangat sedikit. Orang-orang tua sangat pelit soal informasi, kecuali dari bisik-bisik. Itu pun jika orang yang berbicara tersebut tidak mengetahui jika pembicaraan mereka ada menguping.

Di bangku kelas II MTs, saya jadi tahu, ketika seorang guru sejarah mengupas tentang peristiwa DI/TII, karena memang ada di kurikulum. Perkataan dia yang sempat saya ingat adalah, Daud Beureueh memiliki seorang pengikut dan murid yang cerdas dan berani yaitu HT. Kami tentu saja penasaran, sebab dari

keterangan ‘resmi’ dan dari foto-foto yang banyak ditempel di pos jaga Gampong kami, HT merupakan musuh pemerintah. Kami mencoba menanyakan, apakah HT masih hidup? Jika masih, di mana sekarang? Sebab, seperti penjelasan guru saya, jika HT masih hidup, nasib Aceh tidak seperti ini.

Sejak itu, saya tak lagi penasaran, kenapa di setiap foto-foto yang ditempel di *Gampong* kami itu selalu tercetak tulisan, ‘Dicari hidup atau mati’. Kepada penduduk diminta untuk melaporkan keberadaan pengikut HT jika bersembunyi di *Gampong-gampong*. Keberadaan mereka disebut membuat masyarakat sengsara. Yang saya pikirkan saat itu, bagaimana figur seorang HT sampai dia begitu dicari dan ramai dibicarakan? Dari beberapa tulisan yang sempat saya baca, HT bahkan sampai diisukan meninggal dunia, meski beberapa hari kemudian berita tersebut diralat sendiri oleh media yang memuatnya.

Bermula dari bangku kelas II MTs tersebut, ide-ide radikal membuncih, hingga melahirkan pernyataan kritis, “Jika HT masih hidup, Aceh yang kaya raya dengan hasil melimpah, dapat berdiri sendiri.” Guru kami yang mendengarkan tak mampu mengucapkan apa-apa, selain berpesan, bahwa diskusi seperti ini hanya sampai di ruangan ini saja, tak boleh dibawa keluar.

Kekaguman pada sosok kharismatik itu bertambah saat DOM (Daerah Operasi Militer) dicabut, di mana dari satu *Gampong* ke *Gampong* lain, ceramah-ceramah radikal yang mengobarkan perjuangan HT dikumandangkan. Pemuda *Gampong* satu persatu merapatkan barisan, dan menjadi tentara HT.

Sejak itu, saya mengerti betapa besar pengaruh seorang HT, sampai-sampai banyak ulama memberi dukungan pada perjuangannya. Meski, dukungan itu tak lebih sebagai bentuk *euphoria* pencabutan DOM. Namun, ideologi yang ditanamkan HT benar-benar kuat, mengakar, terutama terkait nasionalisme Aceh. “Dalam perkara nasionalisme, orang tidak bisa berpura-pura,” tulisnya dalam buku *Demokrasi untuk Indonesia*. Akibatnya, ribuan pemuda Aceh rela menggadaikan nyawa demi sebuah cita-cita, meski sekarang cita-cita tersebut bagaikan sebuah ilusi.

Tapi hal itu tak membuat kekaguman kita pada sosok keturunan dinasti Tiro itu berkurang. Malah makin bertambah. Keteguhan dan konsistensi merupakan sikap yang perlu dijaga oleh seorang pejuang. Sikap konsisten dan teguh, meski salah, akan dikenang dan dihormati orang sepanjang zaman. Tak heran jika HT hingga kini masih memiliki kharisma dan dihormati oleh segenap orang.

HT sudah membuat mata orang Aceh *teubluet* (terbuka), terutama tentang sejarah negerinya sendiri. Saya ingin mengutip satu paragraf saja, bagaimana HT mendidik orang Aceh dengan pertanyaan kunci, “*pakriban geutanjoë atjèh tangiëng droëteuh? Njoë keuh saboh sueuë njang rajek that keu geutanjoë bansa Atjèh bak masa njoë, njang wadjèb tapham uroë dan malam. Sabab bak djeunaweuëb geutanjoë ateuëh sueuë njoë meugantung nasib bandum geutanjoë bak masa njoë, nasib keuturônân bak masa ukeuë, dan nasib Nanggroë Atjèh njoë ateuëh rhuëng dônja* (Bagaimana kita orang Aceh memandang diri kita sendiri. Ini satu pertanyaan besar untuk kita bangsa Aceh pada masa kini, yang wajib dimengerti siang dan malam. Sebab, dalam jawaban kita atas pertanyaan tersebut menentukan nasib semua kita pada masa kini, nasib keturunan kita pada masa mendatang, dan nasib Nanggroë Aceh ini dalam dunia ini, *pen*).”

Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa HT bukan berjuang untuk suatu kelompok saja. Dirinya juga bukan menjadi milik kelompok tertentu. Karena itu, HT tak bisa dimonopoli oleh suatu golongan, karena HT milik seluruh rakyat Aceh. Karenanya, kepulangan HT pada tanggal 11 Oktober 2008 ke Aceh setelah 30 tahun lamanya, dapat membawa perubahan di Aceh dan mempersatukan anak bangsa yang sedang bersiap-siap menumpahkan darah sesamanya pada Pemilu 2009 nanti. Sebab, meski tidak ada agenda politik, jika kepulangannya ke Aceh dipolitisir dan dimonopoli oleh kelompok tertentu, maka kepulangan tersebut menjadi tidak bermakna, karena kepulangan itu bukan keinginan HT. Semoga Allah merahmati perjuangannya. (HA 250908)

Safari

SELAMA Ramadhan, para pejabat, tokoh, atau orang-orang penting ramai-ramai melakukan Safari Ramadhan. Seolah-olah safari ramadhan jadi kegiatan rutin yang mesti dilakukan dan menjadi *trend* baru selama bulan ramadhan.

Karena tidak ingin latah seperti halnya para politisi atau tokoh tersebut, saya mencoba membuka kamus Bahasa Indonesia untuk melihat arti safari. Ternyata, di dalam kamus tersebut disebutkan, *safari adalah perjalanan jauh*. Jadi, safari Ramadhan dapat diartikan perjalanan jauh selama bulan Ramadhan. Perjalanan jauh di sini tak semata-mata juga berarti perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan spiritual.

Lalu, apakah safari ramadhan yang selama ini dilakukan dapat disebut perjalanan jauh? Soalnya, sering juga pelaku safari ramadhan, yang umumnya dari kalangan pemerintahan, hanya pergi ke masjid-masjid terdekat, dan tak bisa digolongkan jauh jika dihitung dari tempat tinggal pelaku safari. Padahal dulunya, ketika tiba bulan ramadhan, 'pelaku safari' pergi ke tempat jauh untuk menimba ilmu, mencari ketenangan beribadah sambil melihat kebesaran Allah, atau memilih menyendiri di goa-goa atau tempat-tempat yang dianggap bertuah. Safari ramadhan benar-benar dimaknai sebagai perjalanan jauh (perjalanan spiritual), atau menjauh dari keramaian orang atau manusia, dengan memilih mendekati Tuhan, sang pencipta.

Namun sekarang, safari pada momen ramadhan, akhirnya tak ubah hanya sekedar rutinitas kunjungan dari satu desa ke desa lainnya, dari satu masjid ke masjid lainnya. Senyum sana-senyum sini. Berbicara dari satu panggung ke panggung lain, tanpa memberikan makna apapun, selain kepuasan untuk pelaku safari sendiri.

Jika kita pernah menyimak dakwah atau petuah agama dari para pelaku safari ramadhan, pesan-pesan agama mereka kerap diselingi

dengan *haba cet langet* (bualan) yang membuat masyarakat pendengar seperti hidup dalam bayang-bayang ilusi. Padahal, rakyat tak pernah kenyang hanya dengan memakan *haba cet langet* tersebut. Bukankah itu sama artinya para pelaku safari sudah menawarkan kebohongan demi kebohongan, karena dalam ceramah banyak diselilingi dengan janji-janji: 'kita akan melakukan ini, kita akan melakukan itu, tak lama lagi rakyat 'mungkin' akan menikmati kesejahteraan,' dan ucapan-ucapan 'akan' dan 'mungkin' yang tak mampu kita hitung berapa banyak yang keluar dari mulut pelaku safari.

Saya sering membaca di media, bahwa di tempat lain, di daerah yang jauh, banyak politisi juga melakukan safari, sowan, atau silaturahmi, tetapi, lebih sering dieja orang dengan safari atau silaturrahmi politik. *Kok*, masalah politik selalu dibawa-bawa?

Di tempat kita ini juga tak ubahnya dengan di tempat lain itu, di mana safari ramadhan juga kental warna politiknya. Di sela-sela kegiatan safari, sangat sering kita menemui orang-orang yang berbicara untuk kepentingan kelompoknya sendiri, dengan memanfaatkan medium dakwah. Pesan-pesan keagamaan sangat kurang disampaikan, kecuali pesan politik, yang meminta dukungan para jamaah agar memilihnya saat Pemilu nanti. *Hom hai*.

Saya sendiri heran memahami kecenderungan masyarakat kita ini, seolah-olah kegiatan safari itu hanya 'wajib' dan 'harus' pada bulan Ramadhan saja. Akibatnya, keikhlasan menjadi sebuah pertanyaan, karena safari lebih dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan bahwa seseorang itu peduli pada nasib rakyat. Sementara di bulan lain, jangankan mengunjungi seperti halnya kegiatan safari, diundang saja untuk melihat kondisi masyarakat, banyak yang *enggan* memenuhinya. Hal itu wajar saja, sebab, sekali kunjungan puluhan juta uang harus dikeluarkan dari kas negara—di mana kadang-kadang ikut disunat—dengan dalih biaya operasional.

Lalu, karena ada kegiatan safari, dalam hal pakaian juga mengikuti *trend* safari, seperti sering disebut 'baju safari' yang kesannya elitis, necis dan *sok* berwibawa. Kita jadi bertanya, apakah baju safari seperti itu merupakan pakaian 'wajib' dalam kegiatan safari? Entahlah.

Namun, selama ramadhan juga, kita mendengar kecenderungan safari para pejabat, diikuti oleh alat peledak yang disebut granat. Alat mematikan tersebut jadi ikut-ikutan melakukan safari. Seperti kita baca dari media, granat meledak dari suatu tempat lalu menyebar dan melakukan safari ke tempat lain. Di mulai kantor Partai Aceh (PA) tingkat kecamatan yang digranat orang tak dikenal, setelah

itu kantor PA di Bireuen, dan beberapa kantor PA di tempat lain. Beberapa hari kemudian, Partai SIRA Bireuen juga dibakar, entah oleh siapa dan untuk tujuan apa. Granat dan api sepertinya juga melakukan safari. Mungkin juga safari politik. (HA 240908)

Lampoh Soh

MENYIMAK Aceh hari ini, saya langsung terbayang teori *Lampoh Soh*, yang dipopulerkan oleh Sosiolog Dr Ahmad Humam Hamid. Semua kita tahu *lampoh soh*: sebuah lahan kosong, yang bisa jadi semua tempat memilikinya. Apalagi di *Gampong* kita yang katanya besar ini. *Lampoh soh* bukan tanpa pemilik, tetapi pemiliknya kehabisan ide untuk menggarapnya. Jadi, dibiarkan saja jadi *lampoh soh*, tanpa ditanami apa-apa.

Saat kecil, semua kita—khususnya anak-anak kampung—sangat senang jika ada *lampoh soh*. Sebab, biasanya, *lampoh soh* bisa dijadikan tempat bermain: main perang-perangan, jadi arena sepak bola, atau main bola voli. Tak sedikit juga pemuda-pemuda kampung memanfaatkannya untuk sekedar tempat paling aman untuk *peh bate* (main batu) atau main kartu. Jika bermain di lahan kosong seperti itu, tak mengganggu lingkungan.

Jangan berharap di *lampoh soh* itu cuma jadi arena bermain bagi manusia saja, sebab, binatang juga, terutama lembu dan kambing ikut *meurot* (memakan rumput) di dalamnya jika ada rumput hijau. Dengan *meurot* di sana, tak ada orang yang marah, dan lembu merasa aman dari *keunong parang* atawa *geulawa*. Sebab, rumput yang tumbuh di *lampoh soh*, bukan rumput yang sengaja dipelihara, melainkan tumbuh sendiri secara alamiah.

Tak hanya itu, jika ada pohon berbuah tumbuh di *lampoh soh*, semua orang boleh memetikinya. Karena di *lampoh soh* tak berlaku aturan apapun. Tak seorang pun bisa mengklaim, bahwa buah di pohon di *lampoh soh* tak bisa dipetik. Karena, seperti sudah jadi ‘kesepakatan umum’ bahwa yang ada di dalam *lampoh soh* sudah merupakan milik bersama. Meski seperti sudah kita tulis di atas, *lampoh soh* ada pemiliknya.

Ada juga warga *Gampong* yang letak WC-nya jauh dari rumah,

lebih senang membuang hajat di sana. Apalagi jika letak *lampoh soh* agak ke pinggiriran sedikit, jauh dari rumah warga, dan banyak ditumbuhi pohon, sehingga nyaman jika buang hajat. Orang pasti tidak akan melihat saat kita buang hajat, dan tak ada orang yang marah. Sebab, semua orang juga kadang-kadang lebih suka buang hajat di sana. Jika ada yang malu, dan takut dilihat orang, maka cukup aman jika pakai WC terbang atau hasil berak di sebuah kantong plastik dibuang di sana. Tapi jika sudah ada orang yang duluan buang hajat di sana, dalam melempar WC terbang yang berisi berak di dalam plastik, harus sangat hati-hati. Jangan sampai terkena orang. Jika sampai kena orang, yang terjadi pasti perang dunia ketiga.

Nah, bagaimana dengan konteks Aceh sekarang? Saya percaya Aceh sudah ibarat *lampoh soh*, yang *tan soe pakoe* (tak ada yang peduli). Pascatsunami dan MoU Helsinki, Aceh sangat terbuka, seperti ruang kosong yang ditinggal pemiliknya. Siapa saja boleh menciptakan kekacauan di sini, seperti ada aturan yang membolehkannya. Bom kembali meledak di sana-sini, tanpa kita tahu siapa pelakunya. Selain itu, semua partai—beragam ideologi dan kepentingan—didirikan di Aceh. Ada yang benar-benar berjuang mengembalikan martabat orang Aceh, tapi banyak juga yang mencoba menipu orang Aceh. Yang lebih parah, pertarungan sesama partai—terutama partai lokal—menunjukkan tensi yang meningkat. Jika salah-salah dimenej, Aceh bakal berujung pada perang saudara. Sebab, isyarat seperti itu sudah mulai disulut, yang dimulai dengan penggranatan kantor Partai Aceh (PA).

Namun, seperti halnya *lampoh soh*, yang tak dihiraukan lagi, meski masih ada pemiliknya, Aceh juga seperti itu. Karena itu, kita perlu mempertegas, bahwa Aceh bukan *lampoh soh* yang bebas dijadikan arena membuat kekacauan, bebas jadi tempat buang hajat atau jadi tempat binatang ternak *meurot*, karena Aceh masih memiliki pemilik, yaitu kita-kita ini orang Aceh. Kita tentu tak ingin Aceh yang kita cintai ini dinodai, oleh dan dengan apapun, sebab kita masih mencintai Aceh. Kita masih ingin menggarap Aceh agar bermanfaat untuk semua orang Aceh, bukan cuma segelintir orang saja. (HA 200908)

Taubat Politik

SETIAP bertemu kawan lama, baik yang saya kenal dalam politik maupun dalam gerakan, selalu memberondong saya dengan sejumlah pertanyaan. “*Meurumpok lumboi padum untuk caleg, atau Eik dari DP toh?* (Dapat nomor urut berapa untuk caleg, atau naik dari DP mana)” Kadang-kadang saya malas diberondong dengan pertanyaan umum seperti itu. Anehnya, semua mereka bertanya dengan pertanyaan yang sama. Namun, karena bukan ditanyakan dalam sebuah forum, atau saat berkumpul ramai-ramai, maka setiap saat saya harus mempersiapkan jawaban. Umumnya, jawaban saya sama, meski pada kawan yang berbeda.

Biasanya, saya cukup *enjoy* menjawab begini, “Jangankan dapat nomor, partai saja saya tak punya!” Mendengar jawaban tersebut, ada kawan langsung diam, tidak tahu harus bertanya apalagi. Namun, ada juga kawan yang sudah cukup lama saya kenal, bukan dalam politik, mereka mencoba mencari tahu, kenapa saya tidak maju jadi caleg. Mereka bercerita jika banyak dari kawan saya yang sedang bersemangatnya ingin menikmati empuknya kursi dewan. Malah, sebagian sudah mencoba mencari tahu di mana letak rumahnya di komplek dewan di kawasan Jalan Kebun Raja, Ulee Kareng, jika terpilih jadi anggota dewan nantinya. Hah!

Mendapat pertanyaan selidik seperti itu, saya cukup puas menjawab begini, “*Apa sih hebatnya jadi anggota dewan?*” tanya saya. Saya sering mengatakan bahwa saya tidak berminat jadi politisi. Itu alasannya kenapa saya mengambil cuti dari dunia politik. Singkatnya, saya sekarang sudah taubat berpolitik. Saya pribadi belum siap berpolitik sesama kawan. Itu saja. Syukur jika mereka menghargai keputusan saya, dan memaklumi langkah yang saya tempuh.

Sebab, seperti saya dengar, entah benar atau tidak, saya tidak tahu

pasti, bahwa ada sebagian kawan-kawan saya hampir berantam gara-gara penentuan nomor urut caleg. Ada yang memilih mengundurkan diri dari caleg karena tak dapat nomor bagus. Dalam sosialisasi di daerah pemilihan (DP), ada kawan-kawan yang sudah saling menjatuhkan satu sama lain, padahal mereka satu partai. Saya hanya bisa mengurut dada mendengarnya. Seharusnya, caleg dari partai lain yang harus dianggap sebagai lawan, bukan caleg satu partai?

Semakin lama mengamati fenomena seperti ini, saya semakin maklum, bahwa dalam politik butuh kedewasaan. Dalam politik dibutuhkan kesabaran, dan juga kadang-kadang akal busuk. Saya sendiri belum siap seperti itu.

Saya percaya, bahwa dalam politik berlaku rumus menghalalkan segala cara. Dalam politik berlaku pertanyaan umum, siapa mendapatkan apa, dan bagaimana mendapatkannya? Jarang kita mendengar dalam politik berlaku rumus, siapa memberikan apa, dan bagaimana memberikannya. Sebab, yang kita tahu, untuk mendapatkan sesuatu, semua cara jadi halal dilakukan. Dalam politik asas moral jarang berlaku.

Fenomena persaingan sesama caleg satu partai dan saling melakukan pembusukan, menjadikan fatwa Machievalli selalu aktual untuk dikutip bahwa *'tidak ada kawan atau lawan abadi, yang ada adalah kepentingan sejati'*.

Makanya, kepada kawan-kawan yang mendakwa saya, saya selalu bilang, bahwa di partai politik sekarang itu lebih banyak bercokol orang-orang pecundang. Meski mereka berlagak sudah jadi orang sukses, sebab sudah terdaftar sebagai caleg, tetapi sebenarnya mereka adalah tetap sebagai pecundang. Kesuksesan mereka tak lebih karena berlindung di balik baju nama partai yang sudah dikenal sebelumnya. Mereka bukanlah orang-orang sukses, seperti diperlihatkan dalam setiap kesempatan. Sebab, seperti pernah disampaikan oleh Brian Tracy, pakar motivasi: orang yang sukses selalu mencari kesempatan untuk menolong orang lain, sedangkan seorang pecundang akan selalu berkata, "Apakah itu untuk saya?"

Karena itu, wajar jika saya merasa terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan, sebab pertanyaan mereka itu sudah salah alamat. Di samping saya tidak punya partai, saya juga belum berminat jadi anggota dewan. Saya masih puas menikmati profesi yang saya idam-idamkan sejak dulu sebagai penulis. Ya...saya lebih puas menikmati kemerdekaan sebagai penulis.

Sebab, dalam menulis, saya sama sekali tidak memiliki beban.

Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Kepada pembaca yang merasa terganggu dengan tulisan saya, yang dianggap memojokkan seseorang atau sebuah partai, itu sama sekali bukan karena saya punya keinginan menghancurkan partai tersebut. Sikap saya sudah bulat: saya tidak memiliki pilihan pada Pemilu 2009. Itu saja. (HA 190908)

Entahlah

SAYA ingin bercerita tentang negeri *antah-barantah*, sebuah negeri yang dulunya dilanda perang: dahsyat, lama, dan melelahkan. Setiap saat penduduk negeri itu berdoa menolak bala, dan meminta permusuhan diakhiri, namun gejolak tak juga berhenti. Malaikat seperti lupa menyampaikan doa dari penduduk negeri antah-barantah tersebut kepada Tuhan.

Tapi, seperti kita yakini bersama: Tuhan tak pernah tidur. Melalui air bah, setinggi pohon kelapa dikirim untuk membenamkan negeri yang tak pernah berhenti bergejolak tersebut. Saat itulah penduduk itu sadar, bahwa Tuhan sudah sangat murka. Sambil berlari menyelamatkan diri dari air yang berwarna sangat hitam, beracun, dan ganas, tak henti-hentinya penduduk negeri antah-barantah mengumandangkan doa, puja-puji pada Tuhan, serta memohon dijauhkan dari bala. Setelah itu barulah air bah itu surut ke laut, diserap oleh pohon dan kembali ke tanah. Selamatlah negeri itu.

Masalahnya, perang tak juga diakhiri. Sebab, di tengah kebimbangan penduduk mencari sanak saudaranya, senjata masih menyalak, masih ada orang yang mati. Masyarakat dari benua lain yang ingin membantu, tidak bisa mengirimkan bantuannya, karena negeri antah-barantah telah diisolasi, dan dihapuskan dari 'peta' dunia oleh saudaranya yang iri-hati.

Lalu, sebuah konsensus politik pun ditandatangani, tanda perang harus diakhiri. Bantuan warga dunia kemudian mengalir tak henti-hentinya. Meski sebagian tak jelas alamatnya, apakah sampai kepada korban atau tidak. Tak ada audit resmi. Hanya saja, semua penduduk negeri itu maklum, ada bantuan yang dikorupsi dan diselewengkan. Pun begitu, mereka tak juga memprotes.

Kini, setelah suasana damai dirasakan oleh penduduk negeri, sebagian pecinta perang malah mencoba mengobarkan perang

kembali. Menurut mereka, lebih gampang mencari uang saat kondisi lagi perang, ketimbang sekarang. Sekarang, mencari uang susah. Jangankan yang halal, yang haram sukar. Jika tak punya skil, panjang lidah, dan tak berani memukul serta membunuh, sulit bisa mendapatkan uang. Aksi kriminalitas meningkat, pembunuhan semakin sering terjadi.

Hal itu kemudian berpengaruh terhadap kondisi politik, di mana kekacauan politik semakin sering terjadi. Terakhir, dilaporkan, kantor sebuah partai yang memonopoli suara rakyat dibakar di mana-mana. Padahal dulunya, para pengurus partai tersebut merupakan orang-orang yang diharapkan mampu mengembalikan kedaulatan negeri antah-barantah. Namun, saat damai, mereka malah berubah, dan menjadi tirani mayoritas. Hidup sudah dibuat berkelompok-kelompok. Yang bukan bagian dari mereka, adalah pengkhianat: dengan risiko harus dihapuskan dari negeri antah-barantah.

Tak hanya itu, ketidakpuasan pada suasana damai kemudian dilampiaskan dengan mencoba mengembalikan negeri antah-barantah sebagai wilayah perang. Perdamaian, seolah-olah belum memberi arti untuk mereka. Mereka pun berharap, negerinya kembali dipancing jadi arena perang. Menurut mereka, jika ingin damai, maka harus berperang, seperti punyi pepatah yang menghinggapi Jerman pada perang dunia dulu, *si vis pacem para bellum* (Jika menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang). Pepatah itu muncul saat masyarakat Jerman begitu antusias dan menggebu-gebu menyambut perang. Kita jadi bertanya, apakah ada perdamaian tanpa terlebih dulu ada perang? Apakah ada taubat jika sebelumnya tak pernah berbuat dosa?

Rakyat semakin sering dikorbankan. Petinggi negeri itu, yang sebelumnya orang-orang terasing karena hidup dari satu hutan ke hutan lain, menjadi penguasa baru. Mereka sama sekali tidak mengindahkan amaran, bahwa rakyat perlu diselamatkan. Mereka tak lagi mendengarkan petuah Mao Tse Tung, bahwa, rakyat ikut memainkan peran yang luar biasa dalam sebuah revolusi atau dalam perang gerilya. "Rakyat mirip dengar air," demikian Mao Tse Tung memberi nasihat untuk pasukannya. "Kita harus berenang di dalamnya seperti ikan. Pertama kali kita harus belajar dari massa dan kemudian mengajari mereka."

Mereka lupa, bahwa pengorbanan rakyat sudah cukup banyak. Meski saat itu, rakyat hanyalah penonton dari sebuah kekalutan politik, namun merekalah korban potensial. Sebagian, malah, tak jelas di mana letak kuburannya. Jika ada yang coba bertanya, untuk

siapa sebenarnya rakyat berkorban atau dikorbankan? Kita tak pernah dapat jawaban pasti. Namun, secara samar-samar dapat diketahui bahwa mereka berkorban dan dikorbankan untuk sebuah cita-cita. Meski pada akhirnya, cita-cita itu hanyalah ilusi belaka.

Jika dulu, ada rakyat di negeri antah-barantah tersebut berdoa, meminta agar diberi kekuatan untuk mengalahkan sang garuda (simbol pembawa luka), maka sekarang, mereka sudah lupa dengan doa tersebut. Anehnya, (meski) secara diam-diam, ada juga yang berdoa, dan meminta diberikan kekuatan agar mereka bisa melihat gerakan kacamata gelap *phang-phoe* (hancur berkeping-keping).

Entahlah...saya tidak habis pikir suasana di negeri antah-barantah, karena di Gampongku juga terjadi hal yang sama. Saya hanya mampu bertanya, bagaimana mungkin, perdamaian yang dulu begitu didamba, kini malah dikoyaknya?

Apakah mereka sudah dihindangi 'penyakit' seperti ditulis Erich Fromm saat menggambarkan perlombaan senjata nuklir dulunya, antara blok barat dan blok timur, bahwa manusia hancur karena konsensus kebodohan. "Jika kita akan binasa dalam perang Nuklir, hal itu bukan karena manusia tidak mampu menjadi manusia, atau karena manusia pada dasarnya memang jahat; tetapi karena konsensus kebodohan telah mencegahnya untuk melihat realitas dan bertindak atas dasar kebenaran." Entahlah! (HA 180908)

Ureung Aceh

ORANG Aceh dikenal berwatak keras, teguh memegang pendirian, gemar berperang dan lain-lain. Setidaknya, begitulah kesimpulan beberapa penulis Belanda. Jika didalami dan telusuri kehidupan dan sejarah orang Aceh, memang begitu adanya. Tetapi, meski sudah identik berwatak keras, sebenarnya orang Aceh sangat lembut, ramah, terbuka dan mudah bergaul dengan siapa saja. Orang Aceh tahu kapan harus menampilkan watak keras, dan kapan pula berlemah-lembut.

Kesimpulan demikian, sangat mudah ditemui, terutama pada pepatah-pepatah yang sering kita dengar. Misalnya, *“Ureung Aceh misue ka teupeh, bu lubeh han geupeutaba, tetapi misue hana teupeh—maaf—boh kreh juet taraba.”* Pepatah ini tak hanya berlaku untuk orang luar saja yang ingin membangun hubungan dengan orang Aceh, melainkan untuk sesama orang Aceh. Bagi orang Aceh, siapa pun yang membuat luka, mengganggu, dan menyakiti mereka akan diperlakukan sebagai musuh.

Jika ada waktu coba perhatikan cara bicara orang Aceh dewasa ini, sebab, di sinilah kita mengetahui bagaimana watak orang Aceh sebenarnya. Saya sempat merekam beberapa kata, yang menurut saya bisa menjadi kesimpulan bagaimana orang Aceh membuat sekat: mana yang disebut musuh dan mana yang tidak. Untuk kelompok mereka sendiri, orang Aceh cukup menyebutnya dengan *“awak tanyoe atawa awak geutanyoe”*, sementara pihak yang diperlakukan sebagai musuh, orang Aceh mengatakan, *“nyan awak jeh atawa awak nyan.”* Jika sudah dilabeli dengan *awak ‘nyan’* (*nyan*: sebuah kata penunjuk yang objeknya tidak jelas, bisa bermacam-macam, tergantung arah pembicaraan), maka orang tersebut sudah diposisikan bukan lagi sebagai kawan. Label ‘nyan’ dilekatkan kepada orang atau kelompok tertentu, di mana secara tidak

langsung orang Aceh menjaga jarak dengan mereka. Mereka sudah dianggap sebagai musuh.

Label itu sering diberikan oleh orang Aceh untuk mereka-mereka yang sudah memonopoli kebenaran, dan menganggap kebenaran ditentukan oleh mereka. Artinya, label itu diberikan untuk orang-orang seperti disebutkan oleh 'fatwa' Nietzsche, orang yang menganggap "kekuatan adalah sejati, dan kebenaran adalah milik mereka yang punya kekuatan." Bagi orang seperti ini, kebenaran dan ketidakbenaran menjadi tidak jelas lagi. Sebab, yang menentukan ukuran benar atau tidak bukan lagi kesepakatan umum, melainkan kuasa. Ya...mereka yang punya kuasa yang berhak mendefinisikan kebenaran.

Dulu saat konflik, jika kita pernah memperhatikan obrolan orang Aceh di Balee Jaga atau di Warong Kopi, kita pasti banyak mendapati ucapan-ucapan sebagai bentuk perbedaan antara musuh dan teman. Ketika mobil berkaca gelap lewat di suatu Gampong, orang Aceh langsung menyebut, "*Na lewat awak nyan saknyoe* (ada lewat orang 'itu' barusan)." *Awak nyan* di sini berarti anggota TNI atau Polri. Namun, ketika ada beberapa pemuda 'asing' shalat Shubuh di sebuah Meunasah Gampong, di mana senjata AK-47 diletakkan di dekatnya, orang Aceh langsung menyebutnya, "*Nyan awak geutanyoe* (Itu orang kita)". *Awak geutanyoe* tersebut merujuk kepada anggota GAM.

Pertanyaan kita, bagaimana sekarang? Apakah sudah muncul perubahan paradigma di dalam masyarakat Aceh dalam menggunakan kata 'awak nyan' atau belum? Di beberapa tempat, saya mendapati dan merasakan munculnya perubahan paradigma tersebut. Saat duduk di sebuah warung kopi dan di Balee Jaga, di suatu Gampong, saya menangkap kesan, bahwa kata "awak nyan" bukan lagi merujuk kepada TNI/Polri seperti saat konflik, melainkan untuk mantan GAM. Saya sendiri heran, kenapa paradigma orang Aceh begitu cepat berubah.

'Awak nyan' sekarang merujuk kepada mantan GAM. Pertanyaan saya, apakah GAM sekarang mudah berubah menjadi musuh orang Aceh? Saya sedikit ragu menjawab pertanyaan ini.

Pun begitu, saya mencoba mengaitkan perubahan paradigma orang Aceh dengan sifat orang Aceh yang punya perasaan halus, khususnya dalam memandang sesuatu. Seperti halnya indra penciuman mereka, dalam hal pemberian sebutan untuk bau. Sebuah bau, mampu diterjemahkan oleh orang Aceh lewat kata-kata seperti *khieng*, *khop*, *khie*, *khoh*, *phong*, *banga*, *khep*, *syung*, *muHong*, dan *bee masam*. Kata-kata itu menunjukkan kehalusan orang Aceh dalam

mencium sesuatu. Penggunaan kata-kata itu disesuaikan dengan sifat bau dan sumber bau. Karena masing-masing bau, bagi orang Aceh, punya ciri khas tersendiri, dan sulit didefinisikan oleh orang-orang yang tidak memiliki indra penciuman yang halus dan tajam.

Saya jadi bertanya-tanya, apakah kehalusan indra penciuman orang Aceh, memiliki hubungan dengan kemampuan mereka mengenali musuh, atau menempatkan suatu kelompok jadi musuh mereka? Saya tak tahu pasti. Namun, yang jelas, orang yang mengkhianati, menzalimi, menyakiti orang Aceh, maka orang tersebut akan langsung dilabeli oleh orang Aceh dengan sebutan '*awak nyan*'. Jika sudah diberi label seperti itu, maka orang tersebut sudah diperlakukan musuh oleh orang Aceh. Entahlah! (HA 170908)

Fascinatio

SEPERTI halnya kehancuran, perubahan yang terjadi di Aceh juga sangat luar biasa. Secara perlahan-lahan, Aceh merangkak menjadi daerah yang terbuka, jadi panutan, dan incaran orang-orang dari belahan dunia, dengan bermacam tujuan dan keinginan.

Kondisi seperti ini sangat terasa pascatsunami dan terhentinya konflik. Aceh yang semula ditutup rapat dan rapi, tiba-tiba jadi begitu liar, menerima bermacam pengaruh. Dari wilayah terisolasi, menjadi sangat terbuka dan kosmopolit. Dampaknya, dirasakan oleh orang-orang Aceh di kampung.

Lalu-lalang orang-orang kulit putih, bukan lagi pemandangan asing bagi orang Aceh. Padahal, sepuluh tahun lalu, kehadiran orang dengan wajah asing, jadi tontotan menarik bagi orang Aceh. Wajah orang asing itu akan dilihat dengan seksama dan lama. Namun sekarang, hal seperti itu sudah jarang kita lihat—untuk tidak menyebutkan tidak ada lagi.

Lalu, ketika kondisi Aceh menjadi begitu dewasa, puaskah kita sekarang? Saat tinta tanda damai dibubuhi di lembaran-demi-lembaran MoU Helsinki empat tahun silam, apakah kondisi seperti inilah yang kita harapkan? Atau, kalau boleh dipertajam, Aceh seperti sekarang inilah yang dulu kita harapkan bersama-sama?

Pertanyaan pesimis begini mengendap di kepala kita: ada yang berani mengeluarkannya dan berkembang jadi wacana, ada yang mendiamkan saja. Tetapi, yang pasti, Aceh jadi seperti hari ini, banyak orang yang *'han ek kupike, kee!* (tidak sanggup kita pikirkan)'.

Saya ingat, pada malam Minggu, saat mengantarkan teman ke Lueng Bata, kami melewati jalan Tgk Panglima Nyak Makam, Lampineung. Malam itu bukan balapan cross yang kami lihat, melainkan adegan kekerasan. Beberapa personil tentara dengan pakaian seragam, ditambah topi baja, lalu lalang seperti melakukan

operasi, lainnya seperti saat konflik. Sementara di sisi satu lagi, beberapa personil polisi juga memakai seragam, ditambah baju antipeluru. Apakah kedua institusi yang dipisahkan pascareformasi itu sedang berperang? Ternyata bukan. Sebab, di tengah-tengah arena sedang berlangsung adegan kekerasan. Siapa yang dipukul dan memukul, tak ada informasi resmi. Koran-koran juga tidak memuatnya, esok hari.

Sebelumnya, adegan kekerasan juga terjadi di kawasan Keudah, pascapemukulan anggota TNI yang ditangkap warga saat berada di sebuah salon. Setelah itu, giliran aksi balas dendam terjadi. Beberapa warga dilaporkan terpaksa dirawat secara intensif di rumah sakit. Lalu, kita pun jadi bertanya, apakah cerita konflik sudah mulai ditulis lagi?

Deretan aksi kekerasan masih bisa kita perpanjang lagi, di mana banyak berbuntut pada kematian. Padahal, pasca MoU, angka kekerasan menurun drastis, dan warga yang meninggal karena aksi kekerasan sangat sedikit. Namun, sekarang, setiap hari kita disuguhkan korban meninggal karena tembakan atau aksi pembunuhan. Kita tentu saja terenyuh mendengarnya. Karena, ternyata kita tidak bisa merawat perdamaian.

Hal itu, belum lagi gesekan sesama partai lokal. Meski banyak pihak tak berani mengungkapkan ke publik, tetapi praktik kekerasan atau intimidasi oleh 'partai tertentu' (saya tidak terlalu menyukai sebutan ini), sering terjadi. Mendekati Pemilu, intensitasnya bakal meningkat tajam. Pertanyaan kita, Aceh damai seperti ini yang coba kita rajut? Di mana Aceh sudah dimaklumkan sebagai kawasan damai, tetapi tetap saja ada masyarakat yang meninggal.

Jangan-jangan, perdamaian Aceh hanyalah *euphoria* sesaat, sebab yang terjadi sebenarnya adalah kondisi *Fascinatio*—meminjam istilah Daniel Dhakidea (2003)— saat menggambarkan tentang cendekiawan, yaitu sesuatu yang menarik perhatian, pada gilirannya dalam makna asli justru mengandung dua arti sekaligus yaitu, selain menarik perhatian karena sangat memukau, akan tetapi juga mengandung arti kedua: hantu! Ya...perdamaian Aceh sekarang ini ibarat hantu. Menakutkan. (HA 160908)

Politik Tahu Diri

TAK ada hujan, tak ada angin. Nama Bukhari Daud, Bupati Aceh Besar, tiba-tiba begitu populer, dan jadi topik diskusi dari satu warung kopi ke warung kopi yang lain, di kantor pemerintahan, di redaksi media massa, dan jadi bahan pembicaraan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto. Malah, berita mundurnya Bupati Aceh Besar itu, mampu mengalihkan perhatian masyarakat Aceh yang penasaran dengan nasib Gubernur Irwandi Yusuf. Sampai-sampai seorang kawan saya menyelutuk, "Ini juga bagian dari propaganda Irwandi," ujar kawan saya, sebut saja namanya Apa Suman.

Hah...saya tak bisa menyembunyikan keterkejutan saya. Jika ini memang benar bagian dari propaganda Irwandi untuk menyembunyikan kondisi kesehatannya, jelas rakyat bertanya-tanya. Bukankah, hal ini justru mendatangkan teka-teki lain, membuat rakyat tambah penasaran, khususnya rakyat dan politisi di Aceh Besar?

"Jangan berkelakar yang tidak penting begitu, *dong!*" pinta saya. Sebab, belakangan ini, saya selalu disuguhkan adegan-adegan kekerasan, meski di bulan Ramadhan, di mana sebenarnya, semua praktik kekerasan harus diakhiri. Tapi, seperti diyakini semua orang, 'birahi' berperang orang Aceh belum benar-benar mendapat orgasme yang memuaskan. Akibatnya, libido berperang ingin selalu dilakukan. Lakap "*ureung Aceh galak meuprang*," seperti ingin dipelihara. Kalau bisa, selamanya.

Pun begitu, saya tak hendak mengutuk pelaku kekerasan, dan upaya-upaya mengacaukan Aceh, meski perbuatan tersebut, siapapun pelakunya, pantas dikutuk. Saya justru ingin mengomentari sedikit—meski terlambat—alas an di balik pengunduran diri Bukhari yang masih dibalut misteri.

Bagi saya, apa yang dilakukan oleh Bukhari merupakan sebuah

sikap berani di tengah kegilaan orang Aceh pada jabatan dan tahta. Di balik itu, saya justru menangkap ada yang tidak beres soal pengunduran diri tersebut. Kenapa Bukhari mundur begitu mendadak, serta kenapa surat tersebut justru ditulis tangan. “Apakah materai 6000 yang ditempel di surat yang ditulis tangan tersebut, sudah jauh hari disiapkan, atau sudah disediakan oleh ‘oknum berkelompok’ yang menghendaki dia meletakkan jabatan?” begitu rasa penasaran saya.

Yang lebih membuat saya penasaran, kenapa Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusungnya pada Pilkada 2006 lalu, mengeluarkan pernyataan menolak Bukhari mundur ketika dukungan publik lebih memihak Bukhari? Padahal, sebagai partai pendukung, jauh hari PAN harus mengeluarkan pernyataan, bahwa PAN bersama Bukhari dan tidak ingin Bukhari mundur. Sebab, ketika pernyataan dukungan baru dilontarkan sekarang, setelah lebih seminggu polemik di masyarakat bergulir, banyak pihak jadi bertanya-tanya, ada apa dengan cinta Bukhari-PAN? “Bukankah, lakon politik yang terjadi di Aceh Besar, hampir mirip dengan kasus yang menimpa Abdullah Puteh saat digeser dari kursi Gubernur dengan menggunakan kekuatan militer saat itu?” tanya kawan saya. Saya makin penasaran, bahwa sikap Bukhari bisa jadi tak berdiri sendiri. Pasti ada yang tidak beres.

Meski, sebenarnya, saya tak perlu bingung, sebab, seperti diceritakan oleh seorang teman, sikap yang diambil Bukhari dengan mundur dari jabatannya sebagai Bupati dilakukan setelah tujuh malam berturut-turut melaksanakan Shalat Istikharah—shalat minta petunjuk.

Tapi, satu yang perlu dicatat, sikap yang ditunjukkan Bukhari, sudah melambungkan namanya, seperti Nelson Mandela, yang memilih berhenti jadi presiden, ketika tidak punya pesaing berarti. Padahal, jika dia gila kekuasaan, dia bisa menduduki kursi presiden Afrika Selatan, selama yang dia inginkan. Namun, seperti kita tahu, Nelson Mandela, tahu diri, dan lebih memilih merawat keberlangsungan demokratisasi di Afrika Selatan, yang diperjuangkannya bertahun-tahun.

Sikap yang ditempuh Nelson Mandela, dikomentari secara bagus oleh Eep Saifullah Fattah, bahwa ‘demokrasi kerap tak butuh pemimpin besar, melainkan cukup orang tahu diri,’ tulisnya. Eep dengan mengutip Cak Nur, membandingkan langkah Nelson tersebut dengan sikap yang diambil Richard Nixon, seorang presiden AS, yang memilih mundur sebelum di-*impeach* Kongres AS, atas skandal Watergate.

Walaupun masyarakat masih bertanya-tanya, atas alasan apa Bukhari mundur, setidaknya langkah yang ditempuh Bukhari dapat disebut sebagai sikap seorang pejabat yang tahu diri. Sebab, dia tidak mau terjebak dalam politik mafia, yang demikian akrab dilakoni pejabat Aceh dewasa ini. (HA 130908)

Investasi

PADA awal-awal Pemerintahan Irwandi-Nazar, keduanya sangat gencar menggaet investor untuk menanamkan modalnya di Aceh. Berbagai upaya lobi dilakukan, seperti kunjungan ke luar negeri dan memfasilitasi investor melakukan *survey* di Aceh. Namun, seiring waktu, tak banyak investor yang mau berinvestasi di Aceh. Gagalkah Pemerintah Aceh? Jawabannya, hanya rakyat dan kita-kita saja yang tahu

Tapi, saya selalu membayangkan begini, bagaimana jika Pemerintah Aceh saja yang berinvestasi di luar negeri, dan keuntungannya nanti bisa mengalir ke Aceh. Ide ini bisa saja mengundang tawa. Namun, ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sebut saja, misalnya, daripada mengurus investor yang ‘masih’ berencana menanamkan modalnya di Aceh, alangkah lebih baik Pemerintah Aceh melakukan ekspansi investasi di luar negeri. Soalnya, hal ini dimungkinkan, karena Aceh bebas melakukan kerjasama ekonomi dan investasi dengan luar negeri, seperti disebutkan dalam UU PA, yaitu “Penduduk di Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi secara internal dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” (pasal 165 ayat (1)).

Selama ini, seperti kita tahu, banyak anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh, tapi tak mampu dihabiskan. Tahun lalu saja, ada sekitar Rp2 triliun yang harus dikembalikan ke pusat. Sementara tahun ini, diramalkan ada sekitar Rp5 triliun dana yang harus dikembalikan atau jadi SILPA, karena tidak semuanya terserap. Seperti pemberitaan beberapa waktu lalu, dari dana Rp8,5 triliun baru terserap sekitar 10 persen atau Rp850 miliar. Ada sekitar Rp7,6 triliun dana yang tersisa. Dengan masa anggaran yang tinggal beberapa bulan lagi, bakal banyak dana yang tidak terpakai dan hangus dan harus dihabiskan pada anggaran mendatang, yang kita

yakin pasti tak juga mampu.

Nah, bagaimana jika dana yang diperkirakan bakal tak mampu dihabiskan tersebut digunakan untuk berinvestasi di luar negeri seperti membeli sebuah klub Sepakbola di Inggris, misalnya. Bukankah itu lahan bisnis yang menggiurkan. Membeli klub sepakbola dewasa ini menjadi investasi jangka panjang. Tak hanya keuntungan ekonomis yang bakal didapatkan, melainkan ketenaran. Dan Aceh akan selalu disebut-sebut setiap pemberitaan tentang pemilik klub sepakbola tersebut. Apalagi jika icon Aceh selalu disorot kamera saat berlangsungnya pertandingan.

Saya percaya, jika seluruh rakyat Aceh bersepakat menggunakan sebagian dana APBA untuk membeli klub sepakbola, rencana 'gila' ini akan terlaksana. DPRA juga harus bekerjasama, dengan memberi peluang agar anggaran tersebut digunakan untuk membeli sebuah klub bola. Anggap saja, rencana ini untuk mempromosikan pesona Aceh yang mulai pudar, seiring gagalnya beberapa proyek BRR, dan berhentinya konflik.

Pemerintah Aceh, dengan dana yang cukup besar tersebut, saya yakin mampu membeli klub besar. Seperti saya baca di media, harga sebuah klub sepakbola, tidak terlalu 'mahal' karena dengan dana yang dimiliki Aceh mampu membeli klub tersebut. Sebut saja, misalnya, Manchester City, yang berharga 200 juta poundsterling (Rp3,4 triliun), seperti dibeli pengusaha kaya-raya Uni Emirat Arab yang tergabung dalam *Abu Dhabi United Group for Development and Investment* (ADUGDI) yang diwakili Sulaiman Al Fahim dari pemilik sebelumnya, Thaksin Sinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand.

Coba, jika langkah itu diikuti oleh Pemerintah Aceh, yaitu membeli salah satu klub sepakbola di Inggris, pasti rakyat Aceh akan sangat bangga, karena dana yang mengalir ke Aceh tidak kembali lagi ke pusat, tapi menjadi aset berharga untuk masa depan Aceh. Hal itu juga akan berpengaruh terhadap dunia persepakbolaan Aceh, di mana bakal munculnya pesepakbola handal dari Aceh. Jadi, upaya Pemerintah Aceh mengirimkan pesepakbola anak-anak Aceh ke Paraguay tidak akan sia-sia, karena punya tim yang akan menampung mereka nantinya, termasuk berpartisipasi dalam event internasional. Bukankah, Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olah raga internasional (baca UU PA pasal 9 ayat (2)). Jika suatu saat Aceh bisa ikut Piala Dunia, bukankah itu sudah sangat luar biasa? Itu baru *self government*. (HA 150908)

MoU

HARI Jumat (15/08/08) merupakan peringatan tiga tahun perdamaian Aceh, atau 3 tahun MoU Helsinki ditandatangani. Saya mencoba menulis seandainya. Sebab, orang sekarang lebih suka bicara seandainya atau andai saja. Orang suka berandai-andai, termasuk yang mustahil sekalipun. Padahal, mengubah sesuatu tak pernah cukup hanya karena sekedar berandai-andai. Mengubah sesuatu butuh kerja konkrit. Pun begitu, saya ingin bicara seandainya. Itu saja.

Seandainya MoU Helsinki tidak ditandatangani, apakah perdamaian di Aceh akan tercipta? Sebab, seperti kita tahu, perdamaian sulit didapatkan di Aceh sebelumnya. Damai sesuatu yang *meusukee* (sulit didapat) di Aceh. Sepanjang perjalanannya, Aceh selalu dirundung duka dalam bentuk perang. Orang Aceh terus menerus berperang, dengan lawan berbeda. Akibatnya, orang Aceh tak pernah benar-benar menikmati hidup aman dan damai. Makanya, wajar ketika orang Aceh 'mendapat' gelar sebagai bangsa yang gemar berperang.

Seandainya MoU Helsinki tidak ditandatangani, apakah akan ada yang namanya Undang-undang Pemerintahan Aceh (UU PA)? Kita bisa langsung menjawab tidak. Sebab, UU PA adalah amanat MoU Helsinki, meskipun, suara-suara serak mulai muncul belakangan, bahwa banyak poin-poin dalam UU PA tidak mengadopsi isi MoU. Seperti dilansir Harian Aceh sebelumnya, ada sekitar 15 amanah MoU yang tidak diadopsi dalam UU PA.

Seandainya dulu GAM secara institusi menolak UU PA karena tidak sesuai MoU Helsinki, apakah kehidupan politik di Aceh akan separah seperti sekarang? Seperti kita tahu, baru satu PP yang dikeluarkan pemerintah sebagai turunan dari UU PA, yaitu PP Partai Lokal. Selain itu, bukankah UU PA yang ada sekarang

belum dapat disebut cukup maksimal sebagai payung bagi jalannya pemerintahan sendiri di Aceh? Soalnya, di sana-sini masih banyak bentuk intervensi pemerintah pusat, seperti tercermin dalam kata-kata ...akan ditetapkan dengan peraturan yang lain, sesuai perundang-undangan, atau kata-kata sesuai norma, standar dan prosedur. Artinya, Jakarta tetap masih memegang gagang pisau, sementara orang Aceh dikasih ujungnya saja.

Seandainya saat UU PA disahkan oleh DPR RI ditolak secara tegas oleh masyarakat Aceh, khususnya GAM, sudah pasti banyak hal yang bisa berubah. Sebab, dulunya, interupsi dari GAM pasti akan didengar. Apalagi, UU PA merupakan pertarungan bagi perdamaian Aceh. Nyatanya GAM menerima UU PA, tanpa protes, kecuali pernyataan pribadi. Namun, jika saat itu GAM menolak UU PA, bakal banyak suara sumbang dari Senayan yang menggugat hasil MoU Helsinki. Bisa-bisa perdamaian Aceh yang mulai bersemi akan kembali terancam.

Lalu, bagaimana soal Partai Lokal? Bukankah kelahiran Partai Lokal merupakan kemurahan hati para petinggi GAM saat menandatangani MoU Helsinki? Dalam MoU sudah disebutkan bahwa "...memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi Dewan Perwakilan Rakyat..." (Baca poin 1.2 Partisipasi Politik, butir 1.2.1 MoU Helsinki). Hasil yang dicapai ini, dapat disebut sebagai kemurahan hati GAM memberikan peluang bagi orang Aceh mendirikan partai politik. GAM seperti hendak menyampaikan pesan, bahwa perjuangan GAM bukan hanya untuk dinikmati orang GAM saja, tetapi hasil perjuangan GAM dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Aceh.

Tetapi, pernyataan Juru Bicara Partai Aceh, Adnan Beuransah seperti dilansir Harian Aceh (14/08/08), yang meminta semua partai lokal meleburkan diri menjadi satu dalam Partai Aceh, seperti 'pengkhianatan' GAM terhadap niat suci saat MoU ditandatangani oleh petinggi GAM Meuntro Malek. Oke, jika disampaikan bahwa dengan satu partai akan lebih mudah mengalahkan partai nasional. Tetapi saya ingin bertanya satu hal saja, apakah Partai Aceh (PA) diterima oleh seluruh orang Aceh? (HA 15.08.08)

KHA

TULISAN ini, seperti halnya tulisan berjudul RHM, aku dedikasikan untuk dia yang sudah pergi, yang tak bisa lagi kembali. Aku ingin menulis, tepatnya mengenang kata-kata 'kha' yang sering diucapkan dan ditulisnya. Sebab, dulu juga dia pernah memintaku menulis tentang 'kha', tetapi sampai senja tanggal 4 Agustus 2008, permintaannya belum sempat kupenuhi. Dan sepertinya, jika aku tidak menulis sekarang, aku pasti menyesal, sebab dia sudah memintanya jauh hari. Karena aku tahu, bukan saja dia tak bisa lagi memintaku menulis, melainkan aku juga tak tahu harus bertanya pada siapa arti 'kha' yang sering dia ucapkan.

Aku ragu sekarang. Sebab, sudah pasti aku tak dapat membaca lagi kata-kata 'kha' yang sering ditulisnya. Aku masih ingat, kata-kata 'kha' selalu dia ulang-ulang tiga kali, diikuti dengan titik tiga kali. Aku tak tahu, apa yang dia maksudkan dengan kata 'kha' tersebut. Aku gamang, dan terjebak dengan kata-kata, '*yang aku tahu adalah aku tidak tahu apa-apa*' seperti sering diucapkan Sokrates, pertanda rendah hati. Tapi, jujur, aku tak mengerti maksudnya saat dia bilang 'kha'. Ingin rasanya bertanya, namun, apa boleh buat, dia telah tiada sekarang.

Pun begitu, aku mencoba mencari sendiri arti dari kata-kata 'kha' yang selalu dia tulis, setiap saat menyapaku. 'Kha' merujuk kepada keberanian. Berani namun penuh perhitungan. Nekat tapi tak konyol. Aku tahu, saat DM dulu, dia memilih bertahan, daripada pergi mengungsikan diri keluar Aceh. Menurutnya, itulah bentuk pertanggung-jawaban sudah memilih jalan berseberangan dengan pemerintah. Aku juga tahu, dia kemudian merasakan sebagian fisiknya jadi arena latihan tinju dan taekwondo para serdadu. Tapi, dia tetap tegar. Itukah 'kha' yang dia maksudkan?

Aku juga tahu, saat minum di Solong atau ketika *chatting*, dengan lantang dia mengatakan bahwa Pilkada Aceh cacat, setidaknya bagi

dia pribadi dan orang-orang senasib dengannya. Aku yang tidak mengerti hukum, hanya diam saja saat itu. Aku jelas tak pernah menang berdebat dengannya. Aku tak menjawab. Tapi, dia tak pernah memvonisku bodoh. Seperti sering aku bilang padanya, bahwa aku diam hanya karena tak ingin memotong pembicaraannya. Aku diam karena ingin mengetahui detail apa yang hendak dia ucapkan. Dan dugaanku memang benar. Karena, secara panjang lebar dia kemudian bercerita, bahwa Pilkada Aceh 2006 lalu adalah cacat, bukan karena cacat menurut tinjauan hukum, melainkan menurut ukuran kemanusiaan.

Dia tak sekedar menuding saat itu, karena dari alur pembicaraannya, aku tahu dia punya argumen yang cukup kuat mengatakan Pilkada Aceh cacat. Menurutnya, Pilkada Aceh perlu dipertanyakan, sebab KIP—selaku penyelenggara Pilkada—berkantor di tempat di mana saat DM (Darurat Militer) dijadikan arena membunuh (Gedung Arsip). Dia bukan sedang melancarkan propaganda murahan. Sebab, dia sendiri pernah mengalami dan merasakannya, bagaimana manusia dibuat tidak beradab. Menurutnya, karena KIP berkantor di situ, dia menganggap Pilkada cacat, tentu saja menurut ukuran kemanusiaan.

Tapi, aku tahu, meski dia menolak Pilkada (aku tak tahu apakah dia ikut mencoblos atau tidak), hasil yang dicapai Pilkada, katanya, bisa menuntun Aceh ke arah yang lebih baik. Itulah gerbang menuju Aceh yang modern dan kosmopolit, namun tak lupa pada nilai-nilai ke-Acehan.

Belakangan, bisa jadi dia kecewa, karena optimisme yang memuncak di dadanya tak juga berbuah manis. Di sana-sini kekecewaan mulai disebar oleh pemimpin baru hasil Pilkada di semua level. Lalu, karena ingin menghadirkan Aceh yang berbeda, dia terjun langsung. Aceh mesti diubah, katanya, tapi bukan melalui senjata, melainkan jalur politik. Dia begitu yakin bahwa *‘real power does not hit hard, but straight to the point* (Kekuatan yang sesungguhnya tidak memukul dengan keras, tetapi tepat sasaran)’. Makanya, belakangan dia mendedikasikan dirinya berjuang melalui sebuah partai, agar tujuan yang hendak diraih mampu diperjuangkannya. Ada optimisme di sana. Tetapi, lagi-lagi, kematian tak dapat ditebak, karena impiannya sudah tak mampu digapai melalui perjuangan lembutnya.

Dari situlah, meski tak sempat lagi bertanya, aku ingin membuat kesimpulan saja, bahwa ‘kha’ adalah seperti yang telah dijalani sepanjang nafasnya. *‘Anda harus tahan terhadap ulat jika ingin dapat melihat kupu-kupu.’* begitu Antoine De Saint berkhotbah, seperti membenarkan jalan yang ditempuhnya. (HA 16.08.08)

Tuan

“Aceh Teungku, Melayu Abang, Cina Toke, Kaphe Tuan”.

“Ureung Aceh Jak Meuprang, Ureung Padang Jak Meuniaga, Ureung Batak Duek di Ganto, nyang Meu-ato syit ureung Jawa”

UNGKAPAN-UNGKAPAN di atas sering diucapkan oleh orang Aceh. Ungkapan pertama dimaksudkan lebih untuk menunjukkan identitas sosial orang Aceh, sementara ungkapan kedua lebih untuk mempertegas eksistensi diri orang Aceh. Ada nilai-nilai ideologis dan patriotik yang tersangkut dari kedua ungkapan itu. Sama-sama bermuara pada peneguhan sikap dan semangat.

Namun, pada ungkapan pertama, sepertinya ada identitas hegemonik, seperti terbaca pada kata Teungku. Ada upaya penghilangan identitas suatu kelompok sosial. Karena seperti diketahui, di Aceh tak hanya ada gelar Teungku (Tgk), yang merujuk kepada orang yang memiliki pengetahuan lebih, terutama terhadap masalah-masalah keagamaan. Jika dibuka sejarah lama, terdapat dua kelompok lain, yang juga memegang peranan penting di Aceh, yaitu Teuku (kelompok Ulee Balang), dan Tuanku.

Sebutan Teungku merujuk kepada ulama, dan sangat populer saat konflik sosial dengan kalangan Teuku atau Ulee Balang, dalam perang Cumbok. Ulee Balang dapat disebut mewakili kelompok umara atau pemerintahan, atau semacam tuan tanah seperti di Inggris abad Pertengahan yang dikenal dengan Lord, sementara Tuanku merupakan gelar bangsawan, atau gelar untuk para raja/sultan yang ratusan tahun memerintah kerajaan Aceh Darussalam.

Entah benar atau tidak (tanpa bermaksud mengajak pembaca membuka kembali lambang GAM), pada lambang GAM atau lambang Buraq Singa, terdapat huruf T, yang menunjukkan keinginan Wali Nanggroe Hasan Tiro untuk menyatukan tiga golongan

strata sosial ini di Aceh. Saya sendiri tidak tahu tujuannya untuk apa. Tetapi, sepertinya ada semacam keyakinan, bahwa jika ketiga golongan ini (Teungku, Tuanku, dan Teuku) mampu dipersatukan, tak sulit mencapai cita-cita yang dicetuskan oleh proklamator GAM. Saya juga tidak tahu, apakah ketidakberhasilan GAM selama ini mewujudkan cita-citanya ada hubungannya dengan belum berhasilnya menyatukan ketiga kelompok tersebut? Jawabannya ada pada kita masing-masing.

Tetapi, seperti kita singgung di atas, semua identitas tersebut seperti Teungku, Teuku atau Teungku bisa memberi warna bagi orang yang menggunakannya. Dulu, saat masih berkecamuknya Aceh, para pimpinan GAM rata-rata disapa dengan Teungku atau Abu. Malah, ada beberapa organisasi mahasiswa dan pemuda di Aceh yang juga memanggil untuk sesama dengan sebutan Teungku. Hal tersebut, dianggap lebih akrab, lebih emosional, khususnya dalam memperjelas tujuan bersama.

Dari sebutan-sebutan tersebut, menunjukkan orang Aceh sebagai sebuah bangsa yang cukup *pede* (percaya diri) atau memiliki martabat. Sebutan-sebutan tersebut, pada praktiknya, tak hanya membuat si pengguna sebutan merasa perlu menjaga marwahnya, melainkan juga mengilhaminya dalam hal berpakaian.

Soal menjaga marwah yang tercermin dari sebutan, sebenarnya sudah ditanam sejak masih kecil. Sejak kanak-kanak (terutama di kampung), misalnya, sudah diajari untuk menjawab panggilan dengan 'Saya Tuan' seperti tercermin dari jawaban: *nyoe pat lon tuan* (di sini saya tuan). Kalau dipanggil nama, si anak harus menjawab: *na ulon tuan* (ada saya tuan). Sebutan serupa dapat ditemukan juga ketika seseorang sedang berbicara di depan umum seperti ucapannya, *ulon tuan ateuh nan* (saya tuan atas nama)...mengucapkan...dst. Jawaban atau pernyataan ini seperti mempertegas, bahwa mental sebagai 'tuan' sudah ditanamkan sejak kecil untuk orang Aceh. Bukankah ini menunjukkan bahwa sejak dulu orang Aceh diajarkan untuk menampilkan diri bermartabat?

Terakhir, saya berharap agar tulisan ini tidak dipahami sebagai bentuk keinginan untuk menghidupkan paham seperti yang pernah ditunjukkan oleh Hitler, saat mengatakan, bangsa Jerman adalah bangsa teragung yang ditakdirkan memimpin dunia, sebuah paham yang menggiring Hitler membantai bangsa Yahudi. Meski, semangatnya kita percaya lebih dekat ke sana. (HA 19.08.08)

Caleg

SELASA (19/08/08) hingga pukul 24.00 WIB, merupakan hari-hari tersibuk buat para Caleg (calon legislatif). Mereka berpacu dengan waktu mempersiapkan segala berkas untuk dapat bertarung dalam Pemilu 2009 nanti. Waktu, jadinya sangat berarti. Sedikit lengah, kesempatan menjadi wakil rakyat hilang di tangan. Pun begitu, bukan berarti setelah semua berkas lengkap, otomatis mampu meloloskan sang kandidat menjadi wakil rakyat. Mereka perlu bekerja lagi, memperebutkan suara rakyat. Mereka bertarung, dan menjadi pemenang.

Beruntung jika mereka diberikan kepercayaan oleh rakyat. Sebab, sistem yang berlaku, tidak lagi hanya berdasarkan nomor urut (meski di undang-undang Pemilu masih mencantumkan nomor urut), yang membuat para kandidat dengan nomor cantik, tak perlu berpeluh-peluh berkampanye. Sistem yang berlaku, siapa yang mendapatkan suara terbanyak, dialah yang jadi pemenang, tanpa peduli berapa nomor urutnya. Sistem seperti ini sama dengan mengajak rakyat memilih menjadi memilih rasional. Artinya, kandidat yang dipilih benar-benar punya kualifikasinya dan layak untuk dipilih.

Pun begitu, sistem seperti ini, membuka persaingan bukan lagi partai *vis a vis* partai, persaingan antara sesama caleg dari partai lain, melainkan juga sesama caleg satu partai. Pembusukan-pembusukan antar kandidat dengan sendirinya tak terhindarkan, sebab, masing-masing caleg ingin mendapatkan suara terbanyak. Namun, kita berharap, cara-cara kotor tak ikut mewarnai proses demokrasi, meski demokrasi bukan satu-satunya sistem politik, seperti disampaikan Ian Shapiro dalam *Asas Moral dalam Politik* (2006).

Tetapi, meski bukan satu-satunya sistem politik, kata Ian Shapiro, dalam tradisi demokratis menawarkan sumber daya yang jauh lebih baik daripada tradisi-tradisi pemikiran lain, sebab ia memastikan

bahwa klaim politis harus diuji di arena publik, bahwa hak individu adalah perwujudan paling baik dari aspirasi kebebasan manusia.

Merujuk pemikiran Shapiro, para pemilih merupakan pihak yang harus dihormati, sebab mereka punya kebebasan menjatuhkan pilihannya. Karenanya, intimidasi atau ancaman terhadap pemilih merupakan sebuah keniscayaan. Masing-masing partai atau caleg boleh jadi punya basis pendukung masing-masing, tapi basis tersebut sama sekali belum permanen sebelum melewati uji publik. Rakyat sudah demikian pintarnya dalam memberikan pilihan. Untuk itu, penghargaan terhadap kebebasan individu mutlak perlu dijunjung tinggi. Karena, keputusan akhir, siapa yang didukung tetap berpulang pada satu suara per orang yang berhak memilih (*one man vote*).

Untuk itu, kita sarankan kepada para caleg, bahwa menjadi anggota dewan tak cukup dengan modal gagah-gagahan, penampilan parlente, sok berwibawa, jaim atau menampilkan citra positif, malainkan harus mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi. Makanya, sejak dari sekarang, para caleg harus terjun ke dalam masyarakat untuk menggali aspirasi, mengetahui persoalan aktual yang dihadapi oleh masyarakat pemilih, agar memiliki gambaran apa yang mesti diperjuangkan ketika terpilih nantinya. Para caleg ini harus mampu menyakinkan rakyat bahwa mereka layak dipilih.

Karenanya, saat pemilu nanti, partai menjadi tidak lagi penting, sebab yang bertarung adalah individu-individu. Partai hanyalah alat, sementara aktor sesungguhnya adalah para caleg. Para caleg inilah yang menampilkan citra positif sebuah partai. Sebuah partai akan mendapatkan suara terbanyak atau tidak sangat tergantung pada diri sang caleg, meski sesama caleg—tak hanya melawan caleg partai lain—akan bertarung. Kita berharap saja, bahwa tesis Machievalli, ‘tidak ada kawan atau lawan abadi, yang ada hanya kepentingan sejati’ tidak kita temukan dalam persaingan sesama caleg satu partai. Sebab, seperti sudah diketahui umum, dalam mencapai kepentingan, semua cara akan dianggap halal dilakukan, termasuk menjatuhkan wibawa kawan satu partai. (HA 20.08.08)

Dana

DULU ada seorang teman ngomong begini, “Orang Aceh itu tidak ada yang berhak menerima yang namanya zakat fitrah”. Karena penasaran, saya mencoba bertanya, “Kok bisa! Bukankah orang Aceh itu banyak yang tergolong orang miskin, kurang mampu, dan malah banyak yang fakir?” tanya saya. Lalu, dengan gaya bicaranya bak orator, dia bilang singkat saja, “Tanah Aceh itu kaya. Hasil alam melimpah, dan sekarang memiliki APBA yang sangat besar dan lebih dari cukup untuk membantu memulihkan perekonomian Aceh. Jika kekayaan dan dana triliunan rupiah itu dikelola, tak ada orang Aceh yang hidup sebagai keluarga miskin.” jelasnya.

Nyatanya, ketika dana dalam jumlah besar mengalir ke Aceh, orang di Aceh jadi mabuk, dan tak tahu membuat terobosan apa-apa kecuali sekedar cuap-cuap di media.

Berapa jumlah dana yang dititipkan melalui BRR? Tetapi sudahkah membuat Aceh berubah, dan menjadi macan Nusantara? Kemudian, berapa dana yang diplotkan ke Aceh melalui APBA dan APBN? Apa yang terjadi? Dana tersebut tak seluruhnya mampu dikelola, dan akhirnya harus kembali lagi ke kas Negara, atau hangus sendirinya. Masih ingat anggaran tahun 2007 lalu, sekitar dua triliun lebih dana harus kembali ke Pusat atau jadi SILPA karena tak dapat dihabiskan.

Lalu, bagaimana dengan sekarang? Apakah Aceh masih kekurangan dana? Ternyata juga tidak. Malah, Aceh surplus dana. Selain dana melalui BRR, APBA Aceh 2008 ternyata sangat besar untuk ukuran kita orang kampung, sekitar Rp8,5 triliun. Dengan dana sejumlah itu, hampir tidak ada yang tidak mungkin dibangun di Aceh. Tetapi sayangnya, seperti dilansir sebuah Koran terbitan Aceh, sekitar Rp7,6 triliun APBA 2008 belum terpakai. Sejak disahkan pada Mei lalu, baru 10 persen atau sekitar Rp850 miliar dana yang

terserap. Pertanyaan kita, tidakkah orang Aceh bodoh? Masak dana yang sudah ada, tetapi tidak tahu cara menghabiskannya.

Padahal dulu, orang Aceh ribut-ribut ketika distribusi dana ke Aceh kecil, sampai memberontak segala. Tetapi, ketika giliran dana melimpah-ruah, sudah tak tahu mau diapain dana tersebut. Kita tahu, hal itu terjadi karena pengesahan APBA ‘sedikit’ terlambat, tetapi itu juga mencerminkan lemahnya koordinasi dan sumberdaya manusia di Aceh, sehingga memperlambat proses penetapan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam APBA. Kita hanya bisa berucap, itulah hasil *fit and propertest* kepala dinas yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Artinya para SKPA atau pengguna anggaran belum mampu menunjukkan kapasitasnya yang lulus melalui *fit and propertest*, karena di beberapa dinas masih ada tender proyek yang belum diumumkan, termasuk siapa yang sudah memenangkan tender.

Kita jadi pesimis dana yang tersisa sekitar Rp7,6 triliun mampu dihabiskan, sebab masa implementasi proyek hanya tinggal beberapa bulan lagi. Dengan waktu yang tersisa, tidak mungkin semua proyek terkejar. Otomatis, ke depan bakal banyak proyek luncuran. Siapakah yang rugi? Bukan SKPA, bukan kontraktor atau bukan pula para pembesar, melainkan orang kampung yang masih menganggap Rp5000 masih terlalu berharga ketimbang dana triliunan rupiah.

Jika sampai tahun anggaran 2008 berakhir dan dana sejumlah Rp7,6 triliun belum dihabiskan, secara otomatis dana tersebut harus dikembalikan lagi ke kas Negara atau hangus (APBN) dan jadi SILPA. Orang Aceh yang sebenarnya sudah menatap masa depan yang cerah harus gigit jari. Sebab, uang banyak beredar di Aceh, tetapi hanya aromanya saja yang dapat dihirup oleh orang Aceh. Atau orang Aceh hanya mendengar saja bahwa ada triliunan rupiah dana yang diplotkan untuk Aceh, tetapi dana tersebut seperti tak nyata, karena tak memberi manfaat. Kita hanya bisa berucap, sinis, bahwa orang Aceh sebenarnya tidak layak menjadi miskin, tetapi karena para pengelola anggaran tidak becus, Aceh jadi bersimbah kemiskinan. Jatuh miskin. (HA 21.08.08)

Surat Malaikat

KALI ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Kisah ini, tidak terjadi di sini, tetapi di negeri antah-barantah. Sebenarnya tidak ada yang menarik dari kisah yang akan saya ceritakan ini, tetapi karena ada pesan-pesan kejujuran, kisah ini layak untuk diketahui. Menulis kisah kejujuran, bukan berarti kita di sini sudah tidak mampu bersikap jujur lagi. Tetapi, orang jujur sangat *meuseukee* (sukar sekali) kita temui di Aceh. Di sini yang banyak adalah orang-orang yang hanya pandai bicara ‘akan’, ‘mungkin’, ‘memang’, dan kata-kata berandai-andai lainnya. Kita banyak menjumpai pembohong di sini, yaitu orang yang berbicara dengan bahasa-bahasa *kamuflase*, untuk menyembunyikan hal yang sebenarnya.

Konon, di sebuah negeri antah barantah, hiduplah seorang wakil rakyat yang rakus dan tamak melebihi para wakil rakyat lainnya. Namanya, *Bapak Teukok*. Tahun pertama jadi wakil rakyat, sudah mampu membeli mobil mewah bermerek. Tidak sampai tiga bulan menikmati empuknya kursi dewan, *Bapak Teukok* mampu membangun rumah, dua unit sekaligus. Rumah pertama di kota antah barantah, dan rumah kedua di luar negeri. Menurut cerita *Teukok* kepada temannya, rumah pertama untuk tempat tinggal dirinya bersama isteri dan dua orang anaknya, sementara rumah di luar negeri untuk tempat singgahnya jika berkesempatan ke luar negeri. Rumah tersebut ditinggali selingkuhannya.

Jangan tanya soal keliling dunia. Sebab, dalam setahun *Bapak Teukok* berkeliling ke luar negeri tiga kali. Selain dalam rangka dinas atau studi banding, juga untuk mengunjungi selingkuhannya. Pokoknya terkait bisnis ‘tali air’. Kepada kawan-kawan dekatnya, *Bapak Teukok* bilang, bahwa dalam melakukan sesuatu harus selalu ganjil, sebab, katanya, dalam agama disukai hal-hal ganjil. Tapi, suatu ketika, si kawan sempat protes, “Anda tidak konsisten! Sebab, Anda

baru memiliki dua orang isteri.” Tak ingin kalah berdebat, karena soal *mbong* (sombong), *Bapak Teukok* tak ada duanya. “Eh...dengar ya, isteri saya yang sah memang dua sekarang, tetapi, ada seorang lagi selingkuhan saya yang belum saya nikahi,” jawabnya enteng.

Para wakil rakyat yang kebanyakan teman-teman dekatnya, mengangguk-angguk saja mendengar penjelasan *Bapak Teukok*, dan tak rencana membantahnya. Tetapi, gaya hidup yang royal, membuat teman-temannya iri padanya. Maklum, soal kerakusan dan ketamakan, teman-temannya masih di bawah standar. Belum berani korupsi dalam jumlah besar, masih bermain di level anggaran yang kecil-kecil saja, seperti bantuan untuk Meunasah, Masjid dan untuk Dayah (Pesantren), atau bantuan untuk desa.

Sementara *Bapak Teukok*, jam terbangnya dalam hal korupsi sudah bisa digolongkan sebagai koruptor kelas kakap, tapi tak terdeteksi. Dan teman-temannya ingin belajar dari *Bapak Teukok*, bagaimana selalu bisa *survive* tanpa terdeteksi petugas Antikorupsi. “Dalam perkara korupsi, yang penting *share* (pembagian) harus merata,” begitu *Teukok* berpesan sama teman-temannya. Menurutnya, jika hasil korupsi harus kita *share* sama orang lain, maka tindakan kita tidak ada yang berani melaporkan, karena sama-sama tahu, dan sama-sama menikmati. Jika kita dituntut, semua pasti kena. “Yang penting, bukti *share* itu harus berbentuk kwitansi atau bukti lainnya,” lanjutnya.

Pada tahun ketiga jadi wakil rakyat, tindak-tanduk *Bapak Teukok* sudah mulai dipantau. Apalagi, setelah membangun sebuah pusat perbelanjaan (mall) terbesar di kawasan *Leumoh Sinyal*. Rakyat bertanya-tanya, bagaimana *Bapak Teukok* bisa membangun mall tersebut. Darimana duit dia dapatkan, sebab, gajinya tidak lebih dari Rp7,5 juta per bulan. Pihak Antikorupsi memiliki bukti bahwa *Bapak Teukok* selalu membangun *deal* dengan para kepala pemerintah, kepala dinas, dan para pengguna anggaran. Soalnya, *Bapak Teukok* duduk di komisi yang mengurus bagian anggaran. Setiap ayunan palu *Bapak Teukok* dihargai minimal Rp2 miliar, meski kadang-kadang *Teukok* mematok sistem *persentase* dari jumlah anggaran yang ada untuk suatu dinas.

Suatu hari, *Bapak Teukok* tak bisa mengelak, ketika sebuah Koran memuat berita tentang sejumlah yang diterimanya dari sebuah kepala dinas. Petugas Antikorupsi mengembangkan berita Koran, dan sukses membekuk *Bapak Teukok* dengan sejumlah bukti termasuk selebar cek bernilai miliaran rupiah. *Bapak Teukok* langsung ditangkap, dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan

untuk proses hukum. Dalam persidangan yang dihadiri ratusan rakyat, wartawan dan termasuk teman-temannya di dewan, *Bapak Teukok* membuat sebuah pengakuan jujur, pengunjung sidang pun takjub, sebab, baru sekali ini ada pejabat berbicara jujur tentang alasannya melakukan korupsi.

“Bapak Hakim dan pendengar sekalian, kesalahan yang saya perbuat bisa jadi tak dibenarkan dan tak dapat dimaafkan. Tetapi, saya punya alasan kenapa saya merampok uang rakyat, dan menikah lebih dari satu isteri, termasuk memiliki selingkuhan. Yang perlu bapak hakim tahu, sampai sekarang saya masih tetap sebagai manusia. Saya belum mengambil surat Malaikat,” katanya. “Kalau Malaikat *kan* tidak makan-minum, tidak memiliki nafsu, sementara saya manusia, ada makan minum, dan punya nafsu.” Lanjutnya. Pengunjung dan hakim diam. Persidangan membisu. (HA 22.08.08)

Catur

KEMARIN, saat sedang duduk di kantor, HP saya berdering. Seperti biasa, saya agak malas mengangkat HP, apalagi jika sedang bekerja. Tetapi, karena yang telepon adalah seorang kawan, dan namanya *te-record*, saya harus mengangkatnya.

Kadang-kadang *ngeri* juga jika sampai saya *nggak* mengangkat, sebab biasanya yang telepon itu terkait perkara penting—yang pasti bukan urusan proyek atau tender—tetapi sering terkait berita sedih. Saya masih ingat, bagaimana ketika saya matikan HP selama dua minggu karena sedang fokus menulis skripsi, ternyata seorang kawan yang saya segani dan hormati dan selalu jadi tempat saya meminta nasehat berpulang ke rahmatullah. (Semoga Allah menempatkannya di tempat yang layak).

Seringnya saya mematikan HP bukan karena takut ancaman, seperti yang dialami para kepala dinas. Kepala dinas biasanya mematikan HP, sehabis mengumumkan pemenang tender. Nomornya dialihkan ke nomor lain, atau malah sering memindahkan lokasi tempat tinggalnya seperti pergi ke luar daerah. Karena, sehabis menerbitkan pengumuman, pasti banyak pihak memprotes, kenapa perusahaannya tidak lolos, atau ada yang sampai mengancam. Makanya, seperti saya dengar dari kawan-kawan kontraktor lokal, sehabis menempel pengumuman, selama seminggu atau kadang-kadang lebih, para kepala dinas (atau panitia tender) memilih ke luar daerah untuk beristirahat.

Tapi, yang pasti, bukan hal itu yang mau saya sampaikan di sini. Saat menerima telepon, sang kawan yang menelepon bertanya, “Pat posisi bang?” (Dimana posisi bang). Pertanyaan pendek seperti itu, selalu saya jawab pendek pula, “Di Kantor.” Tak ingin dianggap cuek, saya lalu bertanya, “Pat nyoe?” (sekarang kamu dimana). Sang kawan bukannya menjawab lokasi di mana dia berada, melainkan mengajak *ngopi*. “Jak

jep kupi u Romen jak,” ajaknya. Karena tak mau mengecewakan orang yang sudah menawarkan jasa baik, saya mengiyakan, “Preh inan 7 menit teuk beh!” Saya lalu meluncur ke sana.

Rupanya, meski bukan menyangkut urusan proyek, tetapi pertemuan singkat tersebut saya rasakan manfaatnya. Sang kawan, sebut saja namanya Hasrul, meminjami saya buku bagus. Sudah beberapa kali dia memprovokasi saya untuk membaca buku tersebut, yang menurutnya sangat bermanfaat. Tetapi, saya selalu tidak bergairah, sebab, belakangan ini memang saya sudah jarang baca buku. Namun, beda, jika sudah terkait dengan novel, saya pasti sangat bergairah. Saya masih ingat, bagaimana ketika seorang kawan yang pergi ke Medan dan menanyakan mau dibawa oleh-oleh buku apa. Tanpa ba-bi-bu, saya langsung jawab, ‘saya belum baca novel Ketika Cinta Bertasbih’. Sepulang dia dari Medan, si kawan membawa buku tersebut untuk saya, dan sebuah buku lain, yang juga menarik yaitu ‘Jalan Tikus Menuju Kekuasaan’. Buku terakhir ini, sangat bagus jika dibaca oleh para caleg yang sangat menggebu-gebu ingin merasakan empuknya kursi di gedung dewan.

Langsung saja, karena tidak ingin mengecewakan kawan yang sudi meminjami buku untuk saya, tak ada salahnya jika saya menulis sedikit saja isi yang sempat saya baca. Maklum, tugas masih banyak, dan tak sempat membaca semuanya. Dari judulnya saja, buku ini sudah menarik, *Secrets of Power Negotiating* (Rahasia Sukses Seorang Negosiator Ulung) karya Roger Dawson dan sudah terbit (edisi kedua), tahun 2002. Saya percaya, banyak orang sudah membacanya.

Pada bagian pertama, penulis mengajak kita untuk memosisikan *power negotiating* dengan seperangkat aturan seperti dalam permainan catur. Dawson berpendapat antara negosiasi dan catur memiliki perbedaan yang cukup besar. Jika dalam negosiasi, pihak lawan tidak mengetahui aturan-aturannya, dan hanya akan memberikan respons yang bisa diduga terhadap langkah-langkah yang kita buat. Sementara, dalam permainan catur, langkah-langkah atau gerakan yang sering disebut gambit (atau gerakan awal untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan bidak/pion), biasanya selalu melibatkan risiko, dan tak terduga. Tetapi, kita bisa meminimalkan risiko tersebut, ketika tahu kapan saat menyerang lawan, dan kapan bertahan, sambil mencuri kesempatan menaklukkan lawan.

Dawson mengajak kita untuk berhati-hati dalam melakukan gambit. Gambit-gambit awal, katanya, sebagai permulaan permainan, di mana kita bisa mengontrol jalannya permainan sesuai keinginan kita. Sementara pada gambit tengah, kita harus siap-siap

mempertahankan negosiasi tetap berkembang sesuai kehendak kita, sambil mencari letak kelemahan lawan, dan pada saat yang tepat kita harus menggunakan gambit penutup saat kita men-skak pihak lawan, sehingga lawan tidak sempat berpikir cara mengantisipasi. Menurut Dawson, keberhasilan kita menundukkan lawan atau lawan menundukkan kita, sebenarnya, sangat terkait bagaimana kita melakukan gambit-gambit awal. Kita perlu melakukan evaluasi atas setiap langkah yang kita lakukan, mempelajari langkah lawan termasuk susunan-susunan bidak yang hendak kita korbankan untuk memancing lawan.

Dalam politik juga berlaku aturan seperti dalam permainan catur. Di film-film, permainan catur sering dipergunakan sebagai adegan pendukung ketika seseorang ingin mengalahkan lawan, atau memprediksi kejatuhan sendiri (kalah). Tak salah jika permainan politik yang kita lakoni sekarang ini, tak ubahnya seperti sebuah permainan catur. Kita berharap menang, begitu juga lawan kita. (HA 23.08.08)

Pejabat

BENARLAH kata orang, inspirasi dan pemikiran segar di Aceh sekarang lebih banyak lahir di warung kopi. Malah, di warung kopi, setiap hari inspirasi dan ide diproduksi, terus menerus, tak pernah berhenti. Jika ada orang mau menulisnya, pasti tak sanggup merangkum semuanya, karena terlalu banyak, dan lintas topik. Wajar saja, idea atau inspirasi yang berkembang di warung kopi belum ada yang mendokumentasikan (dalam bentuk buku), kecuali dalam bentuk berita atau liputan.

Dari warung kopi pula, sebuah gosip mengembangkan menjadi berita yang ramai dikonsumsi pembaca. Biasanya, sebuah gosip diproduksi dari sebuah meja, lalu besoknya menyebar ke meja lain, begitu sebuah media menulisnya. Selepas itu, semua pengunjung mendiskusikannya. Tak salah jika ada orang bilang, bahwa warung kopi di Aceh sudah menyerupai sebuah forum seminar, terpanas, dan lintas isu. “Bagus kalau Jaya Suprana memasukkannya dalam rekor MURI (Museum Rekor Indonesia),” ujar seorang kawan iseng.

Dan, dari warung kopi pula, aku tahu sebuah kisah, pasti menarik karena terkait juga bagaimana budaya korupsi dipelihara. Ceritanya begini, seorang teman cerita tentang kisah kawannya, sebut saja namanya Polem, mengurus izin untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Semua berkas keperluan sudah disiapkan seperti menyangkut administrasi dan izin. Karena mendirikan lembaga pendidikan harus memiliki izin dari pejabat berwenang, seperti Dikti (Pendidikan Tinggi) atau Kopertais (Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta).

Seminggu ditunggu, tak ada kabar. Surat izin itu belum juga keluar. Minggu berganti bulan, juga belum ada kabar, apakah permohonan izin itu dikabulkan atau tidak. Setiap dihubungi, pejabat berwenang hanya mengatakan bahwa berkas tersebut sedang

diproses. Menurut teman saya, Polem cukup bersabar, karena mendirikan lembaga pendidikan, pikirnya, tidak mudah, mesti melewati jalan yang panjang dan berliku-liku.

Bulan berganti tahun, surat izin itu belum juga dikirim. Terakhir dihubungi, pihak terkait bilang bahwa surat itu sudah sampai di meja pejabat berwenang, dan akan ditandatangani. "Wah, sepertinya tidak lama lagi, saya sudah memiliki sebuah lembaga pendidikan," gumamnya dalam hati. Tapi, lama ditunggu, tukang pos belum juga mengantarkan sebuah kabar gembira untuknya. Karena tak ingin berlama-lama, Polem menelepon kembali pejabat berwenang tersebut. Terjadilah dialog. "Surat itu sudah di meja saya, tetapi saya tidak punya pena untuk menandatangani," kata si pejabat. Karena tahu maksudnya, Polem lalu mentransfer sejumlah dana ke rekening si pejabat, jumlahnya sampai jutaan, untuk membeli pena.

Tapi, surat yang ditunggu belum tiba juga. Ketika dikontak, si pejabat, hanya menjawab. "Pena memang sudah saya beli, tetapi belum ada tintanya, saya mesti membeli tinta dulu untuk pena saya," katanya. Seperti sebelumnya, si Polem kembali mentransfer sejumlah dana, dan berharap inilah dana yang terakhir dikirimnya. Namun, anehnya, surat izin yang ditunggu itu belum juga tiba. Polem lalu mencoba mengontak balik si pejabat berwenang, dan menanyakan apakah suratnya sudah selesai atau belum. "Suratnya sudah saya teken, tapi tukang pos-nya belum ada yang datang," jawab si pejabat. Sekali lagi, Polem setia mentransfer dana untuk mencari tukang pos.

Dua minggu ditunggu, surat itu tak juga sampai, dan karena kecewa, dia menelepon meminta agar tidak dipermainkan. Dengan enteng, si pejabat menjawab lebih enteng lagi. "Tukang posnya memang sudah ada, tapi dia tidak tahu alamatnya di mana," katanya. Polem terpaksa mengirim duit, karena sangat butuh surat izin itu, sebab ingin cepat-cepat punya lembaga pendidikan.

Setelah itu, baru surat yang ditunggunya sampai dua tahun itu pun tiba dengan selamat yang diantarkan seorang tukang pos. Polem sangat senang menerimanya. Untung saja, si tukang pos tidak meminta dana untuk bisa kembali. (HA 25.08.08)

Uang

SEPERTI sudah ditulis sebelumnya, bahwa di warung kopi, semua inspirasi dan ide lahir, berkembang menjadi konsumsi publik. Jika sebuah media tak berani menulis tentang sebuah fakta, maka pembaca akan mencari kebenaran dari sumber-sumber lain. Hal ini tak terlepas karena masyarakat Aceh masih digolongkan sebagai masyarakat sederhana. Dalam masyarakat sederhana, seperti ditulis William L. Rivers, dkk (2003) dalam buku *Media Massa dan Masyarakat Modern*, kebenaran akan dicari dengan cara membandingkan pemberitaan media dengan informasi dari sumber-sumber lain. Karenanya, informasi sebuah media bukanlah sumber informasi dominan. Hal ini berbeda dengan dalam masyarakat modern, di mana isi media merupakan sumber informasi dominan. Karena itu, dalam masyarakat modern, media lebih dituntut untuk menyajikan berita yang benar. Media harus bisa membedakan secara jelas mana yang merupakan peristiwa politik, dan mana yang merupakan pendapat politisi.

Makanya, tidak perlu heran, jika ada masyarakat masih mencari informasi dari sumber-sumber tak resmi, seperti di warung kopi. Sebab, masyarakat lebih banyak mendapatkan informasi di warung kopi ketimbang membaca isi media. Sebagai contoh, ada sebuah peristiwa yang tidak terekpose media, tetapi sangat mudah ditemui di warung kopi. Detail sebuah peristiwa kadang-kadang lebih lengkap kita dapatkan di warung kopi daripada gosip yang ditulis media.

Ada juga fakta yang berkembang di warung kopi tidak dilansir oleh media. Tepat jika kita menyebutkan warung kopi sebagai media alternatif untuk masyarakat Aceh yang beranjak menjadi masyarakat modern. Seperti kisah yang saya dapatkan ini, bisa jadi belum ditulis oleh media. Bukan berarti media tidak mendapatkan informasi tentang kisah ini, melainkan ada pertimbangan 'patut' dan 'tidak patut'

serta alasan lainnya yang jarang masuk akal. Dan ternyata kisah ini saya dapatkan di warung kopi. Ceritanya begini, di kota tempat berkumpulnya pejabat munafik ini, digelarlah sebuah perhelatan akbar, mengundang semua orang yang patut diundang. Acara dibuat semeriah mungkin, dengan harapan orang-orang terkesima dan takjub. Namun, perhelatan itu bukan tanpa cela. Banyak cela yang seharusnya ditulis, tapi karena asas 'patut' dan 'tidak patut' tadi, cela tersebut harus dikikis oleh merdunya suara sang penyanyi yang mampu menghipnotis pengunjung untuk mengikuti irama musik yang keras.

Seperti dikisahkan oleh si empunya kisah, di sebuah kamar hotel, seorang penyair terbesar negeri antah-barantah mengamuk, seperti amukannya saat membawakan puisi di atas pentas. Tapi, ini amukan fakta. Sebab, sebuah amanah begitu saja dilanggar hanya karena terpaut jarak, antara istana dan kamar hotel. Padahal, jarak tersebut begitu dekat, dan hanya Rp3000 ongkos becak saja. Namun, ini bukan soal ongkos becak, tapi ini soal moralitas. Sebuah jarak (yang pendek) ternyata lebih mahal dari harga untuk sang penyair besar kembali ke negerinya, antah barantah.

Perjanjian sebelumnya, pihak istana telah berkenan membayar sang penyair dengan harga seperti MoU. Namun, entah siap yang bermain, atau bisa jadi ulah para oknum berperut buncit, jatah untuk sang penyair tercecce di sepanjang jalan antara istana dan hotel, yang membuat jatah berkurang dari ukuran dan jumlah yang sebenarnya. Tak tanggung-tanggung, dana yang tercecce sampai setengahnya.

Ya...ini soal moral. Di negeri yang berjudul serambi mekkah, praktik-praktik amoral, seperti penyunatan dana jatah orang masih terjadi. Tak cukup memakan gaji, honor orang pun dipalak. Di sini seperti berlaku, jika tidak korupsi sekarang, kapan lagi?

Saya yang mendengarnya tak mampu menjawab apa-apa. Saya hanya teringat sebuah petuah bijak, "jangan titip uang, sebab penerima pasti menerimanya dengan jumlah berkurang." Dan jarak istana dengan hotel yang biasanya cuma Rp3000 ongkos becak menjadi Rp15 juta. Ruarr biasa! (HA 26.08.08)

Reudok

REUDOK *gohlom teunte ujuen*. Mendung tak berarti hujan. Begitu kira-kira bunyi sebuah bait lagu. Tapi, tahukah apa itu *Reudok*? Demikian seorang kawan bertanya. *Reudok* ya suatu kondisi cuaca, di mana muncul tanda-tanda bakal turun hujan. Lalu, jika ada yang mengatakan, *reudok hana ditupue!* Apakah *reudok* di sini dapat disebut menggambarkan kondisi cuaca? Rasanya tidak. Sebab, bisa jadi (pasti), *reudok* di sini dilakabkan untuk orang-orang yang *klo prip, ureung hana peureumuen sapue*. Bisa juga berarti orang bodoh.

Ada lagi kata yang selalu disebut dekat dengan kata *reudok* yaitu *dok*. *Dok*, adalah kata untuk menyebutkan orang-orang yang ingin melakukan semua hal sekaligus. Orang *dok*, biasa ditemui ketika cuaca sedang *reudok*, di mana semua orang terlihat sibuk, lari ke sana kemari, untuk menyelamatkan padi agar tidak terkena hujan. Ada yang ambil *eumpang*, kantong, *drom*, atau semua media yang bisa digunakan untuk menyelamatkan padi dari hujan.

Saat *reudok*, masyarakat terlihat sangat kompak. Orang yang lagi duduk-duduk, biasanya di *balee jaga*, begitu tahu *reudok*, pasti bahu membahu membantu. Meski bukan padi milik sendiri, tetapi mereka cukup semangat membantu *kuet pade*. Semua seperti sepakat, jangan perdulikan dulu padi tersebut milik siapa, tapi yang penting padi terselamatkan dari siraman hujan.

Namun, karena semua orang terlibat dalam penyelamatan padi dari kena hujan, soal kepemilikan padi jadi simpang siur. Tidak jelas lagi mana milik Po Ramlah, mana milik Po Minah, dan mana milik Po Maneh. Sebab, sudah tradisi orang Aceh, jika *adee* (menjemur) *pade* sering berdekatan. Jadi, ketika datang *reudok*, orang tak lagi membedakan mana punya Po Ramlah, mana punya Po Minah dan mana pula Po Maneh. Akibatnya, *pade* yang sudah *dikuat* tersebut sudah bercampur baur. Padi tidak hilang, karena masing-masing

ureung adee pade tahu berapa takaran *pade* yang di-*adee*-nya.

Hanya saja, dalam kondisi tersebut, penolong tadi ada yang tidak mau jerih payahnya sia-sia. Pasti, dia menyembunyikan sebagian padi, sebab, saat di-*kuet* tidak semua *pade* dimasukkan ke rumah si pemilik, karena ada yang ditaruh di Meunasah, di bale jaga. Namun, karena kondisi sedang kacau balau (dok), orang-orang tidak menaruh perhatian kemana padi diselamatkan. Orang hanya berfikir, bahwa padinya ada yang menyelamatkan, meski tidak dimasukkan ke rumahnya. Dapat *kuet pade*, berarti alamatnya beruntung.

Orang yang tidak membantu *kuet pade*, sering tidak mendapatkan apa-apa. Sebab, tak ada jatah yang diambil untuknya. Kemudian, *pade* yang di-*kuet* tak lagi jelas siapa pemiliknya. Pemiliknya ya orang yang membantu.

Filosofi *ureung kuets pade*, tak ubahnya dengan kondisi Aceh sekarang. Seorang kawan bercerita, bahwa kondisi Aceh sekarang mirip seperti *ureung kuets pade reudok*. Semua orang tak hanya sibuk mengejar proyek, melainkan juga sibuk berpartai politik. Artinya, ada orang yang di satu sisi aktif di partai, namun di sisi lain juga bertindak sebagai kontraktor, belum lagi bertindak sebagai kepala dinas atau anggota dewan. Satu orang bisa ditemui dalam aktivitas yang berbeda. Tujuan akhirnya, bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tanpa peduli apakah semua itu haknya atau tidak. (HA 27.08.08)

Rabu Abeh

SETIAP menjelang masuknya bulan Ramadhan, di Aceh ada kebiasaan aneh yaitu orang beramai-ramai pergi ke pantai, yang disebut dengan *Rabu Abeh* (kalau diterjemahkan berarti Rabu akhir). Tujuannya, bermacam-macam, ada yang sekedar mandi sepuas-puasnya menyucikan tubuh memasuki bulan puasa, kencan terakhir di laut, atau alasan-alasan lainnya. Jika dilakukan pada bulan puasa jadi bahan pembicaraan masyarakat. Sebab, puasa dipahami menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari.

Tulisan ini saya batasi pada soal 'menahan diri'saja. Soalnya, inilah sebenarnya substansi dari puasa yang sebenarnya. Meskipun kita yakini, ada hal-hal yang sebenarnya halal dilakukan pada siang hari, tapi karena ada aturan yang sudah ditetapkan, hal tersebut jadi tidak boleh dilakukan, menjadi tidak halal lagi. Saya percaya, semua kita tahu apa yang saya maksudkan ini.

Tapi, saya jadi ingat kisah yang diceritakan teman saya. Ada temannya, sebut saja namanya *Dokaha*. Pada minggu lalu, dia bercerita ingin menghabiskan minggu terakhir sebelum masuk bulan Ramadhan dengan cara pergi ke laut bersama pacarnya. Minggu terakhir itu, sering disebut Rabu abeh. Entah bagaimana muncul istilah ini, belum ada penjelasan yang benar-benar dapat dijadikan pegangan. Saya sendiri, sebenarnya geli juga mendengarnya, sebab, bagi saya yang disebut Rabu, ya hari Rabu, tidak bisa diganti dengan hari lain. Tapi ini beda, hari Minggu juga disebut *Rabu abeh*.

Menurut *Dokaha*, seperti diceritakan temannya, hari Minggu itulah kesempatan terakhirnya untuk bersenang-senang dengan sang pacar, tanpa merasa terganggu dengan aturan yang ada. Sebab, orang-orang di sekelilingnya tak ada yang mencemooh, karena semua orang menganggap hal itu wajar, sebelum memasuki bulan

Ramadhan. Jika pun tidak wajar, pasti akan diwajar-wajarkan saja. Sementara, jika bersenang-senang pada bulan Ramadhan bersama sang pacar, apa kata WH (Wilayatul Hisbah)?

Soal aturan yang membatasinya untuk bersenang-senang bersama pacar pada Ramadhan, juga dikritiknya. Menurutnya, Tuhan terlalu mengatur. “Aneh, Tuhan *kok* aturannya otoriter *banget*,” begitu protesnya suatu ketika, ketika diingatkan, semua aturan itu untuk kebaikan dia dan pacarnya juga.

Tapi, dasar orang *hana troh* (tidak sampai) syariat ke rumahnya, semua aturan Tuhan diprotesnya. Anehnya, *Dokaha* selalu punya segudang argumen untuk membenarkan tindakan-tindakannya. Suatu hari cerita teman saya, si *Dokaha* sudah mencoba meredefinisikan soal Dosa dan pahala. Pendapatnya, sungguh berbeda dengan pendapat ulama yang pernah kita dengar. Menurutnya, jika sebuah perbuatan jahat dilakukan dan pelakunya tidak merasa was-was, takut, dan tidak punya beban, perbuatan itu diberi ganjaran pahala. Tetapi, jika perbuatan baik seperti shalat, puasa atau naik haji, katanya, akan mendapatkan dosa apabila orang yang melakukannya merasa terbebani, tidak tenang, was-was dan muncul ketakutan. Karena menurutnya, beda perbuatan baik dan jahat memiliki efek psikis pada pelakunya, senang atau tidak senang.

Saya hanya senyum-senyum saja mendengar ‘fatwa’ baru *Dokaha*, teman dari teman saya. Namun, saya cuma mengatakan, bagaimana jika tokoh-tokoh partai politik melakukan *black campaign* saat ceramah Ramadhan, tetapi dia merasa senang setelah melakukannya? Kawan saya cuma diam. Dia sekedar bilang, alangkah indahnya jika para tokoh-tokoh partai bisa menahan diri, irit berbicara, dan tidak melakukan kampanye negatif terhadap kandidat partai lain. Tapi, apakah akan ada tokoh seperti itu? Sebab, sudah kebiasaan, jika bulan Ramadhan merupakan momen memperbaiki citra, seperti yang sering dilakukan pada artis di Jakarta: Alim Musiman. Bakal banyak politikus memanfaatkan Ramadhan untuk safari, ceramah *keunoe-keudeh* (kesana-kemari).

Memasuki Ramadhan, kita cuma bisa menyarankan, agar partai bisa menahan diri tidak mengumbar-umbar spanduk, bendera, atau umbul-umbul partai di sembarang tempat. Sebab, seperti kita tahu, ada warga yang alergi melihat umbul-umbul partai, yang over-meriah. Malah, ada yang mengumpat segala, “*Pakon han dicok peng nyan dibantu aneuk yatim bak buluen puasa, nyoe doh diyue siram bak ujuen, diyue tot bak mata uroe* (Kenapa nggak dijadikan uang itu untuk membantu anak yatim di bulan puasa. Ini lebih senang disiram hujan

dan dibakar matahari)”. Bagi warga, melihat umbul-umbul yang kelewat meriah, menggiringnya untuk *update* caci-maki dan sumpah serapah. *Kan aneh*, jika nanti gara-gara umbul-umbul partai membuat kualitas berpuasa warga jadi berkurang! (HA 28.08.08)

Insya Allah

KEMARIN, Jumat (29/08/08), saya berjanji dengan seseorang untuk minum kopi bareng sehabis Shalat Subuh di kawasan Beurawe Kota Banda Aceh. Malamnya, saya sudah memastikan akan hadir. Tetapi, nyatanya saya tak datang. Tegasnya, saya lupa. Namun, saya tidak ingat, apakah ketika berjanji dengannya sempat menyelipkan kata-kata Insya Allah atau tidak. Saya juga tidak tahu, apakah dia marah atau tidak karena saya tidak datang.

Ini bukan yang pertama saya tak datang setelah berjanji. Sebelumnya, banyak kawan juga mengeluh atas sikap saya yang tidak tepat janji. Setiap berjanji mau ketemuan, selalu lupa, dan tak ingat lagi jika saya pernah berjanji akan hadir. Entah, itu sudah tabiat atau tidak, saya sendiri bingung. Sementara jika saya tidak berjanji akan datang, biasanya saya selalu datang. Hal ini tak terlepas dari kebiasaan saya yang tidak pernah merencanakan sesuatu sebelumnya. Jika memang mau ketemuan, ya tidak perlu direncanakan. Sebab, setiap mau melakukan sesuatu, tak pernah didahului dengan rencana.

Saya selalu mencari pembenaran bahwa tindakan saya tidak salah, karena setiap berjanji tak lupa mengucapkan kata Insya Allah. Kalimat ini bisa jadi sangat populer, setelah Bismillah dan setelah Salam (Assalamu'alaikum). Sering diucapkan jika seseorang ingin melakukan sesuatu atau berjanji. Di Aceh malah sampai muncul pernyataan, *pue Insya Allah ureung Aceh?* Ketika seseorang mengatakan Insya Allah saat diundang atau diajak bertemu.

Saya sendiri sempat berfikir, apakah kata Insya Allah orang Aceh berbeda dengan Insya Allah yang diucapkan oleh orang lain dari belahan bumi manapun. Sebab, di Aceh, kata itu diucapkan jika seseorang tidak ingin (punya niat dalam hati) memenuhi janji. *"Insya Allah orang Aceh hanjuet tapercaya,"* ujar seorang kawan. Padahal

kata Insya Allah semacam bentuk penyerahan urusan kepada Allah. Manusia *kan* hanya bisa merencanakan, sementara yang menentukan apakah rencana itu terlaksana atau tidak adalah Allah.

Allah sudah mengingatkan “*Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu ‘sesungguhnya aku akan mengerjakan esok,’ kecuali (dengan mengucapkan) insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah ‘mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.’*” (QS Al-Kahfi: 23-24).

Arti Insya Allah sendiri dipahami sebagai ‘bila Allah menghendaki’. Jadi, pada prinsipnya, seseorang terlepas dari kewajiban memenuhi janji jika sudah mengucapkan kata Insya Allah. Tetapi, yang harus diingat, kata Insya Allah itu bukan disengaja atau khusus diniatkan dalam hati, bahwa tidak akan datang. Jika itu dilakukan tentu sudah menyalahgunakan kata Insya Allah. Salah.

Ada yang menyebutkan, kata Insya Allah, dipakai untuk menunjukkan janji yang longgar dan komitmen yang rendah. Artinya, kata Insya Allah hanyalah kata pemanis pengganti kata tidak janji. Huh...bukankah itu sama saja dengan menggunakan nama Allah untuk membenarkan alasan kita saja, tidak menepati janji seperti sering dilakukan oleh elit politik yang mengutip ayat-ayat Al Quran hanya untuk menunjukkan mereka ikhlas berbuat, dan menghantam partai lainnya.

Padahal, jika kalimat Insya Allah dimengerti secara salah, bisa menggiring manusia sebagai penganut paham *fatalisme*, artinya menganggap segala tindakan ditentukan oleh Allah. Ada yang mengatakan, paham seperti ini tidak tepat, sebab Allah memberikan manusia kebebasan untuk bertindak. Argumen para penentang paham ini juga masuk akal. Menurut mereka, jika seluruh perbuatan ditentukan oleh Allah, bagaimana seseorang mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Manusia, sudah pasti akan membela diri jika di Akhirat nanti Allah mencebloskan dirinya ke dalam neraka.

Ketika soal tak menepati janji itu saya sampaikan sama teman, sang teman secara spontan berucap. “*Alah, nggak usah dipikirkan. Soekarno saja malah sampai bersumpah demi Allah saat berjanji memberikan kebebasan menjalankan Syariat Islam di Aceh, tapi kemudian mengingkarinya.*”

Saya hanya tersenyum kecil. Bukankah semua pejabat juga pernah mengucapkan Insya Allah akan melakukan ini, melakukan itu...tetapi, ternyata omong kosong! (HA 29.08.08)

Alasan

“**HANYA** dengan memiliki alasan saja kita bisa hidup.” Pepatah rakitan ini yang langsung saya ingat begitu seorang teman saya yang bekerja di sebuah koran lokal bercerita tentang wartawannya yang selalu memiliki alasan. Sang teman saya bercerita, dirinya memegang satu halaman daerah. Setiap malam, dia selalu *ngomel*, karena wartawannya terkenal paling telat mengirimkan berita. Jika *deadline* berita daerah jam 4 sore, maka wartawannya sampai jam 9 malam belum juga mengirimkan berita. Setiap diminta agar berita dikirim cepat, selalu memiliki alasan, macam-macam, dan banyak juga yang dibuat-buat

Tetapi, alasan-alasan dari wartawannya, jadi hiburan tersendiri bagi dia, karena bisa membuatnya tersenyum, setelah seharian mengedit berita yang *super* hancur. Kadang-kadang merepet, keluar sumpah serapah, kenapa wartawannya begitu bodoh. “Apa wartawan nggak pernah membaca berita yang sudah dimuat?” tanyanya suatu hari ketika sedang minum kopi, karena berita wartawannya tak pernah bagus-bagus.

Saya diam saja, dan berpikir, ‘capek juga jadi redaktur, nggak punya waktu untuk bernafas’. Belum lagi, jika benar berita yang dikirim sang wartawan begitu hancur. Bisa dibayangkan betapa pening kepala sang redaktur. “*Itu kan yang kamu inginkan dulu,*” jawab saya. Kini, giliran dia yang diam. Menurutnya, dia sama sekali tak membayangkan bahwa kerjanya bisa seribet itu.

Kemarin dia terlihat begitu senang, saat ketemu sedang membeli makanan berbuka puasa. “Eh tau nggak,” katanya putus. “Ya... kalau kamu nggak cerita, mana saya tahu. Apa saya ini malaikat pencatat yang serba tahu,” jawab saya sekenanya. Setelah saya bilang begitu, dia langsung cerita, bahwa si wartawannya mengirim pesan untuknya, plus beritanya. Agar tak hilang makna, saya kutip

utuh. “Ass. Hari ini perjuangan saya sangat berat karena di waktu orang sedang melakukan ibadah shalat tarawih saya harus ke... [edited] untuk mengirim berita, ‘demi adanya berita...[edited] dan merupakan tanggung jawab saya’ sebab jaringan telkomnet instan dan speedy untuk...[edited] rusak. Trims”

Sang teman bercerita, pesan ini merupakan yang teraneh, yang dia terima. Pesan itu, katanya, sampai membuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Padahal, lanjutnya, sebelumnya, si wartawannya cukup enjoy dengan alasan klasik, ‘di tempat saya mati lampu’, ‘di sini lagi hujan’, ‘internet saya macet’, dan sejumlah alasan lainnya. “Saya heran, setiap mengirim berita, dia selalu menyertakan alasannya,” kata teman saya itu. Menurutny, baru kali ini dia tahu, ada orang yang tidak pernah tidak memiliki alasan. “Mungkin dia nggak bisa hidup kalau nggak punya alasan,” jawab saya tak lupa mengutip pepatah rakitan seperti sudah ditulis di atas, “Hanya dengan memiliki alasan saja kita bisa hidup.”

Dan, yang membuat teman saya tertawa, kiriman beritanya esoknya lagi. “Dia memang benar-benar orang aneh yang saya temui,” katanya. “Coba, dia mengirim berita foto sangat aneh dan tak biasa, dengan judul *Sapi Mau ke Masjid*. Saya harus menghela nafas panjang, membacanya,” kata teman saya. Menurut wartawannya, sapi ke masjid tersebut, karena pemerintah kecamatan...(edited) tidak menerapkan tertib ternak.

Saya yang mendengarnya, tak bisa menyembunyikan senyum kecil. Gila. Tapi, saya hanya bilang ke teman saya begini: “Tak usah heran, ini kan bulan puasa. Manusia saja berbondong-bondong ke masjid untuk beribadah, agar mendapatkan kemuliaan ramadhan, serta berharap dapat Lailatul Qadar. Binatang juga perlu beribadah, dan bertaubat dari dosa-dosa binatang yang telah dilakukan,” kata saya. Binatang juga mau taubat pada bulan Ramadhan! (HA 02.09.08)

Buluet

SAAT menulis status di facebook—situs jaringan sosial yang sedang *ngetrend* sekarang ini—bahwa saya sedang *Buluet*, seorang kawan iseng bertanya, *buluet* itu apa? Mendapat pertanyaan itu, saya sempat juga tersentak. Ini pertanyaan kritis namanya. Namun, ketersentakannya saya tak bertahan lama, sebab, dengan modal ‘olah’ yang ada, saya mencoba menjelaskannya, laiknya seorang guru. Tapi saya yakin dia percaya dengan penjelasan saya.

Buluet itu, kata saya, sebuah istilah untuk menyebutkan orang yang sedang kehujanan, di mana pakaiannya basah kuyub. Namun, ada tapi-nya. Nah, mengucapkan kata ‘tapi’ berarti gaya ‘olah’ sedang saya jalankan. Di Aceh, kata saya *sok* tahu—tapi jujur cuma di Aceh kata *buluet* dikenal—istilah *buluet* sering diberikan untuk orang yang rada-rada gila/*pungo*. Istilah *buluet* ini hampir sama juga dengan kata ‘*hana ditupue reudok* (tidak tahu halilintar)’ , atau ‘*klo prip* (tidak bisa mendengar bunyi peluit)’. Sebuah istilah yang kadang-kadang kita sendiri geli mendengarnya, karena ada istilah yang tidak memiliki hubungan sedikit pun. Tapi, itulah letak daya khayal dan betapa kreatifnya orang Aceh dalam menciptakan sebuah istilah. Saya yakin, istilah ini bisa jadi lahir dari *bale jaga* atau di warung-warung kopi.

Saya mencoba memahami kata *buluet* menurut perspektif saya sendiri. Mohon maaf, jika penjelasan saya sedikit menggurui, tapi ini murni untuk ‘*peuteupat* (meluruskan)’ sebuah istilah yang telah hidup ratusan tahun. Saya sudah mencoba mencari tahu di Google arti kata *Buluet*, tapi tidak ada penjelasan yang memuaskan saya. Karena tak ada penjelasan dari Om Google, saya mencoba mengingat kejadian masa lalu.

Dulu, saat masih kecil, ketika sedang belajar di sekolah, kami yang masih polos, dan punya keinginan untuk tahu setiap kejadian,

dikejutkan oleh sebuah penampilan menarik, yang menurut guru saya, penampilan dari *ureung pungo*. Kami anak kecil, saat itu percaya saja yang disampaikan oleh sang guru. Sebab, dalam pikiran kami, guru itu lebih pintar dari kami, dan mereka serba tahu—meski ada juga guru yang marah jika ada pertanyaan aneh dari murid karena tak tahu bagaimana menjawabnya. Kami tak berani membantahnya.

Penampilan aneh yang saya lihat adalah *ureung pungo* tersebut berlari di jalan tanpa menggunakan celana dan baju. Telanjang bulat. Tanpa malu, *ureung pungo* itu, menentang-nentang ‘alat penakluk’ ke arah guru kami yang kebanyakan berjenis kelamin perempuan. “*Biet-biet ureung pungo hana male,*” mungkin pernyataan itu yang akan keluar, jika pemandangan itu saya lihat sekarang.

Saya jadi tahu, kalau bawaan *ureung pungo* seperti itu. Jalan ke sana kemari tak memakai pakaian, di mana setiap saat dibakar matahari, dan kalau hujan disiram oleh air yang jatuh dari langit. Mereka tak pernah berhenti atau berteduh jika kehujanan, dan membiarkan tubuhnya *buluet* (basah). Nasib mereka tak ubahnya seperti dalam bunyi lagu *Naseb Pejuang* karya Imum John, “*tuboh ujuen rah, mata uroe tot*”. Hanya saja, mereka *dibapot* (diterbangkan) di jalan-jalan *Gampong*, bukan di rimba. Jadi, wajar jika *ureung pungo* disebut juga *ureung buluet*. Soalnya, kehidupan mereka sudah super bebas, tak lagi terikat aturan.

Mereka layak disebut *free man*, orang bebas. Ya...karena mereka tak lagi terikat dengan aturan hukum. Sebab, kepada mereka tidak wajib lagi shalat, puasa, haji, membayar zakat atau ketentuan agama lainnya. *Ureung pungo* sudah terputus dengan kewajiban-kewajiban agama, karena mereka sudah dianggap jasad yang masih berjalan. Jika mereka melempari orang di jalan, polisi pasti tidak akan menghukumnya, paling-paling dirujuk ke Jalan Kakap (lokasi Rumah Sakit Jiwa—RSJ di Banda Aceh).

Jika sudah dirujuk ke Jalan Kakap juga belum berubah, dan masih suka berulah yang membahayakan jiwa *ureung pungo* lain yang ada di Jalan Kakap, mereka akan diambil oleh keluarga untuk di-*noek* (dipasung).

Nah, bisa jadi istilah *buluet* diberikan karena *ureung pungo*, sering jalan ke sana kemari di jalan-jalan tanpa peduli hujan dan sengatan matahari. Mereka sering *buluet*, dan tak pernah berniat berteduh jika lagi hujan. (HA 03.09.08)

Merdeka

“**KITA** belum merdeka!” pernyataan seorang kawan tersebut membuatku tersentak kaget. Lalu, aku melihat kalender. Ternyata sekarang memang sedang bulan Agustus. Ada satu tanggal pada bulan Agustus yang disebut *independen day* (hari kemerdekaan). Saya mencoba selidik, kenapa kawan saya mengatakan kita belum merdeka? Kata ‘Kita’ tersebut merujuk kemana? “Bukankah, masih banyak ‘kita-kita’ yang lain yang belum merdeka, dan bukan hanya kita saja,” kataku sekenanya.

Karena terpancing, secara ceplas-ceplos, si kawan menjawab senaknya. “Kamu pernah ke Masjid Raya Banda Aceh?” tanyanya. Saya jadi penasaran. Apa maksudnya ke Masjid? Apa dia tahu kalau selama ini saya sudah jarang ke Masjid Raya? Trus, apa hubungannya merdeka dengan Masjid Raya. “Ah, kamu ngaco!” timplak saya padanya.

Dia diam saja. Sambil membetulkan nafas, si kawan menjawab kebingungan saya. “Coba kamu perhatikan, apakah para penjual bendera merah putih di depan Masjid Raya itu sudah merdeka?” Jawaban berbentuk pertanyaan tersebut membuat saya teragap, dan tak tahu harus menjawab apa.

Menurutnya, para penjual bendera tersebut belum ada yang merdeka. “Berapalah dapat untung dari menjual bendera?” katanya. Penjual itu mengambil barang dari orang lain lagi, dan mereka cuma penjual doang. Kalau ligat menjual bendera, ya pasti untungnya cukup dua hari makan, tapi, kalau sepi pembeli bagaimana? Mereka menjual bendera, karena lagi musim saja. Coba kalau bukan bulan Agustus, tak ada orang yang menjual bendera tersebut, karena sudah pasti tak laku.

Orang sekarang, menurutnya, sukanya ikut *trend*. Kalau lagi bulan Agustus, semua ingin keliatan patriotik, sok nasionalis, ingin terlihat peduli pada hari kemerdekaan. Jadi, mereka hanya membeli bendera merah putih pas datang 17 Agustus saja, setelah itu bendera

disimpan atau malah ada yang dijadikan *lap* meja. Sedih benar. Nah, jika sampai berpeluh-peluh di tengah terik matahari, hanya dapat untung kecil, dapatkah mereka kita sebut sudah merdeka?

Sebenarnya, ada juga yang tidak begitu peduli datangnya 17 Agustus. Cuek saja. Malah, memprotes segala. Kesan ini yang saya tangkap saat menerima pesan via Yahoo! Messenger dengan bunyi aneh. “*Mau 17 Agustus... apa wajib pasang bendera ???... ada peraturan kayak gitu ya ????*” begitu bunyi pesannya. Kok... masalah kemerdekaan dan bendera, jadi serius begitu ya? Gumam saya dalam hati. Kita memang terlalu mendramatisir sesuatu yang sebenarnya tak perlu dibuat besar-besar. Soal bendera, sama sekali bukan persoalan serius, dan tak perlu menyita perhatian kita. Di Amerika, malah, bendera dijadikan bikini atau celana dalam. Orang tak ribut, dan tak ada yang protes. Tak ada juga yang bilang itu melanggar, dan melecehkan lambang Negara.

Sementara di tempat kita ini, persoalan bendera itu jadi masalah cukup serius. Soalnya menyangkut perkara *putoh mareh* (putus leher). Saat konflik mendera Aceh beberapa tahun sebelumnya, bendera bisa menentukan nasib nyawa seseorang. Bendera seolah-olah menentukan atau menjadi tempat menggantungkan nyawa.

Saat itu ketika ada rakyat mengibarkan bendera, sama sekali bukan karena panggilan nasionalisme, melainkan karena takut. Wajar ketika semangat mengibarkan merah putih orang Aceh dan Papua saat itu berbeda dengan semangat di tempat lain. Akhirnya, nasionalisme tak bisa diukur oleh selebar bendera.

Tapi, bukan tidak ada orang yang sangat nasionalis? Simak saja pernyataan seorang petinggi yang isinya kira-kira begini, “Merah putih adalah segala-galanya.” Menurutnya, tak boleh bendera partai atau lainnya lebih tinggi dari bendera merah putih. Hah... nafas saya jadi berat saat membaca pernyataan seperti ini di media. Begitu pentingkah sebuah merah putih? Bukankah ini sudah berlebihan? Sekedar itukah semangat merah putih? Bukankah ada yang lebih penting lagi yang bisa kita lakukan untuk menghormati jasa pahlawan! Misalnya, membuat warga Negara bermartabat di negaranya sendiri! Lalu, merdekakah kita sekarang? (HA 14.08.08)

Pasar Aceh

DULU, ada orang bilang begini: Jika ke Banda Aceh, jangan lupa singgah di Pasar Aceh. Ya... Pasar Aceh sangat terkenal saat itu. Segala kebutuhan manusia terdapat di sana. Orang-orang dari luar Banda Aceh, pastilah akan singgah di Pasar Aceh. Apalagi, Masjid Raya Baiturrahman persis berada di tengah kota di Banda Aceh yang berdekatan dengan pasar Aceh.

Coba jika punya waktu singgah di Pasar Aceh. Aneka tipe orang ada di sana. Para penjual tidak hanya penduduk asli Banda Aceh, melainkan orang yang datang dari luar. Semua bercampur-baur di sana. Ada yang dari Aceh Besar, Sigli, Bireuen, Lhokseumawe, Singkil, Meulaboh, Gayo dan lain-lain, termasuk juga etnis Tionghoa. Sehingga Banda Aceh laiknya miniatur Aceh.

Tak sulit mencari penjual cendol, seperti halnya mencari penjual kain di Pasar Aceh. Soalnya, beragam jenis barang dijual di sana, dari penjual beras sampai penjual *manok* (ayam) potong. Dari penjual souvenir sampai penjual bubuk kopi. Dari penjual ikan asin sampai penjual manisan. Pokoknya, semua kebutuhan manusia ada di sana. Jika mendekati bulan Ramadhan, pastilah Pasar Aceh makin ramai. Makanya, jika sempat berbelanja di sana, tak perlu marah, ketika tubuh anda tersenggol oleh orang lain. Karena begitulah kehidupan pasar. Pasar sama sekali tidak mengenal tata krama. Tak ada aturan ketertiban di sana. Sebab, semua orang ingin bisa berbelanja, dan ingin segera bisa membawa pulang hasil belanjaan.

Jika anda anti terhadap kebisingan, maka pasar bukan tempat yang baik. Sebab, di sana tak berlaku keheningan. Jika ingin menyepi dan mencari ketenangan, anda tak direkomendasikan ke pasar. Ketenangan hanya bisa didapatkan di sebuah *goa* yang sepi, atau di tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Makanya, pasar tak dibuat untuk orang-orang pecinta ketenangan.

Dulu ada yang bilang begini: watak seseorang itu, bisa diketahui di Pasar. Kita tak perlu mengenal orang itu baik atau tidak. Tetapi, pelajari perilaku dia ketika di Pasar. Jika di Pasar dia tergolong baik, maka orang itu pastilah baik. Tetapi ketika saat berada di Pasar orang tersebut brengsek, anda tak perlu ragu membuat kesimpulan, bahwa orang tersebut memang brengsek.

Jadi, orang baik itu tak sekedar sering ke masjid, karena memang masjid tempat untuk orang baik-baik. Kita tak boleh langsung memvonis seseorang itu baik ketika sering melihat dia di Masjid. Tetapi, kita juga harus lihat dia bagaimana ketika berada di pasar. Sebab, seperti kita tahu, di Pasar berkumpul tukang copet, pemalak, orang penjual yang tidak jujur termasuk orang yang pandai bersilat lidah.

Lalu, intinya apa? Lihatlah pasar Aceh. Di sana, tak hanya ada orang yang menjual barang dagangan dengan jenis berbeda, melainkan juga ada orang yang menjual barang yang sama. Tak sedikit orang yang menjual pakaian dan celana. Malah, ada toko yang letaknya berdekatan. Tergangukah penjual di sampingnya? Sama sekali tidak. Sebab, soal dibeli tidaknya barang di suatu toko itu sangat tergantung pada selera, dan juga pelayanan. Pembeli pasti mencari toko yang bisa ditawarkan, pelayanannya bagus, harganya murah, tetapi mutunya bagus. Faktor pembeli sangatlah independen. Tak boleh seorang pelayan toko menghegemoni psikologi pembeli, karena pembeli adalah raja. Dalam membeli, pembeli punya pertimbangan sendiri, dan tak bisa dipaksa-paksa.

Pasar Aceh, jadinya sangat demokratis. Semua pedagang ditampung di sana. Tak ada diskriminasi, karena masing-masing pedagang memiliki peluang dan kesempatan yang sama dengan pedagang lain dalam menjual barang. Hanya saja, mungkin, ukuran toko yang membedakan, antara kecil dan besar. Tetapi, toko kecil juga bisa lebih laris dari toko yang ukurannya besar. Tergantung pelayanan, dan barang di dalamnya. Masing-masing mereka saling menghormati satu sama lain. Mereka tetap tersenyum ketika waktu tutup toko tiba. Mereka saling melempar senyuman karena sudah melayani pembeli sehari, meski laba yang diperoleh tidak selalu sama.

Mudah-mudahan saja, dalam politik juga berlaku sistem seperti di Pasar atau di Pasar Aceh. Tak berlaku hegemoni, paksaan atau intimidasi. Tidak ada partai besar menindas partai kecil. Sebab, Aceh adalah rumah milik bersama, di mana semua orang atau partai berhak memberikan yang terbaik, dan diperlakukan secara baik. (HA 13.08.08)

Maop

SAYA percaya, semua kita pernah mendengar tentang *Maop*, bahkan pernah sangat takut pada *Maop*. Saya juga percaya, meski kita sering mendengar tentang *Maop* dan sangat takut padanya, tapi kita tak pernah tahu bagaimana bentuk makhluk yang kita percaya 'ada' tersebut. Kita tak bisa mendeskripsikan bagaimana bentuk utuh *Maop*. Hanya yang sering kita dengar, *Maop* itu makhluk yang menyeramkan, berwajah sangat buruk (si buruk rupa), tinggi besar, punya taring, dan serba hitam. Tapi, benarkah *Maop* seperti itu? Soalnya, belum ada yang melihat langsung *Maop*, kecuali orang tua kita yang sering mendiamkan tangis kita dengan mengatakan ada *Maop*.

Jika kita tak pernah mengetahui tentang *Maop*, kenapa kita sangat takut padanya? Bukankah itu sangat aneh, karena kita takut pada sesuatu yang tidak pernah kita tahu bagaimana wujud aslinya. Kita percaya sesuatu, tapi kita tak pernah tahu bagaimana sesuatu itu. Bukankah *Maop* itu hanya hayalan kita saja? "*Maop beutoi na hai!*" kalimat seperti ini yang acap kita dengar.

Namun, pembicaraan selalu terputus, ketika kita coba menanyakan, "*kamu pernah lihat Maop?*", lalu jawaban yang kita terima dari orang yang bilang *Maop* itu ada pasti begini, "*Aku belum pernah melihat Maop, dan kuharap semoga aku tidak melihatnya.*" Saya sendiri cenderung mengikuti aliran positivistik, bahwa jika kita percaya sesuatu, sesuatu itu harus bisa diverifikasi. Ada atau tidak ada *Maop*, harus bisa diverifikasi. Nah, bagaimana memverifikasinya? Itu pertanyaan yang sulit. Itu sama artinya, pikiran kita sudah dibentuk oleh ilusi-ilusi yang membuat kita takut terhadap sesuatu yang tidak berbentuk, seperti kepada *Maop*.

Nah, bagaimana jika realitas *Maop* kita bawa dalam realitas politik seperti sekarang? Saya yakin akan menemukan relevansinya. Soalnya, meski kita tak tahu bagaimana bentuk *Maop*, tetapi, *Maop* kerap jadi

kambing hitam, atau setidaknya makhluk yang kita gunakan untuk menakuti orang, terutama anak kecil. Dan hal itu sering jadi solusi mujarab. Sebab, anak kecil pasti akan berhenti menangis.

Coba perhatikan berita-berita di media belakangan ini, bukankah ada penciptaan realitas ‘*maop*’ untuk merujuk sesuatu. Misalnya saja, ada pejabat publik atau petinggi militer mengatakan, ada ‘partai tertentu’ yang melakukan intimidasi, pemaksaan, dan melakukan tindak kekerasan terhadap partai lain. Jika kita coba berpikir normal, di Aceh itu hanya ada 6 partai dan 34 partai nasional (ada beberapa partai nasional yang tidak punya perwakilan di Aceh). Nah, jika ada tuduhan ‘partai tertentu’ melakukan intimidasi, pertanyaannya, ‘partai tertentu’ itu yang mana? Dari 40 jumlah keseluruhan partai politik, saya tidak melihat ada yang namanya ‘partai tertentu’ yang bisa jadi berjumlah lebih dari satu.

Bukankah, masalah ‘partai tertentu’ ini hampir sama juga dengan ilusi kita tentang *Maop*? Bisa jadi ada yang namanya ‘partai tertentu’ tetapi tidak ada yang berani menyebutkannya. Sementara *Maop* bisa jadi tidak ada, tetapi pikiran kita yang merekonstruksi sehingga *Maop* itu ada, dan malah nyata, meski belum ada yang benar-benar pernah bertemu *Maop*. Lalu, bagaimana dengan ‘partai tertentu’, bukankah partai tersebut ada? Masalahnya, apakah ada orang yang berani menunjuk jari ke arah ‘partai tertentu’ itu yang selama ini melakukan intimidasi? Itu yang tidak ada.

Kita selalu latah. Seperti halnya ketika kita menyebutkan pelaku suatu tindak kekerasan adalah OTK yang biasa ditulis dengan ‘Orang Tak diKenal’. Julukan OTK, kerap kita dengar ketika Aceh masih dibalut konflik, malah sampai sekarang masih kita dengar. Pertanyaan kita, benarkah si pelaku itu dari golongan OTK? Bukankah—pasti ada—orang yang mengenal pelaku? Hanya saja kita tidak berani menunjuknya. Sebab, saat itu, jika pelakunya bukan dari GAM ya...sudah pasti dari TNI/Polri. Tetapi, karena itu menyangkut sebuah institusi besar, maka kita—terutama media—menulis pelakunya dengan OTK saja. Lebih aman.

Kita seperti dibentuk oleh sebuah hukum pengecualian. “Jika pelakunya orang kecil dan tak punya kuasa, pasti langsung bisa disebut pelaku kriminal, sementara jika pelakunya dari suatu institusi besar, pasti tindakan itu disebut sebagai upaya penegakan hukum. Ketika tindakan itu bisa mencoreng nama institusi, maka kepada pelakunya disebut OTK. Tapi, soal ‘partai tertentu’ itu, saya tak berharap partai itu adalah partai *Maop*, yang membuat orang jadi takut mendekatinya. Semoga! (HA 12.08.08)

RHM

SENJA baru saja turun, saat engkau mengakhiri nafasmu yang terakhir. Dan nafas itu pertanda duka. Tapi, seperti katamu, kawan: perang selayaknya diakhiri. Tak ada yang menang dengan berperang. Malah, perang bakal menamatkan kita, apa saja yang kita punya. Engkau benar. Sekarang, engkau mengakhirinya, tanpa perlu tahu siapa pemenangnya. Aku pantas bersedih. Sebab, sebenarnya, sebagai kawan, aku ingin melihatmu menang dengan bendera barumu, bahwa rakyat harus dimenangkan, Aceh harus dibuat modern dan mandiri. Itu keyakinanmu, setiap saat kita berjumpa.

Kawan, sebagai kawanmu, aku pantas dicaci dan dimaki. Sebab, ke pemakamanmu saja aku tak sampai. Padahal, seperti sering aku dengar, engkau sangat ingin melihatku berhasil, khususnya sebagai penulis. Malah, segala keperluanku engkau penuhi. Tak pernah bosan engkau mengirimkan SMS yang aku baca setiap aku baru bangun tidur. “Taufik, masalah itu menarik untuk ditulis,” begitu SMS yang sering aku terima. Tak hanya itu, engkau juga mengirimkan nomor HP siapa saja yang harus aku wawancarai. Kadang tak cukup SMS, engkau masih sempat mengingatkan melalui jalur Yahoo! Messenger. Aku masih mengingatnya, bahkan beberapa pembicaraan terakhir masih aku simpan. Bisa jadi, itu adalah hasil chatting kita yang terakhir.

Kawan, engkau juga berhak mencaciku, karena info berpulangnya engkau bukan aku tahu dari HP-ku sendiri atau aku dengar langsung. Sebagai kawanmu, aku mengecewakan, karena berita kematianmu aku dengar dari kawan satu kantor, saat dia menerima SMS dari kawannya. Sementara aku sendiri sibuk dengan rutinitas, dan seperti tak peduli dengan dunia luar. HP-ku mati. Padahal, seperti diceritakan sendiri oleh Thamren Ananda, dia berulang kali menelepon ke HP-ku, tapi tak pernah aktif. Kejadian ini, bisa jadi,

peristiwa yang aku sesali seumur hidupku.

Kawan, engkau juga pantas kecewa padaku. Sebagai kawan, baru hari ini (setelah seminggu engkau berpulang) aku bisa menulis pojok untukmu. Untuk mengenangmu. Aku tak dapat membela diri. Aku mengakui, kalau aku salah, kawan. Kuharap masih ada pintu maaf untukku. Tapi, aku hanya ingin bercerita sedikit saja, bahwa sampai sekarang aku belum bisa menerima kenyataan bahwa engkau telah berpulang. Meski Tuhan sudah memanggilmu, aku belum percaya. Menurutku, masih ada orang lain yang pantas dipanggil, dan itu bukan engkau, orang yang selama ini sudah aku anggap seperti 'abangku' sendiri.

Kawan, baru hari ini aku mampu menulis pojok untukmu. Bukan aku sengaja. Tetapi, sebelumnya aku tak mampu menulis, tentangmu. Aku tak mampu. Setiap aku menulis kata-demi-kata, mataku sembab. Aku menangis, karena aku belum menerima kenyataan engkau telah dipanggil. Tak ada kata yang berhasil aku tulis. Inspirasiku hilang. Otakku kosong. Padahal, dulu, setiap ide yang engkau kirim mampu aku ramu dengan bagus. Tetapi, menulis tentangmu aku tak mampu. Karena itu, maafkanlah aku. Kawan, baru hari ini aku mampu melawan sifat cengengku, bahwa jadi lelaki tak perlu terus menangis, meski sesuap nasi sudah habis kita makan. Maka, tulisan ini pun lahir, meski engkau tak bisa membacanya.

Namun, kuharap, tulisan ini bisa jadi sebagai permintaan maafku padamu, karena aku tak dapat menghadiri hari ketujuh berpulangnya engkau. Padahal, sebelumnya aku sudah bilang 'iya' sama kawan-kawan yang berangkat ke tempatmu. Tetapi, hal itu harus kubatalkan, karena aku tak akan sanggup berada di sana. Aku tak sanggup. Bukan karena aku tidak setuju dengan takdir Tuhan yang menjemputmu, tetapi menurutku, engkau terlalu pagi dipanggil, karena aku yakin engkau sedang ingin berbuat untuk negeri yang sudah serba-hancur ini.

Kawan, tapi aku yakin, kawan-kawanmu pasti akan mewujudkan keinginanmu, bahwa perang ini harus dimenangkan. Meskipun, engkau tak bisa melihat hari kemenangan itu. Aceh, katamu, harus dibuat lebih beradab. Sebab, menurutmu, Aceh sekarang miskin orang beradab. Aku juga tahu, engkau ingin membuat orang miskin berwibawa dengan kemiskinannya. Makanya, aku sering melihat engkau dengan sepeda motor, jalan ke sana-kemari, bukan karena engkau tak mampu membeli mobil, tapi engkau ingin merasakan bagaimana orang miskin menjalani hidup.

Bersepeda motor, katamu, sudah cukup membuatmu bahagia.

Menurutmu, mengendarai sepeda motor lebih terhormat, karena tidak mengganggu orang lain, tidak membuat jalan-jalan jadi sempit. Sementara mereka yang bermobil sering parkir di sembarang tempat, dan sering merusak pemandangan kota. Jika sesekali masuk kampung, mobil membuat pejalan kaki harus minggir ke pagar, padahal itu jalan hasil gotong-royong, dan milik orang kecil.

Tapi, engkau rela hidup sederhana. Itu yang membuatku salut padamu...bahwa kesederhanaan membuat hidup lebih indah dinikmati. Aku yang berduka. (HA 11.08.08)

Rabue

SAYA tidak begitu paham makna yang sebenarnya dari kata *rabue* ini. Hanya saja, orang yang *peugah haba sikrak sapue* (berbicara tidak karuan) sering disebut *rabue*. Kata *rabue* juga disematkan untuk orang yang *pugah broh-broh putoh*, sebuah kalimat yang sangat lucu kalau diterjemahkan. *Pugah broh-broh putoh* berarti bilang atau berbicara sampah-sampah putus—orang pasti bingung memahami kalimat ini—karena sangat lucu. Ungkapan tersebut sah-sah saja tidak perlu diterjemahkan, sebab itulah kekhasan bahasa suatu daerah. Makanya, ada istilah atau ungkapan dalam bahasa Aceh yang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, cukup dimengerti saja penjelasannya. Sebab, jika pun diterjemahkan, bobot sebuah ungkapan sering menjadi dangkal, dan kehilangan martabatnya sebagai sebuah kata atau ungkapan.

Pascadamai—terbebas dari konflik—banyak orang Aceh disinyalir mengidap penyakit stres, kurang waras atau gila, meski saya tidak begitu yakin dengan temuan tersebut. Tetapi jika benar, itulah efek samping dari sebuah konflik berkepanjangan, di mana sering melahirkan orang-orang stres, depresi atau terputus harapan hidupnya. Orang-orang seperti ini potensial terkena penyakit *rabue* yaitu suka *pugah haba sikrak sapue*: bicara tak karuan dan tak jelas juntrungannya, atau dalam bahasa Jawa disebut bicara *ngalor-ngidul*.

Jika pascadamai banyak orang Aceh stres, depresi atau gila, berarti banyak orang Aceh yang sudah *rabue*? Tak ada hasil penelitian tentang kesimpulan begini yang bisa kita rujuk. Hanya saja, kita bisa menandainya, bahwa orang *rabue* itu bicara tak henti, dari satu topik ke topik lainnya, sering loncat tak karuan, sementara si pembicara sering tak tahu apa yang sudah diucapkannya. “*Jeh, ka rabue dipugah haba, ka sikrak sapue,*” begitu sering omelan orang terhadap orang yang sudah *pugah haba sikrak sapue*. Orang seperti ini

positif dan layak disebut gila.

Nah, jika batasannya seperti itu berarti parajurkam (juru kampanye) saat pemilu atau pejabat saat berbicara dalam suatu kesempatan sudah bisa dibilang *rabue*? Tidak juga, karena untuk bisa dikatakan *rabue* sangat tergantung isi pembicaraan. Jika pembicaraannya didengar masyarakat dan bermanfaat, berarti namanya pendidikan politik. Tetapi, jika pembicaraan sudah 'merembes' ke sana kemari, dan si pembicara sendiri tak tahu lagi fokus pembicaraannya, tak tahu kapan harus berhenti, itu sudah bisa disebut *rabue*. Makanya, zaman sekarang sulit sekali menemukan sebuah kampanye yang berisi pesan politik, mencerahkan atau suatu pendidikan politik, sebab yang banyak dipraktikkan adalah *haba broh putoh* atau *rabue*. Karena itu, mereka sering dituduh mengidap penyakit sosial akut.

Satu lagi ciri dari orang *rabue* ini adalah omongannya tak bisa dipegang. Sebab, orang *rabue* ketika berbicara sama sekali tidak memperhitungkan efek sampingnya atau imbas yang muncul, serta akibat yang diterima. Mereka sama sekali tak ingat apa yang sudah diucapkannya.

Para pejabat *kan* sering mengatakan sesuatu, dan selepas itu jadi lupa yang sudah diucapkan. Dengar saja ketika para pejabat diwawancarai oleh TV, selalu saja ada bahan dan janji yang diucapkan. Meski kita tahu itu cuma buat konsumsi publik. Padahal seperti kita tahu rakyat tak pernah kenyang begitu mendengar omongan dan janji pejabat. Karena yang disebut konsumsi biasanya menyangkut urusan di atas puser (*asoe pruet*) atau di atas dada, yaitu *umpuen takue* (UT). Makanya, Nek Tu kita sering berpesan, 'jangan pernah percaya omongan pejabat, karena mereka 'penipu' kelas wahid'.

Dengar juga setiap wartawan menyodorkan pertanyaan untuk pejabat tentang suatu masalah, pasti jawabnya, "oh itu... kita sudah kirim tim untuk menangannya, dan akan diselesaikan segera." Tetapi kata 'segera' bisa juga berarti lama, sampai bertahun-tahun. Sebab, banyak masyarakat yang mengadu masalah jalan rusak, jembatan rusak, drainase sumbat, tetapi tak pernah diperbaiki, meski tim sudah dikirim. Masyarakat sendiri tahu, kalau tim yang dikirim itu tak pernah sampai, seperti mirip sebuah surat yang tak jelas alamat. (HA 31.07.08)

BRR

KANTOR yang beralamat di Jl Mohd Thaher No 20 Lueng Bata kembali bikin berita. Tak ada angin, tak ada hujan, BRR mendukung kongres PWI XXII yang kebetulan berlangsung di Aceh. Dukungan itu, bisa saja tak hanya berbentuk 'pemberian dana' yang bisa jadi menembus angka miliaran rupiah, melainkan juga dalam paket yang dikemas *Tsunami Tour ala BRR*. Cibiran pun mengalir, bahwa langkah tersebut merupakan upaya menutupi kebobrokan kinerja BRR dengan menampilkan hal yang bagus-bagus kepada para peserta kongres. Akibatnya, Harian Aceh langsung menulis tajam: *som gasien peulumah kaya*.

Tak hanya itu, mantan punggawa BRR juga *ngamuk* dan berantam sesama. Perdebatan mereka terbaca oleh orang di luar rumah aib (istilah ini saya kutip dari seorang kawan saat menyebut BRR), karena dikirim ke semua email. Kita jadi tahu bahwa sesama pekerja BRR sudah saling *meudawa-meudawi* gara-gara sebuah rilis yang berisi dukungan. E-mail Harian Aceh penuh dengan perkara *dakwa-dakwi* tersebut. Padahal, perkaranya sepele saja, soal dukungan BRR kepada kongres PWI.

Rilis BRR yang berisi dukungan tersebut diprotes secara halus oleh Yuswardi, yang setahu saya juga bekerja di bagian komunikasi BRR (sekarang saya tidak tahu apakah masih bekerja atau tidak). "Mau nanya nih, berapa dana korban tsunami yang digelontorkan untuk acara dukung-mendukung ini? Apa perlu kami bikin rilis wartawan dukung BRR, biar impas," ujar Yuswardi memulai protesnya, sambil tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Fakhurradzie, orang yang dipercayakan mengolah rilis BRR.

Saya tidak mau berprasangka, tetapi jika pertanyaan Yuswardi benar, dan ada dana jatah korban tsunami 'disisihkan' untuk menyukseskan kongres PWI, berarti BRR sudah keterlaluan. Sebab,

BRR hanya mau tampilan luarnya saja bagus, sementara korban tsunami *bah meu-apak*. Kongres PWI dijadikan moment untuk membersihkan citra BRR yang jatuh di mata para korban tsunami. Dengan mendukung kongres—biasanya diikuti dengan dukungan dana—BRR berharap para wartawan yang tergabung dalam PWI akan menulis yang baik-baik saja tentang kinerja BRR. “Tulislah yang baik-baik saja, karena kami akan membayar anda,” begitu kira-kira slogannya.

Lain soal jika menyangkut perkara korban tsunami, BRR sangat tidak responsif. BRR yang punya visi mewujudkan masyarakat Aceh dan Nias yang amanah, bermartabat, sejahtera dan demokrasi, tak begitu peduli, termasuk permintaan seorang Gubernur dan Ketua DPRA yang meminta agar BRR membayar jatah dana rehab rumah seperti yang dijanjikan yaitu Rp25 juta. Namun, BRR tetap pada sikapnya, seperti bunyi pepatah: *anjing menggonggong kapilah tetap berlalu*. Jatah biaya rehab rumah korban tsunami dari Rp25 juta menipis dan meletus “nol”-nya sehingga menjadi Rp2,5 juta saja.

Karena perkara begitulah, seorang pekerja BRR akhirnya protes kepada rekannya yang dulunya satu korps. Lalu, tak mau kalah, Radzie yang diberi tugas membuat rilis-rilis BRR juga merasa tak nyaman dengan protes Yuswardi, dan lalu membalas yang tak kalah kerasnya: “Alah hai...Ikah Yus, lagee hana pernah ka kerja di BRR...” balas Radzie. Ketika para murid ini bertengkar, ‘guru’ yang sedang bertapa terpaksa turun tangan dan menghentikan pertengkaran sesama muridnya. “Radzie dan Yuswardi... bek ka meukap sabe keudroe-droe gara-gara rilis nyoe saboh,” minta Nurdin Hasan, yang setahu saya juga bekerja di BRR dan lebih senior (dari segi umur) dengan kedua orang yang sedang bertengkar ini. “Omen, Abu Nurdin ka geubela korps. Peu na sihat...?” timpal Yuswardi tak mau kalah. Mudah-mudahan dengan tulisan ini, inbox email Harian Aceh tak lagi penuh dengan dakwa-dakwi tersebut. Karena, mereka yang *meudawa* ini pasti sedang minum kopi di Solong dan saling tertawa. Sangat keras. (HA 29.07.08)

Aceh

ACEH, sebuah nama yang ucapannya cukup singkat bagi lidah kita. Tetapi, meskipun singkat, Aceh sebuah kompleksitas masalah dan juga sebuah pengecualian, dalam hampir berbagai hal. Saat masa penjajahan, ketika daerah lain bertekuk lutut di hadapan Belanda, Aceh masih mengobarkan perlawanan, dan masih sempat membantu saudara-saudaranya di daerah lain di Indonesia. Aceh juga penyumbang pesawat terbang agar pemimpin republik mampu menembus blokade Belanda. Apa yang dilakukan Aceh saat itu, bisa jadi tak mampu dilakukan oleh daerah lain. Jelas, Aceh adalah pengecualian.

Ketika kata tsunami tak pernah terucap di mulut kita, karena seperti tak pernah terdengar di Indonesia, Acehlah yang membuat setiap mulut di negeri ini tak henti-hentinya menyebut kata tsunami. Saat bagian lain dari negeri ini tak pernah tahu bagaimana dahsyatnya air tsunami, orang Aceh bisa merasakannya, bahkan sangat dekat. Saat masyarakat di bagian negeri ini hampir tak mampu berucap apa-apa ketika TV menyiarkan hasil rekaman amatir betapa dahsyatnya tsunami, orang Aceh masih bisa berjuang menyelamatkan diri sambil menyebut-nyebut nama Tuhan. Kenapa bisa terjadi? Karena Aceh adalah pengecualian.

Ketika daerah lain belum mengenal calon independen, Pilkada (pemilihan kepala daerah) di Aceh sudah dibolehkan hadirnya calon independen. Malah, seperti kita tahu, suksesnya Pilkada Aceh dengan hadirnya calon independen, ‘memaksa’ negeri ini merevisi kembali UU No.32/2004 yang akan membolehkan adanya calon independen. Ketika di tempat lain belum dikenal partai lokal, maka pada pemilu 2009 nanti di Aceh, partai lokal dan nasional akan saling sikut-sikutan memperebutkan suara. Kenapa bisa terjadi? Karena Aceh adalah pengecualian.

Benarkah Aceh sebuah pengecualian dan karena itu istimewa? Susah juga menjawabnya. Yang jelas, meskipun Aceh sudah diberikan kewenangan mengurus rumah tangga sendiri dalam bentuk *self government*, tetapi banyak hal yang masih ditahan-tahan Jakarta. Namun, itulah istimewanya Aceh.

Ada lagi contoh Aceh sangat istimewa. Jika dulu ketika darurat militer diberlakukan di Timor Timur dan di Maluku, di kedua daerah tersebut sama sekali tidak diberlakukan KTP yang berbeda dengan KTP nasional. Tetapi apa yang terjadi di Aceh? Saat status Darurat Militer diterapkan, masyarakat Aceh 'diwajibkan' memiliki KTP Merah Putih yang menurut orang Aceh ukurannya "*ubee bluet*". Kebijakan KTP Merah Putih diberlakukan untuk menguji jiwa nasionalisme orang Aceh. Padahal, soal yang satu ini (nasionalisme), orang Aceh sama sekali tak perlu diuji. Jika di tempat lain, bisa jadi, penduduknya tak pernah diminta mengucapkan ikrar setia kepada NKRI, tetapi di Aceh, ikrar setia NKRI adalah ucapan wajib.

Dan hari ini (Senin, 28/07/08), bisa jadi pertama dalam sejarah, kongres PWI tingkat nasional dibuka oleh seorang Gubernur, dan hal itu terjadi di Aceh. Padahal, kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebelumnya selalu dibuka oleh seorang presiden. Lalu, kita bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Aceh adalah pengecualian. Bukankah hal itu dapat dibaca, bahwa Aceh istimewa dalam segala hal, atau bisa juga karena Aceh sudah 'diperlakukan' sebagai pemerintahan sendiri, dan punya otoritas penuh.

Aceh adalah sebuah pengecualian. Saya merasakannya sendiri ketika tanpa sengaja melewati bundaran Simpang Lima Banda Aceh. Di sebuah sudut menuju arah Peunayong, saya melihat sebuah papan reklame ukuran besar yang isinya (kira-kira): "Selamat Datang Presiden Republik Indonesia untuk membuka Kongres PWI..." dan masih dipajang sampai tulisan ini ditulis. Bukankah itu bentuk pembohongan publik? Sebuah pengkhianatan pada kata yang dipertontonkan di muka umum. Karena seperti kita tahu, presiden tidak punya agenda untuk membuka Kongres PWI di Aceh. (HA 28.07.08)

Gol-Put

KALAU tulisan golput dipecah-pecah, akan jadi dua buah kata: gol dan put. Gol atau kata dasarnya *goal* (bahasa Inggris) berarti gawang. Sementara *put* (bahasa Inggris) artinya menaruh, menempatkan, menanam, dll. Gol menunjukkan bola masuk ke dalam gawang dalam sepak bola, dan *put*—kalau boleh saya jelaskan asal-asal—berarti mengambil bola yang sudah masuk gawang dan meletakkan kembali pada titik putih di tengah lapangan. Tujuannya agar permainan bisa dilanjutkan.

Dalam politik (khusus di Indonesia), istilah golput merupakan akronim dari Golongan Putih yang berarti sekelompok orang yang memilih tidak ikut memilih. Mereka bukan tidak memiliki pilihan, melainkan mereka punya pilihan yaitu tidak memilih. Tidak memilih, itulah pilihan mereka. Mereka tidak ikut memilih karena punya alasan yang bermacam-macam: muak sama politisi atau partai politik, kecewa, tidak ada partai yang layak dipilih, atau tak ada partai yang mampu memberikan harapan untuknya, atau karena semua partai busuk. Tak tahu harus memilih partai yang mana.

Diakui atau tidak, dalam Pilkada di Indonesia, golput selalu menang (meski tidak menang mutlak). Malah, ancaman golput pada Pemilu 2009 diperkirakan mencapai 20 persen. Jumlah golput saat Pilpres 2004 lalu (termasuk suara yang rusak) putaran pertama sekitar 24,60 persen. Jumlah ini bertambah menjadi 26,31 persen pada putaran kedua. Catatan Kompas terhadap Pilkada di Indonesia menunjukkan kalau Golput selalu jadi pemenang. Pilkada Banten, jumlah golput mencapai 39,17 persen, Pilkada DKI Jakarta (34,59 persen), Pilkada Jawa Barat (32,7 persen), Pilkada Jawa Tengah (41,5 persen), dan prediksi Litbang Kompas pada Pilkada Jatim, jumlah golput sekitar 39,2 persen. Dari 29 juta lebih pemilih, berarti sekitar 11 juta sekian tidak menggunakan hak pilihnya.

Sementara jumlah golput atau yang tidak memilih di Aceh saat Pilkada 2006 lalu sekitar 17 persen. Angka ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan Pilkada-pilkada di tempat lain. Kita bisa mengatakan, pemimpin yang terpilih di Aceh lebih *legitimite* dibandingkan dengan pemimpin hasil Pilkada di tempat lain.

Tapi jangan berharap partisipasi politik rakyat Aceh pada Pemilu 2009 nanti akan meningkat. Sebab, di sini budaya malas ke TPS masih tinggi. Apalagi, cukup lama rakyat Aceh dikecewakan oleh orang-orang atau partai politik yang pernah dipilihnya. Pengurus partai hanya manis dan baik hati saat kampanye saja. Ketika sudah berkuasa, tabiat aslinya baru kelihatan. Bagi yang mengeluarkan modal banyak dalam kampanye, pada tahun-tahun pertama pasti berusaha mengembalikan modal tersebut. Selebihnya, karena terlalu asyik menjadi lupa diri, dan sampai akhir jabatannya bergelimang dengan perilaku korup.

Karenanya, kepada rakyat Aceh, mulai sekarang mempelajari dulu semua partai politik yang bakal mengail suara di Aceh. Teliti satu persatu partai tersebut, baik partai lokal maupun partai nasional, dan pelajari program politik yang mereka tawarkan untuk rakyat. Sebab, jika langsung menjatuhkan pilihan sejak sekarang, kita takutkan anda salah dalam menentukan pilihan. Jika setelah anda mempelajari secara teliti, dan sudah sangat yakin bahwa tak ada partai yang layak dipilih, jangan paksakan diri untuk memilih. Karena bisa jadi, seperti sudah pernah kita dengar, pemilu bukan pesta kita, tetapi pesta mereka yang gila sebuah kursi.

Jadi, ketika setelah mempelajari partai-partai tersebut, seperti track-record pengurus dan program politik, anda tidak punya pilihan jangan lantas bersedih. Sebab, tak ikut pemilu juga tak berbeda dengan anda ikut pemilu, jika orang atau partai yang anda pilih tidak memberi manfaat untuk anda. Karena, jika tetap memilih berarti anda sudah mengantarkan orang-orang atau partai-partai berkuasa untuk menyengsarakan anda. Saya tak mengajak anda untuk golput, melainkan meminta anda mempelajari dulu secara baik-baik, karena siapa tahu, ada partai yang buruknya sedikit dari yang buruk-buruk. Jadi, jangan asal *put*, sebab ada permainan yang tak perlu dilanjutkan. (HA 26.07.08)

BAGIAN KEDUA POLITEK PUNGO

Kursi

“KATULEH tentang kursi sigo hai,” ujar seorang kawan, ketika saya kehilangan judul untuk menulis pojok. Ya...saya sering tidak memiliki judul untuk menulis pojok, terutama saat-saat genting, ketika *deadline* tinggal sebentar lagi. Jika sudah begitu, saya harus putar-putar di kantor antara tempat kerja redaktur dengan layouter. Sering juga harus turun ke bawah melihat mobil yang melintas di jalan, agar muncul judul. Tidak punya judul atau kehilangan judul yang lupa dicatat cukup menyakitkan.

Lalu, saya pikir-pikir, menarik juga menulis tentang kursi. Apalagi, sekarang *kan* lagi musim kampanye (tertutup). Di mana kebaikan suatu partai politik, politisi atau pengurus sebuah parpol, bukan kebaikan yang berangkat dari hati yang bersih: tidak ikhlas. Sebab, saat menjelang pemilu atau pada masa-masa kampanye (tertutup) seperti ini, sangat sulit menemui orang yang benar-benar ikhlas. Semua pemberian selalu mengharapkan sebuah kompensasi berupa suara. Karena, semakin besar suara yang bisa dikumpulkan, semakin mudah meraih sebuah kursi.

Zaman sekarang, jadi anggota dewan (saya ragu menyebutnya wakil rakyat) punya kebanggaan tersendiri. Status sosial langsung berubah, karena sudah jadi pembawa aspirasi rakyat. Begitu jadi anggota dewan, rakyat bisa dijual, dipolitisir, dikibulin, diberi harapan, dan dimanfaatkan, yang penting menguntungkan. Aspirasi rakyat yang mendukung kekuasaannya, akan diperjuangkan. Tetapi, tak sedikit juga yang tak *dipakoe*, karena mengancam kursinya.

Kursi, bagaimanapun akan dipertahankan, sebab tak hanya empuk dan nikmat diduduki, melainkan juga memuluskan semua keinginan dan harapan, termasuk mengatur soal distribusi dana untuk pembangunan daerah: masalah *wuek tumpok* antara eksekutif dan legislatif (dengar-dengar banyak anggota dewan jadi calo proyek). Tugas lainnya ya mengontrol jalannya pemerintahan.

Sedikit saja salah eksekutif pasti dikritik, terutama kepala-kepala dinas. Jadi, kritik urusan dewan, meski tak jarang juga kritik itu karena perkara *wuek tumpok* dan sharing anggaran yang tidak lancar, seperti tidak lancarnya air PDAM selama ini.

Tawaran nikmat seperti itu yang membuat orang berlomba-lomba mendaftarkan diri sebagai caleg (calon legislatif). Kursi, akhirnya jadi rebutan. Untuk mendapatkan kursi, semua cara akan dilakukan, termasuk yang tidak halal sekalipun. Jangan tanya soal berbohong, karena untuk menjadi anggota dewan juga harus pandai berbohong. Sebab, jika lurus-lurus saja (*teupat that*), tak usah jadi anggota dewan, karena bakal dipeunquet oleh anggota dewan lainnya.

Tapi, yang namanya kursi tetap menarik. Apalagi, jumlah kursi untuk jadi anggota DPRA Aceh pada Pemilu 2009 ini diperkirakan berjumlah 69 kursi. Jumlah tersebut akan diperebutkan oleh 40 partai peserta pemilu di Aceh (lokal dan nasional). Agar mendapatkan kursi yang banyak, mereka pasti akan menjual isu-isu yang membuat rakyat *teu-taho-taho gante*, saling perang spanduk dengan bahasa-bahasa *cet langet*. Bila perlu dengan menjagal kawan seperjuangan. Kursi tetap nomor satu, sementara pertemanan urusan belakangan. Yang penting mendapatkan kursi dulu, perkara teman belakangan. “*Nyan perkara putoh mareh, han kubloh lon keunan*,” ucap kawan saya yang kebetulan berniat tak mencoblos saat pemilu nanti.

Membayangkan pertarungan saat pemilu nanti, saya jadi ingat saat minum-minum kopi di Solong, Ulee Kareng. Kebetulan ada seorang kawan datang belakangan, dan sudah kehabisan kursi untuk duduk. Sementara kawan-kawannya yang duluan datang sebagian memang pengurus partai, sudah punya tempat duduk. “*Gohlom pemilu ka hansep kursi*,” ujarnya. Kami yang sedang asyik ngobrol mau tak mau harus tertawa. “*Kiban cara dilee, kursi-kursi bak warung kopi pih han meurumpok*,” lanjutnya lagi. Hom hai. (HA 25.07.08)

Senjata

SAAT awal-awal tsunami dan damai diteken, di mobil-mobil NGO Asing kita sering melihat gambar senjata yang disilang. Maknanya, bisa macam-macam: tak boleh bawa senjata, tak boleh ditembak, orang-orang bersenjata tak boleh mendekat, tak boleh yang berbau kekerasan. Saat itu, sudah sama maklum bahwa senjata bukan lagi tanda damai.

Senjata, dimana pun adalah alat refresi, alat untuk membunuh, menakuti, menciptakan *maop*, dan alat untuk menyakiti. Bagi orang Aceh, senjata adalah musibah, siapapun yang memilikinya. Orang Aceh tidak takut sama TNI/Polri, GAM, Brimob atau orang-orang berseragam. Orang Aceh hanya takut sama senjata mereka. Tidak ada orang Aceh yang takut sama Hansip atau Satpam, karena mereka tak punya senjata.

Dulu, Napoleon Bonaparte, singa dari daratan Eropa mengatakan: *Saya lebih takut sebatang pena daripada seribu senjata (atau pedang)*. Maksudnya, Napoleon lebih takut kepada wartawan ketimbang ribuan serdadu. Soalnya, senjata belum tentu mampu meruntuhkan kekuasaannya, tetapi hasil pena seorang wartawan bisa membuatnya tidak bisa tidur tenang. Tulisan seorang wartawan mampu membuat kekuasaannya jatuh.

Lalu, apa yang terjadi? Napoleon Bonaparte harus mengurangi surat kabar dari 13 media menjadi tinggal empat media saja, dan melarang pers mengkritik kebijakan pemerintah. Tapi, pada praktiknya, Napoleon tak hanya mengekang kebebasan pers dan melakukan sensor media, melainkan dengan segenap kekuasaannya, Napoleon memenjarakan wartawan dan membunuh kurang lebih 70 wartawan dengan penggal kepala di bawah *guillotine*.

Hal yang sama kemudian ikut mengilhami Soeharto, untuk memenjarakan, membredel dan mengontrol pers selama kekuasaannya.

Begitu takutkah Soeharto kepada pers? Nyatanya, Soeharto tak takut pada pers, melainkan pada hilangnya kekuasaan yang sudah meninggikan status sosialnya, keluarganya, dan kroni-kroninya.

Ketakutan pada wartawan ternyata kita temukan lagi di Aceh, ketika statusnya tak lagi darurat. Seperti dilansir Harian Aceh, kemarin (23/07/08), dua oknum TNI menodongkan senjata terhadap empat orang wartawan: Ampelsa (Antara), Jaka Rasyid (Waspada), Baihaqi (Harian Aceh), dan Hotli Simanjuntak (Trans TV). Padahal, seharusnya, kerja todong-menodong bukan zamannya lagi ketika damai bersemi.

“Kejadian ini terjadi karena permasalahan miss-komunikasi antar kedua pihak...” ujar Letkol Wakhyono, Komandan Zeni Tempur 16 Dhika Anoraga. Pernyataan yang sangat enak didengar dan tanpa merasa berdosa. Trus, seperti disampaikan Dandim 0101 Aceh Besar, Letkol Fauzi, pelaku penodongan sudah diamankan.

Hah...*hare gene* masih ada istilah ‘amankan’!? Aneh. Bukankah kata-kata ‘amankan’ atau sejenisnya seperti ‘disekolahkan’, sudah tak cocok lagi zaman sekarang. Kata ‘amankan’, kalau dulu *kan* berarti: dihilangkan. Sementara, disekolahkan berarti dihabisi. Pertanyaan kita, benarkah oknum yang menodong wartawan sudah ‘dihilangkan?’, minimal diberikan sanksi disiplin, biar mereka ingat bahwa senjata bukan tanda damai. Kita tak yakin. (HA 24.07.08)

Wali Nanggroe

KEMARIN (22/07/08), Harian Aceh melansir berita dari Menko Polhukam, bahwa Wali Nanggroe harus di bawah Gubernur. Tak ada kecaman dari Aceh. GAM atau KPA juga diam saja. Mereka sama sekali tak lagi terusik dengan pernyataan provokatif seperti itu. Tapi, lain soal jika pernyataan ini disampaikan beberapa tahun sebelumnya saat Aceh masih dibalut konflik, bakal banyak kecaman muncul dari GAM, sebab tokoh panutan yang sangat dimuliakan mereka (juga orang Aceh) ditempatkan pada posisi yang sangat rendah.

Merendahkan Wali Nanggroe—orang GAM sering menyebutnya Wali Neugara—sama dengan merendahkan perjuangan suci *awak* GAM, menghina ideologi yang dibawa Wali Nanggroe, dan menentang perjuangan Aceh secara keseluruhan. Lalu, kenapa sekarang tak ada kecaman atau *cap* pengkhianat untuk orang-orang yang sudah merendahkan Wali? Apakah Wali sudah ditinggalkan? Apakah *awak* GAM tak lagi peduli sama Wali? Padahal dulunya, *peunutoh* seorang Wali sangatlah sakral dan jadi titah yang mesti dilaksanakan.

Bagi saya, Wali tetaplah Wali. Karena dia telah membuka mata kita. Dia telah mengajarkan kita cara hidup dan bersikap, khususnya terhadap penjajahan. Keteguhan sikapnya layak diberi apresiasi yang cukup tinggi. Maksud saya, tak ada posisi yang pantas untuknya di Aceh, karena kita tak bisa membandingkan pengorbanannya dengan sesuatu apapun. Maaf, saya tak bermaksud menghidupkan kembali ruh perjuangannya, karena kita sudah berdamai. Jadi, pahami tulisan saya pada koridor yang wajar, tak ada embel-embel apapun.

Jika Qanun Wali Nanggroe disetujui, dan posisi Wali Nanggroe di bawah Gubernur, saya ingin bertanya singkat saja: Maukah Wali Nanggroe dibawa pulang ke Aceh? Sulit menjawabnya. Meskipun Wali sangat ingin pulang ke Aceh, tetapi jika posisinya direndahkan,

saya yakin beliau tidak akan mau pulang ke Aceh. (beberapa bulan kemudian, Wali pulang ke Aceh, tetapi tak terkait dengan Qanun Wali Nanggroe, melainkan rindu tanah Aceh, *pen*).

Gubernur Aceh sendiri saya yakin juga tidak sepakat jika posisi Wali di bawah Gubernur. Karena, dulu beberapa hari setelah dipastikan memenangi Pilkada, Irwandi Yusuf pernah mengatakan dirinya ingin membawa pulang Wali. Malah, pondopo (Meuligoe), tempat kediaman resmi Gubernur Aceh akan dijadikan sebagai tempat kediaman Wali nantinya jika pulang ke Aceh.

Jadi, saya membayangkan, posisi Wali pastilah lebih tinggi dari seorang Gubernur, meski nantinya terjadi dualisme kepemimpinan di Aceh. Tapi, problem demikian tak hanya akan terjadi di Aceh, sebab Yogyakarta juga menghadapi persoalan yang sama. Di sana, sedang dibahas posisi Parardhya, sejenis gelar untuk Sultan dan Paku Alam. Kamus Jawa Kuno Indonesia karya PJ Zoetmulder dan SO Robson menyebutkan Parardhya memiliki arti jumlah yang paling tinggi. Parardhya hampir sama dengan Wali Nanggroe di Aceh, sebuah institusi yang perlu ditinggikan.

Kenapa kita tak ingin posisi Wali direndahkan? Karena, orang Aceh pasti masih ingin mendengar titah: *hai aneuk tadong beukong beuteuglong lagee geupula*. (HA 23.07.08)

Berak

SAYA tak begitu heran, kalau mahasiswa protes kenaikan BBM, karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya juga menanggapi biasa saja, jika masyarakat memprotes tidak kebagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), karena itu memang hak yang harus diterima. Lalu, bagaimana kalau ongkos *toh ek* (berak) dinaikkan?

Mau tak mau, saya harus tersenyum kecil dan ingin mendiskusikannya. Pembaca mungkin sudah membaca SMS di HA (21/07/08). Judulnya aneh, "Berak itu mahal." Yang lebih aneh, justru protes si pengirim SMS, "*kenapa ongkos toh ek yang dulunya Rp1.000 sekarang jadi Rp2.000. Apa karena BBM naik, peng toh ek juga naik?*" demikian protesnya kepada pengurus Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Itulah rakyat kecil...lugu, polos dan sering melakukan protes pada hal-hal yang lebih kecil. Sementara orang-orang besar (bukan besar perut), sama sekali tak meributkannya, karena mereka biasanya berak dari satu hotel ke hotel lain. Makan dari satu restoran ke restoran lainnya. Harganya bisa jutaan karena sudah diakumulasikan dalam harga kamar.

Tapi, zaman sekarang mana ada yang gratis. Di kota-kota besar, berak juga tidak gratis. "*Toh iek, tok ek dikira*." Yang gratis malah kentut (buang angin). Namun, meski gratis, jangan coba-coba kentut sembarangan, sebab soal urusan satu ini, pendengar atau penikmat kentut (yang tak sengaja mencium baunya) sangat sensitif, apalagi jika bau yang dikeluarkan lebih menyengat dari bau hewan yang mati membusuk. Belum lagi jika saat kentut, posisi pantat anda tepat di wajah orang, jangan harap dapat terima kasih, karena sudah pasti bakal *keunong tapak*.

Lalu, bisakah kita mengatakan bahwa protes pembaca HA atas kenaikan ongkos berak merupakan cerminan penolakan terhadap praktik bisnis berak yang dipraktekkan pengurus Masjid? "Memang zaman sudah akhir, tempat ibadah pun jadi lahan bisnis," tudingnya

yang mengaku seorang dhuafa dari Lambhuk.

Saya sendiri tidak sepakat juga, jika masalah berak di Masjid dipersoalkan dan lalu dibesar-besarkan (bukan berarti saya setuju berak di Masjid). Saya jadi bertanya, sejak kapan Masjid berubah menjadi tempat orang membuang hajat, dan lalu ada pemberlakuan pengutipan ongkos untuk siapa saja yang buang hajat di Masjid?

Biasanya orang ke Masjid *kan* untuk beribadah, dan sama sekali tak ada niat untuk berak. Meski zaman sekarang lagi *ngetrend* berak di Masjid. Menurut saya, niatnya yang harus benar dulu. Lain soal jika sesampai di Masjid, orang jadi pingin berak. Itu beda, karena kecelakaan, bukan sejak berangkat dari rumah sudah ingin bisa buang hajat di Masjid. Meski pengguna jalan raya sering memanfaatkan Masjid sebagai tempat paling aman dan nyaman untuk buang hajat.

Jadinya, seperti sudah pernah saya tulis di kolom ini, bahwa banyak orang sekarang ke masjid sekedar mau berak. “*Hai, ho kameujak?*” tanya seorang kawan pada kawannya. “*Lon jak u masjid dilee siat,*” jawab sang kawan enteng. Si kawan yang bertanya tadi aneh saja mendengarnya, soalnya, selama dia kenal sama si sang kawan, tak pernah sekalipun ke Masjid. “*Peu buet u Masjid?*” tanyanya karena heran. “*Lon jak toh ek dilee,*” jawab sang kawan. Orang yang mendengar pasti timbul pikiran macam-macam, apa Masjid sudah jadi tempat buang berak? Sejak kapan bisnis tinja berlaku di Masjid?

Trus, yang jadi masalah sekarang apa? Ya...tidak ada masalah memang. Tetapi, jika hanya karena harga berak naik, lalu ada orang protes berarti sudah melegalisasi masjid sebagai tempat berak. Itu perlu hati-hati, sebab sekarang lagi zaman demo. Coba, jika para jamaah yang tak setuju ongkos berak di Masjid naik jadi Rp2.000 dan melakukan demo. Wartawan yang meliput juga akan berfikir aneh, kok masalah buang hajat jadi masalah besar. Apa kata dunia? Belum lagi, jika sampai petugas Masjid protes kenapa orang buang hajat tidak menyiram dengan bersih. Jawaban para pembuang hajat pasti begini: *adak kutoh, na kubayue...!* (HA 22.07.08)

Tujuan

STEPHEN R Covey, penulis buku *7 Habits of Highly Effective People* (Tujuh Kebiasaan Efektif), memberi nasehat begini: Mulailah dengan tujuan akhir! Singkat saja nasehatnya, tapi penuh makna.

Saya jadi bertanya, tujuan kita sekarang apa? Atau kita tak punya tujuan lagi. Dulu, sebelum damai, kita punya tujuan yang sama: merdeka. Sekarang, ketika kita sudah komit tak lagi menuntut merdeka, apa tujuan kita? Bukankah kita sekarang sudah berdamai? Ya, semua orang tahu kita sekarang sudah berdamai, lalu apa?

Tapi, apakah kita benar-benar sudah cukup puas dengan kondisi perdamaian yang kita nikmati ini? Atau jangan-jangan di hati kita masih ada tujuan yang terpendam. Terserahlah, itu memang sudah tabiat manusia, tak hanya kita di Aceh.

Jika memang berdamai, kenapa aksi ‘kriminal’ muncul lagi? Itu yang membuat kita sedih. Sebab, pelaku tak bisa kita bilang OTK (orang tak dikenal), karena bisa jadi ada orang yang mengenalnya. Tapi, karena kita sudah komit dengan damai, pelaku kekerasan harus dilihat sebagai kelompok kriminal. Dan lalu semua orang sepakat, bahwa pelaku aksi kekerasan seperti baru-baru ini di Beutong (penyerangan ke Dayah dan menewaskan beberapa orang) dan tempat-tempat lain adalah kelompok kriminal.

Cuma, masalahnya, adakah aksi kriminal itu berdiri sendiri? Saya tak bermaksud mengatakan bahwa kelompok itu ada komandonya. Ada yang bilang aksi itu semacam ekspresi kekecewaan, karena kecewa terhadap pemerintahan sekarang, kecewa terhadap pimpinan, atau kecewa karena proses reintegrasi yang tersendat-sendat.

Atau, aksi itu murni karena tujuan sudah berbeda, lalu muncul aksi yang berbeda pula. Satu pihak sudah ingin berdamai, sementara ada kelompok sempalan (juga punya pengikut) yang tak menghendaki damai.

Bisa juga, mereka hanya korban atau bagian dari konspirasi besar menggagalkan proses demokrasi di Aceh. Semua orang percaya, bahwa kesuksesan pilkada di Aceh dengan kehadiran calon independen, sudah membuat sistem politik Indonesia berubah, karena semua daerah sekarang sudah berlaku calon independen, sesuai hasil revisi UU No.32/2004. Artinya, proses politik yang berjalan di Aceh membuat daerah lain cemburu dan lalu juga meminta hal yang sama.

Bisa saja dugaan saya salah. Tapi, rasanya cukup beralasan. Dalam sebuah obrolan ringan di warung kopi Solong, seorang tokoh partai lokal mengajukan kesimpulan demikian. Jika pemilu 2009 di Aceh dengan keikutsertaan parlok berlangsung damai, juga akan jadi contoh bagi daerah lain di luar Aceh. Mereka pasti akan meminta hal yang sama. Lalu, undang-undang mesti direvisi. Ketika semua daerah dibolehkan partai lokal, bukankah Indonesia sudah berubah jadi Negara federal? "Tapi kelompok nasionalis tak menerimanya," ujar kawan saya.

Kita tak bisa mereduksi persoalan berupa pertarungan partai lokal dan partai nasional saat Pemilu 2009, melainkan terkait sistem politik Indonesia yang akan berubah jika proses demokrasi di Aceh berlangsung damai.

Makanya, kita jadi bertanya, apakah "bintik-bintik" konflik yang mulai disemai itu bertujuan mengacaukan pemilu di Aceh? Saya mencoba kasih bayangan begitu, tapi jangan salah paham dulu. Kenapa Beutong berdarah justru ketika Pangdam baru dilantik? Apakah ini juga ada hubungannya, saya tak tahu. Dari berita yang saya baca Pangdam IM yang baru berlatar belakang Kopassus. Semoga yang saya baca salah.

"Tak mungkin militer berbuat demikian," celutuk seorang teman menyadarkan lamunan saya. "KSAD *kan* sudah bilang tak ada penambahan pasukan di Aceh?" sambungnya lagi. Mudah-mudahan keyakinan teman saya itu tak salah. Karena kita yakin, meski *wuek tumpok hana sadum* saat damai, semua orang masih berharap damai tetap terpelihara, dan mudah-mudahan permanen.

Namun, terlepas dari argumentasi di atas, saya justru yakin, munculnya persoalan di Aceh karena tujuan yang sudah tak lagi sama. "*Watee di laot sapue pakat, watee troh u darat ka laen keunira* (ketika di laut sama-sama, ketika sampai ke darat sudah lain ceritanya)," kata teman mengutip pepatah Aceh.

Ada juga yang bilang, tujuan yang berubah. Dulu, "*hudep beusare mate beusajan, sikrak gaphan saboh keureunda* (hidup bersama mati bersama, satu kafan satu kerenda)," tapi masalahnya sekarang,

"*saboh timphan hanjuet bagi dua* (satu timphan-makanan khas Aceh-tidak boleh dibagi dua)." Atau "*watee na bagian hanjuet bagi-bagi* (kalau ada bagian tidak boleh dibagi)."

Soalnya, dulu ketika bersakit-sakit, saat tujuan masih sama, kita diajak untuk bermimpi yang sama. "Kita boleh saja tidur di kasur berbeda, tapi yang penting kita bermimpi dengan mimpi yang sama." Anehnya, meski kita sekarang tidur di tempat tidur yang sama, ternyata mimpi kita sudah tak sama. Tujuan kita berbeda. Makanya, banyak orang beraksi dengan cara berbeda. Satu bertekad mengawal damai, yang lainnya justru merusaknya. (HA 19.07.08)

Tujuan 2

LALU, ketika tujuan sudah berbeda, masihkah ada jalan? Atau meskipun kita sudah tidur satu ranjang, tetapi mimpi kita sudah beda, masihkah kita punya harapan? Masihkah kita mampu merajut mimpi bersama lagi atau bisakah kita memulai lagi seperti disampaikan Stephen R Covey, “Mulailah dengan tujuan akhir.”

Saya sama sekali tak mengajak anda memberontak lagi, karena damai ternyata membuat kita lebih leluasa, tak lagi diliputi rasa takut. Begini, saya mau kasih satu bayangan saja, karena kita semua pasti pernah mengalaminya. Dulu, ketika konflik dan GAM sering membuat aksi seperti penghadapan, penembakan, atau menyandera. Tahu apa pernyataan yang keluar dari petinggi seperti Gubernur, Pangdam atau Kapolda? “Itu pelakunya kelompok kriminal, atau itu ulah gerakan pengacau liar,” ucap mereka serentak.

Tetapi, ketika sekarang riak-riak kecil muncul lagi, dan ada sekelompok orang membuat ulah, mengacaukan perdamaian, pihak petinggi, juga melakukan hal sama, “Itu ulah kriminal.” Saya hanya ingin mengatakan satu hal, kekuasaan tak hanya mengubah keadaan si pemangku kekuasaan, melainkan juga mengubah keyakinan yang dulu diyakininya. Orang yang sudah punya kekuasaan, sudah pasti sangat takut kekuasaannya menghilang.

Godaan kesenangan dan kenikmatan lebih menggururkan ketimbang ilusi yang dulu pernah dihayalkan. Saya jadi berpikir, apa yang dulu dilakukan oleh Ibrahim Hasan, Syamsuddin Mahmud atau Abdullah Puteh yang sangat anti perjuangan GAM, pasti lebih didorong untuk merawat dan menjaga kekuasaannya. Mereka, sama sekali tak ingin kekuasaannya menghilang. Tak ada bedanya dengan keadaan sekarang, ketika pemangku kekuasaan beralih tangan.

Lalu, bisakah kita memulai lagi dengan tujuan akhir seperti

disarankan Stephen R Covey, ketika tujuan kita sudah kabur? Jawabannya pasti sulit, meski bukan mustahil harapan itu masih ada. Karena, ada kultur dalam masyarakat kita, *“bahpih tameh sarang-sareng nyang peunteng pateng dilop lam bara.”* Kita boleh punya harapan dan tujuan berbeda, tetapi tujuan utama tak boleh dilupakan, karena itu ada dalam hati kita. (HA 21.07.08)

Ayat

MASIH ingat Salman Rusdhie? Seorang Muslim keturunan India yang menerbitkan *The Satanic Verses* pada tahun 1988. Karena Novelnya, pemimpin Revolusi Iran, Ayatullah Ruhullah Khomeinei mengeluarkan fatwa hukuman mati dan menghalalkan darahnya pada tahun 1989.

Khomeinei bahkan menawarkan hadiah untuk siapa saja yang bisa menangkapnya hidup atau mati dengan jumlah yang cukup banyak.

Yayasan Khordad XV, badan kebudayaan di Iran, menyediakan hadiah 2,8 juta dolar Amerika Serikat (sekitar 25,2 miliar rupiah) bagi kepala Rusdhie. Sementara Yayasan lain, Markas besar untuk Penghormatan bagi Pahlawan Gerakan Islam Dunia, meningkatkan hadiah awal 2004 senilai 100.000 dolar Amerika Serikat (lebih kurang 900 juta rupiah) untuk kematian Rusdhie menjadi 150.000 dolar Amerika Serikat (kira-kira 1,3 miliar rupiah).

Umat Islam seluruh dunia mengutuk Rusdhie. Respon yang sama juga terjadi atas peredaran film *Fitna* karya Geert Wilders. Sampai-sampai Quraish Shihab menerbitkan buku *Ayat-ayat Fitna* untuk melawan tuduhan-tuduhan Geert.

Tapi, jangan heran jika beberapa hari ke depan sampai Pemilu dilaksanakan bakal banyak beredar ayat-ayat, tak hanya di Aceh tapi di tempat lain. Soalnya, ayat-ayat masih muarab untuk dijual dalam kampanye. Jangan berharap yang dijual nantinya *“Ayat-ayat cinta”* melainkan *“ayat-ayat politik”*.

Saya masih ingat tahun 1992 atau 1997, ketika para jurkam Golkar menjual ayat dari satu panggung kampanye ke panggung kampanye yang lain. Bibir para jurkam ini sangat fasih menggunakan ayat-ayat Al Quran dan Hadist Nabi untuk mendulang suara dari rakyat. *“Kupue kapileh jih, nyan kon awak publoe ayat untuk saboh keurusi,”* ujar orang tua-tua di Kampung yang fanatik sama PPP.

Soalnya, dulu di Aceh, orang-orang lebih simpati pada PPP, yang melambangkan partai Islam. Sementara Golkar, dianggap sebagai partai penguasa, yang membuat mereka sengsara. Jika Golkar kalah di suatu kecamatan, operasi militer biasanya lebih ditingkatkan, dan jalan *Gampong* tak akan diperbaiki.

Orang Aceh ada juga yang bilang begini, “*Hadist keu tungkat, ayat keu belanja*.” Pokoknya untuk para jurkam ini, konotasinya jelek. Meskipun mereka fasih membacakan ayat, tapi menurut masyarakat mereka adalah munafik.

Tapi, fenomena adu ayat, pasti akan lebih semarak nanti. Para jurkam pasti mencari ayat-ayat yang cocok untuk nomor urut partainya. Menurut mereka, menggunakan ayat juga salah satu strategi memenangkan pemilu. Momen ini sebenarnya bagus juga, karena para jurkam sudah kembali mau membuka Al Quran, meski tujuannya untuk kekuasaan. Tak perlu heran, memang sekarang lagi zamannya orang menjual ayat. Semua akan dilakukan, yang penting bisa duduk di parlemen.

Tahu Partai Golkar *kan*? Partai ini dulunya sangat kencang menggunakan ayat dalam setiap kampanye.

Biasanya mereka menggunakan Surat Ibrahim ayat 24, “*Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit*.” Para jurkam Golkar menganggap ayat ini diperuntukkan untuk partai Golkar. Artinya, secara agama keberadaan Golkar direstui. Ada saja.

Hadist juga sering digunakan, yaitu “*Khairul umuri au tsatuha* (Sebaik-baik urusan adalah pertengahan).” Tapi sekarang Hadist ini sudah tidak bisa digunakan lagi, karena sekarang jumlah partai sudah sangat banyak. Sementara pada Tahun 1992 dan 1997, jumlah partai hanya tiga, di mana Golkar mendapatkan nomor urut 2. Jadi, dari Hadist ini, para jurkam Golkar meyakini Hadist ini sebagai bentuk justifikasi untuk partainya. (HA 15.07.08)

Ide

LEO Burnett (21 Oktober 1891- 7 Juni 1971) pernah mengatakan, *Ideas alone enable a man to survive and flourish* (hanya dengan sebuah ide atau gagasan saja seseorang bisa hidup bahkan makmur). Ungkapan ini mungkin hanya berlaku di luar negeri bukan di Indonesia. Soalnya, di sini *kan* berkumpul para tukang bajak karya orang, meski HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) sudah disahkan. Tetapi yang namanya bajak tak ada habis-habisnya.

Seperti juga kehidupan, apakah ketika semua orang menjadi kaya, lalu tak ada lagi yang bertugas membajak sawah? Pasti tetap ada orang yang membajak sawah. Mustahil mengharapkan para petani tidak membajak sawah, karena mayoritas penduduk di negeri ini berprofesi sebagai petani. Makanya, di negeri ini sulit sekali mengharapkan sebuah karya tidak dibajak.

Beberapa waktu lalu Harian Aceh memuat berita tentang demo para mahasiswa dan dosen Universitas Malikussaleh (Unimal) yang meminta rektornya mundur, karena diduga melakukan plagiat (bajak) atas karya ilmiah seorang dosen. Para pendemo juga meminta agar gelar Profesor dicopot.

Ya...ide memang sesuatu yang penting, dan sangat vital. Jadi, cukup celaka jika ada orang tega membajak ide orang lain. Mereka-merek produk terkenal yang kita pakai hari ini, semua berangkat dari sebuah ide. Seperti Honda, misalnya. Seichiro Honda, mungkin pernah beberapa kali gagal, dan idenya menciptakan sepeda motor seperti yang dikendarai manusia dicemooh oleh orang-orang pada waktu itu. Tetapi, ide tetaplah ide, dan dengannya orang bisa hidup. Sampai suatu saat Honda pernah berkata: orang hanya mengingat kesuksesan saya, tetapi tak pernah menyinggung tentang kegagalan-kegagalan saya.

Anda pasti tahu Bill Gates, pencetus ide Microsoft. Idenya tak

hanya memudahkan kerja-kerja manusia sekarang ini, melainkan mendatangkan milyaran dolar bagi penciptanya dari produk software tersebut. Tapi, bisa jadi, pada awalnya ide Bill Gates hanya dianggap sebagai hayalan belaka. Tetapi, apakah sekarang idenya hanya bualan belaka?

Atau mungkin anda tahu dengan merek Aqua, air putih kemasan, yang sangat terkenal. Tapi, apakah anda tahu, bahwa ketika pencetusnya Tirta Utomo sempat ditertawakan orang ketika melontarkan ide mengemas air putih dalam botol. Tetapi, apa yang terjadi sekarang? Ide mengemas air dalam botol banyak ditiru oleh perusahaan lain.

Sekarang masalah curi ide, bukan hal baru lagi. Malah, sinetron *Suami-suami Takut Isteri* di Trans TV pada episode Kamis (10/07/08) sampai harus menyitir tentang kasus curi ide. Saat Kang Dadang sedang menulis cerita novel, datang Pak RT dan Karyo. "Kang dadang lagi tulis apa?" tanya pak RT. "Lagi menulis novel, pak RT," jawab kang Dadang. Tak menunggu lama, kedua orang lain langsung lari pulang ke rumah, dan menulis ide kang Dadang tentang "Petualangan seorang anak mencari kasih ibunya."

Di negeri kita, sebuah film, kaset, atau produk, duluan beredar di masyarakat sebelum diluncurkan. Orang atau pembajak tak pernah merasa berdosa sudah mencuri atau menikmati hasil dari ide orang lain. Kita jadi bertanya-tanya, apakah ini tabiat atau memang manusia di sini cenderung hidup dari ide orang lain? Atau inilah model pendidikan kita. Semua orang *kan* tahu, bahwa soal Ujian Nasional (UN), sering sudah duluan bocor meski ujian belum dilaksanakan. Apakah ini ada pengaruhnya juga. Saya tidak tahu. Yang jelas, banyak juga lembaga yang mencuri ide lembaga lain ketika menggarap sebuah proyek proposal. Jadi, hati-hatilah, jangan pernah kasih tahu ide ke orang lain, karena sudah pasti ide itu akan dibajak. (HA 12.07.08)

Palee

DI Aceh, khususnya di Pidie, *palee* (palu) sering digunakan para ibu-ibu untuk *peh kerupuk mulieng*. Padahal *palee* sebenarnya digunakan untuk *peh labang* (paku) atau untuk mengetok benda-benda keras. Tapi, banyak orang di Aceh was-was atau harap-harap cemas saat menunggu *khok palee* beberapa waktu lalu. Seolah-olah *khok palee* pertanda harapan hidup semakin terbuka. Meski setelah *khok palee*, kebahagiaan tak kunjung juga tiba.

Meski ada yang bilang, hidup sekarang jadi tak bermakna ketika tak punya harapan. Semua orang berhak punya harapan, termasuk harapan kecil sekalipun. Karena orang-orang yang punya harapan adalah orang-orang yang menatap hidup dengan optimis. Mereka punya sesuatu yang diharapkan. Meski, seringkali harapan itu tak seindah kenyataan. Tapi, punya harapan saja sudah lebih dari cukup.

Palee, atau palu, digunakan untuk memperbaiki sesuatu. Orang atau *utoh* (tukang), pasti sangat akrab dengan *palee*. Dengan *palee*, mereka membuat rumah jadi kuat. Dengan *palee* pula, rumah yang tadinya tak bagus, jadi sempurna, meski sekarang banyak *utoh* tak lagi akrab dengan palu, kecuali untuk beberapa bagian saja.

Kawan saya bilang begini, bahwa *palee jameun* tidak ekonomis? *Palee musem* damai yang ekonomis. Benarkah demikian? Dulu, katanya, *palee* Hakim Bow, meski tidak ekonomis tetapi berorientasi pada keadilan dan kebenaran atas keyakinan. Jika ada yang pernah menonton film Hakim Bow, pasti ingat bagaimana berwibawanya sebuah *palee*, karena tak sembarang diketuk. *Palee* hakim Bow dikhoek ketika yakin putusan itu benar, adil walaupun pahit.

Sementara banyak *palee* sekarang baru di *khok* ketika nilai ekonomis sudah nampak. Untuk dewan ketika perkara *wuek tumpok* (bagi jatah) semakin jelas. Artinya *khok palee* bukan lagi untuk membuat sesuatu menjadi *lipeh* (tipis), karena *khok palee* bagi

anggota dewan bagaimana harus bermakna semakin tebal anggaran yang bisa masuk ke kantong mereka. Para hakim sekarang biasanya sering *khok palee* ketika *share* (pembagian) atau salah satu pihak membayar dengan harga yang lebih tinggi (kasus hukum artis bisa menjelaskan fenomena ini). *Khok palee* baru dilakukan, ketika harga satu ayunan dihargai dengan nilai tinggi. Bagi kita kedengarannya memang aneh, ketika nilai ayunan ikut diperhitungkan.

Tapi tahukah kita, ada satu kelompok yang sama sekali tak memperdulikan lagi berapa harga satu ayunan untuk *khok palee*, yaitu para pengrajin emping. *Ureung peh kerupuk. Ureung teu-upah peh* (pekerja) *laen upah, laen keunira*. Ada yang perhitungannya berdasarkan satu bambu, ada si *aree* berapa ongkosnya. Harganya beda-beda. Sementara jika pemilik *aneuk mulieng geupeh keu droe geuh*, *cost* produksi sering bisa lebih dihemat.

Pertanyaan kita, ketika anggota DPR melakukan *khok palee*, mereka umumnya berlagak sebagai apa? Apakah sebagai buruh, pemilik modal atau penikmat laba, yang mendapatkan *fee* setiap ayunannya, dan bunyi. Bunyi *khok palee* sekali berapa harganya. Ataupun, dalam *khok palee* berlaku juga hukum agen karena ada *deal-deal* di belakang meja, di mana rakyat tak perlu tahu, dan tak mungkin diberitahu. *Kan* ada yang bilang begini, “Oke, kita sepakat dengan anggaran sejumlah sekian, tetapi berapa anggaran yang *dishare* untuk kami sebagai upah ayunan palu?” (HA 11.07.08)

Noek

TAHUKAH anda apa itu *noek*? *Noek* biasa dilabelkan pada dua tempat, yaitu pada manusia dan pada *keubue* (kerbau). Pada manusia diberi label karena *pungo* dan pada *Keubue* karena *raya* (kerbau khusus), yaitu *keubue noek*. Manusia yang memiliki *keubue noek* merasa beruntung secara ekonomis, karena bisa *dipake* untuk *tarek kaye* di rimba Tuhan, meski ada juga yang disewakan. Jika punya anak gadis yang mau dikawinkan, *keubue noek* bisa disembelih. Saat *meugang*, *keubue noek* juga dapat menghasilkan banyak duit karena menghasilkan daging yang banyak. Pokoknya, yang punya *keubue noek* tidak akan rugi, meski harus *peu-umpuen tiep uroe*. Tapi, ada juga yang *peu-murot* di *gle*.

Sementara jika ada *ureung teu-noek*, yang tidak perlu repot adalah pihak Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Meski sebenarnya, kehadiran *ureung pungo*, agar RSJ bisa berfungsi. Sebab dengan berfungsinya RSJ, karyawan yang bekerja di sana tidak ambil gaji buta. Tapi, biasanya *ureung pungo* yang *teu-noek* (dipasung) pasti tidak ada di rumah sakit. *Ureung pungo teu-noek* pasti di rumah, dan dilakukan oleh keluarga *ureung pungo*.

Namun, tidak semua *ureung pungo* langsung *teu-noek* (dipasung). Karena *noek* adalah solusi terakhir, ketika keluarga sudah merasa *ureung pungo* itu mendatangkan aib untuk keluarga, seperti *kuwat seumeupoh* (suka membunuh), *lhoen* (telanjang) *bak taloe* jalan, dan *peukaru ureung Inoeng gob* (mengganggu anak gadis atau isteri orang). Perilaku-perilaku ini sebenarnya ditemui dalam tradisi primitif dan kaum barbar.

Rupanya, menurut kawan saya, Belanda dulu ketika masih menjajah negeri kita juga menerapkan hukuman *noek*. Karena, dulu Belanda *kan* suka bilang untuk orang Aceh dengan istilah *Aceh pungo*, Aceh Moorden! Meskipun bagi orang Aceh, perilaku

pungo lebih karena *peu-pungo-pungo droe*. *Pungo* bagi orang Aceh hanya akal-akalan saja. Karena meski *pungo*, orang Aceh juga masih sempat menyerang tangsi atau barak militer Belanda.

Dalam memaknai atau menanggapi kata *pungo*, sikap orang Aceh juga beragam. Jika dibilang, “*Kah lagee ureung pungo*.” Orang Aceh pasti *bungeh* (tersinggung). Tapi, ketika ada yang bilang, “*Kah lagee Aceh pungo*.” Itu pasti orang Aceh sangat senang.

Karena di Aceh ada tabiat aneh. Misalnya, jika ada orang berselisih pendapat atau tidak sukasama orang lain, pasti menantang. “*Kah padum pungo?*” tantangnya. “*Munyoe kah pungo sireutoh* (seratus), *kee siribe* (seribu) *pungo*.” Jadi, di Aceh *pungo* itu sudah seperti orang *peutheun* (mempertahankan) gengsi di tempat lelang, siapa yang paling banyak *pungo*, dialah yang paling hebat. Emang, kadar *pungo* bisa ditaksir? Tapi mudah-mudahan *tanyoe bek sampe pungo lah*. (HA 10.07.08)

Para

PERNAHKAH anda mendengar kata *para* sekarang ini? Bagi masyarakat kota, bisa jadi hampir tak pernah lagi mendengar kata tersebut. Kata *para* bisa jadi sudah terkikis oleh modernisasi, sehingga jarang disebutkan atau diucapkan. Tapi, kata tersebut sampai sekarang masih digunakan di *Gampong-gampong*.

Kata *para* punya sinonim aneh, *sandeng*. Orang yang masih mampu mengucapkan *sandeng* atau *para*, langsung dilakabkan dengan *ureung gampong*. Iya sih, karena di *Gampong-gampong*, kata itu masih populer.

Kawan saya bilang, *para* atau *sandeng* adalah tempat tinggalnya *pa'e* (tokek). Di *coeng para* di *ateuh sandeng*. *Ureung Syik* kita dulu sering menaruh Al Quran di *ateuh para* atau di *ateuh sandeng*. Sampai-sampai jika ada orang malas mengaji dan bodoh, disindir dengan istilah: “*Al ilmu fil kitab, al kitab alas-sandeng, qaraktuhu tikoh teng*.” Artinya, ada Al Quran, tapi jarang dibaca.

Para, kata kawan saya tadi, khusus hanya ada di *Rumoh Aceh*, tempat meletakkan barang-barang *jamuen*, atau biji-bijian. Ada juga yang menyimpan azimat, *boh labu tanoh* atau *saduep*. Tapi, katanya, *para* identik dengan *dapu*. Sementara *dapu* identik dengan *ureung inoeng*, tapi bukan *dapu ureung inoeng* yang konotasinya negatif.

Yang tahu seluk-beluk sejak dari *dapu* sampai *para* dan *ateuh sandeng* adalah perempuan. Sebab, perempuanlah yang lebih interaksinya lebih lama di dapur. Karena itu, perempuan punya tempat mulia, khususnya bagi masyarakat Aceh.

Ada kabar menggembirakan sebenarnya ketika kaum perempuan mendirikan Partai Aliansi Perempuan Peduli Aceh (PARA), dan ingin keluar dari *dapu* menuju ruang lain, tapi, ternyata KIP menghambatnya. Masalahnya, bisakah perempuan menuju ruang lain tanpa meninggalkan dapur? Agak sulit.

Kawan saya juga bilang, saat perang dulunya, banyak pejuang Aceh menyimpan pedang keramat di *ateuh sandeng*. Karena, *sandeng* atau *para* adalah tempat khusus, tempat yang dimuliakan, dan tak bisa dijangkau oleh anak-anak. “Secara tipologi *rumoh Aceh* tidak bisa dimasuki oleh pencuri secara sembarangan, kecuali *tikoh* (tikus) dan *pa’e* (tokek),” ujarnya.

Itulah kelebihan *Rumoh Aceh*. Jika pun ada pencuri ingin masuk ke dalam *Rumoh Aceh*, dia harus melalui banyak ruang seperti *seuramoe keu*, *seuramoe inoeng*, *rambat*, *ulee gajah*, dan *dapu*. Makanya, tak heran ketika kaum perempuan ingin berpolitik, banyak halangan di depannya. Tapi kaum perempuan tak perlu sedih, karena seperti halnya *para* di *rumoh Aceh* yang sangat dimuliakan, tanpa berpolitik pun perempuan tetap punya kedudukannya mulia. (HA 09.07.08)

Aneh

ANEH! Itulah kalimat yang mampu keluar dari mulut saya, ketika mendengar sebuah cerita dari seorang teman. Teman saya itu kerja di lembaga yang Gabthat (maaf, ini bukan merujuk pada nama sebuah partai lokal yang tidak lolos verifikasi KIP). Lembaga Gabthat itu namanya BRR. Pasti semua orang sudah tahu kalau disebut BRR, lembaga yang tak pernah lepas dari masalah.

Ceritanya gini, setiap pulang kampung, dia selalu menukar ulang recehan 5 ribuan. Setiap ketemu anak yatim, dia kasih sumbangan, masing-masing Rp 5 ribu. Tindakan ini selalu dia lakukan setiap pulang kampung.

Tapi, kabar tak sedap muncul: “*kiban han dijok, jih kon le peng, di kerja bak NGO kon le peng* (bagaimana gak dikasih, dia kan banyak duit, dia kerja di sebuah NGO, jadi banyak duit),” ujar orang di kampungnya. Kabar itu sampai ke telinganya. Besok-besoknya, setiap pulang kampung, dia tidak lagi memberi sumbangan, kecuali untuk saudara dekatnya.

Tindakan ini juga memunculkan pergunjungan dari orang-orang di kampungnya. “*Jih peng le, tapi handitem bantu aneuk yatim, hantom dibantu keu meunasah, rugoe na awak gampong kerja dengan gaji le* (Dia banyak duit, tapi tidak mau membantu anak yatim, tidak pernah membantu surau. Rugi punya orang kampung yang kerja dengan gaji banyak),” umpat orang kampungnya. Kabar ini, juga sampai ke telinga dia. Dia pun jadi tak enak, dan menjadi malu pulang ke kampung.

Menurutnya, sudah tidak ada lagi hal yang bisa dilakukan. Dia memberi sumbangan salah, tidak memberi sumbang lebih salah. Orang kampungnya tidak pernah objektif memberi penilaian.

Cerita seperti ini, bisa saja banyak. Jika ada pekerja NGO yang memberi sumbangan untuk meunasah atau untuk tempat publik, ada saja yang mempergunjing: “*Pasti peng nyan hase dari dipeungeut*

masyarakat (pasti duit itu dari hasil menipu masyarakat).” Sementara jika si pekerja NGO tidak memberi sumbangan, langsung keluar ocehan: “Rugoe na gaji le, meu keu u Meunasah han dibantu, sang keuneuk eik Haji (Rugi aja dia punya gaji banyak, untuk Surau aja ga mau dibantu. Sepertinya mau naik haji).”

Itu potret masyarakat kita yang sudah tak mampu lagi menerima perbuatan baik seseorang. Selalu ada saja celah untuk dipersalahkan. Entahlah, mungkin inilah pergeseran nilai masyarakat kita. Kita tak bisa membendungnya. (HA 10.05.08)

Boros

NEGARA ini miskin, tapi boros. Banyak penggunaan anggaran yang tidak tepat. Alokasi anggaran juga terkesan mubazir. Padahal, banyak sektor yang perlu diperhatikan. Tapi malah itu yang dilupakan. Akibatnya, parade kemiskinan bisa ditemui di setiap sudut, saat, dan atau di mana saja.

Saya ingin memberi satu contoh saja, betapa Negara ini menganut paham boros. Bayangkan saja, setiap bulan Negara mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menggaji aparat yang tersebar di Polsek dan Koramil. Padahal, pascadamai, keberadaan Polsek dan Koramil sudah tidak relevan lagi. Mempertahankan mereka, sama saja menghambur-hamburkan di tempat yang tidak perlu.

“Tiep uroe (lebih-lebih pada malam hari) sabe dimu-en batee dan skak (setiap hari selalu main batu dan catur),” begitu jawaban sejumlah masyarakat ketika saya tanyakan bagaimana kerja anggota Polsek dan Koramil sekarang.

Ada juga yang menjawab: *“Rugoe mantong na ganto Polsek di Gampong, hana buet sapue le awaknyan, ladom syit gadoh jak bak rumoh aneuk dara gob (rugi saja ada kantor Polsek di Kampung, sebab tidak ada kerja apa-apa. Malah, ada yang asyik di rumah anak gadis orang).”*

Entah benar entah salah. Yang jelas, untuk membayar gaji mereka sudah membebani APBN. Jika misalnya, ada sepuluh ribu anggota Polsek dan Koramil seluruh Aceh, sudah berapa anggaran yang sudah tersedot? Apalagi, jika gaji mereka minimal Rp1,2 juta, berarti setiap bulannya Negara harus mengeluarkan anggaran Rp12 miliar. Jumlah itu di luar tunjangan, dan biaya lainnya.

Padahal, jika dana itu digunakan untuk sektor lain, akan lebih besar manfaatnya. Karenanya, pihak pengambil kebijakan, harus mendengar suara rakyat ini. Sebab, rakyatlah yang tahu, apakah sebuah badan atau institusi bermanfaat atau tidak. (HA 13.05.08)

Listrik

“SIGO tilat tabayue rekening lestrek, langsung diancam koh talo (Sekali telat bayar rekening listrik, langsung diancam akan diputuskan kabel),” ujar seorang warga, begitu lampu listrik di rumahnya mati. Nasi di *rice cooker* pun tak jadi masak. Untung saja, dia masih bisa menggunakan cara tradisional untuk memasak nasi.

Listrik memang sering bermasalah akhir-akhir ini di Aceh. Kapan saja, tak kenal waktu, pihak PLN memadamkan listrik, tak lagi bergiliran. Malah, pemadaman sering dilakukan tanpa disertai pemberitahuan terlebih dulu. Akibatnya, masyarakat mencak-mencak, dan menuding PLN menipu mereka.

Ada yang bilang, PLN tak meniru motto bola lampu merek Philips: terang terus, terus terang. Malah, PLN lebih *enjoy* dengan semboyan sendiri: padam terus, terus padam. Meski masyarakat sudah membeli lampu Philips, tetap saja tak bisa memberikan cahaya, karena sumber energi masih milik PLN. Seberapa pun mahal bola Philips, kalau PLN mematikan listrik tetap saja mati.

“Pakon lei meunan awak PLN nyan? Munyo masalah bayue hantom pernah tuwo, tapi mate lampu hana pernah dipeduli le awak nyan? (Kenapa sih orang PLN seperti itu? Kalau masalah setoran tak pernah lupa, tapi lampu mati mereka tak peduli),” sambung warga yang lain. PLN katanya harus diberikan sanksi, sebab, kalau masyarakat diam saja, PLN merasa tak ada masalah. Padahal, masyarakat sudah sangat gerah dengan aksi pemadamam yang dilakukan PLN.

“Sigo-go payah ta demo ganto PLN nyan! (sekali-kali harus didemo kantor PLN),” usul seorang ibu. *“Munyo hana ta demo, sabe payah pajoh bu muntah tanyoe (Kalau tidak kita demo, kita harus makan nasi mentah),”* sambungnya. Ibu ini kecewa karena sudah terbiasa memasak nasi menggunakan *rice cooker* yang mengandalkan energi listrik.

“Pakon watee awak droeteuh duek keu ulee, lampu hana pre-pre mate

(Kenapa ketika orang sendiri yang jadi pemimpin, lampu tak henti-hentinya mati),” tanya warga yang lain. Dulu, katanya, listrik agak jarang mati, kalau mati pun kadang-kadang saja saat pejabat di PLN lagi sakit kepala atau sakit hati, sebab banyak warga telat membayar rekening listrik. Tapi sekarang, kesadaran masyarakat membayar rekening listrik tinggi, kenapa listrik tetap padam? (HA 13.05.08)

Absen

PEMERINTAH absen, saat masyarakat membutuhkan. Setahun lebih pemerintah baru berkuasa, tapi belum tampak perubahan yang berarti. Jalan-jalan masih banyak berlubang, lampu sering mati, dan infrastruktur yang dibutuhkan publik terbengkalai. Tak ada yang peduli.

Sejumlah warga di Gampong Kupula Geumuroh, Glumpang Tiga sampai menanam pohon di badan jalan, karena jalan yang menghubungkan desanya dengan desa lain tidak diaspal. Mereka merasa pemerintah absen saat mereka butuh. Masyarakat seperti dibiarkan berkutat dengan masalah, dan pemerintah tak perlu harus tahu.

“Pue kamoe harus sabe meudemo agar kamoe nyoe ditupue sebage rakyat ureung nyan sjit?” tanya beberapa warga di berbagai kesempatan. Mereka pantas bertanya seperti itu, karena keberadaan mereka seperti dianggap tidak ada.

Warga Lampeudue Baroh, misalnya, merasa pemerintah mengorbankan mereka. Lahan parkir RSUD Sigli, yang sebelumnya dikelola oleh pemuda setempat, tapi kemudian dialihkan kepada pengelola lain. Alasannya, karena pemerintah ingin meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). *“Kamoe pih sanggop bayue keu kas daerah munyoe memang keputusanjih lagee nyan?”* protes warga Lampeudue tentang alasan pemerintah dan pihak RSUD tidak memperpanjang lagi soal pengelola lahan parkir kepada warga Lampeudue.

Tak hanya itu, nasib beberapa korban tsunami juga dilupakan, seperti di Pasi Lhok, Kembang Tanjong. Selama ini, mereka mengaku sebagai korban tsunami, tapi tidak ada bantuan untuk mereka. Padahal, mereka butuh rumah. Banyak rumah, kata mereka, dibangun bukan untuk korban tsunami. Pemerintah diam saja. (HA 14.05.08)

Kriminal

AKHIR-AKHIR ini banyak sekali muncul aksi kriminal, seperti perampokan, pembunuhan, penculikan dan atau korupsi (kalau korupsi boleh disebut juga sebagai aksi kriminal). Motifnya bermacam-macam. Kebanyakan karena faktor ekonomi. Lalu, apakah pelaku kriminal memang dilahirkan khusus untuk menjadi kriminal? Atau memang, pada dasarnya mereka semua dilahirkan untuk menjadi baik tapi faktor keadaanlah yang membuat mereka jadi jahat?

Kalau pertanyaan ini diajukan kepada Erich Fromm, sang tokoh humanis kelahiran Frankfurt, Jerman akan langsung menjawab: “Banyak orang yang melakukan kejahatan karena mereka diperintahkan oleh orang lain yang memiliki kekuasaan.” Meskipun Erich percaya bahwa sangat sedikit manusia yang dilahirkan sebagai orang suci atau sebagai penjahat tulen.

Menurutnya, takdir menjadi baik atau jahat sangat ditentukan oleh pengaruh-pengaruh yang dibawa dari luar. Persoalan baik dan buruk itu hanya soal pengaturan: sesuatu disebut baik dengan alasan ini, ini, dan ini. Sementara sesuatu yang buruk, alasannya itu, itu, dan itu.

“Tidak ada yang baik ataupun buruk, tetapi pemikiran kitalah yang menjadikannya demikian,” demikian Shakespeare berkhutbah. Artinya, persoalan baik dan buruk itu hanyalah soal kesepakatan saja.

Kenapa banyak orang akhir-akhir cenderung menjadi kriminal? Apakah kondisi yang membuatnya demikian atau ada pengaruh-pengaruh lain, katakanlah seperti disebut oleh Erich Fromm?

Kita heran saja, orang semakin gampang membunuh, hanya karena ingin merampok satu sepeda motor; atau orang rela menculik, karena berharap ada tebusan ratusan juta rupiah. Ada juga aksi kriminal yang lebih terhormat, seperti korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Mereka hanya mengutak-atik angka di ruang kerja

yang mewah, tapi ribuan rakyat kemudian jadi korbannya.

Lalu, jika orang menjadi kriminal karena diperintah oleh kekuasaan, bagaimana kekuasaan melakukannya? Salah satunya, ya melalui korupsi. Banyak hak rakyat yang hilang karena korupsi, sebab kebanyakan anggaran yang dikorupsi diperuntukkan untuk rakyat. Cara lainnya, memperlambat pengesahan APBA. Akibatnya, hak rakyat setiap hari berjumlah miliaran rupiah tak dapat dinikmati. Lalu, karena dapur harus berasap, ada yang menempuh jalan pintas: merampok atau menculik. Dalam hal ini berarti pemerintah layak dipersalahkan. (HA 15.05.08)

Utopia

NASIB rakyat Aceh *saban* tahun terkatung-katung. Mayoritas seperti kehilangan induk semangnya. Pencerahan baru terlihat ketika Pilkada 2006 lalu, rakyat serentak memberi kepercayaan kepada pasangan Irwandi-Nazar untuk berkuasa. Berjuta harapan digantungkan kepada pasangan yang naik melalui jalur independen ini.

Tapi, berangsur-angsur, ekspektasi rakyat terhadap pasangan ini berkurang. Popularitas yang sempat melejit pasca-menang, mulai terkikis, dan muncul kekhawatiran: jangan-jangan pemimpin dari barisan perjuangan ini sedang membawa rakyat ke jurang kemiskinan dan kehancuran.

Saya sangat percaya, bahwa keduanya (Irwandi-Nazar) cukup paham, bahwa rakyat tak cukup hanya makan janji-janji manis. Rakyat butuh hasil nyata. Rakyat tidak akan menjadi kenyang oleh tawaran utopia demi utopia. Sebab, ketika rakyat memilih kedua pasangan ini, terhipnotis oleh pesan kampanye: *tapuwoe keulayi maruwah bansa nyang dilee meugah ban sigom donya*. Menurut rakyat, inilah saatnya menatap masa depan yang cerah.

Tersadar, bahwa dipundak keduanya rakyat sedang menggantung harapan, pemerintah Irwandi-Nazar pun meluncurkan program *Kredit Peumakmu Nanggroe*. Melalui program ini, keduanya bertekad mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tapi, seiring perjalanan waktu, program tersebut menjadi tidak jelas, karena *toh*, belum muncul juga kesejahteraan seperti diharapkan. Malah, di sana-sini mulai muncul kekecewaan, sebab tidak semua rakyat kecil memiliki akses mendapatkan program kredit tersebut.

Belum lagi masalah itu terpecahkan, pemerintah plus DPRA kembali melakukan hal tidak populis: memperlambat APBA yang menjadi hajat hidup orang banyak. Rakyat Aceh hanya mendengar saja bahwa banyak sedang berkeliaran di Aceh, tapi tak sedikit pun

bisa dinikmati. Padahal, dengan pengesahan APBA, banyak hal bisa dilakukan, minimal program kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi publik.

Jika pun dalam bulan ini (Mei) APBA 2008 disahkan, diyakini tak semua anggaran terserap karena sempitnya waktu. Banyak dana yang harus dikembalikan lagi ke Pusat. Akhirnya, dana yang banyak itu, konon sampai 8 triliun hanya menjadi perbincangan saja. Lalu, ketika kondisi ini muncul, bisakah pemerintah dan DPRA mengklaim sudah bekerja maksimal, atau minimal pemerintahan mereka sukses? Padahal, perdebatan tentang RAPBA masih terus berjalan, karena masing-masing pihak (eksekutif dan legislatif) memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok.

Kondisi ini persis seperti disampaikan Brian Tracy, seorang pakar motivasi: *Orang yang sukses selalu mencari kesempatan untuk menolong orang lain, sedangkan seorang pecundang akan selalu berkata, "Apakah itu untuk saya?"* Entahlah. (HA 16.05.08)

Big Lie

JUDUL tulisan ini termasuk aneh, *Big Lie*. Bukan bermaksud *sok* modern menggunakan bahasa Inggris, tapi memang judul ini yang cocok. Kalau diterjemahkan bebas berarti 'kebohongan besar'. Saya sengaja menulis ini, karena sekarang banyak orang atau katakanlah para pejabat membohongi rakyat. Apa yang disampaikan mereka sering hanya sebagai suatu kebohongan, tetapi karena diulang terus menerus, orang jadi percaya bahwa itu adalah benar.

Istilah *Big Lie* atau dalam bahasa Jerman, *Argentum ad nauseam*, ini sebenarnya teknik yang digunakan Paul Joseph Goebbels (29 Oktober 1897-1 Mei 1945), orang kepercayaan Adolf Hitler, yang diberi posisi kunci sebagai Menteri Propaganda Nazi. Goebbels menjadi orang ketiga yang paling populer di Jerman setelah sang Fuehrer dan Martin Bormann. Tetapi kematiannya termasuk tragis, karena saat Jerman kalah perang, Goebbels bunuh diri bersama anak-istrinya.

Prinsip *Big Lie* sederhana saja, "Sebarkan berita bohong melalui media massa sebanyak mungkin dan sesering mungkin hingga kemudian kebohongan tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran." Cukup sederhana, tapi mematikan. Menurut Goebbels, kebohongan yang paling besar adalah kebenaran yang diubah sedikit saja.

Dulu, ketika Aceh masih dibalut konflik, setiap ada kejadian, si wartawan pasti mengonfirmasi kejadian tersebut kepada aparat yang berwenang. Sebut saja, seorang wartawan melihat langsung suatu kejadian, di mana aparat menembak anggota masyarakat.

Tetapi, karena ingin berita berimbang, si wartawan mengonfirmasi sama pejabat aparat berwenang. Si pejabat lalu mengatakan, yang menembak itu bukan anggotanya, karena aparat keamanan *kan* tugasnya menjaga dan mengayomi masyarakat. Si wartawan, meski sudah jelas-jelas melihat dengan mata kepala bahwa yang

menembak adalah aparat, tetapi tidak berani menulisnya, dan lebih senang mengutip ucapan pejabat berwenang, bahwa aparat tidak mungkin menembak masyarakat.

Si pejabat otomatis sudah melakukan “pelintir” atas suatu peristiwa dan fakta, dan menyebarkannya melalui media. Berita tersebut kemudian jadi propaganda dan mempengaruhi opini publik. Publik yang awam tentu saja percaya begitu saja dengan berita tersebut, karena tidak mengetahui masalah tersebut dengan detail. Jadi, berita berubah menjadi dusta. (HA 07.07.08)

Cet Langet

CET (mengecat) atau *syoet* (meraih sesuatu menggunakan alat) sebenarnya pekerjaan yang tidak sia-sia. Tetapi, ketika kata *cet* dan *syoet* ditambah kata *langet* (langit) di depannya, kegiatan tersebut menjadi sia-sia. *Cet* atau *syoet langet*, sama artinya dengan *lumpoe* atau mimpi.

Kegiatan *cet/syoet langet* sering dilakukan ketika sedang tak beraktivitas. Biasanya kegiatan *cet/syoet langet* dilakukan ketika sedang rebahan, di mana tangan diletakkan di atas kepala. Orang-orang pasrah atau kalah bersaing dengan kehidupan sering melakukannya. Bayangan tentang kehidupan yang lebih baik, atau ingin menang dalam hidup ikut mewarnainya. Hayalan atau impian yang terlalu muluk, sementara kenyataan sama sekali tidak mendukung.

Tapi, seperti halnya mimpi, kegiatan *cet/syoet langet* juga tidak bermanfaat alias sia-sia saja. Bisakah mengecat atau meraih langit sambil tidur atau rebahan? Sama sekali tidak mungkin. *Mission impossible*, kata Bang Joni. Manusia tidak bisa mengecat langit, yang katanya sampai tujuh lapis itu.

Soalnya, ketika langit berawan, dia tetap berwarna putih. Sementara ketika langit cerah, dia pasti berwarna biru (biru langit). Saat sore hari, ketika matahari mulai terbenam, warna langit akan mengikuti warna mentari berupa kuning keemasan atau merah saga. Warna langit akan selalu begitu, dan akan berubah warnanya mengikuti cuaca.

Cet langet, jadinya hanya membuat hati tersiksa, dan manusia jadi tidak produktif. Kesuksesan tidak akan tercapai hanya karena tidur sambil membayangkan hal-hal indah. Napoleon Hill, seorang pakar motivasi terkenal abad 19 dan 20, yang menulis buku “*Think and Grow Rich* (Berpikir menjadi Kaya)” memberi nasehat: *Jangan*

menunggu. Waktu tidak akan bisa berputar kembali. Mulailah dari tempat anda berdiri, bekerjalah dengan alat apapun yang anda punya. Niscaya alat yang terbaik akan anda temukan seiring dengan perjalanan anda.

Nah, bek gadoh cet langet. Bangun dari tempat tidur anda, dan ubah hidup anda sendiri, setelah itu ubahlah dunia ini seperti keinginan anda! (HA 08.07.08)

SBY

KEMARIN, KPU mengeluarkan berita penting, bahwa Pemilu 2009 digelar pada 9 April 2009. Tetapi, ada yang aneh dari tanggal tersebut, soalnya, itu *kan* tanggal lahir SBY. Alvin Lie, anggota DPR rupanya mempersoalkan tentang pelaksanaan pemilu pada tanggal tersebut, meski beda bulan dan tahun dengan tanggal kelahiran SBY.

Saya heran juga, bagaimana mungkin bisa kebetulan. Soalnya, jika pelaksanaan pemilu pada tanggal 09.04.09, berarti angkat tersebut menunjukkan tanggal dan tahun lahir SBY (SBY lahir pada 1949). Menurut Alvin Lie pertimbangan pemilihan tanggal tersebut bukan hari ibadah Kristen atau hari ritual Ching Ming bagi warga Tionghoa. "SBY *kan* sukanya begitu," kata Alvin.

SBY pasti beruntung. Soalnya, saat pemilu nanti tinggal memberi tahu, "jika mau membantu saya, atau memberi hadiah pada tanggal kelahiran saya, maka anda cukup mencoblos gambar partai saya." *Kan* sudah politis jadinya.

Indonesia, memang benar seperti dikatakan orang, Negara bukan-bukan. Kalau orang Aceh bilang, "*Nyang kon-kon dipeubuet.*" (Yang bukan-bukan dibuat). Semua hal dikaitkan dengan hal-hal mistis, dan lalu dipolitisir.

Tak aneh, jika pemilihan tanggal tersebut sebagai hari pencoblosan juga dipolitisir. Di Indonesia, segala sesuatu sulit dipisahkan dari aroma politik. Semua dipolitisir. Nonton Euro bareng yang dilakukan politisi juga dipolitisir. Sutrisno Bachir (SB), Ketua PAN, dipersoalkan karena membuat iklan di TV sampai Rp 300 miliar juga kental warna politisnya. RCTI bahkan menggunakan Soetrisno Bachir sebagai 'koresponden' yang melaporkan langsung suasana Euro di Austria. Sementara masih banyak tokoh lain yang ikut nonton bersama SB, tapi kenapa cuma komentar SB yang diminta. Pasti ada udang di balik batu.

Jika ada tokoh politik pergi ke Pesantren, pasti dipolitisir. Pejabat politik selingkuh atau kawin lagi, juga dipolitisir. Hampir tak ada arena dan masalah yang tidak dipolitisir. Malah, dulu ketika heboh goyang ngebor, pantat Inul juga dipolitisir. Tapi, sangat celaka jika sampai orang lapar juga dipolitisir. *Capek deh!* (HA 05.07.08)

Dame

KALAU kita sudah sepakat berdamai, kenapa senjata harus kembali menyalak. Jika kita sudah sepakat berdamai, kenapa dendam masih kita pelihara? Jika kita sepakat untuk berdamai, kenapa harus ada masyarakat yang terluka tertembak?

Pertanyaan itu muncul tiba-tiba saja, saat membaca Harian Aceh kemarin yang melansir berita penembakan seorang buruh tani, Sayuti. Menurut keterangan aparat, Sayuti ditembak karena AKAN mencuri besi milik Exxon mobil. Kata AKAN sengaja saya tulis dengan huruf besar, karena saya tahu kata-kata AKAN sering menunjukkan keinginan. Kata AKAN berarti, belum melakukan, masih dalam tahap berniat.

Jika boleh *sok* alim, Malaikat saja belum mau mencatat perbuatan buruk/jahat seorang hamba, sebelum dia melakukannya. Lalu, kenapa seorang oknum Brimob harus memuntahkan timah panas ke tubuh Sayuti, jika dia baru berniat mencuri besi *Exxon Mobil*?

Bukankah Aceh sudah damai? Jika apa yang masih diniatkan Sayuti suatu kesalahan atau pelanggaran, *kan* bisa ditangkap? Apalagi, hukum di tangan Polri sekarang. Ataukah, Aceh sudah benar-benar menjadi negeri para mafia, di mana segala sesuatu menjadi beres ketika senjata menyalak?

Atau jangan-jangan kita sudah bersepakat merusak perdamaian? Karena perdamaian ternyata tidak memberi harapan apapun. Apalagi, kasus kriminal hanya bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Sementara jika tak ada perdamaian, aksi kriminal bisa dilakukan secara terang-terangan?

Jika benar kita sepakat merusak perdamaian, tak ada salahnya mendukung usulan Bupati Benar Meriah, Ir Tagore yang meminta pemerintah pusat melakukan operasi pemulihan keamanan di Aceh. Tapi, jika kita masih berharap Aceh damai bersemi di Aceh, ayo katakan: Ir Tagore salah *jeb ubat!* (HA 04.07.08)

Talo

PIALA Euro 2008 sudah berakhir. Spanyol akhirnya keluar sebagai juara, setelah 44 tahun tidak merasakan menjadi kampiun Eropa. Analisis bola, akhirnya sepak, yang menang dalam Euro 2008 kali ini adalah sepakbola. Sebenarnya, kalau diberi urutan satu per satu, masih banyak lagi pihak yang menang, selain Spanyol tentunya. Sejak dari panitia euro sampai pemilik warung kopi. Lalu, yang kalah siapa?

Nah, yang kalah sulit ditebak. Soalnya banyak sekali. Tetapi, yang paling terasa, tentu yang memasang taruhan. Apalagi, euro kali ini banyak sekali memunculkan kejutan-kejutan. Tim-tim yang pertama sempat diunggulkan, kemudian satu-persatu terjungkal, seperti Belanda dan Portugal. Akibatnya, tebakan selalu meleset. Kalah.

Imbasnya, memang tidak begitu terasa. Tetapi, jika nilai taruhan sudah melibatkan dana berjuta-juta tentu saja sudah jadi masalah. Apalagi, jika ada sang suami yang rela meminjami perhiasan milik isterinya, bisa-bisa kena *score* dari isteri. Malamnya sudah tidak pulang ke rumah, taruhan kalah lagi. Sudah pasti isterinya memberi sanksi lain, yang menyiksa batin.

Jika tak jatuh sakit gara-gara kalah taruhan, tak jadi soal. Namun, kebanyakan setelah kalah taruhan langsung jantungan, kena *stroke*, dan harus dirujuk ke Penang, Malaysia. Artinya, "*mangat si pade, saket saboh beurandang.*" Sementara pemilik warung kopi, sudah pasti untung besar, seperti halnya panitia euro. Sehabis euro ada yang langsung bisa beli mobil, bisa sewa toko baru, dan ada juga yang kawin lagi.

Sementara yang kalah taruhan, apalagi sampai menjual mobil, atau mobil sebagai taruhannya, pasti sangat menyiksa. Jika dia berprofesi PNS, sudah pasti akan ambil surat cuti. Malu *kan* jika ke kantor sudah tidak punya mobil lagi?

Ada juga orang yang merasa patah semangat, karena timnya kalah. Orang itu hanya kena imbas psikologis dan emosional saja. Tetapi, jika sampai mengganggu kerja, pasti sudah tidak benar. (HA 03.07.08)

Hom Hai

HARI-HARI ini, yang paling sibuk bukan rakyat, melainkan politisi. Banyak yang harap-harap cemas, apakah partainya lolos verifikasi atau tidak. Malah, tak sedikit yang jantungan, ketika partainya tidak memenuhi syarat, dan dinyatakan tidak layak mengikuti Pemilu 2009. Sementara rakyat, biasa-biasa saja, dan sibuk dengan urusan masing-masing.

"Jinoe baro peurele keu geutanyoe, barosa kon diblie teuh," ujar Apa Suman di sebuah Gampong di Pidie. *"Pane ek tapike politek, peng BLT mantong sampe inohat hana troh-troh lom,"* timpal Syik Uma. Menurut mereka, energi untuk ikut memeriahkan politik melemah. Ada yang bilang tak bermanfaat, hanya *"peu-lumak (maaf) boh gob."*

Lalu, mereka pun mengeluarkan sumpah serapah. *"Ka lheu takalon, mandum diseumike keu pruet droe, pruet gob bah soh."* Umpat Apa Suman yang kebetulan sedang duduk di bale jaga. Apa Suman mencontohkan, beberapa waktu lalu pemerintah pernah memberi *angen syuruga*, bahwa pengobatan untuk orang miskin gratis, tetapi, dirinya harus membayar harga obat yang jumlahnya ratusan.

"Tapi kita harus memberi kesempatan sekali pada Pemilu 2009 ini," pancing saya. Apa Suman dan Syik Uma saling berpandangan. *"Partai!"* jawab mereka serentak. *"Han ek le meu partai, karena le pancuri dum bak partai,"* kata Apa Suman menjawab duluan. Saya hanya mengangguk pelan, antara yakin dan tidak apa yang disampaikan orang tua ini, yang bagi saya pasti sudah sering ditipu oleh para politisi.

Menurut mereka, kehadiran Partai Lokal tidak memberikan banyak manfaat. Belum pemilu saja, sudah bertengkar sesama. Padahal, kehadiran Partai Lokal untuk membuat masyarakat sejahtera dan bermartabat. Tetapi, kata mereka, kehadiran partai seperti ajang untuk *"peu hayue-hayue droe."*

Lalu, keduanya menunjuk ke rumah salah seorang petinggi Partai, di mana di halaman rumahnya dua mobil mewah berdiri berjejer. *"Nyan misue dilewat bale jaga, hantom dibri saleum, moto dibalab teuga-teuga,"* beber mereka.

Padahal, kata mereka, jika Partai ingin memenangkan Pemilu, masyarakat harus dirangkul. Jika rakyat tidak memilih, bagaimana mungkin partai bisa memenangkan pemilu. Suara pengurus dan anggota partai sama sekali tidak cukup. Suara rakyat yang lebih menentukan. Makanya, keduanya berharap, agar saat meminta KTP masyarakat harus sopan, tidak boleh main bentak dan ancam. Rakyat tidak boleh disakiti.

Saya kemudian teringat nasehat Mao Tse Tung, tokoh pergerakan China. *"Rakyat mirip dengar air,"* demikian Mao Tse Tung memberi nasehat untuk pasukannya. *"Kita harus berenang di dalamnya seperti ikan. Pertama kali kita harus belajar dari massa dan kemudian mengajari mereka."*

Jika nasehat Mao dipraktekkan oleh para pengurus Partai, saya percaya, masyarakat pasti akan antusias ikut pemilu. Tetapi, jika praktik arogan masih menjadi baju para pengurus partai, maka sudah saatnya Partai *jak lam pague*. Makanya, kita berharap, masyarakat sebagai *ureung Nanggroe* harus dilibatkan dalam urusan *pugot nanggroe*. *Bek watee duek mantong tingat keu rakyat*, sementara ketika senang rakyat kembali dilupakan.

Jangan sampai kita mendengar rakyat bernyanyi dengan irama yang berbeda: *"Udep beusare mate beusajan, watee na bagian hana bagi-bagi,"* yang dipelesetkan dari pepatah endatu, *"udep beusare mate beusajan, sikrak gaphan saboh keureunda."* Hom hai...! (HA 01.07.08)

Petani

HARI Sabtu (28/06/08) kemarin, saya duduk di warung kopi Jasa Ayah di Solong. Ternyata di sana sedang ada diskusi yang dibuat *Trade Union Care Center Foundation* dan FES Aceh. Temanya menarik, *"Menggugat Eksistensi Negara di Era Globalisasi."* Sebelum diskusi dimulai, saya ketemu dengan kawan yang dulu pernah membantu kami ketika dalam masa *safety house* di Jakarta. Dia tanya, kenapa di Aceh, orang suka berkumpul di warung kopi? Saya kaget juga ditanya dengan pertanyaan demikian, karena di Aceh orang sudah biasa berkumpul di warung kopi.

"Di Aceh, banyak ide-ide besar dan brilian lahir di warung kopi," jawab saya seenaknya saja. Dia hanya menggangguk saja. *"Di warung kopi, berkumpul berbagai macam latar belakang orang, ada pejabat, politisi, GAM, pengusaha, dan aktivis mahasiswa,"* sambung saya lagi. Warung kopi, sudah menjadi semacam tempat buat bertukar pendapat dan pikiran.

Beberapa kontraktor dan pengusaha menyelesaikan masalah di antara mereka di warung kopi. Ada juga beberapa wartawan menulis berita tentang suatu isu dimulai dari warung kopi. Skandal beberapa pejabat, lebih cepat beredar dan terbongkar dari warung kopi ketimbang dari tempat lain. Makanya, warung kopi sekarang tak lagi dianggap sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang tak punya kerjaan, melainkan tempat melancarkan pemberontakan, tempat berbagai ide dipertandingkan.

Beberapa kasus korupsi pejabat juga terbongkar dari sebuah obrolan ringan di warung kopi, lalu kemudian menjadi bola salju ketika *diback-up* oleh media. Di warung kopi, diskusi tak pernah dibatasi, karena sudah mirip dengan dunia maya. Orang yang duduk di warung kopi, modalnya jika tidak pandai ngomong, ya...telinga harus selalu dibuka. Karena, informasi bisa datang

bertubi-tubi, tanpa mampu kita saring, mana yang penting dan mana yang tidak. Tak heran, jika banyak orang lebih memilih meng-*update* informasi dari warung kopi, ketimbang membaca Koran. “Membaca Koran membutuhkan,” ucap beberapa orang yang sudah alergi sama berita koran.

Kawan saya semakin yakin, karena beberapa tokoh partai ternyata duduk minum kopi di warung ini, seperti Thamren Ananda, Taufik Abda, Ridwan H Mukhtar (kini almarhum), dll. Bagi sebagian orang, warung kopi seperti rumah, tempat untuk melepaskan penat dan beban kerja yang menumpuk. Di sini orang bisa rileks, dengan saling tukar pendapat sesama kawan atau orang yang baru dikenalnya.

Tapi, yang membuat saya menarik, bukan itu, melainkan sebuah pernyataan yang dilontarkan seorang panelis diskusi tersebut. “Petani tidak butuh Negara, sementara Negara butuh para petani,” ujar Andito dari GMII. Pernyataannya sangat provokatif.

Menurutnya, para petani yang menggarap sawah sama sekali tidak pernah memikirkan Negara. Mereka sudah puas hidup sebagai petani. Keberadaan Negara juga sama sekali tidak banyak memberi manfaat untuk mereka. Bagi mereka, tanpa Negara juga mereka masih bisa bertani. Tetapi, tanpa padi dan beras hasil produksi petani, bisakah Negara bisa hidup?

Saya hanya mengangguk-angguk saja. Pernyataan itu memang benar. Karena sebagian besar masyarakat petani menganggap Negara tidak pernah hadir dalam kehidupan mereka. Mereka merasa seperti tidak memiliki Negara. Negara hanya butuh mereka ketika datang masa Pemilu. Saat itu, semua orang ingin dekat dengan para petani. Tidak dekat dengan petani, berarti keinginan berkuasa laksana jauh panggang dari api.

Makanya, sang panelis tadi heran, ketika ada rakyat (sebagian besar petani) senang dekat dengan Negara. Dia mencontohkan, ada rakyat yang senang memakai baju TNI/Polri dan jadi PNS. Ada juga orang yang memotong rambut cepak, biar keliatan mirip aparat, sehingga membuat orang takut. Kondisi ini sering kita temui saat kondisi Aceh sedang panas-panasnya. Dekat dengan aparat, di satu sisi jadi kebanggaan, tetapi banyak juga yang jadi sumber malapetaka. Karena tak semua orang Aceh saat itu suka sama aparat, lebih-lebih bagi tentara GAM. (HA 30.06.08)

Seu-let

HARIAN Aceh kemarin (27/06/08) melansir berita tentang anggota DPRK Aceh Utara yang dinilai *beu-o seu-iet*, karena hanya memikirkan gaji, sementara kerja seenaknya saja. Tudingan *beu-o seu-iet* dilontarkan karena dalam rapat III masa persidangan pertama tahun 2008 tentang pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA), dari 40 anggota dewan, hanya 18 orang yang hadir. Lalu, yang lain kemana?

Tak ada yang tahu, kemana. Tapi, harap maklum saja, sekarang lagi musim bola, dan musim tender. Bagi yang senang bola, pasti paginya mereka malas bangun tidur, karena bergadang larut malam. Sementara yang senang tender, pasti mereka sedang sibuk lobi sana-sini agar dapat proyek. Ada juga yang bersembunyi, takut jika proyeknya bertabrakan. Jadi, menghindar merupakan solusi yang bijak, meski tugasnya sebagai wakil rakyat terabaikan.

Istilah *beu-o seu-iet* sebenarnya sering dilakabkan untuk ayam yang *keunong ta-uen*. Ayam kalau sudah kena *penyaket ta-uen*, sering terlihat *sungkuep* (lemah-lesu), tidak bergairah, dan seperti pepatah, hidup segan mati pun tak mau. *Beu-o seu-iet* sering juga diterjemahkan malas-jinak. Artinya, ketika dilakabkan untuk anggota dewan, berarti maksudnya, malas kalau diminta ikut sidang (kerja), tetapi akan bersikap jinak dan penurut saat masa ambil gaji tiba.

Lalu, apakah hanya anggota DPRK Aceh Utara saja yang *beu-o seu-iet*? Saya harus hati-hati menjawabnya. Karena, sebenarnya, perilaku seperti ini sudah umum dilakukan oleh para anggota dewan. Jika tidak percaya, silahkan lihat saat sidang di DPR Pusat, berapa jumlah kursi yang kosong? Sangat banyak, karena tak bisa kita hitung dengan jari. Malah, bagi anggota yang hadir dalam ruang sidang juga tak terlihat rajin dan bersemangat memperjuangkan nasib rakyatnya, mereka sering disorot oleh kamera sedang tertindur pulas.

Tetapi, bagi sebagian anggota dewan *enjoy* saja, karena masuk TV. Bagi mereka, yang penting hadir di dalam sidang meski hanya 'datang, duduk, diam, dengar, dan duit'. Wajar, jika setiap peraturan, kebijakan atau undang-undang yang dilahirkan, sering menjadi UUD (ujung-ujungnya duit). Lihat saja saat pembahasan APBN, APBA, adan APBK, semua anggota dewan setiap tingkatan sibuk berdebat ketika masuk pembahasan *wuek tumpok*. Sementara ketika masuk agenda tentang program kesejahteraan rakyat, mereka pasti bersepakat: "Rakyat cukup kita kasih *angen syuruga*, kalau mereka protes, paling cuma demo dan jadi senang kalau sudah masuk media. Besoknya pasti akan diam lagi." Begitu guman mereka dalam hati.

Masalah kinerja atau perilaku *beu-o seu-iet* juga pernah dimuat di harian ini beberapa waktu lalu tentang kinerja pegawai kantor Bupati Pidie, dan beberapa dinas lainnya. Malah, jika pada hari Jumat dan Sabtu (di Pidie hari Sabtu masuk kantor), jam 10 belum nampak batang hidung pegawai ke kantor (yang nampak cuma sedikit). Sebagian malah lebih *enjoy cang panah* di warung kopi, dan mendiskusikan jalannya pertandingan Bola.

Tapi, jangan coba-coba memangkas gaji atau honor mereka. Mereka pasti melawan, dan tak sungkan-sungkan membeberkan ke media. Itulah wajah pejabat dan abdi rakyat di negeri kita, sering *beu-o seu-iet lagee manok keunong ta-uen*. Tetapi bersemangat ketika masuk dalam perkara *asoe pruet* dan *umpuen takue*. (HA 28.06.08)

Partai

"SEKARANG lagi musim partai bos!" Begitu ucap seorang kawan menyadarkan saya. "Semua kebaikan yang dilakukan, ujung-ujungnya untuk kepentingan 2009," sambungnya lagi. Lalu, dia bercerita panjang lebar, tentang sepak terjang seorang mantan pejabat, menampilkan citra positif seolah-olah peduli dengan nasib tahanan yang masih mendekam di penjara-penjara di pulau Jawa.

Karena sekarang lagi musim politik, semua orang kemudian jadi sibuk. Mendekati pemilu 2009, citra masih terlalu ampuh menarik massa. Tanpa citra yang baik, sulit mendapatkan suara. Meski ada yang bilang dana masih sangat ampuh, tetapi untuk kondisi sekarang tidak lagi menentukan. Apalagi orang Aceh sudah punya resep mujarab, "*Di peukhem takhem, tatem yang bek. Dijok tacok, taculok nyang bek.*"

Ya...rakyat Aceh sudah sangat berpengalaman. Mereka jarang yang mau diperlakukan sebagai massa, apalagi massa mengambang. Lalu, apakah berbeda antara rakyat dan massa? Menjawab ini, saya harus merujuk Eep Saifullah Fattah (2001). Eep membedakan secara nyata dan jelas antara rakyat dan massa. Menurutnya, jika rakyat percaya diri di atas kesepakatan tentang hak dan kewajiban, massa biasanya membangun surplus percaya diri atas nama jumlahnya, dan dengan itu, menularkan virus ketakutan sambil menuntut kepatuhan, bahkan sikap tunduk tekuk lutut.

"Jika rakyat adalah pendesak yang sehat, massa adalah kerumunan besar yang suka bertabiat buruk: meletupkan kekecewaan dan kemarahan lewat teror," tulisnya.

Tetapi, apakah di Aceh ada massa yang suka bertabiat buruk? Dan lalu suka menebar kemarahan lewat teror? Kita menyangsikannya, meski ke depan hal seperti itu bukan mustahil terjadi. Belum lagi jika gesekan antar massa tak bisa dibendung, karena beberapa partai pasti memperebutkan basis massa yang sama. Kita pasti akan

menonton parade politik yang berdarah-darah. Politik, jadinya tak lagi dipahami seperti sering dikatakan oleh Mao Tse Tung, sebagai perang yang tidak menumpahkan darah. Politik penuh darah bakal berlangsung di Aceh.

Saya begitu terkejut ketika membaca statemen juru bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) di harian ini beberapa waktu lalu, bahwa tidak boleh satu partai pun mengklaim diri sebagai partai eks awak GAM. Menurutnya, partai eks awak GAM hanya satu: Partai Aceh. Sementara kita tahu, banyak awak GAM sekarang tersebar di berbagai partai seperti Partai SIRA, PAAS, dan lain-lain.

Saya jadi bertanya-tanya, jika Partai Aceh tampil begitu eksklusif, apakah bisa menjadi partai yang memberikan banyak harapan untuk orang Aceh? Apalagi, banyak rakyat Aceh sekarang begitu antipati dengan GAM. Jika hanya mengandalkan awak GAM, bagaimana Partai Aceh bisa menjadi pemenang di Aceh? Padahal, suara rakyat Aceh (awak nanggroe), cukup besar, dan diperebutkan oleh banyak partai: Lokal dan Nasional.

Ekspektasi rakyat Aceh untuk ikut pemilu juga diyakini bakal berkurang. Karena, rakyat semakin sadar bahwa Pemilu tak banyak memberikan perubahan bagi rakyat Aceh. Pemilu hanya mampu mengganti kulitnya saja, sementara isinya sama. Orang-orang yang duduk di Parlemen boleh saja berbeda, tetapi kebijakannya tetap sama, bahkan lebih buruk. Lalu, kita harus bertanya, untuk apa rakyat ikut Pemilu?

Bukankah, setiap Pemilu, rakyat selalu disuguhi tampilnya politisi-politisi munafik, yang hanya pandai berjanji? Rakyat boleh saja terpana sesaat mendengarkan kemampuan para jurkam berkampanye, dengan retorika memukau, tetapi, begitu pulang ke rumah, rakyat pasti sadar, bahwa retorika tak bisa mengubah apapun. Hanya sebuah baju *sareng kopi* yang sempat mereka terima saat dilempar dari atas panggung kampanye, lainnya tidak. (HA 27.06.08)

Bungkam

BUNGKAM tak hanya dilakukan pemerintah. Kalangan swasta atau orang berduit juga sering melakukannya. Ada yang melakukannya secara kasar, seperti menggunakan tangan besi, ada juga yang menempuh cara halus. Dan pihak media, diakui atau tidak sering menjadi objek yang dibungkam.

Tulisan atau berita yang dimuat di sebuah media, sering berakhir dengan persidangan di pengadilan, dan lalu di Penjara. Meski banyak juga sebuah berita menjadi ter-ralat dengan sendirinya, setelah si wartawan dipanggil untuk menghadap.

Ya...mereka punya banyak dana, sementara si wartawan tidak. Tapi, meskipun tidak punya banyak duit, kita masih punya nurani. Itu yang penting. Sebab, tanpa nurani, kita tak pantas menyebut diri manusia. Karenanya, jangan sampai nurani yang ada sama kita, lalu kita gadaikan. Wartawan yang bisa dibeli sering tak punya harga diri, dan lalu tak bermartabat.

Saat tak lagi punya martabat, kita bisa mengkritisi apa saja, dan menulis tentang semua hal. Tetapi, tulisan kita tetap sudah bisa diukur dengan nilai mata. Tulisan yang begitu, jika dikasih duit Rp200 ribu pasti tidak lagi seperti itu. Akibatnya, martabat sebuah tulisan menjadi hilang. Dia kehilangan daya kritisnya, dan lalu tak memberi pengaruh apa-apa.

Sering juga ketika sebuah media memberitakan tentang kebobrokan suatu lembaga, kantor atau malah sebuah Bank, mereka langsung mempersiapkan jurus maut agar si wartawan tidak lagi menulis berita tentang kebobrokan bank tersebut. Semua orang tahu, keuangan sebuah bank tidak terbatas, meski tersebut milik nasabah. Tetapi, bunga atau keuntungan dari simpanan nasabah cukup untuk membayari seorang wartawan untuk membungkamnya.

Saya mendengar dari seorang kawan, bagaimana takutnya

beberapa pimpinan Bank, saat kasus raibnya dana Pemda Aceh Utara terpampang di halaman media ini. Berbagai upaya *shock therapy* disiapkan seperti menyediakan penasihat hukum untuk mensomasi media ini, meski kemudian upaya tersebut tidak jadi dilakukan, karena polisi berhasil membongkar kasus tersebut.

Tapi, upaya Bank ternyata tak hanya berhenti di situ. Karena beberapa hari kemudian, dengan perantara seseorang, pimpinan Bank mencoba menawarkan kerjasama, baik berupa pariwisata atau sesuatu yang bisa membuat media ini tidak lagi menulis tentang kasus Bank tersebut. Beruntung, upaya ini belum berhasil.

Para wartawan di lapangan saya kira juga menghadapi dilema seperti ini. Sering ketika si wartawan menulis suatu penyelewengan di sebuah kantor, dinas atau kantor pemerintahan, tetapi besoknya, berita tersebut langsung diralat oleh si wartawan yang bersangkutan. Upaya ralat tersebut, meski dalam dunia jurnalistik, ada aturannya, tetapi sering terasa janggal. Bisa jadi si wartawan sudah dibungkam dengan sejumlah dana (memang tidak terlalu banyak).

Jika dulu, saat pers dikontrol oleh penguasa, ketika sebuah media menulis berita yang buruk-buruk tentang penguasa, si penguasa cukup hanya duduk di kantor dan menelepon si pemilik media. Besoknya, pasti media tersebut akan lebih hati-hati dan menulis yang baik-baik saja. Si wartawan akan melawan istilah yang sering dikenal di dunia jurnalistik: *bad news is good news* dan cenderung setuju dengan *good news is news*. Jika pihak media membandel, dan tetap bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, yakinlah usia media tersebut tidak bakal lama, karena pasti dibredel.

Beruntung sekarang, hukum rimba berupa main bredel tidak dikenal lagi. Tetapi, jangan salah, pihak media pun menghadapi tantangan yang tak kalah berat, yaitu upaya suap agar si wartawan dan media tidak bebas menulis. Makanya, jika si wartawan sudah bisa di-jengkal isi perutnya, apapun berita yang ditulisnya tidak punya pengaruh lagi. “kasih duit Rp50 ribu, dia pasti tidak akan menulis lagi,” begitu ucapan yang sering kita dengar dari mulut si pemilik kuasa. (HA 25.06.08)

Sulet

KATA *sulet*, punya dua arti. Tergantung cara penggunaan kalimatnya. Ada yang mengartikan *sulet* itu berarti bohong, dusta, suka menipu atau mengatakan sesuatu yang tidak benar. Sering juga diartikan dengan sukar, payah, sesuatu yang tidak mudah dikerjakan. Misalnya, pejabat *nyan sulet*, *hanjuet pileh le ukue*. Arti *sulet* di sini berarti suka bohong, tidak bisa dipercaya, suka menyalahnyakan amanah. Sementara jika dalam kalimat berikut: *Proyek nyan sulet untuk ta peu gol*, berarti kata *sulet* di sini berarti sukar.

Tapi, jangan pernah untuk *meu-sulet*, karena sekali saja *meu-sulet*, *sampe ditimoh neungkee mie* tidak dipercaya. Jika sudah dicap *sulet*, selamanya orang tidak akan percaya lagi sama kita. Saking seriusnya perkara *sulet*, dalam agama pun mendapat porsi tersendiri, sampai Nabi pernah bersabda, *al khizbu la ummati*, orang yang berdusta itu bukan umat Nabi.

Nah, jangan suka bergaul dengan orang *sulet*. Karena *tiep uroe geutanyoe* akan *dipasoe lam itoken* (ditipu maksudnya). Jika ada yang tidak tahu apa arti *itoken*, tanya sama orang yang suka pakai sepatu. *Itoken* sama dengan kaus kaki. Tapi, jangan bayangkan *dipasoe lam itoken* yang baru dibeli, melainkan *itoken* yang sudah sebulan tidak pernah disentuh air. Bisa dibayangkan bagaimana aroma baunya. Pasti menyengat.

Dalam masyarakat Aceh, orang *sulet* sering disamakan juga dengan orang *paleh* (orang jahat). Orang *sulet* itu bisa menimbulkan pengaruh luar biasa, termasuk mencelakakan orang lain. Pengalaman saat DOM, DM dan operasi-operasi militer lainnya di Aceh, banyak orang Aceh meninggal sia-sia karena *haba sulet*, atau seseorang memberi informasi yang tidak benar. Makanya, *sulet* sangat berbahaya.

Endatu kita juga sudah pernah mengingatkan, “*bek ta meungon*

ngon urueng paleh (baca ureung sulet), hareuta teuh abeh geutanyoe binasa.” Makanya, kita perlu berhati-hati dengan orang-orang sulet ini. Sebab, lebih banyak mudharatnya, ketimbang manfaat.

Lalu, jika penguasa sulet bagaimana? Itu memang sudah kerjanya penguasa. Bagi penguasa, sulet sudah hal biasa. Kalau tidak bisa *meu-sulet*, tidak bisa jadi penguasa. Saat kampanye juga mereka sudah *meu-sulet*. Mereka berjanji yang muluk-muluk, tetapi ketika berkuasa, janji tersebut tak pernah mampu ditunaikan. Makanya, ada yang bilang, penguasa itu lebih dekat ke orang munafik ketimbang kita rakyat miskin.

Memang sih, sekarang sudah ada cara *meu-sulet* profesional. Artinya, ketika mereka menipu, terlihat sangat berwibawa, sehingga pengemis pun tidak tahu kalau sang penguasa sedang *meu-sulet*. Tahu kenapa tidak ada yang tahu? Karena mereka jago ‘olah’. Orang sulet itu kan dikenal jago olah!

“Kita sangat peduli terhadap nasib rakyat. Kita akan berusaha membuka lapangan kerja, dan meningkat kesejahteraan untuk rakyat miskin,” begitu biasa bunyi pidato penguasa jika sedang berada di tengah-tengah rakyat. Rakyat yang tidak tahu bahwa mereka sedang di-olah (dikelabui) penguasa, pasti memberi *applus* berupa tepuk tangan meriah. Namun, ada juga yang diam-diam, berkata dalam hati: *nyan ka diolah lom geutanyoe!*

Makanya, rakyat harus cerdas. Sehingga tidak setiap Pemilu bisa diolah oleh juru kampanye atau penguasa! *Bek sabe ek dipasoe lam itoken*. Rakyat harus mampu berkata seperti bunyi ceramah Abraham Lincoln saat berpidato di Clinton pada 8 September 1858 yang mendapatkan sambutan luar biasa dari warga Amerika: “*You can fool all the people some of the time, and some people all of the time, but you cannot fool all the people all of the time*” (Anda dapat membodohi seluruh rakyat selama beberapa waktu, dan beberapa orang rakyat buat selama-lamanya, namun Anda tak dapat membodohi seluruh rakyat buat selama-lamanya). (HA 24.06.08)

Lumpoe

LUMPOE atau *geulumpoe* sering dialami oleh orang yang sedang tidur. Tetapi, tidak semua orang yang sedang tidur mengalami *geulumpoe* atau *lumpoe*. Karena ada juga yang tidak pernah mengalaminya (atau tidak sering). Namun, sekarang, *lumpoe* tak hanya milik mereka yang sedang tidur, orang jaga pun mengalaminya. Untuk orang seperti ini, sering disebut dengan, “*cot-cot uroe timang pih geulumpoe*,” atau sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

Dewasa ini, orang ‘jaga’ sering *geulumpoe*. Mereka bukan *geulumpoe cilet-cilet*, tapi *geulumpoe raya panyang*. Harapan yang terlalu berlebihan, sementara kemampuan terbatas. Banyak juga orang yang merenda masa depan dari sebuah mimpi. Einstein, Newton, Edison, dll memulai penciptaan dan penemuan mereka dari sebuah mimpi. Orang tidak pernah percaya terhadap sesuatu yang mereka mimpikan, tetapi ketika berhasil, mereka pun dipuja.

Tetapi, hati-hati, jika terlalu banyak *geulumpoe*, bisa berbahaya. Apalagi jika tidak didukung dengan kemampuan atau peluang. Mimpi bisa berakhir di sebuah rumah sakit jiwa.

Saya menduga, orang Aceh sekarang banyak hidup atau terbuai dengan mimpi-mimpi. Sering bukan mimpi mereka sendiri, melainkan mimpi orang lain. Tetapi, mimpi tersebut tak pernah jadi kenyataan. Anehnya, meski jarang jadi kenyataan, besok-besok jika mereka diajak bermimpi lagi, orang Aceh tak pernah membantahnya. Mereka mau saja diajak terbuai oleh mimpi lainnya.

Kita sudah pernah diajak untuk *geulumpoe* perubahan, *geulumpoe* hidup sejahtera, *geulumpoe* untuk merdeka, tapi kenyataannya kita tetap masih terjajah, miskin dan terbelakang. Kita juga sering dikasih *lumpoe* bakal ada kereta api bawah tanah, kebun sawit rakyat, tetapi rakyat sendiri tidak pernah tahu bagaimana kereta api bawah tanah itu, serta bagaimana bentuk kebun sawit rakyat.

Ada yang mengatakan, *lumpoe* merupakan setengah dari kesuksesan. Orang yang bisa bermimpi berarti orang tersebut sudah mempersiapkan peluang untuk sukses. Atau setidaknya, tahu apa yang hendak dicapai ke depannya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Namun, untuk kondisi sekarang, mimpi saja tidak cukup.

Saya punya contoh bagus. Ada seorang pengrajin madu (bisa saja pengrajin pemula). Suatu hari dia melihat sebuah pohon besar yang punya sarang madu. Dengan sedikit kemampuan *magic*, dia berhasil mengusir lebah dan mengambil madunya. Dia mengisi madu tersebut dalam botol yang jumlahnya puluhan. Dia sangat senang ketika melihat jumlah botol di hadapannya, dan dalam hatinya berkata: "Saya akan jadi orang kaya. Per botol akan saya jual Rp35 ribu. dananya nanti saya pergunakan membeli Ayam. Ketika ayam berkembang biak dan banyak, saya jual, lalu saya beli kambing. Ketika kambing jadi banyak, saya menjualnya, dan dananya saya pergunakan membeli Kuda.

"Wow, saya senang sekali. Keinginan saya membeli kuda akhirnya jadi kenyataan. Saya akan memacu kuda dengan kencang, dan kalau perlu saya ajak melompat tinggi," gumamnya dalam hati. Tanpa sengaja, ketika memperagakan gaya kuda meloncat, satu kakinya terkena botol Madu, akhirnya, menimpa yang lain dan jatuh...madu tumpah. Saat itu dia sadar, bahwa mimpinya tinggal hayalan.

Jika ini yang terjadi, jangan marah ketika Bang Joni menyindir: *Eh Malam!* (HA 23.06.08)

Martunis

SAYA tidak tahu, apakah saat laga Jerman versus Portugal, Martunis sempat menonton atau tidak. Tapi, jika Martunis sempat menonton laga tersebut, saya yakin dia akan menangis. Soalnya, 'abangnya' Ronaldo dibantai panser Jerman 3-2. Mimpi Portugal melaju ke babak selanjutnya pun tertahan. Penonton tak bisa lagi melihat aksi indah Ronaldo saat mengolah si kulit bundar.

Saya sendiri, saat menonton laga tersebut langsung terbayang pada sosok Martunis, seorang bocah Aceh 9 tahun (sekarang 12 tahun), yang selamat dari amukan tsunami, dan bertahan hidup di tengah puing-puing bekas tsunami selama 19 hari. Martunis hanya minum air atau makanan yang lewat dari laut. Saat ditemukan, Martunis hanya memakai pakaian sepak bola timnas Portugal.

Pakaian ini pula yang membuatnya menjadi sosok terkenal, dan bisa melanglang buana ke Portugal, menyaksikan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2006. Potretnya, dimuat secara besar-besaran di media massa, baik dalam maupun luar negeri. Martunis pun mendunia. Banyak wartawan asing lalu tertarik mewawancarainya.

Malah, Ronaldo yang sudah dianggap 'abang' oleh Martunis khusus datang ke Aceh menjumpainya. Padahal, Ronaldo seorang bintang terkenal, yang memiliki harga Rp1,1 triliun. Tapi itulah kekuatan sepakbola. Ronaldo saat itu tak lagi melihat Martunis sebagai seorang korban yang patut ditolong, melainkan faktor nasionalisme. Baju yang dipakai Martunis sangatlah berarti ketika muncul di TV luar, di mana Negara Portugal mendapat promosi gratis, apalagi dipakai oleh seorang korban tsunami, bocah lagi.

Saat Ronaldo melihat Martunis di televisi, baju yang dipakainya bukan lagi sekedar pakaian untuk digunakan, melainkan sudah menjadi simbol nasionalisme, apalagi bagi masyarakat Eropa yang terkenal gila bola.

Wajar jika baju timnas Portugal yang digunakan Martunis

menjelaskan banyak hal. Karena, di baju Martunis, sudah mengandung nilai-nilai nasionalisme, prestise, kebanggaan, kekayaan dan malah sebuah kekuatan lobi yang luar biasa. Tak hanya itu, baju yang dipakainya ternyata mampu mengubah nasibnya.

Tetapi belakangan, namanya tenggelam, bersama orangnya. Saya sendiri tak pernah lagi mendengar kabar bocah 'ajaib' tersebut. Padahal, pascatsunami namanya *bak* selebritis terkenal. Kemana Martunis? Apa yang sedang dilakukannya sekarang? Tak ada yang tahu.

Laga Jerman versus Portugal membuat saya teringat lagi pada sosok ajaib tersebut. Saya, bertanya-tanya dalam hati, bagaimana perasaan Martunis saat tim Portugal digilas Jerman? Menangiskah dia? Juga tak ada yang tahu.

Namun, melihat banyaknya penonton yang menangis, wajar saja jika seandainya Martunis juga ikut menangis. Karena secara emosional antara Martunis dan Timnas Portugal sudah terjalin sebuah hubungan yang sangat erat, tak lagi terpisah oleh sekat-sekat nasionalisme sempit. Karena, Sepakbola mengajarkan keterbukaan.

Jika pun Martunis tidak menangis, bisa jadi, dia sudah lupa dengan Sepakbola, dan sama sekali tidak tertarik lagi pada perhelatan Euro yang digelar empat tahun sekali itu. (HA 21.06.08)

Masjid

SAYA menulis pojok tentang Masjid ini tak bermaksud apa-apa. Bukan karena saya alergi dengan Masjid. Sama sekali bukan. Entah benar, entah tidak, saya tidak tahu, bahwa Masjid Raya sekarang selain menjadi tempat ibadah juga tempat bercengkrama/pacaran. Tak sulit menemukan sepasang remaja berbeda jenis kelamin duduk di halaman Masjid sambil tertawa dan sesekali dengan 'colekan-colekan' ringan.

Malah, saya mendengar seorang kawan bercerita, kebetulan dia duduk berdekatan dengan sepasang kekasih yang sedang merenda "masa depan." Bagi kawan saya, pemandangan itu terasa aneh saja, ketika Masjid dijadikan saksi resminya mereka berpacaran. "Jika adik tidak percaya kalau abang sangat cinta sama adik, Masjid Raya ini jadi saksi, bahwa Abang sangat mencintai adik," ujar si Pemuda sambil berdiri dan menunjukkan ke arah Masjid.

Mendengar cerita kawan tadi, saya jadi berpikir bahwa Masjid tak hanya menjadi tempat ibadah, atau tempat memuja Tuhan, melainkan berfungsi sebagai saksi bagi orang yang berpacaran. Kita akui, kalau Masjid Raya belakangan ini tak hanya dikenal sebagai Masjid termegah di Asia Tenggara, atau simbol ke-Acehan, melainkan juga sebagai tempat berbagai aliran bertarung, menanamkan pengaruhnya. Masjid Raya juga sudah "dilegalkan" sebagai kawasan wisata. Entahlah, apakah Masjid Raya juga menjadi objek wisata seperti kampanye Pemerintah Kota Banda Aceh, yang menjadikan Banda Aceh sebagai Bandar Wisata Islami. Saya tidak tahu pasti.

Ada juga yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa di Masjid Raya masih menggunakan plang nama untuk para "pembesar" (bukan besar perut tentunya) atau para pejabat yang shalat di *shaff* terdepan. Saya tidak tahu, apakah hal itu masih ada sekarang atau

tidak, karena sudah lama saya tidak pernah ke Masjid Raya lagi. Jika masih ada, itu sangat disayangkan, karena pengurus Masjid sudah menyelewengkan fungsi Masjid.

Padahal, seharusnya Masjid berfungsi sebagai tempat semua manusia dinilai sederajat, tidak dibeda-bedakan berdasarkan status sosial. Karena saat beribadah kepada Allah, tidak ada lagi yang namanya Gubernur, Kapolda, Pangdam, dan atau Kajati. Yang ada hanya hamba-hamba Allah.

Soal penyelewengan, sebenarnya, sejak dulu sudah terjadi. Misal, ketika Aceh sedang gawat-gawatnya. Saya sempat melihat beberapa bendera Merah Putih berukuran besar dinaikkan di beberapa bagian Masjid (bukan di tempat biasa). Kita akui, tindakan itu tidaklah salah, tapi, kita menangkap kesan politis di sana. Ada pertarungan nasionalisme yang kuat, dan sudah memasuki areal Masjid. Seolah-olah dengan menaikkan bendera berukuran besar di Masjid sudah menunjukkan bahwa orang Aceh sudah ditundukkan, dan satu pihak sudah dikalahkan.

Tapi *homlah*, itu sudah masalah politis, saya tidak mau terjebak. Hanya saja, saya ingin sampaikan bahwa fungsi Masjid sudah banyak berubah sekarang. Malah, saya pernah menanyakan kepada seorang kawan, ketika bergegas dan buru-buru memasuki Masjid. Saat saya tanyakan mau kemana, dengan enteng kawan saya menjawab: "*Lon jak toh iek dilee*." Dalam hati saya berfikir, *kok toh iek* harus ke Masjid? Bukankah Masjid tempat untuk orang beribadah memuja Tuhan!

Saya yakin, perilaku kawan saya tidak hanya terjadi di Banda Aceh, malah, Masjid di sepanjang jalan Banda Aceh-Medan sudah menjadi tempat *toh iek*. Pengguna jalan, yang menempuh perjalanan jarak jauh, pasti sering berhenti di Masjid, kadang-kadang bukan karena mau Shalat, melainkan sekedar *rhah* muka dan *toh iek* (ada juga yang *toh ek*).

Tetapi kita tetap berharap, agar tidak ada Masjid di Aceh yang berubah menjadi Masjid Drirar yang pernah dibakar oleh para sahabat Nabi karena sudah menjadi tempat berkumpulnya kaum munafik yang berniat meninggalkan dakwah Nabi. (HA 19.06.08)

HP

HP yang saya maksud di sini bukanlah sebuah merek dagang, melainkan Handphone, sejenis alat komunikasi yang menggunakan sinyal. Hampir sebagian besar manusia sekarang menggunakan HP sebagai alat berkomunikasi. HP tak lagi merupakan barang mewah yang sulit dijangkau, karena anak SD juga sudah memilikinya.

Malah, sekarang fungsi HP tak lagi sekedar alat untuk menelepon atau SMS, melainkan juga berfungsi sebagai kamera, mendengar musik, atau alat untuk mencatat pesan-pesan penting. Tak jarang juga digunakan sebagai alat menonton film biru (BF), yang banyak beredar itu. Ada juga yang iseng merekam sendiri adegan porno di Hp-nya.

Pokoknya, alat tersebut sudah menjadi semacam kebutuhan akan tuntutan hidup modern. Tak memiliki HP dianggap kuno, kampungan atau belum pantas hidup di dunia yang serba modern ini. Hanya saja sekarang, merek atau modelnya yang menunjukkan seseorang berkelas atau tidak. Dulu, misalnya, semua pejabat sangat bangga memiliki Nokia 9500, meski fasilitas yang digunakan hanya untuk SMS dan menelepon.

Tapi sekarang, para pejabat, atau yang ingin tampil prestise, sudah cukup bangga punya Nokia E90. Sepertinya, jika belum memiliki HP merek tersebut belum layak disebut berkelas atau punya koneksi bisnis yang luas. Aneh-aneh saja orang sekarang.

Namun, yang ingin saya sampaikan bukan itu. HP diakui atau tidak sudah membuat silaturahmi (secara fisik) berkurang. Tak jarang, dengan Hp juga membuat orang semakin mudah berbohong, atau menyembunyikan kebohongan. Misal, ada seorang wartawan yang ingin mengonfirmasi tentang suatu kasus penyelewengan, karena kasus tersebut layak diketahui oleh masyarakat, tetapi si pelaku dengan enteng mematikan HP, atau mengaku sedang tidak

berada di tempat.

Meski sebenarnya, orang tersebut tidak kemana-mana, tetapi siapa yang bisa memastikan tempat yang dia sebutkan benar atau tidak? Misalnya saja, saat kita telp, dia mengaku sedang berada di Medan, Jakarta atau di kota-kota besar lainnya, tapi apakah ucapannya benar? Bisa saja dia sedang berada di salah satu kota di Aceh, atau malah di kantor. Jika kita tidak bisa memastikan atau tertangkap tangan, maka dia sudah berbohong.

Makanya, HP juga berfungsi sebagai alat untuk berbohong. Ada juga si suami yang selingkuh, tetapi HP-nya tidak boleh dipegang oleh isterinya. Isterinya tidak boleh mengetahui isi HP suaminya. Karena, jika diketahui sebuah hubungan keluarga bisa hancur. Jika pun ada SMS masuk, dan kebetulan si isteri melihatnya, si suami dengan gampang mengatakan, “*oh...itu rekan bisnis papa,*” meski sebenarnya adalah SMS dari selingkuhannya.

Selain itu, dengan berbicara melalui HP, lebih bisa menyembunyikan kebohongan, karena saat menyampaikan sesuatu, kita tidak bisa memastikan bahwa ucapannya berbohong atau tidak, karena kita tidak bisa melihat mimik wajahnya. Sementara kalau berbicara langsung, dari kedip atau gerak matanya kita bisa tahu, bahwa dia berkata benar atau tidak. Tak hanya itu, dengan berbicara lewat HP, seseorang dengan gampang mengatakan tidak tahu. Padahal, jika berhadapan langsung, bisa jadi dari jawabannya, kita bisa mempertanyakan lagi, dan tak bisa dipotong, sementara jika lewat HP bisa langsung dimatikan. *Kiban?* (HA 18.06.08)

Pungo

PUNGO, sebuah kata yang aneh. Namun, saya yakin, orang Aceh sangat paham dan mengerti tentang arti dari kata *Pungo* ini. Hal ini, bukan hanya karena orang Belanda pernah memberi label *pungo*—Aceh Moorden—untuk orang Aceh, melainkan juga karena dalam praktik sehari-hari, kita sering menemui perangai orang Aceh yang boleh disebut *pungo*. Lalu, bagaiman sebenarnya definisi *pungo*? Kata *Pungo*, kalau diterjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia berarti gila, tidak waras, atau mengalami penyakit saraf.

Namun, bagi orang Aceh sendiri, sebutan *Pungo* tak hanya karena seseorang terganggu sarafnya, melainkan juga dengan melihat perilakunya. Misalnya, orang tua yang terkenal sangat kejam dan suka memukul anaknya, sering diberi label oleh tetangga dengan istilah *ureung syik pungo bui* (orang tua yang taraf gilanya sudah melebihi rata-rata dan disamakan dengan babi gila). Selain itu, istilah *pungo* juga diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan yang mengganggu ketentraman orang lain.

Contohnya, jika ada anak muda yang membawa sepeda motor dengan kencang atau ugal-ugalan di jalan *Gampong*, juga disebut *pungo*. “*Jeh si Gam pungo, di kampung pih balap Honda*teuga-teuga* (Itu si anak muda gila, di kampung saja sudah bawa lari sepeda motor kencang-kencang),” begitu biasanya teriak orang *Gampong* yang sedang duduk di *bale jaga*. Untuk anak muda seperti ini, sering didoakan *beubagah mate* (cepat meninggal). “*Nyan misue cot reuda u langet, bek tatem peubudoh, bah bagah wabah kireuh* (jika terjadi sesuatu atau terbalik, jangan kita bantu biar cepat tewas).”

Sementara untuk orang yang benar-benar terganggu sarafnya, orang *Gampong* hanya mengatakan, “*Si Gam nyan saket ulee*.” Jika *saket*-nya sudah pada taraf yang cukup parah, orang tersebut biasanya akan di-*noh/noek* (dipasung). Itu pun jika perilakunya

sudah sangat mengganggu warga kampung.

Sekilas memang benar, kalau orang Aceh itu *pungo*. Ini sama sekali bukan vonis. Kita boleh sepakat dengan julukan yang diberikan orang Belanda ini. Sebab, dulu, label *Pungo* diberikan untuk orang Aceh karena satu orang Aceh berani menyerang *konvoi* pasukan Belanda yang sedang operasi. Ada juga yang mengatakan, orang Belanda memberi label *pungo* untuk orang Aceh, karena ketika pasukan Belanda sedang jalan-jalan melihat orang Aceh naik pohon kelapa sambil mengikat kakinya.

Kita bisa juga mengatakan jika orang Belanda sebenarnya *pungo* juga, karena tidak tahu bahwa yang digunakan orang Aceh untuk mengikat kakinya adalah *singkreut* atau *seuringkuet* atau tali yang dipergunakan untuk menahan kaki ketika sedang memanjat kelapa. Jadi bukan mengikat kaki agar tak dapat bergerak.

Lalu, bagaimana sekarang? Ketika sedang musim tender seperti sekarang ini, saya mendapati banyak orang Aceh—meski bukan hanya orang Aceh saja—tergila-gila ingin bisa membeli mobil mewah merek *Harrier*. Keinginan tersebut lebih tinggi dari tahun lalu, yang hanya ingin bisa memiliki mobil Honda CRV atau New CRV. Untuk orang seperti ini, orang Gampong biasanya menyebut mereka dengan istilah *Pungo Moto***.

Tentang keinginan ini, saya jadi teringat ketika awal-awal reformasi di Aceh. Saat itu, orang Aceh hanya meminta para pelanggar HAM diadili, tetapi tak juga digubris oleh pemerintah pusat. Lalu, orang Aceh menaikkan permintaannya, dengan meminta agar Aceh diberikan perimbangan keuangan, 70 persen untuk Aceh, dan 30 persen untuk pusat, serta minta Negara federal. Permintaan ini juga tidak digubris, lalu Aceh meminta Referendum. Tuntutan ini juga tak kunjung diberikan. Karena marah, orang Aceh serentak meminta Merdeka.

Dari sinilah terlihat, bahwa orang Aceh dalam meminta sangat *Pungo*, dan selalu menaikkan penawaran. Bagi orang Aceh, itulah gensi. Tetapi, ternyata Indonesia lebih bisa *pungo* lagi. Orang Aceh minta merdeka, yang diberikan malah darurat militer! *Biet-biet pungo*. (HA 17.06.08)

Politik Bola

LAGA Perancis *versus* Belanda, Sabtu (14/6/08) dinihari, tak hanya menarik ditonton. Banyak hal yang bisa kita nikmati dari laga tersebut, seperti permainan bola indah dan menyerang. Pecinta si kulit bundar benar-benar dibuat terlena, tak hanya oleh gol-gol yang lahir dari kejeniusan si pemain, melainkan bagaimana kedua tim ingin tampil menjadi yang terbaik dalam laga tersebut. Meski, pada akhirnya, Perancis harus mengakui keunggulan *total football* yang diperagakan anak-anak Belanda dan sukses memukul Perancis dengan skor telak, 4-1.

Tapi, ada yang kita lupakan dari laga tersebut. Bahwa, apa yang terjadi dalam laga Perancis *versus* Belanda, ternyata sering juga terjadi di dunia nyata, bahkan sangat nyata. Laga tersebut, seperti membenarkan kembali teori *Machievalli* yang diproklamirkan ratusan tahun silam, bahwa “Tak ada lawan atau kawan sejati, yang ada hanya kepentingan abadi.”

Ya...teori Machievalli tersebut begitu nyata. Sepakbola, jadinya, tak hanya sebatas pertandingan. Sepakbola juga berarti pertarungan politik, menegakkan gensi, ideologis dan semuanya. Sepakbola seperti mengajarkan kita untuk lebih hati-hati dalam memilih teman, khususnya terkait urusan politik. Machievalli benar ketika mengatakan, bahwa tak ada yang abadi dari sebuah hubungan pertemanan, karena yang selalu tampak nyata adalah kepentingan.

Teman dalam politik, kata Machievalli, tak pernah abadi, demikian juga musuh. Semuanya hanya berjalan begitu saja, karena pada akhirnya, kepentinganlah yang membuatnya retak atau menyatu. Lihatlah, bagaimana Patrice Evra berjuang menjebol gawang Edwin van Der Sar. Padahal, ketika bersama Manchester United, baik Van Der Sar maupun Evra saling bahu membahu menjaga agar gawang klubnya tidak kebolan.

Hal yang sama juga terjadi antara William Gallas dan Van Persie. Saat di Arsenal, kedua pemain ini bersama-sama saling bantu membantu untuk menjebol gawang lawan, tetapi dalam laga Perancis *versus* Belanda, jiwa nasionalisme yang menuntun mereka untuk saling menundukkan, mengalahkan, dan mempermalukan. Tak jarang, antara keduanya terlibat tekel keras, padahal aksi seperti itu tak pernah kita temui saat mereka membela kepentingan Arsenal.

Ke depan, di perempat final, hal-hal seperti itu akan semakin sering kita saksikan, saat kawan satu klub saling bunuh membunuh ketika membela kepentingan negaranya. Masing-masing, termotivasi menjaga marwah bendera negaranya. Artinya, begitu mereka menggunakan kostum yang berbeda di lapangan, mereka yang sebelumnya berteman, akan bertarung mati-matian sebagai musuh.

Realitas demikian sangat gampang ditemukan di dunia nyata, bahkan malah sangat dekat dengan kita. Dalam Pemilu 2009 di Aceh yang melibatkan partai politik lokal, kita akan melihat bagaimana kawan-kawan dari Partai Aceh (PA) yang dimotori awak GAM bekerja mati-matian mengalahkan partai lokal lainnya seperti Partai SIRA. Kenapa bisa terjadi? Bendera yang membuat mereka berubah. Padahal, kita tahu, dulunya kawan-kawan SIRA-lah yang mengakui GAM sebagai Pemerintah Neugara Aceh (PNA), ketika organisasi lain bungkam dan takut berhadapan dengan TNI.

Tapi, itulah politik. Sebuah kebersamaan dalam sekejap bisa hancur, saat kepentingan berbelok. Makanya, saya selalu sarankan, untuk siapa saja yang sudah terjun ke dunia politik, "Jangan pernah percaya teman yang kamu temui dalam politik!" Kawan dalam politik hanyalah kawan semu, atau kawan kamuflase. (HA 16.06.08)

Sabang

BEBERAPA waktu lalu, saya diajak ke Sabang oleh Wakil Bupati Aceh Timur. Sampai di sana, saya melihat belum banyak yang berubah. Meski, untuk berangkat ke sana, saya bisa menumpang kapal cepat Ekpress Bahari, yang baru saja diresmikan. Tapi, saya tak melihat hal-hal yang membanggakan dari Sabang, meski beberapa ruas jalan di sana sudah sangat bagus.

Dari obrolan singkat dengan Wakil Walikota Sabang di sana, Tgk Islamudin, saya menangkap banyak sekali keinginan untuk membenah Sabang menjadi lebih baik, agar kenangan tahun 1980-an bisa terulang kembali. Misalnya, bagaimana pemerintah kota Sabang menarik minat investor untuk menanamkan investasinya di sana.

Sebenarnya, di Sabang sudah ada Badan Pengelola Kawasan Sabang (BPKS), tetapi sampai saat ini belum menunjukkan taringnya. Belum terlihat kinerja yang patut dibanggakan. Padahal, seharusnya, Sabang sudah bisa menjadi pelabuhan bebas, yang benar-benar bebas. Artinya, berbagai komoditas yang ada di Sabang, dan juga dari Aceh sudah bisa *diekport* ke luar, begitu juga dengan barang-barang keperluan masyarakat bisa diimpor bebas ke Aceh.

Tetapi kenyataannya, hal itu belum bebas dilakukan. Malah, saya melihat masih banyak mobil eks Singapura di Sabang. Mobil tersebut belum boleh dibawa ke daratan Aceh, karena tersangkut dengan izin. Akibatnya, sebagian mobil tersebut malah hampir karatan.

Namun, saya sedikit mendapat pencerahan atau optimisme bahwa Sabang bisa maju ke depan. Pencerahan ini saya dapatkan ketika di penginapan, Sabang Hill, beberapa investor dari Malaysia memberi saran bagaimana mengembangkan Sabang. Memang, usulannya sederhana saja, dan sangat gampang dilakukan, tetapi keinginan untuk bisa diimplementasikan sepertinya agak sedikit sulit.

Menurutnya, jika Sabang ingin menggaet investor atau setidaknya mengembangkan potensi wisata, pemerintah Sabang harus bisa menyediakan koneksi internet di seluruh kawasan Sabang. Hal itu katanya untuk memenuhi tuntutan kehidupan modern dari para wisatawan atau juga kalangan lainnya. Karena, ketika mereka datang ke Sabang, tidak hanya bisa menikmati keindahan yang ditawarkan kawasan Sabang, melainkan mereka masih bisa melakukan komunikasi dengan kawan-kawan atau jaringan bisnisnya di tempat lain. Jadi, ketika mereka pergi ke Sabang, jalinan komunikasi mereka tidak terputus, atau informasi terbaru selalu ter-update. Mereka bisa mengabarkan keindahan Sabang kepada rekan-rekannya, dengan mengirimkan foto-foto terbaru.

Selain itu, ada optimisme lain yang disampaikan, bahwa saatnya Sabang atau pelabuhan lainnya di Aceh melakukan kontak langsung dengan Penang, karena salah seorang timbalan menteri (atau pejabat di Penang), merupakan orang yang sangat mencintai Aceh. Malah, seperti disampaikan beberapa pengusaha China Malaysia saat obrolan santai itu, Prof. Rama Sami (seorang menteri di Penang) menyatakan ingin membangun hubungan perdagangan dengan Aceh. Jika *angen syuruga* ini benar-benar bisa diwujudkan, Sabang atau pelabuhan lain di Aceh akan kembali hidup.

Ada lagi cara membuat Sabang diminati oleh investor atau pengusaha lainnya, seperti disampaikan Wakil Walikota, bahwa kendala dan hambatan yang membuat wisatawan *beu-o* berkunjung ke Sabang karena sarana transportasi darat yang sangat kurang. Jika pun ada, beberapa mobil kondisinya sudah *saket* sehingga para bule merasa takut menumpangnya. Islamudin, berharap Pemerintahnya bisa mewujudkan memperbaharui sarana transportasi tersebut.

Tapi, sepulang dari Sabang, saya justru terbebani dengan pertanyaan, apa yang sudah berubah di Sabang? Pertanyaan ini muncul karena sampai saat ini, Wakil Walikota Sabang masih sendiri, alias jomblo! (HA 14.06.08)

Efek

MESKI tak ada data kongkrit, diyakini banyak PNS yang malas masuk kantor akhir-akhir ini. Tidur terlalu larut, sering jadi kambing hitam. Lagi-lagi Bola yang disalahkan. Ya...tak bisa dibantah, bahwa permainan si kulit bundar menghipnotis siapa saja, termasuk PNS. Semua terkena dampak 'demam' bola.

Pihak media massa, baik cetak maupun online, berlomba-lomba menyajikan informasi menarik, terbaru, dan unik dari perhelatan yang digelar setiap empat tahun ini. Tak jarang pula, pihak media menyediakan lomba tebak score, juara euro, pemain terbaik dan lain-lain, agar medianya diminati.

Sementara di kampung-kampung, ajang pertandingan sepak bola, menjadi sumber penghasilan. Banyak anggota masyarakat yang bermain tebak score dengan nilai dari ratusan ribu sampai jutaan. Mereka seperti hendak menguji teori kemungkinan, apakah berpihak padanya atau pada orang lain. Meskipun, ketika tim yang dijagokannya kalah, sumpah serapah yang keluar. Tetapi, kemungkinan menang, dan mendapatkan uang menjadi motivasi untuk selalu berjudi, siapa tahu dewi fortuna memihaknya.

Semua sepakat, bola memang tak lagi memandang usia, status sosial, atau antara orang-orang kampung dengan kota. Bola menjadi permainan yang sangat manusiawi. Dunia menjadi bersatu karena bola. Perang bisa berhenti karena bola. Perpecahan dalam negeri bisa reda karena bola. Konflik rumah tangga juga bisa reda karena bola. Sebab suami tak perlu memarahi isterinya, karena terlalu asyik menonton bola.

Efek dari bola juga luar biasa. Kejadian di Laweung, misalnya, seorang pria nekat memasuki kamar isteri orang lain, karena si suaminya asyik menonton bola. Kejadian ini, pasti banyak juga terjadi di tempat lain, meski tidak masuk media. Jadi, musim bola

juga menjadi sarana memudahkan segala perbuatan maksiat terjadi.

Maling juga semakin bebas beraksi, karena banyak lelaki memilih memelototi TV, daripada berada di rumah. Sementara si isteri pasti tertidur lelap, dan tak berharap suaminya kembali. Karena, jadwal bola sudah sangat larut. Pagi sang suami baru pulang ke rumah.

Pokoknya, banyak hal yang terjadi, di samping banyak hal pula yang bisa diambil dari bola. Untuk para politisi, agar dekat dengan rakyat pilihannya, bisa menggelar kegiatan nonton bareng, untuk mendengar aspirasi atau keluhan yang dialami rakyatnya. Karena bola, bisa menjadi sarana mendekatkan kembali rakyat dan pejabat yang sudah dipilihnya. Hal ini tak terlepas, karena bola sering menjadi ajang menyatukan hati yang sedang koyak. (HA 13.06.08)

Fanatisme

ORANG Aceh benar-benar gila bola. Hampir di semua warung kopi sekarang memasang layar tancap, agar menarik minat masyarakat menonton bola. Pemilik warung kopi tentu saja untung, karena berjubel-jubel warga menonton. Datang musim bola, seperti pesta untuk pengusaha warung kopi. Tapi, meski masyarakat sangat gila bola, pihak pengusaha warung kopi tidak ikut-ikutan gila dengan menaikkan harga segelas kopi, melainkan pelayanan diusahakan sebagus mungkin, sehingga warungnya jadi tempat favorit.

Ternyata antusiasme masyarakat Aceh menonton bola, tak jauh berbeda dengan yang terjadi di Eropa. Di Belanda dan Portugal, misalnya, tayangan piala Eropa mendapatkan *share* penonton 80 persen. Hal yang sama juga terjadi di Negara-negara lain, khususnya yang timnya lolos ke perhelatan 4 tahunan tersebut. Seperti dikutip situs *detiksport*, pihak UEFA mengaku puas dengan antusiasme masyarakat yang menonton bola.

Mungkin pihak UEFA akan terkejut jika mengetahui masyarakat Aceh juga menggilai bola. Karena dari kota sampai *Gampong*, warung kopi selalu penuh. Tak peduli tua, muda, semua rela memelototi TV sampai larut malam. Karena, sepertinya inilah fanatisme yang tidak bisa ditandingi oleh hal apapun. Bola benar-benar mengglobal.

Jangan tanya, tentang klub favorit yang didukung oleh masyarakat Aceh. Karena soal yang satu ini, orang Aceh dijamin punya pendapat beragam. Orang Aceh sangat demokratis, dan punya tim favorit masing-masing. Sangat beragam. Tak ada tim yang didukung mayoritas orang Aceh.

Dalam mendukung, orang Aceh juga tidak fanatik buta atau taklid buta. Karena dalam mendukung sebuah tim, orang Aceh punya alasan, yang kadangkala membuat kita geli mendengarnya. Misal, ada orang Aceh mendukung tim Perancis. Saat ditanya

kenapa, dia langsung memberi alasan, “Perancis dulu menentang agresi AS ke Irak.”

Ada juga yang mendukung Turki. Hal itu bukan karena faktor Islam atau hubungan sejarah. “Saya mendukung Turki, karena benderanya hampir sama dengan bendera GAM,” ujar seorang kawan.

Tak sedikit juga yang mendukung tim Belanda. Saat ditanya kenapa, ada yang menjawab ‘kangen’ dengan masa penjajahan dulu, sebab ada kereta api. Ada juga yang menjawab, Belanda menyimpan arsip sejarah Aceh. Kalau kita tidak mendukung Belanda, arsip Aceh akan dihancurkan, dan kita kehilangan sejarah.

Banyak juga masyarakat Aceh mendukung tim Jerman, karena Jerman banyak membantu program rehab-rekons di Aceh. Malah, sebuah rumah sakit di Banda Aceh sedang dibangun oleh Pemerintah Jerman. Yang aneh dan mungkin karena fanatisme terhadap perjuangan GAM, ada orang Aceh mendukung tim Sweden. Saat ditanya kenapa, jawabnya: Wali Neugara Hasan Tiro tinggal di Sweden.

Jangan anggap tim Italia tidak ada pendukung di Aceh. Ada juga pendukung Italia di sini, karena Italia menawarkan permainan indah. Tapi, kita berharap jangan sampai ada orang Aceh mendukung tim Italia karena alasan Paus tinggal di sana (Roma). *Nyan kabrat sange*. (HA 12.06.08)

Pemerintah

KEMARIN saya melihat sebuah foto di sebuah media. Di foto tersebut terlihat beberapa personil polisi yang berjaga-jaga di sekitar Istana Negara, Jakarta merapikan kawat berduri yang dipasang di sekitar jalan masuk Istana. Kawat berduri tersebut selalu menjadi sasaran kemarahan para pendemo, karena menghalangi mereka masuk dalam Istana.

Foto tersebut, setidaknya, memberikan gambaran, betapa takutnya pemerintah terhadap aspirasi yang dibawa rakyat, yang bertamu ke Istana. Para polisi yang berjaga-jaga juga melihat dengan tatapan penuh kemarahan, seolah-olah para pendemo adalah anjing yang mengganggu stabilitas dan keamanan Istana. Berkali-kali, sumpah serapah dikeluarkan: “Setiap hari demo, membuat kita harus selalu berjaga-jaga. Sepertinya kita tidak ada pekerjaan lain, hanya mengurus orang-orang yang selalu mencaci dan mencerca.” Begitu kira-kira kata-kata yang selalu keluar dari mulut mereka.

Padahal, andai saja pemerintah punya nurani, tipis kemungkinan masyarakat atau rakyat mendatangi langsung Istana. Kedatangan rakyat ke Istana, membuktikan bahwa pemerintah selalu absen terhadap urusan-urusan masyarakat. Artinya, pemerintah tidak pernah memperhatikan nasib rakyat, dan selalu mengeluarkan kebijakan tanpa berkonsultasi dengan rakyat, apakah suatu kebijakan patut dikeluarkan atau tidak.

Nah, ketika suatu kebijakan tidak dikonsultasikan dengan rakyat, jangan heran kalau kebijakan tersebut selalu ditolak. Dan penolakan rakyat ini jangan dipahami bahwa rakyat tidak menyukai pemerintah. Rakyat hanya saja ingin mengingatkan pemerintah, bahwa tanpa rakyat, tidak ada pemerintah. Tanpa rakyat, tak ada Negara.

Jadi, jika kondisinya demikian, kenapa pemerintah takut menemui rakyatnya sampai Istana pun dipasang pagar berduri?

Padahal, rakyat yang datang ke Istana sama sekali bukan pengemis, hanya saja mereka ingin agar segala sesuatu dimusyawarahkan, apalagi terkait dengan urusan rakyat.

Saya jadi ingat masa kecil, saat main *pet-pet* (petak umpet) atau perang-perangan, begitu mendengar pemerintah (Camat atau Bupati) datang ke kampung, kami anak-anak berlari pulang ke rumah masing-masing. Menurut orang tua kami saat itu, pemerintah digambarkan sangat jahat dan suka membunuh. Kami sebagai anak-anak tentu saja terpengaruh dengan pikiran tersebut. Apalagi, saat itu, kondisi kampung kami sedang masa konflik, kehadiran pemerintah sebagai suatu bencana.

Sementara kondisi sekarang, berbeda. Pemerintah (Bupati) yang takut menemui rakyatnya. Padahal, mereka dipilih oleh rakyat, dan saat kampanye sering berada di kampung berbicara dengan rakyat. Namun, begitu duduk di jabatan Bupati atau yang lebih tinggi, mereka *enggan* bertemu rakyatnya. Memang, dunia berputar, jika dulu rakyat yang takut menemui Pejabat pemerintah (Bupati, Gubernur, dan Presiden), sekarang merekalah yang takut kepada rakyatnya. (HA 11.06.08)

BAGIAN KETIGA
POLTEK HANA TTEK

Kekuasaan

KETIKA menulis tentang kekuasaan, mau tak mau, nama Guru Besar Sejarah Modern Universitas Cambridge, Lord Acton, harus dilibatkan. Sejak awal abad ke-19, Acton sudah mempopulerkan istilah *power tends to corrupt*. Lord Acton seperti menyadari bahwa kekuasaan sangat paradoksal. Sesuatu yang saling bertolak belakang.

Kekuasaan cenderung korup, sementara kekuasaan mutlak cenderung korupsi dengan mutlak. Demikian Acton menyampaikan khutbahnya. Semua pakar politik sepakat dengannya. Kekuasaan dan korupsi, selalu dipandang sebagai dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Hal itu karena, tindakan korup, atau korupsi itu sendiri hampir selalu mengiringi setiap kekuasaan, sementara kekuasaan diyakini sebagai pintu terbaik dan mudah melakukan korupsi.

Kekuasaan memudahkan semua hal. Teman, yang tak dikenal sekalipun akan mendekat tanpa diundang. Penghormatan akan kita dapatkan, meski kita tidak gila hormat. Malah, orang tergila-gila menghormati kita. Tapi, sering pula, kekuasaan menyilaukan mata. Dengan kekuasaan, kita sering lupa sama kawan, saudara, atau orang-orang yang pernah membantu kita. Meski sering pula, kekuasaan juga membuat kita lupa sama orang lain, dan merangkul saudara sendiri dan memberi mereka jabatan-jabatan strategis.

Soeharto, dalam hal ini, cocok dijadikan sebagai contoh. Dengan kekuasaan yang melebihi kekuasaan siapa pun di Indonesia, sukses membangun kroni-kroni yang terdiri dari saudara, famili, kawan dan orang-orang yang mau dijadikan sebagai budaknya. Makanya, selama 32 tahun berkuasa, Soeharto sukses membangun kerajaan Cendana dan menanamkan paham soehartoisme. Tak ada siapa pun yang lebih berkuasa, kecuali kekuasaan Soeharto.

Tapi, di akhir masa jabatannya, Soeharto sangatlah rapuh. Kekuasaan yang begitu besar ambruk oleh pekikan heroik dan

keberanian para mahasiswa. Kawan-kawan yang dulu dekat dan menyembahnya satu persatu menjauh darinya, dan berusaha menjadi penumpang gelap kendaraan baru. Dekat dengan Soeharto saat itu, pertanda karir bakal tamat. Meski ada juga orang yang mati-matian membela Soeharto, karena Soeharto sudah menjelma menjadi dewa yang patut dipuja.

Karenanya, tak ada alasan lain, jika harus kaya maka mutlak kita harus memiliki kekuasaan. Jika kita gila hormat, juga bisa didapatkan melalui kekuasaan. Dengan kekuasaan pula, semua bisa dibeli. Hakim bisa dibeli, kekayaan bisa dibeli, penghormatan bisa dibeli, kawan bisa dibeli, bahkan termasuk harga diri bisa dibeli. Lewat kekuasaan pula, kita bisa membangun citra, di hadapan rakyat. Meski kita seorang penjahat, tetapi dengan modal kekuasaan, kita mampu mengubah tampilan jahat menjadi seorang ratu adil yang ditunggu-tunggu.

Tak hanya itu, kebenaran juga bisa dibeli. Tapi, yang perlu diingat tak semua hal bisa dibeli dengan kekuasaan. Sebab, kekuasaan juga punya keterbatasan. Kekuasaan tak bisa membeli hati nurani. Berbahagialah orang-orang yang punya kekuasaan dan memiliki hati nurani. Sebab, itulah sebenarnya modal kita hidup, bukan kekuasaan. Dengan hati nurani pula, kita masih pantas menyebut diri manusia. *Nyan ban* kekuasaan! (HA 10.06.08)

UT

SAAT menulis pojok tentang UT ini, saya terpaksa harus membuka situs Wikipedia. Saya tidak ingin orang-orang mendapatkan informasi yang salah tentang tema yang saya tulis ini. Di situs ensiklopedi virtual ini, UT atau Universitas Terbuka diberi definisi sebagai perguruan tinggi negeri yang menerapkan sistem belajar jarak jauh dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan tinggi kepada mereka yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti pendidikan tinggi tatap muka (konvensional).

Universitas Terbuka atau biasa disingkat dengan sebutan UT diharapkan mampu menjangkau seluruh pelosok tanah air, tanpa membatasi usia, kondisi sosial ekonomi, dan waktu.

UT diresmikan pada tanggal 4 September 1984, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 41 Tahun 1984. UT telah memperoleh Sertifikat Kualitas dan Akreditasi Internasional dari Internasional Council for Open and Distance Education (ICDE) Standard Agency (ISA) tanggal 12 Agustus 2005. Pada tanggal 14 Maret 2006, UT juga memperoleh Sertifikat ISO 9001:2000 untuk bidang Layanan Bahan Ajar dari Badan Sertifikasi SAI Global.

Informasi di atas setidaknya sudah memberi gambaran kepada kita, apa sebenarnya yang disebut UT. Tapi saya tidak tahu, ada berapa UT di Aceh yang benar-benar UT. Saya belum begitu update informasi tentang keberadaan UT ini. Hanya saja, setiap ke kampus Darussalam, saya justru melihat Kampus sangat terbuka sekarang. Pagar yang pernah dijanjikan sampai sekarang belum dibangun, padahal, soal pagar sudah pernah didemo oleh mahasiswa.

Memasuki areal kampus, saya mendapati kesan, inilah UT yang sebenarnya. Kondisi IAIN benar-benar mirip UT. Di sana tak hanya manusia yang belajar, melainkan binatang juga belajar di

sana. Malah, binatang seperti lembu atau kambing sering masuk ke kampus bersamaan dengan mahasiswa lainnya. Bedanya, mahasiswa belajar dalam ruang, sementara lembu atau kambing hanya *meurot* di samping ruang belajar mahasiswa.

Saking terbukanya, menurut pemberitaan Harian ini beberapa waktu lalu, sepasang mahasiswa dan mahasiswi dari Unsyiah ditangkap sedang berbuat mesum di Musalla Fakultas Tarbiyah. Mungkin kedua manusia yang sedang dimabuk asmara ini menduga, IAIN sudah sangat terbuka sekarang. Semua hal bisa dilakukan termasuk mesum.

Tak hanya itu, di IAIN juga masuk *isme-isme* dan partai politik dengan agenda tertentu. Ada yang berkedok dakwah, ada juga yang berkedok memperjuangkan kesejahteraan. Semua mereka mencoba meracuni otak mahasiswa yang masih bersih dengan utopia-utopia dan ilusi yang tidak jelas.

Iya, memang IAIN sangat terbuka sekarang. Siapa saja boleh masuk kampus, termasuk maling sekalipun. Dari maling berdasi atau terhormat, sampai maling *cilet-cilet*. Buktinya, beberapa fakultas pernah kehilangan komputer atau peralatan kantor lainnya. Mahasiswa juga sempat kecurian sepeda motor. Nah! (HA 090608)

Lupa

DULU, seorang kawan saya dari Subang, Jawa Barat melontarkan sebuah pernyataan yang menurut saya cukup menohok, '*Orang Aceh tidak pandai berterima kasih ya? Orang Aceh cepat sekali melupakan bantuan orang!*' Saya tentu saja kaget. Soalnya, selama ini dia tidak pernah menampakkan sikap tidak suka terhadap orang Aceh. Malah, selama kami dalam *safety house*, dia termasuk banyak membantu.

Saat saya tanya, kenapa bisa membuat kesimpulan secepat itu? Lalu dia cerita, saat awal-awal Darurat Militer, rumahnya di kawasan Ciputat, Banten, jadi tempat persembunyiaan aktivis Aceh sebelum diungsikan ke tempat yang aman. Ada aktivis Aceh, menurut cerita dia, tinggal di rumahnya selama dua Minggu. Makan di sana, minum di sana, termasuk mandi dan tidur.

Tetapi, katanya, ketika bertemu lagi dalam suatu kesempatan setelah beberapa bulan berpisah, si aktivis Aceh itu sama sekali tidak mengenal lagi namanya, orang yang sudah menampungnya selama ini. Si aktivis Aceh, cerita kawan saya ini, saat bertemu dengannya hanya mampu memanggil dengan sebutan aneh: *Eh... Pak Bos!* dengan suara terputus-putus (bisa jadi sambil mengingat nama yang sebenarnya), meski, kemudian tak juga berhasil.

Tak hanya itu, katanya, semenjak aktivis Aceh kembali pulang ke Aceh pascadamai, jarang kawan-kawan yang dulu akrab dengannya mengirim SMS atau mengabarinya tentang kondisi di Aceh. Aktivis Aceh, kata dia, lupa bahwa mereka pernah jadi kawan berdiskusi dulunya.

Cerita tersebut teringat kembali, ketika saya dalam perjalanan pulang dari Sabang ke Banda Aceh menggunakan kapal cepat yang baru diresmikan, Ekspres Bahari. Kebetulan di sebelah saya duduk seorang kawan, yang sekarang memimpin sebuah Partai Lokal di Sabang. Dari ceritanya, terlihat bahwa dia cukup kecewa terhadap kawan-kawan yang pernah dibantu dulunya. Saat mendengar cerita

dia, saya hanya terpikir satu kata saja: Lupa.

Dia sampai bercerita kepada saya, bahwa dirinya pernah mengirim SMS untuk seorang kawan agar disampaikan kepada seorang pejabat yang pernah didukungnya, *“Neutulong pugah siat bak gobnyan, lon hana perle keu gobnyan, tapi misue ukue gobnyan perle suara lom dari Sabang, lon siap bantu* (tolong sampaikan sebentar pada beliau, saya tidak butuh dia. Tapi jika ke depan dia butuh suara dari Sabang, saya siap membantu)” begitu bunyi SMS-nya.

Ya...saya jadi terpikir kemana-mana. “Apa benar orang Aceh cepat sekali lupa?” begitu gumam saya dalam hati. Jika merujuk pada dua contoh di atas, bisa jadi memang benar orang Aceh cepat sekali lupa. Malah, seratus kali perbuatan jahat bisa dilupakan hanya dengan sekali janji manis. Orang yang dulu begitu dibenci, kini menjadi orang yang sangat dipuja. Kawan-kawan yang dulu satu perjuangan, kini malah dicurigai macam-macam, dan diperlakukan sebagai musuh.

Berapa banyak kasus pelanggaran HAM terjadi di Aceh, tapi siapa yang masih mengingatnya sekarang, dan memusuhi pelakunya? Sangat sedikit sekali. Kita orang Aceh, selalu lupa, termasuk lupa mencatat orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. (HA 07.06.08)

NAD

NAD. Ya...sebuah singkatan yang sepatutnya kita benci, tidak hanya sekarang, tetapi sejak dulu. Jika kita tidak mengetahui singkatan dari “NAD”, sungguh kita tidak tahu bahwa singkatan tersebut merupakan nama yang diberikan kepada Aceh sesuai dengan UU No.18/2001 tentang Otonomi Khusus.

Saya yakin, orang asing juga tidak tahu bahwa NAD sebenarnya adalah Aceh. Misal, ada sebutan ‘masyarakat NAD’, ‘rakyat NAD’, ‘penduduk di NAD’, dsb. Bukankah sebutan itu sama sekali tak menunjukkan kesan bahwa sebutan itu merujuk pada rakyat Aceh?

Istilah “NAD” juga tak mencerminkan khas Aceh. Pemberian nama “NAD” untuk Aceh lebih terkait dengan kepentingan politis, mengaburkan sesuatu yang berbau Aceh. Dengan hadir istilah “NAD”, dengan sendirinya sebutan Aceh menghilang, kecuali kalau istilah NAD tersebut ditulis menggunakan kepanjangan. Masalahnya, yang terjadi, penyebutan untuk istilah tersebut sering hanya singkatan saja, sementara kata Aceh tenggelam di dalam istilah NAD.

Yang lebih aneh, istilah tersebut masih dipergunakan sampai sekarang, bukan hanya monopoli media nasional saja, karena media lokal juga sering mempergunakannya. Selain itu, para pejabat juga masih nyaman menyebut Aceh dengan NAD. Malah, kop surat kantor Gubernur sampai sekarang masih menggunakan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam ucapan-ucapan selamat di media, juga masih ditulis dengan sebutan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Padahal, begitu Undang-undang Pemerintah Aceh (UU PA) disahkan, secara *de jure* penyebutan Aceh dikembalikan kepada Provinsi Aceh. Sementara pemerintahnya, disebut dengan Pemerintah Aceh, seperti disebutkan dalam UU No.11/2006 tentang

Pemerintahan Aceh. Undang-undang tersebut dibuat bukan untuk berlaku enam tahun lagi, melainkan sudah berlaku sejak diundangkan atau ditetapkan.

Sudah dua tahun (kalau saya tidak salah), Undang-undang tersebut berlaku. Tetapi, *kok* masih ada orang-orang di Aceh menyebut Aceh dengan NAD. Padahal, sudah sejak dulu (khususnya elemen perjuangan) menolak UU No.18/2001 yang menyebutkan Aceh dengan NAD. Bagi elemen perjuangan, kehadiran UU tersebut lebih karena faktor politis meredam perjuangan GAM saat itu. Hanya sebagian kecil saja orang menerima UU tersebut, sementara sebagian besar rakyat Aceh saat itu menolak.

Sementara UU PA, meski masih banyak kekurangan di sana-sini, merupakan produk hukum yang sah untuk Aceh sekarang sebagai provinsi yang memiliki kekhasan di banding provinsi lain di Indonesia. UU PA merupakan produk politik yang diperjuangkan bersama-sama. Karena itu, sudah sepatutnya UU tersebut digunakan, lebih-lebih pada penyebutan Aceh. Kita orang Aceh harus melawan sekuat tenaga terhadap pihak-pihak yang mencoba menghilangkan sebutan Aceh.

Jadi, sekali lagi, khususnya untuk kalangan pemerintah Aceh, berhentilah menggunakan istilah NAD. Sudah saatnya istilah Pemerintah Aceh dipopulerkan, karena di samping sesuai dengan UU, juga sudah mencerminkan karakteristik ke-Aceh. *Kiban, na pakat?* (HA 06.06.08)

Tender

HARI Selasa (03/06/08) lalu, sebelum ke kantor, saya menyempatkan diri duduk di ruang tunggu kantor Wakil Gubernur Aceh. Saya melihat tamu yang datang lumayan ramai. Dari orang biasa, pengemis, sampai pengemis profesional. Orang yang datang tanpa henti. Keluar satu masuk satu (ada juga yang berkelompok). Kepentingannya juga macam-macam, ada yang minta diluluskan proposal progam, ada juga yang minta rekom agar menang dalam sebuah tender.

Masa awal-awal pengesahan APBA memang seperti *uroe raya kleng*, bermacam-macam urusan orang datang ke kantor Gubernur. Kalau istilah orang mancing, inilah saatnya orang "*jak rhueng kawe* (membalas kail)." Dulu memasukan proposal ke kantor Gubernur, sekarang saatnya melihat dan memantau apakah proposal tersebut disetujui atau tidak.

Saya tak sempat melihat suasana di ruang kerja Gubernur, jadi tak bisa menggambarkan bagaimana suasananya. Tapi, menurut kawan-kawan saya, suasananya juga sama. Orang tak pernah berhenti menemui Gubernur, dari persoalan batas Gampong sampai masalah kayu.

Sementara kemarin, saya hanya melihat sekilas suasana di ruang kerja Wakil Gubernur. Di ruang tamu, saya menyaksikan bermacam-macam urusan orang menemui Wagub. Saya juga melihat orang yang keluar dari kamar Wagub, wajahnya cerah. Saya tak tahu, apa masalah dia selesai atau tidak. Yang saya lihat, seutas senyum tersungging di bibir, dan pulang dengan sejuta harapan.

Saya sempat menangkap kesan tak ramah dari beberapa karyawan di sana. Wajahnya kaku, dan tak ada kesan bersahabat. Saya melihat setiap tamu yang datang ditatapi dengan sinis. Ada kesan penjajahan dari mata mereka. Saya sendiri merasakan kesan seperti itu. Dari tatapan yang diarahkan kepada saya, saya

seperti divonis sebagai pengemis, atau orang yang meminta-minta sumbangan.

Padahal, terlihat sekilas, mereka seperti karyawan baru, atau malah belum punya SK pengangkatan. Saya sempat bertanya dalam hati: apa semua karyawan di kantor pemerintahan sombong-sombong, meski gaji pas-pasan? Apa yang mereka banggakan? Apakah bekerja di kantor pemerintah sesuatu yang luar biasa?

Tapi saya tak terlalu mempersoalkannya, itu hak mereka. Cuma kita berharap, jika ada tamu yang datang (bukan hanya yang sudah dikenal), sapalah dengan ramah, lemparkan seutas senyum sebagai tanda persahabatan. Itu saja.

Saya memperhatikan mobilitas orang menemui Wagub (begitu juga dengan Gub), sangat tinggi. Saya maklum, sekarang lagi musim tender. Orang yang menemui Wagub (dan juga Gub) pasti terkait dengan tender. Kondisi serupa kita temui juga pada tahun anggaran sebelumnya, orang-orang juga ramai menemui Wagub, meski pada akhirnya, begitu semua proyek selesai, yang keluar sumpah serapah. Karena target untuk menjadi orang kaya baru (OKB) tidak kesampaian. *Jak lom u Banda!* (HA 05.06.08)

Inspirasi

SEORANG teman meminjamkan sebuah buku bagus untuk saya. Judulnya menyentuh dan teduh, *The Art of Worldly Wisdom*, yang kalau diterjemahkan berarti: Titian Kebijakan Duniawi. Buku tersebut diterbitkan oleh Terawang Press.

Di dalamnya berisi pepatah-pepatah bijak (si penulis buku menyebutnya dengan inspirasi), yang disesuaikan dengan tanggal setiap bulannya, selama setahun. Per tanggal, memiliki pepatah tersendiri yang berbeda dengan pepatah per tanggal di bulan lain. Sekilas, pepatah yang terdapat di buku ini mirip dengan isi ramalan bintang.

Di antara pepatah yang ada, saya tertarik dengan satu pepatah yang berbunyi, *Free yourself from common foolishness*. Pepatah ini berisi ajakan untuk berkembang, bagi siapa saja, kaya-miskin, pintar-bodoh, orang biasa sampai untuk orang terkenal sekalipun. Ajakannya biasa saja, tetapi punya pengaruh luar biasa: *Free yourself from common foolishness* (Bebaskan diri dari kebodohan khalayak).

Inspirasi atau pepatah yang terdapat dalam buku ini, sangatlah bagus untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ditulis oleh seorang bijak pencinta ketenangan. Tak sembarang orang bisa mengamalkan pepatah di buku ini. Untuk mengamalkannya, orang tersebut haruslah punya pikiran dan jiwa yang sehat. Artinya, nasihat di buku ini tidak diperuntukkan bagi orang gila. Pasti.

“Kebodohan didukung oleh adat kebiasaan yang melembaga, dan orang-orang yang menentang penjajahan individu tak bisa menghindari arus orang banyak.” Itu nasihat pertama. Pepatah ini, seperti hendak mengingatkan bahwa pengaruh lingkungan sekitar berpengaruh terhadap perkembangan seseorang. Kita tidak bisa menghindari berhadapan dengan orang banyak ketika melakukan sesuatu termasuk saat melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Karena pasti, banyak orang siap melawan kita.

Selain itu disebutkan pula, “orang berjiwa rendah tak akan bahagia dengan keberuntungannya sendiri sekalipun keberuntungan terbaik, atau tak pernah kecewa dengan keadaan kecerdasannya, sekalipun pada kondisi kecerdasan terburuk.” Kondisi begini sering kita temui dalam kenyataan sehari-hari, di mana banyak orang tidak merasa bahagia meski kondisi saat itu sangat mendukung. Beginilah nasib orang yang tidak mampu menggunakan kesempatan.

Kita juga banyak menemui orang yang tidak senang melihat kesenangan orang lain, yang sekarang sering disebut dengan istilah SMS (susah melihat orang senang atau sebaliknya, senang melihat orang susah). Hal ini dipicu oleh “ketakbahagiaan dengan kehidupannya sendiri menjadikan mereka iri hati terhadap kebahagiaan orang lain.”

Selain itu, “manusia sekarang memuji segala sesuatu yang berbau masa lalu, dan manusia suka memuji segala sesuatu yang jauh.” Bagi mereka, “masa lalu tampak lebih baik, dan apa-apa yang jauh lebih dihargai.” Saya percaya, kenyataan seperti ini yang menghipnotis rakyat Aceh puluhan tahun lalu, sehingga mereka lupa memproyeksi masa depan secara lebih baik. Padahal, masa lalu seharusnya tidak membuat kita terlena, melainkan bagaimana masa lalu itu kita jadikan sebagai cermin bagi kita melangkah ke depan.

Sementara, di akhir pepatah yang saya kutip di atas disebutkan, “Orang yang menertawakan sesuatu sama bodohnya dengan orang yang merasa sedih karena sesuatu.” Entahlah, apakah kita sekarang termasuk dalam golongan seperti ini atau tidak, saya sendiri tidak tahu. Mudah-mudahan tidak. (HA 04.06.08)

FPI

Saya sempat menonton film Fitna yang menghebohkan itu, malah sampai habis. Meski, setelah menontonnya, saya merasa berdosa, karena sudah ‘melegalkan’ aksi kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam di beberapa tempat di dunia, sebagaimana dituduhkan Geerts Wilders, si pembuat film Fitna itu.

Tapi, apakah semua tuduhan Geerts Wilders salah? Saya ragu menjawabnya. Saya pernah belajar agama, dan tahu bagaimana Malaikat berdebat dengan Tuhan ketika hendak menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Malaikat tidak setuju dengan kebijakan Tuhan, karena menurut Malaikat, manusia suka menumpahkan darah dan membunuh antar sesama.

Tuhan memotong protes Malaikat melalui firman-Nya, “Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” Apa yang terjadi? Ternyata, protes Malaikat benar-benar terjadi, ketika anak Adam, Qabil membunuh Habil saat memperebutkan Iqlima (adiknya), serta karena zakatnya tidak diterima oleh Tuhan.

Membaca berita di media dalam dua hari terakhir ini, membuat saya kembali ingat film Fitna dan protes Malaikat tersebut. Menurut saya, penyerangan massa Front Pembela Islam (FPI) terhadap Aliansi Kebangsaan Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB) di Monas Jakarta seperti melegalkan tuduhan Geerts Wilders dan protes Malaikat kepada Tuhan.

Tindakan FPI, sama sekali tidak mencerminkan sebagai perilaku Islam. FPI seperti membenarkan wajah Islam penuh darah. Padahal, citra Islam sama sekali tidak seperti yang ditunjukkan oleh FPI. Islam itu damai dan mendamaikan. Islam itu anti kekerasan. Lalu, apakah FPI pantas memosisikan dirinya sebagai salah satu ormas Islam?

Saya semakin ragu. Karena, sejak dulu saya berkeyakinan bahwa FPI merupakan gerakan provokator yang sengaja dibentuk

oleh intelijen untuk memecah persatuan umat Islam. Aksi-aksi yang diperlihatkan FPI semakin membenarkan keyakinan saya, bahwa FPI memang benar dibentuk oleh intelijen. Karena itu, saya berpendapat, sudah selayaknya FPI dibubarkan.

Saya sering mendengar, jika kalangan militan Islam didukung oleh militer. Hal ini, karena kalangan militer perlu membangun *network* dengan kelompok militan Islam, sebagai alat melakukan *bargaining* dengan pemerintah. Kedua pihak sama-sama saling menguntungkan. Kalangan militan misalnya mendapat dukungan dari militer, sementara militer butuh kelompok militan menekan pemerintah. Diakui atau tidak, pascapemisahan TNI dan Polri, terjadi persaingan ketat antara dua institusi ini.

Hasil laporan International Crisis Group (ICG) beberapa tahun lalu juga membenarkan adanya jaringan tertutup antara kelompok Islam radikal dengan militer. Banyak tokoh-tokoh militan Islam itu dekat dengan kalangan militer. Jadinya, bisa dimaklumi, kenapa aksi kekerasan massa FPI terhadap AKK-BB tidak ada yang melerai. Polisi juga hanya diam saja. Bukankah, ada permainan intelijen di sini?

Terserah benar atau tidak keyakinan saya di atas, tapi saya percaya jika FPI tidak dibubarkan, orang-orang akan semakin percaya bahwa Islam identik dengan kekerasan. Meskipun kekerasan itu cuma dilakukan oleh FPI saja. Karenanya, pemerintah tak perlu ragu dan lemah, untuk membubarkan FPI, karena banyak pihak setuju FPI dibubarkan. Jadi, tunggu apa lagi? Bubarkan FPI atau citra Islam akan rusak akibat ulah anarkis FPI. *Kiban, ka meupat?* (HA 03.06.08)

Donya

DUNIA ini aneh. Ada yang bilang juga berputar. Tapi, memang benar demikian. Tak selamanya nasib kita hari ini akan sama dengan besok, lusa atau dua tahun mendatang. Hari ini boleh saja kita hina, tapi dua atau tiga tahun ke depan, kita akan menjadi orang yang sangat mulia.

Dulu, Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar punya kawan terbatas, termasuk yang mendukung cita-cita perjuangannya. Mereka hanya punya kawan dari kalangan mereka sendiri. Sementara orang lain, katakanlah, para pejabat atau pegawai, memandang rendah perjuangan yang mereka lakukan sebagai tindakan bodoh.

Pokoknya, bisa diibaratkan, orang-orang yang se-ideologi dengan mereka (kelompok perjuangan) mengidap penyakit kusta. Orang-orang tak mau bergaul atau dekat. Keberadaan mereka menjijikkan. Kondisi seperti ini juga terlibat saat masa kampanye Pilkada dulu. Tak banyak pejabat yang menyokong mereka berdua, karena dinilai tak punya peluang untuk menang. Malah, pejabat sebuah Bank saat diminta membantu pasangan yang naik lewat jalur independen ini berkali-kali angkat tangan, diselilingi janji: pasti kita bantu. Namun, sampai Pilkada usai, bantuan tersebut tak pernah datang.

Hanya saja, begitu dipastikan memenangi Pilkada, si Pejabat Bank ini menurut cerita kawan-kawan dari SINAR (tim sukses Irwandi-Nazar) menawarkan diri membantu melunasi utang-utang kampanye. Hah...begitu cepat sebuah dukungan berbalik. Dunia ini memang lebih banyak dipenuhi para penjilat.

Saya sering ditanya kawan-kawan, kenapa Irwandi-Nazar terkesan melupakan tim kampanye-nya? Saya tak tahu harus menjawab apa. Mereka bahkan menantang saya dengan pertanyaan: siapa yang bisa jamin, bahwa kawan-kawan Irwandi dan Nazar sekarang ini adalah teman-teman yang dulu berjuang bersamanya? Sebab, kata mereka, kawan Irwandi-Nazar sekarang banyak abu-abu.

Tak hanya itu, mereka juga mempertanyakan sikap lunak para pejabat yang dulu tak memandang rendah mereka berdua. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Irwandi-Nazar sekarang sudah menjadi pemimpin bagi mereka.

Sekali lagi, dunia ini memang aneh. Dulu hampir tidak ada (kecuali beberapa orang saja para pejabat yang mendukung perjuangan mereka) pejabat yang memuliakan mereka. Malah, mereka berdua (termasuk ideologi perjuangan yang mereka anut) dikecam sebagai virus yang merusak kemapanan posisi para pejabat dan pegawai. Saban hari, ideologi yang mereka perjuangkan dituding sebagai racun yang bisa membunuh.

Apa yang terjadi sekarang? Keduanya diperlakukan *bak* raja: disembah, dihormat, dan dimuliakan. Kemana saja mereka pergi selalu diikuti. Di berbagai kesempatan, orang-orang berdesak-desakan ingin berfoto untuk kenangan dipajang di rumah, agar menambah *power* (kekuatan), atau dipandang sebagai orang dekatnya.

Saya sering melihat, bagaimana 'tabiat budak' melekat pada para pejabat, PNS atau orang-orang yang berharap mendapat keuntungan dari hubungan pertemanan dengan mereka (Irwandi-Nazar). Kalau ada suatu acara, dan kebetulan kedua orang ini suka, para pejabat lain ikut-ikutan menikmati acara tersebut, walau dalam hati sering *ngomel*, "*Kalau bukan karena pimpinanku nonton, aku ga bakalan nonton. Dari dulu, aku paling ga suka acara seperti ini.*" omelnya.

Jangan tanya soal kawan baru Gubernur dan Wakil Gubernur? Setiap hari ratusan kawan baru bertambah. Berteman dengan seorang pejabat tinggi seperti Gubernur atau Wakil Gubernur punya nilai tersendiri: marwah terangkat, status sosial semakin tinggi, kesejahteraan meningkat, dan punya kesempatan diajak kemana-mana. Pokoknya, serba wah.

Lalu, apa modal bergaul dengan pejabat? Modalnya mudah saja: buang rasa malu, gunakan perangai budak. Selain itu, jangan suka membantah, harus selalu *nurut*. Kalau si pejabat bilang 'taik' sebagai makanan, anda sebagai bawahan harus bilang itu sebagai 'makanan'. *Pue na rencana bantah?* (HA 02.06.08)

Hobi

DULU, saat masih duduk di bangku SD, banyak murid kalau ditanya gurunya mau jadi apa ketika besar nanti, jawabannya pasti beragam. Banyak dari mereka ingin jadi pilot. Ada juga yang ingin jadi dokter, dan tak sedikit yang ingin jadi presiden. Jarang kita mendengar ada anak yang mau jadi Bupati, Walikota atau camat. Bisa jadi, karena anak-anak saat itu tidak begitu tahu tentang posisi Bupati, Walikota atau camat.

Yang aneh, cita-cita tersebut lebih banyak lahir dari anak-anak yang sekolah di pedalaman, ujung kampung atau di kawasan yang sama sekali tidak masuk dalam peta. Meski demikian, kita patut berbangga, karena sejak kanak-kanak (walaupun tinggal di pelosok) sudah menggantung cita-citanya setinggi langit. Itu sebuah pertanda, bahwa naluri manusia sejak kecil sudah punya keinginan untuk maju.

Keinginan atau cita-cita setinggi langit tersebut bukan sebuah kesalahan. Karena, ketika manusia tidak punya cita-cita dan keinginan, mereka hanyalah mayat hidup. Manusia seperti itu tak pernah mampu merancang masa depannya sendiri, karena mereka menjadi produk gagal dari sejarah kelahiran.

Tapi, keberhasilan dan kesuksesan tidak pernah ditentukan oleh dari mana kita berasal, dan anak siapa? Karena kesuksesan tersebut sama sekali bukan produk rekayasa lingkungan atau dibentuk khusus oleh orang tua kita.

Kesuksesan sangat ditentukan oleh konsistensi kita mencintai apa yang kita cita-citakan dan selalu beristiqamah menggapainya. Saya jadi ingat, seorang pakar yang banyak terlibat dalam training-training kepemimpinan, motivasi dan manajemen perusahaan, Dale Carnegie, pernah mengungkapkan: Orang jarang mencapai kesuksesan, kecuali orang tersebut mencintai apa yang mereka lakukan.

Kita sepakat dengan Carnegie, soalnya dia sendiri memulai

kesuksesannya dengan kegagalan demi kegagalan. Konon, menurut cerita, Carnegie dibesarkan dalam kemiskinan. Sejak remaja sudah bercita-cita bisa berpidato di depan publik, namun berkali-kali gagal. Bukan hanya itu, ia juga gagal dalam lulus ujian latin. Tak puas dengan nasibnya, ia pindah ke New York, dan menekuni bidang penjualan. Di bidang ini, nasibnya juga tidak beruntung. Kemudian ia melamar pekerjaan di sebuah lembaga untuk mengajar berpidato, dengan gaji 2 dollar setiap sesinya. Meski sudah gagal terus menerus, dunia kini mengenalnya sebagai motivator besar abad 20. Bahkan dia mendirikan lembaga atas namanya, Dale Carnegie Institute for Effective Speaking & Human Relation, dan telah melatih orang-orang di seluruh dunia.

Yang ingin saya sampaikan, sekarang banyak pejabat memberi motivasi kepada orang lain ketika berhasil, dengan membanggakan diri bahwa dulunya dia termasuk orang yang pintar dan bisa sukses. Padahal, kesuksesan yang kini dicapainya, didapatkan secara instan, tanpa melalui perjuangan berat.

Kita menemui bermacam-macam jenis manusia. Seperti orang yang ingin melakukan banyak hal, dan menggandrungi hobi yang dulu tak pernah terlintas di benaknya. Dulunya, kita tak mengenal dia seperti itu. Namun, ketika sudah jadi pejabat, ada di antara mereka yang belajar main golf dan menyanyi. Padahal, hobi tersebut sama sekali bukan bidangnya. Ada-ada saja hobi jika sudah berhasil. (HA 31.05.08)

Rakyat

ANGGARAN Pendapatan Belanja Aceh (APBA) disahkan. Jumlahnya, tak tanggung-tanggung: Rp8,517 T. Informasi ini tentu saja sebuah berita yang menggembirakan. Meskipun nantinya banyak dari anggaran tersebut tidak bisa dinikmati oleh rakyat. Tapi, setidaknya rakyat sudah mendengar, bahwa banyak anggaran tahun ini yang diperuntukkan untuk mereka.

Uang sejumlah Rp8,517 triliun termasuk banyak. Kalau untuk beli kopi, sampai tujuh turunan mati *pun*, masih tersisa uangnya. Pokoknya, kalau kita beli kopi Ulee Kareng dengan sejumlah itu, penjualnya bisa meninggal saat mengaduk kopi. Uang tersebut lebih dari cukup untuk sekedar membeli cendol bang Joni.

Kita berdoa saja, agar harapan masyarakat di Gampong tidak terbang begitu saja. Soalnya, masyarakat di Gampong sangat berharap bisa menikmati kue pembangunan, karena pengalaman dulu-dulu, kue tersebut hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu saja. Tahun inilah kesempatan buat mereka. Jika tidak, tak ada bedanya antara dulu dan sekarang. Rakyat tetap saja melarat dan sebagian malah sekarat.

"Kupue tadungo dum peng diro u Aceh, tanyoe mantong meu keu bakong asoe hana pat tacok," ujar Wak Minah seorang pedagang kaki lima di pasar Sigli. *"Pue dum that ilee peng 8 Triliunnya pue? Sampe tiep uroe dimeusunoh?"* tanyanya lagi, saat disampaikan bahwa tahun ini, anggaran untuk Aceh sekitar Rp8,517 T.

Pedagang seperti Wak Minah, sama sekali tak pernah bermimpi punya duit sampai miliaran rupiah. Baginya, dapat sehari Rp12 ribu sudah cukup. Karena, dengan uang sejumlah itu, dapurnya bisa berasap. Dia tidak berharap muluk-muluk, yang penting uang yang didapatnya halal.

Tak aneh, jika orang seperti Wak Minah sama sekali tak terlalu

ambil pusing disahkannya APBA. Mau disahkan atau *nggak* itu bukan urusan dia. Toh, dia sama sekali tidak merasakan manfaat dari anggaran yang melimpah itu. Yang ribut hanya para *elite*, pejabat, kontraktor dan pengusaha. Masing-masing berhitung, tahun ini berapa anggaran yang bisa didapatnya. Dia sama sekali tidak mau peduli, bahwa sebenarnya anggaran itu diperuntukkan bagi rakyat, bukan untuknya saja. Akibatnya, siang dan malam mereka tak bisa nyenyak.

Hanya orang seperti Mak Minah, sebenarnya yang merasa tenang saat anggaran disahkan. Soalnya, dia tidak terlalu ambil pusing atau melobi sana-sini agar ada proyek yang diloloskan. Baginya, lapak tempatnya berjualan tidak digusur sudah cukup. Orang seperti Mak Minah merasa hidup nyaman. Will Foley pernah mengatakan: *Dunia ini penuh kaktus, tapi kita tidak harus duduk di atasnya.* (HA 30.05.08)

Takut

SAYA begitu terkejut, saat tahu banyak kawan-kawan yang sebelumnya tidak begitu peduli dengan Koran, tiba-tiba sangat antusias menyimak isi Koran. Ketika didekati, rupanya cuma melihat iklan tender. Ya...dalam hari-hari mendatang, akan sangat banyak orang yang membaca Koran, tapi bukan beritanya, melainkan pengumuman tender. *"Pue korannyoe ka mulai dipubloe iklan? Tiep-tiep halaman nyang talop, nyang dueh sjit iklan tender,"* gerutu Apa Suman di sebuah warung kopi di kampung saya ketika mendapati Koran yang dipegangnya penuh iklan tender.

Apa yang dikeluhkan Apa Suman kebalikan dengan kenyataan yang saya lihat di Banda Aceh, atau di kota-kota besar lainnya di Aceh. Di kota, orang tidak membaca berita, melainkan melihat iklan tender. Mereka marah jika di Koran tersebut tidak memuat iklan tender. Jika ada proyek yang jumlah anggarannya besar, langsung dikasih tanda. Malah, Koran di warung kopi pun banyak yang raib sekarang, tak tahu siapa yang ambil.

"That geulet catok, ban-ban bungoh ka gadoh Koran. Rugoe tajep kupi pancong bak warong nyoe, meu Koran han tatumueng baca," ujar seorang pemuda, mungkin seorang mahasiswa.

Sudah trend di Aceh, orang membeli Koran bukan lagi menyimak beritanya, melainkan apakah di Koran tersebut memuat iklan tender atau tidak. *"Han ek ta langganan Koran awak droe, karena hana iklan tender,"* begitu jawab seorang kawan ketika saya mengusulkan agar dia juga berlangganan Koran tempat saya bekerja.

Saya hanya bisa mengangguk-angguk saja. *"Aneh, orang sekarang tidak butuh lagi berita. Mereka lebih butuh iklan tender,"* omel saya dalam hati. Tapi, saya tetap senang, karena semangat orang Aceh untuk kaya semakin tinggi sekarang. Artinya, mereka ingin hidup seperti orang di luar negeri, yang kesejahteraannya sudah terjamin.

Saya juga mendengar, karena keinginan untuk menjadi—meminjam istilah Otto Syamsuddin Ishak—kelas menengah baru, mereka mau berbuat apa saja, termasuk melabrak kepala dinas. Mereka sama sekali tidak takut akan berurusan dengan hukum. Jika ada kawan yang duluan mengklaim “ini proyek saya” juga akan dilawannya, termasuk berhadapan dengan mantan pimpinannya ketika berjuang dulu.

“Kamoe hana meucok surat malaikat lom. Kamoe na makan-minum,” demikian jawabnya saat kita tanya kenapa begitu ngotot ingin mendapatkan proyek tersebut. Menurutnya, jika malaikat tidak makan-minum, sementara manusia pasti ada makan minum.

Sikap berani mereka patut diacungi jempol. Mereka sama sekali tidak takut apa yang akan terjadi. Mereka seperi ingin menguji kebenaran petuah pakar motivasi, Robert T Kiyosaki: *Salah satu alasan utama mengapa manusia tidak kaya adalah rasa takut mereka terhadap apa yang belum terjadi.* (HA 29.05.08)

Kamuflase

SEBELUMNYA saya sudah pernah menulis tentang sosial. Sekarang, saya mau menulis tentang sosial, tapi dengan kemasan berbeda. Jika sebelumnya saya menulis tentang sifat sosial masyarakat Aceh yang ikhlas, maka tulisan ini kebalikannya: sosial kamuflase.

Tahun 2009 *kan* sebentar lagi. Memasuki tahun tersebut, khusus di Aceh (di tempat lain mungkin sama juga), kita pasti banyak menemui orang-orang yang murah hati, tapi juga berharap sesuatu. Selain itu kita juga akan menjumpai para politisi yang *sok* merakyat. Setiap hari, sepertinya ingin hidup dan dekat dengan rakyat. Tujuh hari dalam seminggu seperti tidak cukup untuk mereka berbuat baik. Mereka mau seminggu jadi sepuluh hari, karena berharap bisa lebih dekat dengan rakyat. Karena, semakin dengan rakyat, harapan mereka dipilih lebih terbuka.

Pada tahun 2009, proses peredaran uang cukup besar di Aceh. Para politisi tak sungkan-sungkan menghambur-hamburkan uang percuma: cetak sticker, poster, kaos, baliho, spanduk, dan lain-lain. Selain itu, masih dibarengi juga dengan sumbangan kepada masyarakat, memasang iklan di media. Pokoknya, kita akan menyaksikan para politisi berlomba-lomba masuk syurga dengan gemar bersedekah.

Para pemuda di kampung pasti senang, sebab mereka tak perlu lagi membuat proposal permohonan bantuan bola kaki dan bola *volley*. Karena pasti ada politisi yang langsung berkunjung ke perkampungan sambil membawa bantuan. Bantuan itu diberikan ‘ikhlas’ tanpa perlu proposal. Masyarakat tak perlu teken kuitansi atau tanda terima lainnya.

Para politisi ini juga terlihat sangat ramah, dan menyapa siapa saja yang ditemuinya. Jika kebetulan sedang berada di sebuah kampung untuk minum kopi, masyarakat bisa berbondong-bondong ke warung kopi, karena pasti mendapat traktir kopi, rokok

atau makanan apa saja yang dijual di warung tersebut. Masyarakat bisa juga bercengkrama dengan mereka, karena mereka sama sekali tak *peutimang mbong*.

Saat itu, kita dapat menemui mereka di mana saja, di kantor atau di tempat lain. Jika kebetulan kita berada jauh dari perkotaan, kita dapat mengirim *short message service* (SMS), karena SMS kita pasti akan dibalasnya. Jika dia tak sedang menelepon orang lain, kita pasti akan diteleponnya.

Begitu mereka terpilih, jangan berharap kita akan dikunjunginya lagi. Sebab, nama kampung kita tak dihafalnya. Jangan pula berharap, kita bisa menemui mereka, karena jawaban yang akan kita terima pasti menyakitkan: “Bapak sedang *meeting*.” kata ajudannya.

Kita juga tak perlu berharap SMS kita akan dibalasnya, karena bukan hanya nomor kita tak lagi disimpannya, melainkan mereka pasti sudah ganti nomor. Saat mengganti nomor, mereka tak perlu memberitahukan kita, karena kita tidak dibutuhkan lagi. Jangan pula berharap akan ada bantuan bola kaki dan bola *volley* secara gratis, karena ajudannya meminta kita membuat proposal. Dan proposal tersebut pasti jadi langganan *Recycle Bin* (tong sampah). (HA 28.05.08)

Sosial

ORANG Aceh dikenal sangat sosial. Sejak zaman dulu, orang Aceh sudah terkenal murah hati dan suka menolong orang lain yang lagi membutuhkan. Sejarah mencatat, ketika masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, orang Aceh rela menggadaikan nyawa dengan berperang sampai ke Medan, yang dikenal dengan perang Medan Area.

Pascakemerdekaan atau ketika Indonesia yang baru diproklamirkan Soekarno butuh bantuan, orang Aceh di kampung-kampung menjual apa saja, termasuk perhiasan yang paling berharga untuk disumbangkan membeli pesawat terbang. Bukti nyata, dapat dilihat di Blang Padang, berupa pesawat replika yang dibeli dari sumbangan masyarakat Aceh. Saat Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997, masyarakat Aceh juga tergerak hati menolong Negara.

Kalau berbicara nasionalis, orang Aceh sebenarnya sangat nasionalis. Jadi, terasa aneh, ketika ada pernyataan yang meminta orang Aceh menjadi nasionalis. Soalnya, meski orang Aceh berjuang memisahkan diri dari Indonesia, itu tetap karena orang Aceh sangat nasionalis. Artinya, orang Aceh tidak mau pemerintah RI terlalu memikirkan Aceh, sehingga lupa pada pembangunan di kawasan lain yang lebih membutuhkan.

Karena suka menolong dan murah hati tersebut, muncul pepatah yang terkenal di kalangan masyarakat Aceh: “*Ureung Aceh munyoe hana teupeh pade bijeh geupeutaba, tapi munyoe ka teupeh, bu leubeuh han geupeutaba.*” Orang yang sudah memahami pepatah ini, akan mengerti kenapa Aceh sering bergolak. Hal itu tak lain, karena orang Aceh selalu disakiti.

Bukti murah hati orang Aceh, dapat dilihat juga dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kampung-kampung dimana ikatan sosial orang Aceh masih sangat kuat. “*Po minah, lon cok boh limeng dua*

boh beh (Kak Minah, saya ambil belimbing dua buah ya?). Jangan berfikir bahwa *boh limeng* yang diambil itu hanya dua buah.

Kemudian, di kampung juga masih berlaku adat saling *intat* makanan. Jika sebuah keluarga memasak *Kuah Pliek U*, pasti para tetangga di sekeliling rumah dibagi *Kuah Pliek U* satu mangkok. Keluarga yang dikasih *Kuah Pliek U* juga tahu diri, karena ketika dia mengembalikan mangkok tersebut, sering di dalam mangkok ada isinya. Yang pasti ketika dikembalikan, mangkok tersebut tidak kosong.

Dalam hal *seumula* (menanam padi), juga berlaku hal yang sama. Jika satu keluarga menanam padi, biasanya orang sekeliling rumah membantu. Besoknya, ketika orang di sekeliling rumah itu *seumula*, juga akan dibantu. Tradisi seperti ini sudah berlangsung turun temurun. Hanya saja sekarang sudah mulai terkikis, dan diganti dengan tradisi saling membayar (*cash for work*). (HA 27.05.08)

Lembu

JIKA kita pernah melewati jalan Sigli-Kembang Tanjong, Pidie atau persis di kawasan Simpang Tiga, ada pemandangan menarik yang bisa kita lihat, terutama pada malam hari. Jangan berharap pemandangan tersebut berupa hutan yang hijau, atau warna-warni lampu seperti di kota-kota metropolitan. Sama sekali bukan. Kita justru melihat pemandangan unik, dan bisa jadi menjengkelkan. Soalnya, di sepanjang jalan, atau di beberapa bagian dari jalan tersebut mirip dengan kandang lembu. Mereka (kalau boleh disebut “mereka”) seperti hendak merazia (*sweeping*) setiap pengguna jalan.

Jika tak berhati-hati, apalagi membawa kendaraan dengan kencang, sering berakibat fatal. Bukan ditilang karena melanggar undang-undang para lembu, melainkan kecelakaan. Akibat paling ringan ya...harus mencium aspal atau mobil yang mengkilap jadi *penyot*. Atau cuma patah kaki dan luka-luka ringan. Tak jarang ada yang meninggal.

Sebagai pengguna jalan, kita boleh saja kecewa. Soalnya para pemimpin lembu tak mengeluarkan amaran yang meminta para lembu tidak melakukan *sweeping* pada malam hari. Atau bisa jadi, para pemimpin lembu tidak begitu peduli dengan hal itu, *toh* mereka hanya menggunakan jalan tersebut pada malam hari saja, soalnya siang sudah digunakan oleh masyarakat.

Jika masyarakat kecewa dengan aksi para lembu, seharusnya memasang iklan atau spanduk di sepanjang jalan, bahwa kandang lembu/sapi tidak seluas dan sepanjang jalan raya. Mudah-mudahan para lembu membaca iklan tersebut. Atau iklan tersebut bisa juga semacam masukan kepada para pemimpin lembu agar menertibkan anggotanya untuk tidak keluyuran malam, apalagi dengan cara bergerombolan karena mengganggu ketertiban umum.

Kita sebenarnya kecewa dengan pemandangan seperti ini.

Bukan soal lembu merazia pengguna jalan, melainkan kenapa para pengguna jalan atau katakanlah para pencuri lembu tidak beraksi. Apa para pencuri tidak melihat keberadaan gerombolan lembu sebagai lahan bisnis yang menjanjikan? Satu ekor lembu sekarang laku dijual dengan harga Rp6 juta. Jumlah itu lebih besar dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang hanya Rp300 ribu.

Kita yakin, pencuri lembu profesional bisa membawa pulang setiap malamnya minimal 10 ekor lembu. Masalahnya, kita jarang mendengar lembu-lembu di jalan raya tersebut dicuri. Para pencuri lebih senang mencuri lembu di kandangnya dengan risiko yang jauh lebih besar. Soalnya, jika kedapatan oleh pemilik bisa *diboh* parang.

Bagi saya itu aneh. Kenapa lembu yang bergerombol di jalan seperti tak ada pemiliknya, tak pernah dicuri. Yang sering dicuri justru lembu di kandang. Jangan-jangan, sudah ada statuta umum, bahwa hanya koruptor yang boleh mencuri dalam jumlah yang besar, sementara pencuri lembu hanya boleh mencuri dalam jumlah yang sedikit. Entahlah! (HA 26.05.08)

Bola

BOLA. Ya...Bola. Pasti semua orang menyukai bola. Pertandingan Liga Champions (musim 2008) antara Manchester United dan Chelsea berlangsung menegangkan. Meski akhirnya, MU keluar sebagai juara.

Begitulah permainan bola. Dalam waktu beberapa menit, semua bisa terjadi. Klub yang tak diunggulkan bisa langsung menang, begitu juga sebaliknya. Dalam waktu per menit juga, air mata bisa bercucuran karena tim favorit kalah. Tim yang sudah memastikan menang, namun karena lengah sedikit saja harus pulang dengan wajah tertunduk. Sekali lagi, itulah bola.

Negara besar atau klub besar yang identik dengan kampion sepak bola, tak langsung menang atau menjadi juara. Anda pasti tahu Brazil, negara yang punya tradisi sepak bola dan favorit juara Piala Dunia 2006 dua tahun lalu di Jerman. Apa yang terjadi? Brazil rontok di tangan Perancis yang sama sekali tidak difavoritkan. Perancis kemudian kalah dari Italia dalam laga final yang berlangsung dramatis tersebut.

Demikian juga Inggris, Negara tempat permainan bola pertama kali diperkenalkan. Tapi, apa yang terjadi, Inggris harus absen di Piala Eropa yang berlangsung pada Juni-Juli 2008. Publik tentu kecewa, karena bagaimanapun Inggris tetap memesonakan siapa saja. Liga Inggris dikenal sebagai kompetisi terbaik dan sekaligus termahal di dunia.

Namun begitulah hakikat semua permainan, terutama bola. Semua bisa terjadi dan tak bisa diprediksi. Kalkulasi di atas kertas tak selalu sama di lapangan. Bola itu bulat, kata orang. Tim populer, pemain termahal, dan negara *superpower* tak jadi jaminan akan langsung menjadi raksasa sepak bola. Karena, popularitas dan nama besar tak selamanya berarti bisa menang.

Dalam permainan, hanya klub yang memiliki taktik dan teknik jitu yang bisa menang. Ada strategi-strategi yang dimainkan. Tahu di mana kelemahan dan kelebihan lawan. Kemudian tahu cara mengatasinya. Jika ingin menang, sebuah klub harus sangat pandai mempelajari teknik lawan. Karena klub yang memiliki teknik terbaiklah yang selalu bisa menang.

Lalu, apakah dunia politik sama seperti dalam permainan bola? Sama, hanya saja, dalam politik lebih abu-abu. Kita tak bisa menerka siapa lawan atau kawan kita. Dalam politik, umum berlaku teori Machievalli: “tak ada kawan atau lawan sejati, yang ada hanya kepentingan.” Sangat abu-abu.

Lalu, apakah dalam politik dibutuhkan analisis seperti dalam sepakbola? Tak selalu harus. Analisis itu kadang-kadang menciptakan “maop” bagi diri sendiri, dan mengakrabkan kita pada sikap kalah sebelum bertanding.

Tahun depan, di Aceh akan berlangsung pesta demokrasi yang berbeda di tempat lain di Indonesia. Pemilu di Aceh diwarnai dengan kehadiran partai politik lokal. Partai-partai lokal ini akan bertarung dengan partai nasional dan juga sesama partai lokal. Kita akan menyaksikan elemen-elemen perjuangan akan saling mengalahkan, dengan cara apapun.

Tapi, kita harus mengingatkan, bahwa ini politik. Klaim politik harus diuji di arena publik. Biarlah rakyat yang menentukan pilihan tanpa dipaksa untuk memilih salah satu partai. Karena, seperti disampaikan Mao Tse Tung, “politik adalah perang yang tidak menumpahkan darah, sementara perang adalah politik yang berdarah-darah.” Sebab, kita sudah lama meninggalkan perang. Ini politik bos! (HA 24.05.08)

Plin Plan

PLIN-PLAN merupakan sikap yang tidak konsisten dan suka berubah-ubah pendirian. Sikap seperti ini, tak layak dimiliki, karena tak terpuji. Di dunia politik, sikap seperti ini lumrah saja. Artinya, dalam politik membaca peluang itu penting, seperti halnya dalam bisnis. Kemampuan membaca peluang, berarti juga isyarat, suatu bisnis akan sukses.

Tapi, tak selamanya sikap plin-plan itu diterima. Orang plin-plan sering tidak dapat dipercaya. Hari ini bilang begini, besok bilang begitu. Antara kemarin, hari ini dan besok selalu berubah-ubah. Hari ini bilang A, besok jadi B, besok lusa pasti jadi C. Jika ada tipe pemimpin seperti ini, tak layak jadi panutan.

Sikap plin-plan sangat akrab dengan politisi. Hari ini bergabung dengan partai ini. Ketika kepentingannya tak terjamin di partai tersebut, besok dia pasti mencari partai lain yang menurutnya lebih punya peluang memuluskan kepentingannya. Makanya, seorang politisi tak perlu didengar omongannya. Erich Fromm memberi nasehat yang bagus bagaimana cara memahami orang plin-plan ini.

Menurutnya, kita tak perlu selamanya mendengar orang plin-plan. Kita tidak perlu percaya padanya setiap dia berbicara. Kita bisa langsung mengambil kesimpulan dengan cara melihat pengalaman atau pembicaraan dia sebelumnya. Oleh Erich Fromm, teori seperti ini disebut dengan pendekatan behavioristik murni: perilaku masa mendatang bisa disimpulkan dari perilaku masa lalu.

Lalu, apa sebenarnya sikap plin-plan itu? Orang Aceh biasanya sering menyebut mereka dengan, “*Ureung tujuh go luho si uroe*.” (Orang tujuh kali shalat dhuhur dalam sehari)

Sementara secara teori, sikap plin-plan disebut juga dengan *indecisiveness*, atau suatu ketidakmampuan menentukan keputusan atau bersikap dengan alasan-alasan yang sangat tidak kuat.

Orang plin-plan itu adalah orang yang gampang melakukan bongkar-pasang rencana, keputusan atau penyikapan atau suka gonta-ganti pasangan bagi orang yang pacaran. Karena itu, plin-plan sering diperlawankan dengan *self-confidence* (kepercayaan diri).

Misal, dalam hal pendirian partai politik. Jauh-jauh hari sudah berkomitmen memberi nama partai dengan nama partai X. Nama partai X itu harga mati, dan akan diperjuangkan habis-habisan. Malah, jika ada kekuatan yang mencoba mengubah nama partai X akan dilawan dengan sekuat tenaga. Tapi, belakangan karena satu dan lain hal, nama parti X itu harus diubah menjadi partai Y, dengan alasan yang dibuat-buat. Anehnya, setelah berubah satu kali, besok berubah lagi, entah sampai kapan.

"Nan partai droe mantong han ek diperjuangkan, kiban dijak perjuangkan naseb geutanyoe (Nama partai sendiri saja tidak sanggup diperjuangkan, bagaimana mereka mau memperjuangkan nasib kita)," ujar Apa Mat Nu di kampung saya. Capek dech! (HA 23.05.08)

Untong

KITA sering mendengar ucapan dalam masyarakat Aceh, yang sebenarnya berisi sindiran atau menyindir dirinya sendiri. *"Ureung Aceh sabe untong, hantom rugoe meusigo. Sementara ureung China sabe rugoe* (Orang Aceh selalu untong, tidak pernah rugi sekalipun, sementara orang China selalu rugi)". Kenyataannya, orang China jarang rugi, malahan orang Aceh yang rugi terus-menerus.

Namun, orang Aceh selalu mensyukuri segala pemberian Tuhan, baik berupa cobaan maupun kenikmatan hidup. Saat musibah tsunami pun, orang Aceh masih bisa berucap, *"Untong cuman tsunami, kon kiamat* (Untuk cuma tsunami, bukan kiamat)". Demikian orang Aceh berucap atas musibah yang terjadi.

Dulu, saat Aceh masih didera konflik, seorang ibu saat mendengar anaknya tewas tertembak, namun mayatnya ditemukan, masih mampu berucap. *"Untung meupat manyet, munyoe hana sang han ditheun jantung keuh* (Untung ada mayat, andai tidak ditemukan mayatnya, saya bisa jantungan)," begitu lirihnya, meski dia tetap sedih.

Demikian juga ketika Ia mendengar anaknya tertimpa musibah, seperti kecelakaan yang membuat salah satu kakinya patah. Sang ibu, sambil menangis akan berucap, *"Untong cuma siblah kaki aneuk lon yang patah, munyoe dua blah aleh kiban jeut aneuk lon nyan* (Untung cuma sebelah kaki yang patah, coba kalau kedua kaki yang patah, bagaimana jadinya anak saya)".

Ucapan tersebut menunjukkan bahwa orang Aceh sangat tegar ketika menghadapi setiap masalah. Hal ini sudah diakui, bukan hanya oleh orang Aceh sendiri melainkan oleh dunia internasional. Orang Aceh masih tetap *establish* meski dirundung konflik puluhan tahun. Daya resistensi orang Aceh sangat kuat.

Bukti lainnya yang menunjukkan daya tahan orang Aceh cukup kuat, seperti saat Tsunami tiga tahun lalu. Musibah tersebut sama

sekali tidak membuat orang Aceh terpuruk. Malah, pascamusibah, orang Aceh seperti tidak merasakan apa-apa, hanya saja banyak di antara mereka dibuat terlena oleh janji bantuan, di mana kadang-kadang bantuan tersebut tidak pernah datang.

Para korban tsunami yang belum mendapatkan rumah, juga jarang mengeluh. Meski kadang-kadang ketika tidak tahan mendemo kantor BRR. Tapi, bagi orang Aceh, punya tempat tinggal meski di barak sudah cukup, yang penting kebutuhan untuk makan sehari-hari mencukupi.

Saya masih ingat, sebuah buku humor yang diterbitkan Garba Budaya, Jakarta yang berjudul: Geer Aceh Merdeka. Di buku yang berisi humor tersebut, menggambarkan orang Aceh sosok yang tegar. Konflik sama sekali tidak mempengaruhi kehidupan orang Aceh. Orang Aceh masih mampu menciptakan berbagai humor yang sebenarnya liris. Orang Aceh, seperti ditulis dalam buku humor tersebut hendak menyindir perilaku para tentara yang jarang tersenyum. Bahwa ada dua jenis orang yang tidak bisa ketawa, yaitu kalau tidak “sedang sakit” ya “pasti sedang punya niat jahat.”

Jadi, tak heran jika ada yang mengatakan untuk orang Aceh: “Orang Aceh masih bisa bercanda meski sedang berduka.” (HA 22.05.08)

Akan

BANYAK pejabat kita kalau berbicara sering menggunakan kata “akan”, dan banyak juga yang lebih senang menggunakan kata “mungkin”. Kedua kata ini, sebenarnya tidaklah salah, tapi ketika dipadankan dengan janji dan keinginan, kalimat tersebut sudah menipu.

Saat tulisan ini ditulis, sudah tak terhitung janji yang tak ditepati, baik itu janji para pejabat, politisi, pekerja LSM dan lain-lain. Ketika berbicara, lebih-lebih di hadapan khalayak, mereka sangat sering menggunakan kata “akan” dan “mungkin”

“Jika saya terpilih, saya akan membangun jembatan, jalan, dan akan membangun ini, itu dan seterusnya,” begitu janji politisi setiap musim kampanye.

Para pejabat begitu juga. Setiap meninjau ke suatu tempat, pasti mengumbar janji. “Mungkin tahun depan, masyarakat petani akan makmur. Pemerintah mungkin akan membantu para petani dengan modal usaha,” janji seorang pejabat dari Dinas polan.

Dalam berpidato, para pejabat tersebut lebih sering menggunakan teks, yang dibuat khusus oleh tim penulis konsep pidato. Jadinya, pidato tersebut bukan sepenuhnya berasal dari pemikiran si pembaca pidato (baca: pejabat).

Maaf jika saya sebut para pejabat sebagai pembaca teks pidato. Karena begitulah kenyataannya sekarang. Para khatib Mesjid di kota-kota besar sekarang juga ikut-ikutan menggunakan teks. Hal itu menunjukkan kedangkalan ilmu dan pemikiran.

Tak heran, jika sehabis pidato, sang pejabat atau khatib kadang-kadang tidak tahu apa yang sudah disampaikan. Ini tentu bermasalah, karena dia sama sekali tak ingat lagi janji-janji yang diucapkan itu. Sebab, janji tersebut bukan berasal dari pemikiran dia melainkan dari konsep yang ditulis oleh tim khusus.

Makanya, jangan heran, jika dalam setiap pidato, kita mendengar

kata-kata “akan” dan “mungkin”. Artinya, yang disampaikan itu, sering tidak mampu diwujudkan dalam kenyataan. Kondisi ini sering disebut oleh rakyat di Kampung dengan “Uet Jalo Toh Kapai” (Menelan Boat, mengeluarkan kapal), sesuatu yang tidak mungkin. (HA 21.05.08)

Manajemen

KAWAN saya, Hasrul yang sedang berada di Medan membeli sebuah buku untuk saya. Judulnya: La Politica (Politik), karya monumental Aristoteles (384-322). Saya belum selesai membaca seluruhnya. Tapi isinya menarik, meski ditulis ribuan tahun yang lalu.

Ada beberapa pemikiran Aristoteles, khususnya Bab XII dari Buku Pertama menarik untuk dikaji. Dalam bagian ini, Aristoteles menulis tentang manajemen rumah tangga, unsur terkecil dari sebuah Negara. Menurutnya, dalam manajemen rumah tangga, ada tiga aturan yang berlaku: *Pertama*, aturan majikan terhadap budaknya (baca: pembantu), *Kedua*, aturan seorang Ayah, dan *Ketiga*, aturan seorang suami.

Aturan sang majikan yang diterapkan terhadap budak merupakan bagian daripada ilmu, berupa penguasaan. Meski ada juga yang menyebutkan, aturan yang diterapkan tersebut berlawanan dengan alam. Perbedaan antara budak dan majikan, disebutkan, hanya ada di dalam hukum, bukan secara alamiah. Berlawanan dengan alam, menurut Aristoteles, adalah tidak adil.

Budak atau disebut juga pelayan adalah alat sang majikan, yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang optimal, atau bisa juga digunakan untuk mengantisipasi keinginan yang lain. Artinya, budak adalah milik sang majikan yang bisa digunakan menurut selera majikan. Karena budak tidak memiliki diri sendiri sepenuhnya.

Sementara seorang suami dan ayah, mengatur isteri dan anak-anak, keduanya bebas, tetapi aturannya berbeda. Aturan untuk anak-anak disesuaikan dengan aturan di rumah tangga, sedangkan aturan untuk isteri merupakan aturan konstitusional, karena meski ada beberapa pengecualian terhadap tata aturan alam, sang laki-laki secara alamiah lebih sesuai untuk posisi komando daripada

perempuan, sama seperti yang tertua dan dewasa lebih superior terhadap yang lebih muda dan belia.

Dalam Negara yang paling konstitusional, sambung Aristoteles, warga masyarakat memerintah dan diperintah secara bergantian, karena ide Negara konstitusi berarti bahwa kedudukan warga masyarakat adalah setara dan tidak berbeda sama sekali. Yang penting bagaimana antara yang memerintah dan yang diperintah saling menghargai satu sama lain.

Begitu juga halnya dengan aturan seorang Ayah kepada anak-anaknya, yang lebih banyak bersifat kerumah-tangga, karena sang ayah memerintah lebih dilandasi oleh perilaku mencintai dan menghormati sesuai dengan usia. Jika aturan demikian indahnya, sangat disayangkan ketika ada ayah yang tega mengorbankan anak-anaknya, lebih-lebih jika sampai merusak anak gadisnya seperti menghamili atau menjualnya. Hal ini jelas salah. (HA 20.05.08)

Publoe Nanggroe

“NYAK, ka croih laju ungkot masen beh, Mak han ek budoh le dari teumpat eh (Nak, kamu goreng saja ikan asin ya, Ibu tidak sanggup bangun dari tempat tidur),” pinta Ibu Minah dengan suara terbatuk-batuk di kamar depan. “Jeut mak, tapi minyuek kabeh dari baroe supot (Iya Ibu, tapi minyak goreng sudah habis dari kemarin sore),” jawab sang anak yang sedang membaca buku.

“Pue ayah droekeuh hana geubloe minyuek baroe supot? (Apa bapak kamu tidak beli minyak goreng kemarin sore)” tanya sang ibu lagi. “Geupeugah hana belanja. Mak. Keu rukok mantong hana ngon geubloe (Bapak bilang tidak ada duit. Katanya untuk beli rokok saja tidak ada duit),” jawab putrinya.

“Munyo meunan, ka panggang mantong eungkot masen nyan (Kalau begitu, kamu bakar saja ikan asin itu),” pinta sang ibu, karena harapannya untuk menikmati ikan asin goreng sirna sudah. “Jeut mak (Baik, Bu),” sahut sang anak, yang barusan ikut UN ini.

Di tempat lain, ceritanya berbeda. “Dapat berapa proyek tahun anggaran 2007 kemarin?” tanya seorang pengusaha muda pada temannya. “Nggak banyak, cuma dua proyek aja. Anggaran juga sedikit, jembatan yang satu di kampung A, dapat untung Rp2,5 miliar. Jembatan satu lagi, belum selesai semuanya, tapi dah dapat laba Rp1,2 miliar,” jawab sang teman. “Kamu sendiri gimana?” tanyanya.

“Aku belum dapat apa-apa sejak pemerintahan Irwandi-Nazar berkuasa. Cuma kemarin ada proyek rehab irigasi di Kecamatan S, itu pun *nggak* untung, cuma dapat Rp700 juta,” jawab sang pengusaha muda tak kalah semangatnya. “Kemarin ada rehab Mesjid proyek dari RRB, tapi itu juga sama *nggak* untung, cuma dapat Rp75 juta. Panitia Mesjidnya agak pintar, jadi tak bisa dikibulin,” sambungnya lagi.

Di sebuah kantor partai politik lain lagi. “Tema kampanye apa kita jual lagi di pemilu mendatang?” tanya sang ketua membuka

rapat. “Kita tawarkan aja program kesejahteraan untuk rakyat miskin. Mereka pasti tertarik,” timpal salah satu pengurus.

“Kalau menurut saya, kita janjikan saja program kereta api bawah tanah, dari barat ke timur, dari utara ke selatan,” sahut seorang ketua yang rambutnya sudah uban. “Kita tak perlu idealis. Begitu kita menang, kebijakan bisa kita ubah lagi. Kita bisa jual hasil alam di hutan Aceh ke perusahaan asing. Banyak yang bisa dijual, kok! Kalau perlu kita jual saja pulau Aceh dan Sabang, investor asing pasti senang,” sambungnya lagi. Peserta rapat diam.

Begitulah potret Aceh sekarang. Di tengah terjepitnya nasib rakyat, masih ada orang-orang berpikiran busuk menjual Aceh, sejengkal demi sejengkal. Entahlah! (HA 19.05.08)

Wakil Rakyat

HARIAN ini kemarin (17/05/08) melansir berita yang cukup memiriskan hati: “Enam Komisi Melancong, Gedung DPRA Kosong.” Mereka berbondong-bondong berangkat ke Jakarta dan tempat lain, katanya untuk *study banding*. Terlepas apapun tujuannya, pelancongan atau *study banding* para anggota dewan tersebut tetap tidak dapat kita terima. Pasalnya, banyak hal yang meski diselesaikan mereka. Katakanlah, masalah keterlambatan pengesahan APBA yang perlu dipercepat.

Para wakil rakyat ini seharusnya memikirkan bagaimana terjepitnya kondisi rakyat di tengah wacana kenaikan harga BBM. Harga-harga melambung tinggi, dan biaya hidup semakin mahal. Sementara, para wakil mereka, yang katanya terhormat, dengan seenaknya menghambur-hamburkan uang rakyat dengan alasan *study banding*.

Meski kita yakin, tindakan para wakil rakyat itu untuk melakukan *lobby* bagaimana masalah Tapol/Napol Aceh yang ditahan di penjara-penjara di Pulau Jawa bisa dibawa pulang ke Aceh. Tetapi, ini hanya agenda sampingan, karena kita tahu pasti ada agenda lain di balik kunjungan tersebut, katakanlah terkait dengan pemilu 2009 atau agenda personal lainnya. Bayangkan saja, anggota Komisi C yang membidangi masalah keuangan, malah melakukan *study banding* ke Batam. Apa ini tidak salah, atau bukankah ini terkait dengan bisnis ‘tali air’?

Jika kunjungan atau *study banding* itu menggunakan uang pribadi, kita tidak berhak mempersoalkannya, meski secara moral itu sudah salah, karena mereka adalah para wakil rakyat, di mana siang dan malam harus memikirkan nasib rakyat yang diwakilinya. Tapi, dana yang mereka gunakan adalah rakyat. Sementara rakyat, untuk membeli beras saja sudah sulit.

Tak hanya itu, ketika para mahasiswa berniat menemui para anggota dewan mengadu soal kenaikan BBM, juga harus kecewa. Karena mereka hanya disambut oleh beberapa orang saja, yang tidak punya kuasa mengeluarkan kebijakan. Jika begitu kondisinya, pantaskah mereka mengaku sebagai wakil rakyat? Pasal, ketika rakyat butuh mereka, mereka justru tidak berada di tempat. Kita juga bisa mencecar dengan seribu pertanyaan, soalnya nasib APBA yang jadi hajat hidup orang banyak masih terkatung-katung tak jelas kapan disahkan. Kenapa mereka tega berbuat demikian? Padahal, ketika berkampanye mereka dengan mulut manis berjanji akan memperjuangkan nasib rakyat siang dan malam. Lalu, sekarang rakyat butuh mereka, mengadu soal kenaikan BBM yang membuat rakyat kecil tercekak, kenapa mereka menghindar? Apakah mereka malu bertemu dengan rakyat yang diwakilinya, karena banyak janji yang tak berhasil ditunaikan? Kita berharap agar rakyat mengingat mereka, bukan karena ingin memilih lagi pada Pemilu mendatang, melainkan menghukum mereka dengan tidak memilihnya. Alasannya, karena keberadaan mereka sama sekali tidak memberikan manfaat untuk rakyat. Bayangkan saja, sudah lima bulan anggaran 2008 berjalan, tapi pengesahan APBA masih tertunda. (HA 17.05.08)

Tahu Diri

Ada dua tempat yang selalu kuperhatikan ketika saya pulang kampung. Pertama, pasar hewan di Sibreh, Aceh Besar, dan kedua pasar ayam di Simpang Pidie. Pasar Sibreh selalu ramai ketika hari pekan yaitu Rabu, sementara pasar Simpang Pidie, setiap pagi ramai, setiap hari. Di pasar Sibreh, selalu saja ada hewan seperti kambing, lembu dan kerbau yang dijual. Di Simpang Pidie hanya ada bebek dan ayam. Saya belum pernah membeli Hewan di Pasar Sibreh, hanya melihat-lihat saja dari jauh. Sementara di pasar Simpang Pidie, tepatnya di lampu merah, saya pernah berhenti dan sempat melihat-lihat bebek dan ayam yang dijual di sana. Baunya khas dan menyengat. Jika tak ada keperluan, kita tak akan membuang waktu berlama-lama di sana.

"*Manok nyang toh kubri saboh*," tanya seorang penjual ayam. Jangan salah diartikan, *kubri* (memberi) di sini bukan bermakna memberi mentah-mentah, tapi kata halus untuk menjual. Dia memberi kita ayam, kita memberinya uang. Jadi, bukan memberi *tok*, semacam hadiah atau sedekah. Mendengar itu, aku hanya senyum-senyum saja, dan menjawab singkat. "*Lon ngieng-ngieng dilee jeut?*". "*Juet*" jawabnya, sambil melihat-lihat ke arah pembeli yang baru datang.

Meski aku belum merasakan suasana di pasar hewan di Sibreh, tapi kondisinya pasti sama. Setiap kita ke sana, langsung ditawarkan kambing, lembu atau kerbau. Karena, yang datang ke sana bukan sekedar melihat-melihat tidak membeli. Di sana hanya ada penjual dan pembeli. Memang sih, kondisinya ada yang seperti kata pepatah, "Yang datang tidak membeli, yang membeli tidak datang".

Tapi, secara umum hanya ada dua golongan manusia di sana, pembeli dan penjual hewan.

"*Pue tacok* (kita ambil) *saboh kameng bak kamoe?*" pertanyaan itu yang selalu ditanyakan kepada setiap pembeli yang dikenal maupun tidak dikenal (pembeli baru). Perhatikan *tacok*, yang artinya 'kita

ambil'. Kata ini sebenarnya terdiri dua kata: kita (di singkat menjadi "ta") dan *cok* (ambil). Padahal, itu kambing dia, tapi dia masih tetap bertanya, seolah-olah kalau kita ambil (beli), berarti termasuk dia di dalamnya, meskipun dia penjual. Terlihat ada penghargaan terhadap pembeli. Penjual menggunakan bahasa politik yang sangat halus mempengaruhi pembeli. Tapi, ini jelas bukan medan kampanye di mana orang berbicara dengan bahasa 'sok' akrab penuh dengan kamufase. Ini hanya arena jual beli hewan. Tapi, komunikasi politik tetap berjalan dan pembeli merasa dihargai.

Sudah tabiat kita, kalau sesuatu sudah ditawarkan, tetap saja barang itu tidak lagi menarik. Kita tidak langsung membelinya, melainkan tetap ingin melihat-lihat. Perilaku pembeli, di pasar mana pun selalu melihat-lihat dulu barang yang akan dibeli, seperti melihat kualitas barang, harga barang, dan membandingkan dengan harga pada penjual lain. Pembeli tidak akan membeli kambing atau ayam yang ditawarkan. Karena jika ditawarkan, konotasinya pasti ada yang tidak beres: tidak laku lagi, atau barang tersebut tidak sempurna, ayamnya *keunong ta-uen*, atau flu burung. Kalau kambing, mungkin kambingnya sudah *ciret*, sudah mau mati, atau ada penyakit yang pembeli tidak tahu.

Logikanya, jika tidak bermasalah pasti tidak ditawarkan. Pembeli yang cerdas, seperti sudah kita tulis di atas, tidak akan langsung membeli.

Dalam membeli kambing atau ayam, dia pasti melihat dulu barangnya. Meneliti dan mengamati, dan membanding-bandingkan dengan kambing/ayam sebesar itu cocok tidak dengan harga penjual yang lain. Dia pasti mau membeli kambing atau ayam yang sehat. Tanpa ditawar pun kalau kualitasnya bagus, pasti dibeli. Setiap kambing atau hewan yang dibawa itu, sang penjual pasti sudah memperhitungkannya, kambing/hewan/ayamnya laku berapa: ada yang laku per ekor Rp400 ribu untuk kambing, atau Rp15 ribu untuk ayam. Jika dia membawa banyak ayam, dia yakin tak semuanya laku. Pasti ada yang tinggal. Dia hanya menawarkan banyak pilihan kepada pembeli. Kalau baik pasti akan dibeli. Penjual tak perlu ragu.

Sementara kambing/hewan/ayam yang tidak laku, juga tahu diri. Dia rela dibawa pulang kembali ke rumah dan dimasukkan ke kandang. Dia tahu diri. Penjual tahu diri kalau kambing/hewan/ayamnya mutunya tidak bagus atau sakit-sakitan. Oleh penjual sejak dari rumah sudah bisa diprediksi, mana kambing yang bakal laku, mana ayam yang bakal laku dan mana yang tidak. Itu tergantung pada selera pembeli.

Lalu, apa hubungannya dengan judul di atas? Tidak ada

hubungan apa-apa. Karena ketika saya menulis ini, saya tahu diri. Bahwa tulisan saya akan dimaki dan dicaci, dan dianggap tidak manfaat. Tapi, ada satu pesan yang bisa diambil di sini. Dalam politik, sangat penting politik tahu diri. Politisi atau orang yang terjun dalam politik, harus ingat betul-betul, bahwa "Yang naik tanpa kemampuan akan turun tanpa kehormatan".

Begini, mungkin bahasa saya terlalu susah dipahami. Partai lokal *kan* sudah diverifikasi, setelah itu pasti masing-masing partai sibuk merancang dan menempatkan siapa saja yang mampu dijadikan calon legislatif (*caleg*). Orang-orang yang ditempatkan itu, menurut partai, pastilah kader-kader terbaik. Masalahnya, siapa yang tahu bahwa *caleg* itu kader yang baik? Soalnya, jika dibuat oleh partai, berarti dipaksakan dari atas (dari partai), sementara rakyat tidak pernah tahu siapa dia. Saran kita, sebelum menempatkan *caleg*, apakah sesuai nomor urut atau sesuai daerah pemilihan, *caleg-caleg* itu harus diperkenalkan dengan masyarakat. Atau biarlah masyarakat sendiri yang mengusulkan, mana yang layak dijadikan sebagai *caleg*. Kalau perlu, dibawa ke pasar seperti halnya hewan yang dibawa ke pasar hewan. Biarlah masyarakat yang memilih. Kalau *caleg*-nya bagus, masyarakat akan menerima dan mau memilihnya. Jika tidak, apa boleh buat. Nasibnya mungkin tak jauh beda dengan ayam yang *keunong ta-uen* atau *kameng ciret* (mencret). Dipoles, dirayu dan ditawarkan bagaimana pun tetap tidak laku. (HA 31.04.08)

Bale Jaga

BALE Jaga. Semua orang pasti pernah mendengarnya. Istilahnya juga macam-macam. Di kampung saya (khususnya di Pidie), *bale jaga* sering disebut dengan *Blukoh*. Di tempat lain ada yang menyebut *bale* saja. Saat konflik dulu, sering dikenal dengan Pos Kamling (Posko Keamanan Lingkungan) atau Pos Jaga. Tak sedikit juga yang menyebut *rangkang*. Meski punya banyak istilah, saya lebih senang menyebutnya *Bale Jaga* saja.

Lalu, apa yang menarik dari *Bale Jaga*?" Tak ada yang menarik," jawab seorang teman. Benar juga, memang tidak ada yang menarik dari pos jaga. "Tapi, meski tidak menarik, banyak *loh* orang yang rela menghabiskan waktu di pos jaga," jawabku spontan. Malah, di kampungku sekarang, masih ada orang yang tidur di pos jaga sambil berdesak-desakan. Mereka tiduran sambil mengusir nyamuk dan rebutan bantal kayu yang sudah licin. Belum lagi udaranya juga dingin, pasti sangat tidak enak. Jadi, aneh kalau ada orang mau saja tidur di *bale*.

Menariknya, setiap hari *Bale Jaga* tak pernah sepi. Ada saja orang yang duduk di sana. Orang-orangnya juga *nggak* berubah, itu-itu saja. Yang pasti topik pembicaraan merakyat *banget*. Dari persoalan dasar masyarakat sampai obrolan politik. Topik-topik itu dibahas dan dianalisis menurut logika masyarakat awam, yang kadang-kadang lebih ilmiah dari kupasan lulusan perguruan tinggi.

Tak hanya itu, banyak persoalan yang muncul di masyarakat, mampu dipecahkan sendiri oleh mereka. Sebut saja masalah perselisihan dalam rumah tangga, pembagian harta warisan, dan masalah kasus pencurian di kampung. Semuanya, mampu diselesaikan dari obrolan di *Bale Jaga*. Padahal saat itu, pemerintah

absen atas nasib mereka.

Itu baru sebagian kecil saja hal yang menarik dari *Bale Jaga*. Tapi kalau mau dikaji, setidaknya menurut saya, ada tiga fungsi yang membuat Bale Jaga menarik. Tiga fungsi ini juga bukan muncul secara kebetulan melainkan ada prosesnya. Pertama, kalau pada masa DOM (Daerah Operasi Militer), Bale Jaga berfungsi sebagai sarana menjaga keamanan lingkungan. Masyarakat, entah sukarela atau terpaksa, menjaga kampungnya dari pos jaga. Setiap malam ada petugas piket yang ditugaskan. Banyak juga cerita seram yang muncul dari Bale Jaga ini. Jika ada petugas piket kedatangan sedang tiduran saat tentara tiba di Bale, mereka akan dihukum. Ada yang diminta merayap di sawah, ada yang diminta merendam di sungai/*lueng*. Tak sedikit juga yang harus menghisap rokok 10 batang sekaligus.

Kedua, Bale Jaga berfungsi sebagai tempat melakukan update fitnah. Istilah ini saya adopsi dari seorang teman. Maksudnya, memperbaharui fitnah. Jika sesekali sempat singgah di Bale Jaga, kita akan menjadi akrab dengan fungsi ini. Masyarakat yang duduk di Bale Jaga ini sering membicarakan kejelekan dan keburukan orang lain. Sifat kepala desa yang tidak disenangi juga diomongin di sini. Tentu saja yang buruk-buruk, seperti suka memangkas bantuan untuk orang miskin, suka gangguin anak gadis atau isteri orang. Pokoknya, kalau sudah menyangkut orang lain, cerita yang beredar di Bale Jaga ini sudah tidak benar. Artinya, jarang yang diomongin tentang kebajikan orang lain. Sangat pantang, mungkin. Bahkan, proses pemecatan seorang kepala desa juga berawal dari fitnah di Bale Jaga.

Ketiga, Bale Jaga juga bisa digunakan sebagai media mendengar aspirasi masyarakat bawah. Apa keinginan masyarakat bisa diketahui dari obrolan yang berkembang di Bale Jaga ini. Artinya, topik yang dibicarakan sering menyangkut kondisi aktual masyarakat. Masyarakat sedang membicarakan nasibnya. Sebut saja soal kenaikan harga sembako, lebih mudah dibahas di sini.

Nah, jika ada pejabat, wakil rakyat atau orang yang ingin mengetahui kondisi aktual masyarakat, mereka tak perlu repot-repot. Mereka bisa menemui masyarakat di sini. Informasi yang didapatkan juga bisa lebih valid ketimbang lewat forum-forum diskusi atau seminar. Soalnya, kalau lewat forum-forum diskusi atau seminar yang membahas tentang masyarakat sering tidak valid dan tak aktual. Aspirasi yang didapatkan juga lebih banyak bumbu kamufilasnya, apalagi jika seminar atau diskusi itu dibuat oleh lembaga pemerintahan. Pasti yang banyak muncul aspirasi atau informasi Asal Bapak Senang (ABS). Sementara kondisi

sesungguhnya tidak *tercover*.

Kalau mau populis, tak salah, jika para pejabat atau anggota dewan berkunjung ke Bale Jaga ini. Syaratnya, ya harus berlagak seperti rakyat juga. Jika tetap seperti pejabat, apalagi bawa pengawal yang *rame*, jelas tidak akan mendapatkan informasi tentang kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Masyarakat menjadi sangat tertutup.

Jadi, tunggu apa lagi? Pemilu 2009 sudah di depan mata. Jika ingin dipilih, mulai sekarang harus turun ke kampung-kampung dan berkumpul dengan masyarakat di Bale Jaga. Sebab kalau hanya saat kampanye saja mau turun ke kampung-kampung, itu lebih banyak bumbu politiknya. Karena ada mau-nya. Entahlah! (HA 19.04.08)

Skandal

SAYA membaca sebuah berita menarik. Berita itu datang dari seorang Gubernur New York, Eliot Spitzer yang berasal dari Partai Demokrat. Sang Gubernur menurut berita itu, memilih mengundurkan diri setelah skandal seks-nya terbongkar dan ditulis oleh berbagai media, terutama The New York Times. Saat jumpa pers, secara jantan, sang Gubernur mengakui bahwa dirinya memilih mundur karena tidak ingin masalah pribadinya mengganggu pekerjaan publik.

Menurut berita tadi, sang Gubernur terlibat dalam skandal seks jaringan prostitusi tingkat tinggi yang menyediakan perempuan pekerja seks dengan tarif US\$ 1000 (atau sekitar Rp9,5 juta) hingga US\$ 5500 (sekitar Rp51 juta) per jam.

Begitu membaca berita itu, pikiran saya langsung terbayang ke Aceh. “Ada nggak skandal seperti ini di Aceh?” gumam saya dalam hati. Karena penasaran, Saya tanya sama kawan satu profesi dengan Saya. “Kayaknya ada sih, tapi tidak terekpose?” jawabnya. Saya hanya mangut-mangut saja.

Saya jadi ingat kasus Salon plus yang ada di Banda Aceh yang pernah digerebek WH. Dengar-dengar, salon itu milik isteri kedua seorang pejabat di Pemko Banda Aceh. Saat digerebek, beberapa pekerja seks ditangkap. Sekarang salon plus itu sudah tutup. Belum lama juga, pihak WH dibantu aparat pernah menggerebek sebuah Café di seputaran Peunayong, persis di depan Kodam Iskandar Muda. Dari dengar-dengar sama kawan saya, yang kebetulan Komandan WH Banda Aceh, café tersebut juga punya seorang petinggi militer atau dilindungi olehnya. Entahlah, benar atau tidak, yang pasti café itu sekarang sudah tutup.

Saya terusterang jadi bertanya-tanya, jangan-jangan masih ada salon plus atau Café yang dicekingi sama pejabat atau orang-orang penting

di Aceh. Bukankah bisnis *lendir* (maaf agak kasar dikit) prospek yang pantas dilirik sekarang. Kalau berharap gaji dan tunjangan berapalah. Kalau bisnis *lendir* ini, tentu saja hasilnya lumayan. Bukankah di Aceh lagi musimnya NGO baik lokal maupun asing. Para pekerja NGO kalau digarap dengan bagus *kan*, bisa jadi pelanggan potensial untuk mengeruk keuntungan dari bisnis *lendir* ini?

Entah kenapa, saat menulis ini, saya jadi ingat sama seorang kawan, kebetulan jenis kelaminnya cewek. Saat itu, kami lagi duduk di sebuah cafe sepulang dari nonton bola volley. Tak lama HP-nya berbunyi. Dia agak ragu membacanya, karena pesan itu bukan dikirim oleh teman atau pacarnya. Tapi dari seorang pejabat yang jadi atasannya. Karena penasaran, saya minta lihat. “hai, apa kabar? lagi ngapain?” demikian bunyi pesan pendek itu. Trus, aku tanya, emang dia itu siapa? Katanya, yang ngirim itu seorang pejabat, tapi bukan sembarang pejabat, karena dia punya posisi penting di pemerintahan.

Naluri keingintahuan saya seketika muncul. Saya tanya, apa dia sering mengirim SMS? “Sering,” jawab si cewek ini spontan. Tapi menurutnya, tak pernah dijawab. Begitu selesai dibaca langsung dihapus. Atau begitu tahu SMS itu dari si Pejabat, langsung dihapus, karena si cewek ini tahu, pejabat yang ngirim itu punya anak dan isteri. Umurnya juga sudah tidak muda lagi.

Tanpa perlu dipancing dengan pertanyaan, si cewek ini langsung cerita panjang lebar. Katanya, si pejabat itu tak hanya kirim SMS, tapi sering juga nelson. Bahkan kalau lagi nelson, ceritanya, sering lama-lama. Pernah dia matiin HP, karena sudah tak sanggup lagi ngomong. Karena isinya tak ada hubungannya dengan pekerjaan dia di kantor.

Tak cuma itu, katanya, si pejabat itu sering mengajaknya ke Medan, ke Jakarta atau sekedar bertemu. Tapi si cewek ini tak pernah mau. Bahkan pernah suatu hari Bapak itu ada rapat mendadak di Jakarta, tapi sebelum berangkat rapat, minta ketemu dulu dengannya. “Bapak *kan* ada rapat di Jakarta,” tanya si cewek ini. “Saya bisa batalin rapat itu, yang penting saya bisa ketemu dulu dengan kamu,” jawab si Pejabat ini.

Si cewek ini tentu saja menolak. Rapat itu untuk kepentingan orang ramai, sementara ketemu dia, hanya kepentingan pribadi. Menurutnya, itu sama sekali tak lazim. Dia tetap menolak. Tapi si Pejabat ini tak mau menyerah sampai di situ. Sesampai di Jakarta dia masih mencoba menelponnya, dan meminta dia untuk menyusulnya ke Jakarta. Soal biaya semua ditanggung sama pejabat ini.

“Kenapa kamu tidak mau berangkat?” tanya saya, padahal semua

biaya ditanggung oleh bapak itu. “Ga mau, apa kata dunia, dia *kan* sudah tua, sementara saya masih punya masa depan,” jawabnya.

Entalah. Pejabat itu bisa siapa saja, dan pasti banyak di Aceh. Makanya, sesekali Pak Irwandi tidak hanya merazia anak buahnya di warung-warung kopi pas jam dinas, melainkan juga merazia bawahannya yang sedang dinas di luar daerah, di Medan atau di Jakarta. Kalau tertangkap, langsung saja dipecat. Atau, kalau memang si Pejabat tahu diri, dia pasti mundur dengan sendirinya, seperti yang dilakukan oleh Gubernur New York seperti dikutip di atas. (HA 2008)

Po Nanggroe

DI kesempatan ini, ada dua kalimat menarik yang ingin saya kutip. Pertama, kalimat yang pernah diucapkan Bang Joni alias Bang Kapluk dalam komedi Eumpang Breueh: *Nyang gasien meukuwien lam tika*. Kedua, salah satu bait lagu Dedy Dorres: *Yang kaya tertawa berpesta pora*.

Keduanya, bicara tentang dua nasib anak manusia. Yang satu diberi nikmat kemiskinan, sementara yang kedua dikasih nikmat kaya. Jika yang miskin, nasibnya begitu sedih, tak berdaya dan pasrah. Sementara yang kedua begitu congkak dan gagah. Hidupnya dibalut dengan kesenangan-kesenangan.

Kedua manusia beda nasib itu sering kita temui. Coba, kalau ada waktu keliling kampung-kampung yang ada di Aceh. Pemandangan seperti itu sangat kontras terlihat. Jika anda tak punya waktu terjun ke kampung, baiklah, saya ceritakan saja nasib masyarakat di kampung saya. Biar anda dapat gambaran utuh.

Saya ingat, saat pulang kampung beberapa waktu lalu, suasananya cukup berbeda. Jika dulu, saya sering nongkrong di warung kopi sampai larut malam. Sementara sekarang, jam sebelas malam, warung-warung pada tutup. Saat saya tanya, kenapa malam tak lagi semarak seperti dulu? Banyak dari masyarakat menjawab bahwa mereka tak mampu membeli segelas kopi. Hah! Saya tentu saja kaget. Mereka harus menunggu musim panen padi, agar bisa berkumpul lagi larut malam di warung kopi.

Tapi *kan*, pemerintah baru sudah meluncurkan Kredit Peumakmu Nanggroe? Seharusnya kehidupan masyarakat sudah cukup makmur sekarang. Tak ada jawaban. Hanya saja, mereka mengaku sulit mendapatkan kredit tersebut. Urusannya sangat berbelit-belit, apalagi jika tak ada *beking*.

Tak heran, jika Kredit Peumakmu Nanggroe (KPN) mulai

dieja Kredit Peumakmu Po Nanggroe. Kita bisa saja disalahkan karena sudah memplesetkan kalimat itu. Tapi, bagi kita ejaan kedua sepertinya lebih tepat. Namun, Po Nanggroe di sini jangan dipahami rakyat kecil yang punya nasib seperti disebut oleh Bang Joni, melainkan elite politik, kontraktor dan lain-lain yang tak pernah mengerti bagaimana *meukuwien lam tika*.

Malah, jika boleh cerewet, saya ingin bilang: jalan menuju kampung saja seperti gelombang air laut. Kalau kita bawa kereta terlalu cepat, badan kita bergoyang seperti bergelombang. Sementara, di beberapa bagian, meski baru diaspal sudah muncul rumput siap menyapa matahari pagi.

Nah, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah? *Kan* tak gampang mewujudkan perubahan secara instan! Ya...yang penting bukan program-program *cet langet*lah. Wujudkan dulu kesejahteraan dan kemakmuran (prosperity). Jika tak ada yang tahu apa itu kemakmuran, baiklah kita ingatkan lagi. Kemakmuran, sering disebut sebagai keadaan di mana kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan wajar secara mantap dan terus menerus.

Pertanyaannya kemudian, jika untuk membeli segelas kopi masyarakat harus menunggu musim panen padi, sudahkah itu wajar? Sudahkah kebutuhan terpenuhi secara terus menerus? Entahlah...yang penting, jangan sampai gara-gara kemiskinan dan kelaparan, orang Aceh memberontak lagi. Itu saja. Perkecil saja kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin setipis mungkin.

Kita hanya berharap, jika rakyat mengungkapkan kekecewaan, jangan dipahami sebagai bentuk kebencian, apalagi sebagai ancaman. Pertanyaan rakyat—yang bernada kritis—jangan dipahami sebagai ancaman terhadap legitimasi kekuasaan. Pemerintah tak perlu alergi dengan sejumlah pertanyaan itu, meski tak enak untuk didengar. Ingat, orang lapar itu sering lebih punya banyak ide (untuk memberontak) ketimbang orang-orang kenyang. Tak percaya? (HA24.02.08)

Politek Hana Titek

“JANGAN pernah percaya teman yang kamu temui dalam politik.” Kalimat di atas murni bukan produk saya. Kalimat ini milik seorang kawan, mantan pejuang GAM. Saya mengenalnya sudah lama. Nada bicaranya masih tegas, dan jelas. Dia seperti mampu menghasilkan kalimat-kalimat yang lebih retorik seperti itu. Maklum, awal-awal 1999 dia pernah menjadi Biro Penerangan GAM. Dia sudah akrab dengan kalimat-kalimat yang mampu menghipnotis pendengar.

Sekilas, kalimat itu terlihat biasa-biasa saja. Tapi ada pesan penting di dalamnya. Dia mengingatkan saya, dan tentu kita semua, bahwa tak selamanya teman yang kita temui dalam politik itu akan menjadi teman sejati kita. Mereka hanya berkawan dengan kita, ketika dia butuh kita. Dia tentu saja punya alasan kuat mengucapkan itu. Baginya, pasca-damai, kita sudah tak mampu lagi mengenali kawan yang benar-benar senasib dengan kita. Kita lupa pada mereka semua.

Kalau dilihat, kalimat di atas nadanya hampir sama seperti yang pernah diucapkan Niccolo Machievalli, “Tak ada kawan atau lawan abadi, yang ada hanya kepentingan sejati.” Jelasnya, teman dalam politik tak pernah permanent. Begitu juga kawan. Begitu kira-kira maksudnya.

Irwandi Yusuf, dalam suatu kesempatan di Gedung AAC Unsyiah pernah bilang sejak setelah hasil *quick count* memastikan dirinya menang dalam Pilkada. “Yang menjadi kawan saya nantinya adalah orang-orang yang rela susah dan sakit bersama saya, mereka adalah kawan-kawan saya.” Kita yakin Irwandi belum lupa dengan ucapannya itu.

Politik, memang susah dipahami. Coba simak saja berita beberapa waktu lalu, di mana disuguhkan berita bahwa GAM retak. Bagi kita, berita itu tentu saja terdengar miris. Gerakan yang susah payah dibangun puluhan tahun ternyata tak tahan dengan proses politik

yang terus berubah ini.

Keretakan itu, terlihat dari penolakan eks Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menghadiri undangan Aceh Peace Resource Center (APRC), sebuah pertemuan bersama perwakilan RI-GAM yang membahas pelaksanaan MoU Helsinki dan isu-isu yang berkenaan dengan keamanan di sekretariat Forbes Damai Banda Aceh.

“Kami kira pertemuan ini tidak akan bermanfaat dan hanya untuk menghabiskan dana BRA. Jadi kami tidak akan pernah menghadiri dan mengirim perwakilan,” demikian pernyataan Juru Bicara KPA, Ibrahim Syamsuddin Kbs seperti dimuat di harian ini beberapa waktu lalu.

Pihak media ramai menafsirkan kalau sudah terjadi keretakan di tubuh GAM. Soalnya, ada Tgk Bakhtiar Abdullah dan Munawarliza yang menghadiri undangan itu, sementara Irwandi Yusuf dan Nurdin Ar berhalangan. Kesimpulan itu yang dipegang oleh media.

Padahal, seharusnya mereka ingat. Ada sesuatu hal yang membuat mereka selama ini begitu kuat dan kokoh: ideologi. Zaman memang berubah, kondisi politik berubah, tapi ideologi mereka belum berubah. Itu yang harus mereka pegang. Sebab, dengan ideologi mereka akan mengenal secara jelas siapa kawan dan siapa musuh. Dengan ideologi mereka tak jadi lupa pada janji dan cita-cita.

Saya ingat, seorang kawan tadi siang di Solong bercerita, bagaimana dia menyakinkan kawan-kawannya di lapangan. Dia tak bisa memahami kondisi politik sekarang. “Jika saya salaman dengan orang Partai Rakyat Aceh (PRA), saya dianggap pengkhianat. Jika saya salaman dengan orang SIRA, saya dianggap pengkhianat. Tapi, kenapa ketika saya salaman dengan orang-orang Polsek dan Koramil, tak pernah dianggap pengkhianat?” ujarinya heran

Ada pesan dari orang-orang bagi yang terjun dalam dunia politik. Bahwa tak semua keinginan itu bisa digapai dengan politik, apalagi jika sampai mengorbankan ideologi atau kawan-kawan yang masih setia pada ideologi itu. “*Munyoe panyang talop, meunyo paneuk talingkue*,” begitu pesan orang-orang tua kita. Petuah itu entah cocok untuk kondisi sekarang atau tidak. Kita tak tahu.

Ada lagi berita yang membuat kita tersentak. Saudara kita di bagian Tengah dan Barat Selatan minta cerai dari Aceh. Menurut mereka, pemerintah Aceh dari dulu tak pernah serius memikirkan nasib mereka. Mereka selalu dianak-tirikan. Tak ada pembangunan. Jalan-jalan berlubang. Dan berbagai alasan-alasan lainnya.

Parahnya, sempat muncul pernyataan yang meminta agar Irwandi tak hanya menjadi Gubernur untuk orang Bireuen saja.

Gubernur diminta menjadi Gubernur seluruh rakyat Aceh. Suara-suara demikian sekarang ini sudah bukan asing lagi bagi masyarakat di bagian Tengah dan Barat Selatan.

Akhirnya, saya ingin mengutip satu kalimat yang kiranya bisa menyadarkan kita, bahwa ada satu keinginan bagi kita mewujudkan cita-cita Aceh seperti cita-cita semua orang Aceh. “*Nyang Meusipreuk ta peusapat, lagee kheun pakat takerija*.” Demikian harapan Muhammad Nazar, Wakil Kepala Pemerintahan Aceh dalam pidato pelantikan DPP Koniry, beberapa hari yang lalu. *Hom hai!* (HA23.02.08)

Netralitas Pejabat

PEMILIHAN Umum (Pemilu) baru berlangsung pada 9 April tahun depan. Partai politik baik lokal maupun nasional tengah sibuk mempersiapkan diri, termasuk menjaring tokoh-tokoh penting yang mampu mendongkrak perolehan suara. Para pejabat publik, apakah itu Gubernur, Bupati atau Walikota, tak terlepas dari incaran partai. Mendapat dukungan pejabat publik, tak hanya menguntungkan secara politik maupun secara finansial, namun juga mempermudah urusan setiap partai yang didukungnya. Tetapi, dukungan tersebut patut dipertanyakan, sebab, seorang pejabat publik haruslah berdiri di atas semua golongan dan kepentingan.

Seperti diberitakan Harian Aceh Kamis (31/07/08), Bupati Aceh Utara, Ilyas A. Hamid, secara terbuka menyatakan dirinya di Partai Aceh (PA). “Saya di Partai Aceh, saya *nggak* mungkin membelot ke partai lain,” ucap Bupati yang juga seorang petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pernyataan ini, diakui atau tidak, sarat dengan aroma kampanye seorang pejabat publik kepada rakyat yang dipimpinnya, meskipun tak berisi ajakan untuk memilih partai tersebut.

Pun demikian, ada juga yang menganggap pernyataan itu biasa-biasa saja. Seperti disampaikan Ketua Umum Partai Bersatu Atjeh (PBA), Ahmad Farhan Hamid, pernyataan Bupati Ilyas A. Hamid bukan suatu bentuk kampanye karena lebih kepada sosialisasi kepada publik. Lalu, masalahnya, jika pernyataan ini dipahami sebagai sosialisasi, kenapa mesti harus menyebutkan secara tegas salah satu partai? Bukankah lebih bijak jika Bupati meminta warga berpartisipasi dalam pemilu, dan meminta instansi terkait yang mengurus masalah KTP Nasional segera menyelesaikan pembuatan KTP. Sebab, masih banyak masyarakat yang belum memiliki KTP Nasional dan terancam tidak bisa Pemilu.

Soal partai mana yang didukung sang Bupati, tanpa dipertegas

atau sosialisasi pun, masyarakat juga sudah tahu. Bupati Ilyas A. Hamid merupakan seorang petinggi GAM, yang maju lewat jalur independen. Tetapi, yang harus dipahami sekarang, posisi Ilyas A. Hamid adalah Bupati Aceh Utara dan harus memayungi semua partai politik yang ada di Aceh Utara. Ini penting diingat, agar tidak ada partai yang ‘diistimewakan’ dan ‘dianaktirikan’.

Dukungan Bupati kepada salah satu partai politik, bisa mengurangi kualitas demokrasi dalam bentuk pemilu. Padahal, kita berharap, Pemilu 2009 di Aceh yang melibatkan partai nasional dan lokal bisa memberi contoh bagaimana pesta demokrasi berlangsung secara *fair*, damai, dan tanpa cela. Jadi, tak hanya Komisi Independen Pemilihan (KIP), Panitia Pemilihan Kecamatan (KPK) dan Panwaslih/Panwaslu yang harus bersikap independen dan netral, melainkan juga para pejabat publik seperti Bupati/Walikota atau Gubernur.

Bagaimana jika langkah yang dilakukan Bupati Aceh Utara ini diikuti oleh Bupati-bupati lain yang berlatar belakang GAM? Bagaimana jika Gubernur, Wakil Gubernur juga melakukan hal yang sama? Sudah barang tentu, pesta demokrasi secara *fair*, jujur dan independen sulit diharapkan. Besar kemungkinan akan terjadi yang namanya politik *plah trieng* (belah bambu), di mana satu partai diberikan kebebasan, kemudahan dan fasilitas, sementara yang lainnya dibungkam dan malah diinjak.

Jika hal demikian terjadi, kita sama saja kembali kepada masa Orde Baru, ketika partai penguasa, Golkar, berlembang sendirian, dan mempraktekkan politik kotor. Golkar yang didukung penguasa bebas melakukan semua cara, termasuk cara yang dilarang dilakukan oleh partai lain, seperti memaksa dan mengintimidasi masyarakat agar memilih partai tersebut yang didukung oleh militer. Hal yang sama bakal terjadi di Aceh, jika para pejabat publik tidak bisa bersikap netral. Sebab, pelaksanaan Pemilu 2009 sangat mirip dengan Pemilu pada masa Orde Baru, di mana praktik intimidasi atau pemaksaan salah satu partai kepada partai lain sulit untuk dihindari. Harapan Pemilu berkualitas bagai jauh panggang dari api. Para pemenang sudah bisa diketahui sebelum suara selesai dihitung. (HA 01.08.08)

Siapa Musuh Kita?

DALAM politik, umum berlaku rumus Machievalli, “Tak ada kawan atau lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan sejati.” Petuah itu selalu aktual untuk segala kondisi dan situasi. Sederhananya, kawan dalam politik tak selalu berlaku permanen, demikian juga musuh. Hanya kepentingan yang selalu permanen: membuat musuh menjadi kawan dan kawan menjadi musuh.

Jika kalimat itu diterjemahkan dalam kondisi politik di Aceh, bagaikan menemukan pijakannya. Kita berasyik ria dengan musuh. Sementara kawan—baik kawan seperjuangan maupun kawan se-ideologis—kita campakkan. Malah, di setiap kesempatan kita memberikan fatwa di hadapan rakyat kita, bahwa kawan kita menjadi pengkhianat, menerima dana dari si polan, sedang merencanakan sebuah skenario untuk kepentingan pribadi, dll.

Sementara musuh kita perlakukan bagaikan dewa. Seolah merekalah pembela kita selama ini. Sesuatu yang buruk dari mereka, kita anggap baik. Sementara yang baik dari kawan, kita anggap buruk. Kita telah jauh melangkah, dan memberlakukan kawan sebagai musuh, sementara musuh kita elu-elukan, kita puja dan malah kita “sembah!”

Kita tak pernah tahu, bahwa kita sedang menari dalam irama yang diciptakan musuh kita. Dan celakanya, kita terlena dengan irama itu. Padahal, mereka sedang merancang kehancuran kita secara pelan-pelan. Sambil kita terlena. Kita tak menyadarinya. Jika pun ada yang mencoba menyadarkan, tak segan-segan kita keluarkan fatwa: “tembak.”

Memang, zaman telah berubah. Kondisi politik juga berubah. Tapi satu yang tak pernah kita ubah: Ideologi. Sebab, dengan ideologi itu kita mengenal secara jelas siapa musuh kita. Dengan ideologi, kita tak lupa pada cita-cita kita.

Lalu, pertanyaannya: sejak kapanakah kita sudah mengubah keyakinan kita, ideologi kita dan juga musuh kita? Sejak kapanakah kita percaya bahwa partai politik dapat memperjuangkan nasib kita? Sejak kapanakah kita yakin bahwa melalui partai politik, kita dapat menghentikan isak anak yatim, tangisan para janda dan menyembuhkan luka para korban? Sejak kapanakah kita lupa bahwa partai punya saham dan andil besar membuat kita sengsara!

Zaman berubah, kondisi politik berubah, begitu juga strategi. Tapi, ideologi belum kita ubah. Musuh belum kita ubah. Dan kita juga belum buat kesepakatan apapun bahwa kawan seperjuangan dan se-ideologi adalah musuh kita sekarang. Kita belum buat kesepakatan apapun.

Karena itu, kita perlu memiliki lagi penerang. Kita butuh SUWA (obor) agar kita mengenal lebih jelas siapa lawan dan siapa kawan kita. Sebab, mata kita telah silau. Mata kita telah dibutakan oleh uang yang melimpah. Mata kita dibuat kabur oleh asap-asap dari mobil pemberian mereka. Sampai membuat kita tak mengenal lagi kawan kita.

SUWA tak hanya untuk memperjelas kembali wajah-wajah kawan kita, melainkan juga memperjelas diri kita sendiri. Jangan-jangan, meski jasad masih milik kita, tapi isi otak sudah bukan punya kita lagi. Otak kita telah dicuci. Sementara kita tak menyadarinya.

Selain itu, dengan adanya SUWA, kita berharap dapat mengenal yang mana Halal, yang mana Haram. Karena, keduanya sekarang sudah sulit dibedakan. Kita menghalalkan sesuatu yang haram, dan mengharamkan sesuatu yang halal. Bagi kita itu “oke-oke” saja. Entahlah!

Menang Atau Kalah; Sebuah Tragedi

There are two tragedies in life. One is not to get your hearts's desire, the other to get it. (George Bernard Shaw) Orang selalu saja beranggapan bahwa ketika sebuah impian dicapai, pertanda suatu keberhasilan. Sebab, impiannya jadi kenyataan. Kita sependapat dengan anggapan ini. Sementara, ketika orang tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, kita menyebutnya sebagai suatu kegagalan. Sederhananya: sebuah tragedi. Benarkah demikian?

Jika kita mau jujur, sebenarnya, baik mendapatkan maupun yang tidak atas suatu keinginan dan cita-cita, keduanya sama-sama suatu tragedi.

Kenapa demikian? Bagi yang mendapatkan, tentu saja ia menghadapi banyak tantangan, tanggung jawab dan juga tugas yang menumpuk. Apalagi, ada warisan masa lalu yang musti diselesaikan.

Dalam kasus Aceh, misalnya, memenangkan Pilkada bukan akhir dari segalanya. Memenangkan Pilkada dan mendapatkan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur belum dapat disebut suatu keberhasilan.

Sebab, ukuran berhasil bukan karena sanggup mengatasi lawan politik yang sudah berpengalaman, punya modal dan juga lihai bermain trik dan intrik politik. Memenangkan Pilkada bagi kita merupakan tragedi, jika kondisi Aceh yang begitu carut marut, banyak problem, serta baru saja keluar dari konflik dan tsunami, tak mampu diubah dan dibuat menjadi bermartabat.

Jika di awal-awal pemerintahan tak mampu menciptakan perubahan, atau setidaknya menjadi lebih baik dari sebelumnya tentu akan mengundang kecaman, cemoohan dan hujatan. Karena itu, bagi

yang terpilih perlu memikirkan bagaimana menciptakan perubahan, bukan malah menciptakan suatu tragedi baru. Itu yang penting.

Para kandidat yang terpilih itu patut merenungi kembali sebaait pidato terkenal Abraham Lincoln saat berpidato di Clinton pada 8 September 1858 yang mendapatkan sambutan luar biasa dari warga Amerika: *"You can fool all the people some of the time, and some people all of the time, but you cannot fool all the people all of the time"* (Anda dapat membodohi seluruh rakyat selama beberapa waktu, dan beberapa orang rakyat buat selama-lamanya, namun Anda tak dapat membodohi seluruh rakyat buat selama-lamanya)".

Pesan Lincoln ini perlu direnungi agar menjadi cermin atau setidaknya pengingat dalam memperlakukan masyarakat. Apalagi, para kandidat yang menang langsung dipilih oleh rakyat. Tanggung jawabnya sangatlah besar. Berbeda dengan sebelumnya, dipilih oleh segelintir anggota dewan.

Kepercayaan rakyat yang sudah diberikan hendaknya perlu dijaga dengan baik. Karena, ketika kepercayaan ini tak dijaga, rakyat akan berpaling. Rakyat bisa mencabut kepercayaan dan dukungan kapan saja. Mereka punya kuasa melakukannya.

Sementara bagi orang yang tidak mendapatkan keinginannya, kita sudah bersepakat menyebut mereka mengalami sebuah tragedi. Setidaknya ada tujuh pasang kandidat yang tidak mampu mewujudkan keinginan menjadi gubernur. Bagi mereka itulah sebuah tragedi, meski ada juga yang menyebutkan sebagai pengalaman.

Disebut tragedi, karena mereka sudah mengeluarkan banyak dana untuk biaya kampanye, membeli calon Wakil Gubernur, membayar tim sukses, dan lobby ke partai politik supaya mencalonkan dirinya sebagai salah satu kandidat gubernur.

Namun, meski sudah mengeluarkan banyak dana dan membagi-bagikan kepada masyarakat sesaat sebelum pemilihan, *toh* sama sekali tak mempengaruhi pilihan rakyat. Rakyat tetap memilih kandidat yang disukainya. Ketika rakyat berpaling, bayangan tragedi seperti di depan mata. Apalagi esoknya diperparah dengan pengumuman sementara di Koran, bahwa kandidat lain yang unggul, tentu saja dunia seperti runtuh.

Terbayang kemudian sejumlah dana yang tak bakal kembali, tagihan utang dan kwitansi yang menumpuk, baik pada masa pra maupun saat kampanye. Belum lagi biaya kontrak dengan perusahaan atau kontraktor, yang berbentuk perjanjian pemberian proyek jika terpilih, tak dapat dipenuhi. Bagi yang tidak siap tentu saja langsung pingsan. Tak sedikit tim sukses yang jatuh sakit dan stress.

Dalam suatu kesempatan, seorang teman menceritakan nasib tim sukses seorang kandidat yang paling diunggulkan memenangkan pilkada, terpaksa membaca judul koran sehari setelah pemilihan berulang-kali. Dia seperti tak percaya, bahwa kandidat yang dijagokan olehnya "KO" alias gugur. Dia bersikap tak biasanya, membolak-balik, menutup dan meletakkan Koran kemudian membaca lagi.

Orang-orang di sampingnya memperhatikan tak percaya. Sesaat Koran diambil, dan dibaca lagi. Diletakkan, kemudian dibaca lagi dan seterusnya. Entah apa yang ada di kepalanya. Bisa jadi dia berharap, judul Koran yang menempatkan berita kemenangan Irwandi-Nazar di halaman depan segera berubah.

Sampai tulisan ini dibuat, belum diketahui berapa jumlah kandidat yang jatuh stress dan kena stroke. Begitu juga dengan nasib tim sukses mereka, atau para kontraktor yang mendukung dana kampanye mereka. Boleh jadi, pascapilkada angka orang gila di Aceh meningkat tajam. Ini tentu saja memiriskan hati.

Kita atau siapa saja, hendaknya menghibur mereka untuk tertawa sebagai obat penawar menghilangkan stress. Guyonan-humor atau cerita lucu perlu diperdengarkan, misalnya: "Biarpun kita kalah, tapi kita sudah memenangkan Pilkada dalam hal jumlah spanduk dan baliho"; atau bisa juga, "Biarpun kalah, kita sudah menipu para kontraktor yang sudah mendukung kita, sehingga kita tak kekurangan dana"; bisa juga, "Kita sudah memenangkan pilkada dalam hal jumlah dana kampanye, sehingga kita mampu beramal untuk masyarakat sebelum pemilihan," dan lain-lain.

Atau, jika jurus itu tak mempan, kita gunakan jurus kedua yang diberikan Guree saya Tgk Ilyas Bada. Kita sampaikan pada tim sukses dari kandidat yang kalah bahwa, "Sebagai tim sukses jangan pernah mengucapkan kandidat anda kalah. Bilang saja kandidat anda kurang suara atau tak cukup suara, jadi bukan kalah." Ini lebih terhormat.

Terlepas dari semua itu, baik yang menang maupun yang kalah—terpilih atau tak terpilih—perlu kita ingatkan pada pesan yang disampaikan oleh George Bernard Shaw seperti dikutip di awal tulisan ini, bahwa, ada dua tragedi dalam hidup ini: Pertama, kalau anda tidak mendapatkan apa yang anda dambakan, dan Kedua, kalau anda memperolehnya.

Jika sama-sama tragedi, berarti baik yang menang maupun yang kalah harus kembali ke komitmen awal: siapa menang siap kalah. Karena selama ini, sulit mencari orang yang siap menang

siap kalah. Yang banyak, siap menang tapi tak siap kalah. Kita berharap yang kalah tidak menjadi pengacau dan mencari celah mengacaukan jalannya pemerintahan, begitu juga yang menang, tidak membusungkan dada. Entahlah!

Oposisi

BEBERAPA waktu lalu, sempat mencuat wacana oposisi terhadap pemerintahan Irwandi-Nazar. Wacana itu berawal dari sebuah diskusi “Kemenangan GAM: Perlukah Oposisi?” yang diselenggarakan oleh Pergerakan Demokratik Rakyat Miskin (PDRM) di D’Rodya Café, Banda Aceh, (12/02.07). Meski kemudian, wacana itu kembali menghilang ditelan oleh isu-isu lain.

Bagi kita, wajar saja dalam era keterbukaan muncul wacana oposisi. Dalam demokrasi, hal itu dibenarkan adanya. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan jalan pemerintahan, agar tetap berada di *rel* yang benar. Karena ada pandangan, bahwa penguasa dengan kekuasaan besar di tangannya, perlu diawasi. Hal ini karena, kekuasaan cenderung korup.

Ada yang mengatakan bahwa peluang penguasa untuk menyeleweng jauh lebih besar ketimbang dari kemampuan mengawasi dirinya. Banyak godaan yang akan muncul di tengah jalan. Jika kontrol lemah, makan godaan itu akan menguasai firasat baik sang penguasa. Saat itulah keinginan menyeleweng menemukan relevansinya.

Atas kondisi itu, gerakan opisisi dibutuhkan. Ia tak hanya untuk mengawasi kekuasaan. Karena menurut Ignas Kleden dalam bukunya *Indonesia sebagai Utopia* (2004) , “opisisi diperlukan karena apa yang baik dan benar dalam politik haruslah diperjuangkan melalui konstes politik serta diuji dalam wacana politik yang terbuka dan di hadapan publik.” Jadi, sangat naif jika kita masih percaya bahwa pemerintah bersama semua pembantu dan penasihatnya dapat merumuskan sendiri apa yang perlu dan tepat untuk segera dilakukan dalam politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan kebudayaan.

Dalam bahasa yang lain, Ignas menyebutkan oposisi seperti setan penyelamat. Ia menyelamatkan kita justru dengan mengganggu kita terus menerus. Karenanya, oposisi mutlak dibutuhkan, apalagi

sebuah kebijakan perlu diuji di hadapan publik. Kebijakan yang benar baru diketahui ketika ada kebijakan yang salah. Sebuah kebijakan itu dianggap 'benar' dan 'tepat' ketika tak ada lagi protes. Tetapi, ketika masih ada pihak yang mempertanyakan sebuah kebijakan, tentu saja harus ada evaluasi. Bukan mutlak juga bahwa ketika ada protes kebijakan itu salah. Tak selalu harus demikian adanya.

Pertanyaannya, dengan kondisi sekarang, di mana Irwandi-Nazar masih baru memerintah, mendesakkan wacana oposisi digulirkan? Bukankah itu lebih mencerminkan sikap sakit hati dan keinginan balas dendam bagi pihak yang kalah? Bukankah yang harus dilakukan adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpikir dan berbuat secara tenang. Karena ketika banyak muncul gugatan dan protes, konsentrasi pemimpin bisa pecah. Muncul polemik yang berkepanjangan, sehingga lupa apa yang mesti dan harus dilakukan.

Kita bisa menerima bahwa kehadiran oposisi agar akuntabilitas dan pertanggungjawaban sebuah kebijakan lebih diperhatikan, tetapi tentu saja dengan selalu bersikap baik. Kita juga percaya bahwa dengan adanya oposisi membuat pemerintah perlu menerangkan dan mempertanggungjawabkan mengapa kebijakan ini diperlukan, apa dasarnya, dan seberapa penting. Tetapi, apakah semua kebijakan itu harus diterangkan? Apalagi ada kebijakan yang memang harus disembunyikan dari publik?

Jika kita masih ragu terhadap tindakan dan kebijakan pemerintah di bawah Irwandi-Nazar, setidaknya Socrates, filosof Yunani Kuno, yang dikutip Ignas Kleden pernah mengemukakan tiga kriteria untuk menguji perlu-tidaknya sebuah tindakan. Pertanyaan *pertama*, apakah sebuah tindakan itu benar dan dapat dibenarkan? Kalau tindakan itu terbukti benar, menyusul pertanyaan *kedua*: apakah tindakan yang benar itu perlu dilakukan atau tidak? Kalau tindakan itu ternyata benar dan perlu, pertanyaan *ketiga* adalah apakah hal itu tidak atau tidak untuk dilaksanakan?

Contoh kecil saja sebut Ignas, korupsi mutlak tidak dapat dibenarkan dan jelas tidak baik, sekalipun mungkin perlu (misalnya karena harus menolong sanak keluarga yang sedang menderita sakit parah dan memerlukan ongkos besar untuk perawatan di rumah sakit).

Nah, dengan nasihat Socrates, kita sudah punya pegangan bagaimana caranya menguji kebijakan Irwandi-Nazar. Hanya saja, untuk sekarang berikan peluang untuk mereka berpikir dan berbuat. Jika dalam perjalanan kita menemukan indikasi menyeleweng, barulah kita akan berpikir ulang. Karena kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat yang memilih mereka. Karena rakyat

tentu saja sudah mengerti dan sangat paham, kapan dan dalam kondisi bagaimana seorang pemimpin harus diturunkan dari tahta kekuasaan? Rakyat pasti sudah sangat mengerti. Lihat saja nanti!

Tanggung Jawab Sosial Media

BUKU *Media Massa dan Masyarakat Modern* (2003) karya William R. Rivers, Jay W. Jensen dan Theodore Peterson menarik untuk ditelaah. Buku ini tak hanya menjelaskan tentang kedudukan media dalam masyarakat Amerika, hubungan pers dengan pemerintah dan bagaimana kebebasan pers diperjuangkan, melainkan juga tentang ketergantungan masyarakat Amerika kepada media.

Dalam buku ini disebutkan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers seperti dinyatakan oleh Komisi Kebebasan Pers. Syarat-syarat ini sendiri diajukan oleh para tokoh media massa sendiri.

Pertama, media harus menyajikan “pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas.” Media dituntut untuk selalu akurat, dan tidak berbohong. Fakta harus disajikan sebagai fakta, dan pendapat harus dikemukakan murni sebagai pendapat. Kriteria kebenaran juga dibedakan menurut ukuran masyarakat: Masyarakat sederhana dan masyarakat modern.

Dalam masyarakat sederhana, misalnya, kebenaran akan dicari dengan cara membandingkan pemberitaan media dengan informasi dari sumber-sumber lain. Sementara dalam masyarakat modern, isi media merupakan sumber informasi dominan, sehingga media lebih dituntut untuk menyajikan berita yang benar. Media harus bisa membedakan secara jelas mana yang merupakan peristiwa politik, dan mana yang merupakan pendapat politisi.

Kedua, media harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Karenanya, media tak hanya berfungsi sebagai sumber informasi melainkan juga forum penyelesaian masalah. Setiap masalah yang menjadi urusan publik dan berhubungan dengan publik disodorkan oleh media, untuk kemudian dibahas bersama dan dicarikan jalan keluar.

Jadi, media benar-benar menjadi milik publik. Dan publik pun

merasakan manfaat dengan kehadiran media. Ada relasi yang sinergis antara media dan publik pembacanya. Grove Peterson, seorang tokoh Pers yang dikutip dalam buku ini, misalnya mendefinisikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan memastikan bahwa, “Koran adalah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu saja.” Bahkan secara tegas ia menyatakan bahwa, “Koran yang bebas bukan sekedar tempat mencari nafkah.”

Ketiga, media harus menyajikan gambaran khas dari setiap kelompok masyarakat. Syarat ini menuntut media untuk memahami karakteristik dan juga kondisi semua kelompok di masyarakat tanpa terjebak pada *stereotype*. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya konflik sosial di masyarakat terkait dengan isi berita yang disajikan. Karenanya, media dituntut untuk mampu menafsir karakter suatu masyarakat dan mencoba memahaminya, seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka mereka. Dengan demikian, kelompok yang lain tahu gambaran tentang kelompok lain, dan lalu mencoba memahaminya. Pemahaman demikian tentu saja memberi peluang bagi setiap kelompok masyarakat untuk memahami masing-masing karakter dan cara memperlakukannya.

Keempat, media harus selalu menyajikan dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Ini tidak berarti media harus mendramatisir pemberitaannya, melainkan berusaha mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat dalam hal-hal yang harus diraih. Hal ini karena media merupakan instrumen pendidik masyarakat sehingga media harus “memikul tanggung jawab pendidik dalam memaparkan segala sesuatu dengan mengaitkannya ke tujuan dasar masyarakat.”

Terakhir, media “harus membuka akses ke berbagai sumber informasi.” Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak ketimbang di masa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan adalah dengan tersebarnya informasi akan memudahkan pemerintah menjalankan tugasnya. Lewat informasi, sebenarnya media membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

GAM dan SIRA

SAYA pernah menulis di rubrik editorial SUWA tentang “Siapa Musuh Kita?”. Ide tulisan itu muncul terkait dengan pertarungan pasangan Irwandi-Nazar (SINAR) dan Humam-Hasbi (H2O) dalam perebutan kursi menjadi orang nomor 1 di Aceh. Pertarungan itu berimplikasi negatif terhadap harmonisasi GAM dan SIRA. Hubungan SIRA dan GAM menjadi meruncing, khususnya di Kabupaten Pidie.

Hubungan GAM dan SIRA yang begitu harmonis selama konflik melanda Aceh, hancur begitu saja di Pidie. Bahkan mulai muncul stigma SIRA sebagai pengkhianat. Padahal saat konflik berlangsung, SIRA menjadi satu-satunya lembaga perjuangan sipil yang mengakui GAM sebagai Pemerintahan Negara Aceh. Tak hanya itu, SIRA juga *memback-up* secara maksimal perjuangan GAM dengan cara-cara damai dan demokratis, seperti mobilisasi massa untuk menentang kebijakan militeristik Jakarta, kampanye HAM di luar negeri, dll.

Harmonisasi itu terjadi saat Aceh dilanda konflik dan pertikaian. Saat di mana kita masih memiliki musuh yang sama. Saat di mana kita masih melihat perjuangan sebagai tugas yang suci. Saat itu, kita belum berpikir tentang kekuasaan dan memperkaya pribadi.

Lalu, pertanyaannya, kenapa dalam kondisi damai, kita tak bisa bersatu? Kenapa, ketika perjuangan memasuki tahap-tahap akhir kita tak bisa memelihara persatuan? Padahal, perjuangan kita belum berakhir, perjuangan kita hanya baru sampai setengah jalan. Masih banyak tugas dan tanggung jawab kita di masa mendatang.

Tahukah kita bahwa banyak pihak diuntungkan dengan adanya konflik dan disharmonisasi di antara sesama lembaga perjuangan? Sebab, musuh-musuh kita sama sekali tak diam dengan kondisi seperti ini. Mereka terus bekerja, dengan berbagai cara agar kita tak lagi kompak. Bahkan, mereka berusaha memperdayakan kita,

sampai kita lupa siapa diri kita, kawan kita bahkan kita juga dibuat lupa siapa lawan kita.

Haruskah kita membuka lagi lembaran hubungan harmonis GAM dan SIRA? Bagaimana tokoh-tokoh GAM dan SIRA bersama-sama mengunjungi Wali Neugara Hasan Tiro di Sweden. Bagaimana tokoh-tokoh GAM dan SIRA membuat berbagai seminar di luar negeri untuk memperjuangkan nasib rakyat Aceh? Bukankah para pimpinan GAM mengakui bahwa SIRA adalah *aneuk meuh*? Lalu, kenapa kita bisa lupa sejarah harmonisasi itu sekarang?

Memang, seperti sudah sering ditulis, bahwa kondisi saat konflik dan damai sangat jauh berbeda. Jika saat konflik, kita mengenal (sangat dekat) siapa saja musuh-musuh kita dan juga kita mengetahui dengan *detail* siapa kawan kita. Kondisi demikian berubah saat Aceh memasuki kondisi damai. Dalam kondisi damai, musuh menjadi abu-abu dan malah kabur. Sementara, kita cepat sekali lupa pada kawan seperjuangan maupun kawan se-ideologis.

Ingat kondisi seperti ini, saya teringat sebuah pepatah bahwa, teman sejati adalah kawan di saat kita dalam kondisi sulit. Melihat kenyataan hari ini, kita bertambah percaya akan kebenaran pepatah ini, sekaligus tak yakin. Pasalnya, saat kondisi normal dan damai seperti sekarang, kita berusaha menjauhkan diri dengan teman saat sulit tersebut. Kita berusaha melupakan mereka. Tak jarang kita memvonis mereka dengan para pengkhianat.

Lalu, sampai kapan kondisi saling bermusuhan seperti ini kita langgengkan? Bukankah masa-masa seperti ini hanya sebentar saja? Bukankah kita masih harus bekerja keras di masa-masa mendatang, tak hanya memenangi Pemilu legislatif 2009, melainkan mempersiapkan kader untuk Pilkada 2012. Bahkan yang lebih penting, kita mesti berjuang bersama-sama memperjuangkan apa yang sudah dirumuskan dalam MoU Helsinki. Kita masih harus berjuang memperbaiki UU PA yang merugikan kita. Artinya, ke depan masih banyak tugas yang harus kita lakukan. Ke depan, kita masih butuh sebuah kekompakan, khususnya di antara sesama organisasi perjuangan.

Jika kita tak bersatu, jangan harap kita dengan mudah memenangi Pemilu 2009, apalagi Pemilu 2012. Semua pihak, khususnya para musuh kita, berusaha memecah-belah kita, dengan berbagai cara termasuk dengan menyusup dalam tubuh kita. Target mereka tak sekedar menghambat kemenangan kita, melainkan juga menghancurkan basis ideologis yang selama ini kita sakralkan. Mereka tak pernah diam.

Karena itu, saya ingin mengingatkan kita bahwa perpecahan seperti yang terjadi pada Pilkada 2006 lalu, sama sekali bukan isyarat positif untuk kita. Jika kita tak membentengi diri dengan semangat perjuangan dan ideologi, kita akan semakin bercerai berai dalam Pemilu 2009. Jika dalam Pilkada 2006 kita terbelah dua, maka pada Pemilu 2009 mungkin perpecahan ini menjadi sangat parah. Dan kita akan dirugikan dengan kondisi seperti itu.

Jadi, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Pemilu 2009? Berapa partai politik lokal yang kita butuhkan? Saya sama sekali tak berminat menjawab pertanyaan ini. Yang harus kita pertanyakan adalah, apa kepentingan kita terhadap Pemilu 2009? Sekedar menjadi anggota parlemenkah atau mengembalikan kedaulatan Aceh? Entahlah!

Membaca Kembali Aceh

BAGAIMANA kita membaca Aceh hari ini? Atau perlukan kita membaca kembali Aceh hari ini? Pentingkah bagi kita merenungkan kembali tentang Aceh hari ini, dan pengaruhnya terhadap Aceh masa depan? Lalu, bagaimanakah bentuk Aceh masa depan itu?

Itulah beberapa pertanyaan yang mengusik saya dalam beberapa hari ini. Dan saya yakin, kita—khususnya yang merasa diri rakyat dan bangsa Aceh—perlu membaca kembali Aceh. Sebab, jangan-jangan Aceh sudah jauh dari cita-cita kita di masa lalu. Dan, kita seperti sudah lupa dengan cita-cita itu. Apalagi, kita seperti tak ingat lagi bagaimana Aceh masa depan yang ingin kita bentuk.

Bagi saya, ada dua hal yang membuat kita perlu membaca kembali Aceh. Pertama, Aceh pasca-Gempa dan Tsunami. Kedua, Aceh pasca-MoU Helsinki. Dua hal itu yang sudah mengubah Aceh sekarang. Gempa/Tsunami sudah mengubah status Aceh dari terisolasi menjadi go-international. Dari daerah yang tak dikenal menjadi terkenal. Sementara MoU Helsinki menciptakan kondisi sosial-politik-ekonomi yang kondusif di Aceh. Aceh bisa menjalankan pemerintahan sendiri.

Tapi, dalam beberapa hal, khususnya melihat kondisi hari ini, MoU lebih terkesan sebagai sebuah kecelakaan sejarah, ketimbang resolusi yang bermartabat. Faktanya dapat dilihat dalam beberapa hal. Pertama, MoU telah menutup pintu untuk kemerdekaan Aceh, yang diikuti dengan pemusnahan senjata GAM. Kedua, MoU merupakan jalan yang mulus bagi integrasi total Aceh ke dalam konstitusi Indonesia. Ketiga, MoU membuat penyelesaian Aceh dipenuhi tanda tanya.

Meski MoU memberi jalan terbentuknya *self government* di Aceh, tapi faktanya Aceh tetap dalam pengontrolan ketat dari pemerintah di Jakarta. Contoh dekat terlihat dari perumusan UU PA yang banyak

bertentangan dan tak sejalan dengan amanat MoU Helsinki serta lebih banyak menguntungkan pemerintah pusat. Keempat, MoU telah mereduksi militansi rakyat Aceh. Hal ini terlihat, banyak rakyat Aceh sudah terlena sekarang, dan menjadi bangsa yang tidak kreatif. Sementara banyak mantan pejuang sekarang berasyik masyuk bermain proyek. Jika ini dibiarkan, proyek Aceh masa depan yang pernah digariskan oleh para endatu akan menjadi ilusi sejarah. Mitos.

Padahal, jika kita membuka kembali sejarah Aceh, hampir sepanjang perjalanan sejarah bangsa Aceh dihabiskan dalam perang dan konflik. Namun, identitas ke-Acehan tidak pernah luntur apalagi pudar. Dulu, saat Aceh dibalut dalam situasi Darurat Militer (DM), kita berpikir bahwa itulah isyarat kematian nasionalisme Aceh, yang dibuktikan dengan ikrar setia NKRI. Tetapi, rekayasa Tuhan mengalahkan segala-galanya.

Karena itu, kita berharap identitas ke-Acehan tetap terjaga. Jangan kotori ia untuk kepentingan politik sesaat apalagi hanya karena faktor kebencian. Lebih jelasnya saya ingin katakan bahwa, penggunaan bendera GAM sebagai simbol partai GAM juga dapat dibaca sebagai kecelakaan sejarah. Jika pun saya dianggap pengkhianat, tapi saya harus katakan, itu sama sekali tidak patut. Bendera GAM, seperti sebut Sofyan Dawood adalah milik rakyat Aceh. Ia bukan lagi milik kelompok.

Banyak rakyat Aceh syahid demi memperjuangkan bendera itu berkibar di Aceh. Mereka yang syahid itu sama sekali tak berharap bahwa pengorbanan mereka sekedar menjadikan bendera itu sebagai simbol partai. Jika pun kita belum mampu mewujudkan harapan dan impian mereka, setidaknya kita perlu menjaga amanah itu. Bendera itu terlalu mahal harganya untuk sekedar dijadikan bendera partai.

Jika itu tetap dipaksakan, kita telah kehilangan sejarah. Perjuangan kita benar-benar memasuki terminal terakhir. Dan, perjuangan kita akan kembali dimulai dari nol. Kita takutkan, tak ada lagi yang mau berkorban untuk bendera itu, karena bukan lagi sakral, bukan lagi simbol perlawanan, melainkan bendera partai politik. Ia kehilangan tuahnya sebagai marwah bangsa Aceh.

Tak hanya itu, akan banyak roh-roh pejuang yang menjerit sedih saat kampanye bendera yang dulunya mereka puja diinjak-injak di jalan, di lapangan kampanye dan disinari mentari sampai pudar karena ditempel di tembok, tiang listrik dan juga di pagar beton. Ia pasti kehilangan makna.

Saya tak tahu, apakah Wali Neugara yang menghidupkan kembali budaya dan roh resistensi rakyat Aceh tahu lakon politik

yang sedang berjalan di Aceh. Saya pribadi ragu, jangan-jangan Wali Neugara sama sekali tak tahu apa yang sedang terjadi di Aceh. Apalagi, jika informasi yang disampaikan ke Wali tak lengkap dan banyak bumbu AWS-nya. Asal Wali Senang. Bahkan, banyak informasi yang ditutupi dan tak sampai ke telinga Wali.

Jika bendera itu tetap dipaksakan menjadi bendera partai, saya ingin bertanya satu hal, apakah Wali memberi restu terhadap penggunaan bendera GAM sebagai simbol partai GAM. (Partai GAM bukan akronim Gerakan Aceh Merdeka). Saya takutkan, ada penyusupan liar di kalangan tim perumus partai GAM. Jangan-jangan ada anasir lain yang merecoki pikiran para tim perumus partai bikin GAM yang mencoba menghapus ideologi yang pernah diajarkan oleh Wali.

Lewat mimbar ini, saya ingin ingatkan bahwa jika kita gagal mengembalikan nasionalisme Aceh yang hampir pudar pasca-MoU Helsinki percayalah kita tak bisa mendesain nasionalisme Aceh lagi dalam waktu sekejap. Karena, nasionalisme bukanlah produk asal jadi, apalagi produk yang lahir karena paksaan. Karena saya selalu percaya, bahwa nasionalisme adalah produk final sejarah: terutama sejarah perlawanan.

Karena itu, sebagai produk sejarah, nasionalisme Aceh bukan lahir pasca reformasi 1998 lalu. Bukan pula pasca Wali Neugara mendeklarasikan kemerdekaan Aceh pada 1976. Nasionalisme Aceh sudah lahir jauh sebelum generasi yang memperjuangkannya lahir. Nasionalisme Aceh sudah lahir sebelum kita lahir! Generasi sekarang hanya meneruskannya apa yang telah digariskan sejarah. Sedangkan tahun 1998-1999 (saat gema kemerdekaan dan referendum menghipnotis rakyat Aceh) hanya mempertegas garis pemisah antara nasionalisme Indonesia dengan nasionalisme Aceh. Tahun 1998 hanya mempertegas gejala kekecewaan terhadap nasionalisme Indonesia yang terlalu dipaksakan.

Pertanyaannya, jika kita sangat nasionalis, senangkah kita terhadap pemaksaan bendera GAM sebagai simbol partai GAM (tanpa akronim)? Apalagi, partai itu nantinya tunduk di bawah hukum RI yang tentu saja menghilangkan makna bendera itu sendiri. Atau, jangan-jangan proses ideologisasi Nasionalisme Aceh belum tuntas. Hal itu mungkin karena: orang hanya berpura-pura—padahal seperti ditulis Wali Negara Aceh Dr Hasan di Tiro dalam *Demokrasi untuk Indonesia*—dalam perkara nasionalisme dan kebangsaan orang tidak mungkin berpura-pura atau menipu dirinya sendiri. Bangsa Amerika tidak mungkin berpura-pura

menjadi bangsa Indonesia, bangsa Korea tidak mungkin berpura-pura menjadi bangsa Arab, begitu juga bangsa Arab tidak bisa berpura-pura menjadi bangsa Arya dan lain-lain.

Seseorang menjadi bangsa Aceh bukan faktor kebetulan atau karena keinginannya. Apalagi klaim sepihak. Kebangsaan seseorang tidak bisa direayasa. Hal ini berbeda dengan negara/kewarganegaraan. Kita bisa mengganti kewarganegaraan setiap saat atau jika kita sudah bosan dan benci pada negara induk. Kita bisa menjadi warga negara lain. Hari ini menjadi warga negara Indonesia, pada lain waktu kita bisa menggantinya. Tetapi dalam hal kebangsaan tidak bisa segampang itu. Nasionalisme/kebangsaan adalah produk final dari sejarah!

Karena itu, saya berkesimpulan kita perlu membaca lagi Aceh. Sebab, jangan-jangan kita sudah berbeda sudut pandang sekarang dalam membaca Aceh. Terakhir saya ingin mengutip lagi pernyataan Wali yang sering ditulis dalam bukunya: *"Hai aneuk...tadong beukong, beutuglong lagee geupula."* Entahlah!

Mengalah Demi Cinta

PARTAI GAM akhirnya mengalah dan bersedia mengganti lambang dan akronim. Jika sebelumnya, Partai GAM tanpa akronim dan menggunakan lambang bendera Gerakan Aceh Merdeka, maka, sejak kemarin, Selasa (25/02/08) Partai GAM resmi menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri. Untuk lambang, mereka cukup menggunakan tulisan GAM dengan warna dasar merah, sementara di sudut lambang tersebut bertuliskan Partai Gerakan Aceh Mandiri.

Perubahan tersebut menurut salah seorang pendirinya, Ibrahim bin Syamsuddin KBS, bukanlah langkah mundur, karena tidak mengubah semangat dan tujuan yang dicetuskan sejak partai ini didirikan. Semua itu dilakukan oleh Partai GAM, sebagai bukti kecintaan kepada rakyat Aceh demi langgengnya perdamaian.

KBS menegaskan bahwa dengan adanya perubahan itu, ke depan pihaknya tidak mau lagi mendengar adanya polemik dan suara miring bahwa mereka tidak ikhlas kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Sebelum perubahan nama dan lambang, Partai GAM dianggap masih memelihara semangat separatisme. Malah, politisi di Jakarta menuding, partai GAM tidak ikhlas dengan perdamaian, karena masih bercita-cita memperjuangkan kemerdekaan untuk Aceh.

Sikap yang ditempuh GAM ini termasuk sikap yang moderat. Meski kita yakini, perubahan itu tidak sepenuhnya diterima oleh pengurus mereka di lapangan. Apalagi, perubahan itu termasuk pada hal-hal yang paling prinsipil, karena mereka sejak dulu tetap ngotot bahwa Partai GAM tidak akan mengubah lambang.

Sebenarnya, perubahan sikap GAM ini sudah mulai terlihat sejak pengunduran diri Perdana Menteri GAM, Malek Mahmud Al Haytar dari jabatan Ketua Umum Partai GAM. Malek menyerahkan tampuk pimpinan Partai GAM kepada Muzakkir Manaf, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA). Pengunduran diri Malek karena

tersangkut dengan kewarganegaraan. Seperti diketahui, Malek sampai sekarang masih berstatus warga Negara Swedia. Undang-undang Indonesia tidak membolehkan warga negara asing menjadi pengurus partai politik.

Penggunaan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai lambang partai sebenarnya juga banyak ditentang oleh para petinggi GAM. Sebut saja Sofyan Dawood, mantan Panglima GAM Wilayah Pasee dan mantan Juru Bicara KPA. Sofyan beralasan, bahwa lambang GAM itu bukan milik sekelompok golongan, melainkan milik rakyat Aceh. Penggunaan lambang GAM sebagai bendera partai akan menurunkan nilai bendera itu sendiri.

Perubahan akronim juga dilakukan oleh Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) yang mendeklarasikan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (Partai SIRA). Namun SIRA dalam beberapa pernyataan mengaku tidak mengubah nama, melainkan membentuk Partai. Artinya, Partai Suara Independen Rakyat Aceh bukanlah perubahan dari SIRA, melainkan sayap politik SIRA. Sementara organisasi SIRA tetap tidak bubar.

Apapun alasannya, kita tetap berharap bahwa semua pihak harus peduli terhadap keberlangsungan perdamaian di Aceh. Perubahan nama dan lambang Partai GAM setidaknya memberi kepada kita suatu keyakinan, bahwa GAM ikhlas menerima perdamaian. Akhirnya, Partai GAM mengalah. Sungguh satu sikap terpuji. Bila Partai GAM benar-benar mencintai rakyat maka semoga cinta itu berbalas! (HA 27.02.08)

Note: Nama Partai GAM kemudian berubah lagi menjadi Partai Aceh (PA).

Berpolitik Secara Damai

SEJAK 12 Juli 2008 lalu, masa kampanye (rapat tertutup) partai politik dimulai. Masa kampanye tertutup ini berakhir pada 5 April 2009. Sementara masa kampanye (rapat terbuka) baru dimulai pada 17 Maret-5 April 2009. Partai politik, baik lokal maupun nasional berlomba-lomba mensosialisasikan diri untuk dikenal publik, dan berharap didukung saat Pemilu nanti.

Semua mata sebenarnya tertuju ke Aceh, karena baru di Aceh partai lokal bisa berpartisipasi pada Pemilu. Pesta demokrasi di Aceh akan berlangsung semarak, bahkan lebih semarak dari tempat lainnya. Partai-partai lokal akan bersaing sesama, dan juga dengan partai politik nasional. Partai-partai ini berharap menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat Aceh.

Karenanya, intrik sesama partai tak terhindarkan. Partai-partai ini sudah pasti akan menggunakan berbagai cara, taktik, dan tentu saja tema-tema kampanye yang menarik, agar rakyat menjatuhkan pilihannya. Cara-cara kotor juga pasti akan mewarnai pesta demokrasi di Aceh.

Tapi, kita berharap, baik kepada partai lokal maupun nasional untuk bersaing secara sehat. Tidak menggunakan cara-cara kekerasan, intimidasi, dan teror terhadap partai lain. Tetapi, bersainglah secara sehat, dengan menggunakan akal sehat. Tunjukkan pada dunia sekali lagi, bahwa pesta demokrasi di Aceh bisa berlangsung damai, dan bebas dari praktik kekerasan.

Kita akui, semua partai ingin menang dan menjadi yang terbaik di Aceh. Tetapi, untuk mencapai keinginan itu, tidak semua cara halal dilakukan. Ada cara-cara yang dilarang, dan pantang dilakukan. Jadi, jika ingin menang, tawarkan program-program yang membuat rakyat tertarik. Karena, kita yakin, rakyat sudah sangat pintar

dalam menilai dan menjatuhkan pilihan. Hanya partai dengan visi terbaiklah yang akan didukung oleh rakyat.

Karena itu, kepada partai politik, baik lokal maupun nasional, kita berharap agar tidak merasa diri sebagai pemilik sah suara rakyat Aceh. Sebab, sebelum pemilu, semua suara rakyat Aceh adalah bebas untuk direbut oleh siapa pun, baik oleh partai lokal maupun oleh partai nasional. Tidak boleh ada yang merasa diri sebagai partai yang banyak menanamkan jasa untuk rakyat Aceh. Karena semua partai punya hak yang sama untuk menang. Klaim-klaim politik berupa dukungan rakyat, karenanya, harus diuji di arena publik (pemilu), secara terbuka, *fair* dan sportif. Jadi, tak boleh satu partai pun memonopoli suara rakyat sebelum diuji dalam Pemilu.

Memaksa dan mengintimidasi masyarakat untuk memilih partai tertentu bukan zamannya lagi. Politik penuh warna kekerasan sudah lama kita tinggalkan begitu MoU Helsinki ditandatangani. Karena itu, cara-cara mafia dalam memperoleh dukungan rakyat mutlak juga harus ditinggalkan. Sebab, kita sudah lama tak lagi bersahabat dengan konflik dan kekerasan.

Kita atau siapa saja pasti menghendaki Pemilu di Aceh, sejak masa kampanye sampai pencoblosan berlangsung damai, kekeluargaan dan santun. Kita tak ingin ada darah yang tumpah hanya karena memperebutkan sebuah kursi di DPRA dan DPRK. Sebab, seperti disampaikan Mao Tse Tung, tokoh pergerakan China, *politik adalah perang yang tidak menumpahkan darah*. Kita pasti sepakat dengannya.

Jika hanya gara-gara satu kursi kita harus bertengkar lagi, damai pasti akan ternoda. Jika pun kemudian damai benar-benar ternoda, kita hanya bisa berucap: *tak perlu menangis hanya karena sesuap nasi sudah habis kita makan*. Damai sulit untuk kembali. (HA 14.07.08)

[R]evolusi

ACEH kembali bergeliat dan semarak. Seperti sembilan tahun yang lalu, ribuan orang tumpah ruah ke Banda Aceh. Tapi, kehadiran massa yang diduga mencapai ratusan ribu orang tersebut bukan untuk membuat sebuah revolusi damai, atau sedang melampiaskan amarah pada negara. Massa yang datang tersebut murni untuk menyambut seorang pencetus 'revolusi' Tgk Hasan Muhammad Di Tiro.

Namun, kehadiran massa yang menyerupai pawai Referendum tahun 1999 lalu membuat kita merenung, apakah rakyat Aceh masih butuh sebuah revolusi? Sebab, seperti sering kita dengar dan baca, dalam revolusi kerap meminta lebih banyak korban. Bakal ada darah yang tumpah. Harga termahal yang mesti dibayar sering berbentuk nyawa manusia. Lalu, sudah siapkah rakyat Aceh mengorbankan nyawa untuk kesekian kali, demi sebuah revolusi yang tak kunjung sampai tersebut? Ataupun kehadiran massa dalam jumlah besar ke Aceh tersebut hanyalah ekspresi kerinduan rakyat yang mendalam akan sosok Hasan Tiro? Terpengaruhkah mereka dengan ideologi yang puluhan tahun ditanamnya tersebut, atau sekedar ingin melihat bagaimana sosok pencetus ide merdeka tersebut dari dekat? Yang pasti, massa yang hadir tersebut bukan massa liar, tanpa satu komando. Meski komando sekarang adalah memuliakan orang yang baru pulang dari jauh.

Di Gampong saja, jika ada orang pulang dari jauh, setelah puluhan tahun meninggalkan Gampong juga dimuliakan, dengan dipeusijuek tanda kemuliaan. Jadi, bagi kita wajar jika antusiasme warga menyambut Hasan Tiro sangat luar biasa. Namun, saya melihat ada pemandangan aneh, yang diperlihatkan massa yang berjubel-jubel

di atas mobil tersebut. Mereka bukan membawa bendera GAM, seperti *geunareh* Hasan Tiro yang dikenal Wali Nanggroe tersebut, melainkan bendera sebuah partai lokal. Lalu, apakah Wali pulang demi partai lokal tersebut?

Sebab, banyak orang berharap, Wali Nanggroe, tak menjadi monopoli satu kelompok saja. Wali adalah aset berharga rakyat Aceh, karena berjasa membuka mata orang Aceh tentang sejarah negerinya. Wali Nanggroe sudah menjadi milik rakyat Aceh, apakah dia itu GAM, PNS, Ulama, Apa Mae, Apa Suman, atau siapa saja yang tergerak hatinya setelah membaca tulisan-tulisan penuh spirit dari Wali.

Lalu, apa maksud orang ke Banda Aceh membawa hanya satu warna bendera saja. Di mana warna itu pun sudah jauh berbeda dengan lambang yang dulu dikeramatkan oleh Wali dan pengikutnya. Sebab, bendera yang dibawa oleh orang yang pergi ke Banda Aceh, warnanya saja yang menyerupai. Bukankah itu bentuk hegemoni dan upaya mengotak-kotak rakyat Aceh? Padahal, seperti kita tahu, Wali berkeinginan menyatukan rakyat Aceh, dengan menyebut 'Bansa Aceh'. Sebab, yang disebut 'Bansa Aceh', bisa dari bermacam-macam golongan, ada Teungku, Teuku dan Tuanku, dan bermacam elemen lainnya. Tanpa persatuan seperti itu, cita-cita yang dulu diperjuangkan Wali sulit dicapai. Hanya itu yang saya takutkan. Sebab, jika sampai Wali nanti bertanya, kenapa Aceh yang dicita-citakan menyatu dalam barisannya tanpa satu kelompok pun merasa paling kuasa dan berjasa kini justru terpecah, siapa yang akan menjawabnya?

Jika sampai Wali bertanya, kenapa ada Partai ini dan partai itu, padahal dulu sama-sama berjuang meski dengan cara berbeda, tapi sekarang sedang bersiap-siap menumpahkan darah, siapa yang sanggup menjawabnya?

Bukankah orang yang pulang dari jauh, apalagi dalam waktu yang sangat lama, pasti ingin mendengar cerita-cerita yang baik-baik saja? Sebab, jika orang yang baru pulang dari jauh mendengar kisah-kisah yang tidak baik, niatnya untuk bertahan dan tetap tinggal pasti berkurang. Mereka pulang biasanya karena mengharapkan ada suasana baru yang membuatnya tenang. Namun, jika yang disaksikannya adalah kehancuran, apa yang akan terjadi? Apalagi jika puluhan tahun dia sudah berjuang untuk membuat rakyat negerinya bersatu, berperadaban dan bermartabat, tiba-tiba sedang terpecah dan saling *meu-klok-klok* satu sama lain. Apa yang akan terjadi? Karena itu, saya berharap, perhatikanlah hal-hal baik pada Wali Nanggroe, agar beliau tidak *wueh hate* melihat Aceh. (HA 111008)

Demam

ADA yang bilang, bila seseorang diserang demam, pasti ada yang tidak beres dengan kondisi badan atau tubuhnya. Karena demam sering diartikan dengan memanasnya suhu badan seseorang atau lebih tinggi dari biasanya, yaitu 37°C, bila diukur lewat mulut, atau 37.7°C (suhu rectum), atau lebih dari 37°C bila diukur di bawah ketiak.

Ada juga yang menyebutkan demam sebagai reaksi tubuh saat berperang melawan infeksi bakteri, virus atau parasit. Penyebab demam juga bisa melalui non infeksi, seperti terluka atau cedera. Biasanya setelah vaksinasi dan dehidrasi.

Demam yang kita kenal juga bisa bermacam-macam, dari yang berbentuk penyakit, seperti demam berdarah, atau terkait dengan kondisi mental seseorang, yang menunjukkan ketakberesan, seperti istilah demam panggung. Sering juga demam dikaitkan dengan suatu yang luar biasa dan mendatangkan respon yang tak biasanya, karena semua orang ikut membicarakannya, seperti demam Lady Diana, demam Piala Dunia, atau demam Obama yang melanda dunia, belakangan ini.

Di Amerika, khususnya pasca-penyerangan menara kembar WTC, dunia juga diajak untuk 'berdemam' perang melawan terorisme, atau demam Al Qaeda. Sebelumnya, ada demam Saddam Husein, yang membuat beberapa masyarakat kita menamakan anak laki-laknya dengan nama Saddam Husein. Demam tersebut selalu mengikuti *trend*, dan membuat orang merasa menjadi anggota komunitas dari yang didemamkannya.

Artinya, ada banyak demam di dunia. Dan seperti umumnya demam, sering menghilang, setelah masyarakat atau komunitas merasa hal tersebut menjadi sesuatu yang biasa. Menghilangnya

suatu demam, biasanya, setelah digantikan dengan demam yang lain. Itulah dunia, sesuatu mendapatkan tempat tersendiri, dan juga komunitasnya sendiri. Menjadi benarliah apa yang sering diucapkan orang, 'setiap zaman dan fase ada demamnya sendiri-sendiri. Dan setiap demam, ada masa dan pengikutnya masing-masing'. Ibarat dunia, selalu berputar, dan tak pernah stagnan.

Di tempat kita, soal demam ini—yang tak terkait dengan penyakit—sering kita saksikan dan kita alami. Saat 17 Agustus, misalnya, bocah-bocah pelajar demam dengan lagu Indonesia Raya, panjat pinang, mengibarkan bendera merah putih kecil, serta demam dengan film-film yang membangkitkan spirit perjuangan. Demam 17 Agustus juga sering tak bertahan lama, karena selepas itu masyarakat disuguhkan dengan demam yang lain.

Saya juga pernah melihat demam Darurat Militer beberapa tahun yang lalu, di mana masyarakat Aceh akrab dengan 'demam ikrar setia'. Di berbagai tempat, orang sering membuat kegiatan ikrar setia, sebagai penanda cinta pada Negara. Tak mengadakan kegiatan ikrar setia, berarti tak berpartisipasi pada demam yang sedang melanda, dan karena itu tak menjadi komunitas dari yang sedang berdemam.

Hal yang sama juga kita saksikan saat tahun 1999 lalu, ketika orang Aceh larut dalam demam Referendum. Di mana-mana, termasuk di pelosok Gampong, kita menemukan ekspresi demam tersebut dalam bentuk lukisan grafiti referendum, penempelan spanduk referendum. Referendum seperti magnet yang mampu menarik perhatian orang untuk membicarakannya. Malah, seperti pernah diulas oleh analis, saat demam referendum melanda Aceh, sukses menghadirkan tulisan referendum di badan jalan, sejak dari Banda Aceh sampai Medan atau di lintas Tengah dan Barat. Grafiti tulisan di badan jalan tersebut disebut sebagai tulisan terpanjang di dunia. Tak hanya itu, massa yang tumpah ruah saat aksi kolosal referendum di Masjid Raya Banda Aceh pada 8 November 1999 dianggap sebagai protes sipil terbesar sepanjang sejarah, mengalahkan aksi yang pernah dibuat oleh Marthin Luther King di Amerika atau menyamai jamaah Haji di Mekkah. Hah!

Nah, seperti ditulis di atas, terjadinya demam karena ada sesuatu yang tak beres. Demam Ikrar Setia, misalnya, karena Aceh dalam 'cengkeraman' militer. Demam referendum, karena Aceh ingin menentukan nasib sendiri dan sudah 'bosan' dengan Negara Induk, sebab ingin kejelasan status.

Lalu, sekarang rakyat Aceh kembali disuguhi dengan 'demam'

Wali Nanggroe. Pertanyaan kita, apakah demam Wali yang sekarang ini hinggap di hati orang Aceh, menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di Aceh, atau justru ada yang tidak beres dengan kepulangan Wali? Sebab, seperti disampaikan seorang teman, dulu ketika pengikutnya masih 25 orang, Wali sangat bersemangat memproklamkan 'Aceh Merdeka', tapi kenapa ketika massa pendukungnya mencapai ratusan ribu orang, Wali menjadi sangat pelit bersuara dan bicara! Entahlah, semoga pernyataan teman saya tadi salah. (HA 131008)

Facebook

PECINTA internet, belakangan ini, sibuk bermain-main *facebook*, sebuah situs jejaring sosial yang mendadak terkenal di dunia maya. Tak mau ketinggalan, para politisi juga memanfaatkan situs ini, untuk mendongkrak popularitas, atau sekedar agar tak dianggap meleak internet. Jika di dunia nyata kita sulit menemui atau berbicara dengan para politisi, namun melalui *facebook*, mereka merupakan sosok yang mudah ditemui, dan malah terlihat sangat ramah.

Bukan tanpa sebab jika situs *facebook* begitu populer, sebab, seperti sudah banyak diulas media, melalui situs jejaring sosial ini (meski bukan satu-satunya), Barack Obama, kandidat presiden dari Demokrat mengalahkan rivalnya Hillary Rodham Clinton, salah satu wanita terkuat di dunia. Terinspirasi dari kisah Obama, para politisi kita di tanah air ikut-ikutan latah memanfaatkan media ini untuk mencari popularitas agar dilirik oleh rakyat pada Pemilu 2009 nanti.

Tak salah jika kecenderungan tersebut dapat kita sebut dengan istilah '*demam facebook*'. Pasalnya, kehadiran situs yang didirikan oleh Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes ini memiliki jumlah pengguna 34 juta orang per Juli 2007. Posisinya sebagai situs populer terus meranjak naik, dari posisi 60 pada September 2006 menjadi 7 pada September 2007. Sementara menurut Alexa, situs pembuat ranking web di dunia, *facebook* memiliki *traffic rank* 5. Sementara menurut situs ensiklopedia virtual, *Wikipedia*, *facebook* menjadi situs nomor satu untuk foto di Amerika Serikat, mengungguli situs publik lain seperti Flickr, dengan 8,5 juta foto dimuat setiap harinya.

Tak pelak, kesuksesan tersebut mendatangkan pundi-pundi uang untuk perusahaan yang mempekerjakan lebih 1000 karyawan, dengan pendapatan US\$10-50 M. Wajar saja jika situs ini kemudian

digandrungi sejak dari anak sekolahan sampai presiden sekalipun. Karena, melalui situs ini, popularitas begitu gampang didapat, berbeda dengan di dunia nyata.

Seorang teman saya, sampai berkomentar begini untuk facebook, *'ada mainan baru yang membuat lalai pada dunia dan melupakan hari yang lebih kekal di akhirat...nampaknya makin banyak orang yang lagi mentel dengan facebook. Mungkin juga ada sebagian teman saya yang lagi menjalin cerita di facebook ini'*. Sebuah komentar yang sangat wajar untuk situs yang pertama muncul pada 4 Februari 2004 ini.

Lalu, apa yang menarik dari situs ini? Situs ini terdiri dari dua kata saja, dan kita pasti sudah mengerti arti dari kata-kata tersebut, yaitu *face* (wajah) dan *book* (buku). Jika diterjemahkan secara kasar, *facebook* berarti 'wajah buku', atau bisa juga 'buku tentang wajah'. Bagi pakar psikologi, wajah sering mampu bercerita banyak hal, termasuk perilaku atau sikap seseorang. Kita bisa mengetahui seseorang sedang marah atau tidak dari wajahnya. Demikian juga dengan orang yang berniat menipu, kita bisa mengetahuinya dari mimik wajah dengan memperhatikan sedikit gerak matanya.

Bagaimana dengan buku? Seperti kita tahu, buku merupakan sumber ilmu dan juga sumber inspirasi. Sebuah persoalan dibahas secara tuntas dalam sebuah buku, tak ada yang ditutupi, kecuali disengaja oleh si penulis buku. Intinya, kita dapat mengetahui sesuatu melalui buku, baik tentang kelebihan seseorang atau kekurangannya, suatu kejadian atau malah sebuah kontroversi. Sebagai pembaca, kita tak pernah dilarang untuk mengetahui secara tuntas setiap persoalan yang dibahas dalam sebuah buku.

Nah, melalui Facebook, kita bisa mengetahui seseorang secara lengkap seperti nama, tanggal lahir, foto wajah, alamat, pekerjaan atau semua informasi seseorang yang disertakan di dalamnya. Meskipun semua informasi yang ditampilkan di situs tersebut hanya yang baik-baik saja, dan tak jauh berbeda dengan di dunia nyata, di mana para politisi kita selalu menyertakan informasi yang baik-baik saja, seperti yang saya temukan dalam berita-berita tentang Pilkada Pidie Jaya belakangan ini. Semua kandidat yang berkampanye tak pernah mengatakan dirinya jelek. Malah, mereka mengaku sebagai kandidat pilihan yang mampu mengantarkan rakyat Pidie Jaya ke arah yang lebih baik. Perilaku mereka tak ubahnya seperti para politisi yang sedang memopulerkan diri di situs Facebook, selalu menampilkan sisi baik.

Padahal, sekarang rakyat butuh pemimpin yang jujur, dan berani mengatakan, 'pilihlah saya agar kalian kubuat sengsara.' (HA 171008)

4 Desember

TAHUN 1999 silam, tanah Aceh memerah. Sangat merah. Tapi bukan oleh banjir darah, seperti sebelumnya, melainkan oleh warna. Saat itu, syair perlawanan tak henti-hentinya diperdengarkan. Aceh ketika itu adalah Aceh yang sedang mabuk, meski ada nilai-nilai kesucian yang tertanam di dalamnya.

Ingat tahun 1999, kita seperti diajak memungut mimpi-mimpi yang disimpan dalam kotak pandora. Ada kegairahan di sana. Kita begitu fasih dan bangga melafalkan pekikan 'merdeka' meski setelah itu ada bayangan ketakutan yang hinggap. Sebagiannya justru menemui ajalnya.

Ingat tahun 1999, kita seperti diajak mengagumi sosok Tgk Abdullah Syafii. Kita begitu akrab dengan sifat ramahnya. Senyumnya membekas dalam ingatan orang-orang yang masih mengingatnya. Ada sihir simpati terpancar dari sana. Lawan pun tertunduk oleh matanya yang sendu. Sosoknya penuh aura dan karisma.

Kini, setelah 10 tahun berlalu, siapa yang masih mengingatnya: warna, syair dan sosoknya. Siapa yang akan percaya, bahwa dulu ada bendera 'aneh' dikibarkan di setiap sudut Gampong dan Kuta. Siapa yang akan percaya, syair *prang sabi* merasuki setiap relung hati, dan setelah itu memercikkan api perlawanan setelah seruan, *"bek tatakot ta surot aneuk senapan bangswan, aneuk meriam ya Allah ata...[edited]"*. Siapa yang masih mengingatnya bahwa Tgk Abdullah Syafii membuai rakyat Aceh dengan satu mimpi yang pasti, meski kini jadi ilusi.

Kita hanya ingat bahwa selepas euphoria itu, Aceh menjadi kubangan darah. Meski, tak seorang pun memaki warna bendera yang merah itu. Karena statusnya begitu terhormat dan tinggi. Dia jadi simbol kemuliaan dan juga penegasan sikap, "kita" dan "mer-

eka". Kini, siapa yang masih peduli, bahwa dulu antara 'kita' dan 'mereka' begitu kontras? Tidak ada. Keduanya kini bercampur, dan kita lupa mengingatnya. Sebab, sebagiannya menjadi musuh, dan sebagian lagi berteman dengan musuh.

Tak ada lagi ajaran, yang dulu, dari tiap Meunasah ke Meunasah, telinga kita tak henti-hentinya dibisiki doktrin: *ngon+ngon=ngon; ngon+musoh=musoh; musoh+musoh=musoh*. Sekarang, kita tak perlu bertanya lagi pada doktrin itu. Sebab, tak akan ada yang masih mengingatnya. Tak ada yang peduli.

Padahal, masih sangat akrab kita dengar, bahwa berkorban untuk warna merah itu, kita dapat label terhormat. Syahid. Semua orang meyakini ada ribuan budiadari *'geumat kipaih lah kipas saboh bak jaroe, geupreh judo woe ya Allah dalam prang sabi'*. Tak ada ibu menyesali anaknya syahid. Mereka malah sangat yakin, *'aneuk jak lam prang peutimang amanah nabi'*.

Itu dulu, ketika kita masih bermimpi dengan mimpi yang sama, ketika ideologi adalah panglima, dan ketika kepentingan kita masih sama. Kita juga bisa mengatakan, karena dulu kita punya musuh bersama. Sementara kini, kita lupa siapa musuh bersama itu. Kita juga lupa, siapa kawan yang mau mati bersama. Malah, parahnya, banyak dari kawan yang dulu siap mati bersama, kita posisikan sebagai musuh, dan karena itu *'jadi halue darah'*. Sungguh kita seperti hidup di dunia yang sangat aneh. Sangat-sangat aneh. Saya sendiri sempat tersentak, ketika muncul pernyataan, 'siapa saja yang mengibarkan bendera yang dulu begitu dikeramatkan itu harus diberi hukuman'. Dus...dunia cepat sekali terbalik. Kita jadi percaya, bahwa tak ada yang abadi di dunia ini, kecuali kematian.

Tapi, ada yang membuat kita bangga, bahwa masih ada orang-orang yang mengagumi warna seperti sepuluh tahun yang lalu, meski nadanya berbeda. Dan warna itu, bisa kita temui di setiap sudut-sudut Gampong dan Kuta. Warna yang begitu kontras, sebab, tak boleh ada warna lain yang lebih mencolok. Namun, tahukah mereka bahwa *'warna tak berarti apapun bagi orang buta!'*. (HA 041208)

Tentang Penulis



TAUFIK AL MUBARAK, lahir di Trueng Campi pada 9 November 1981, dari pasangan Muhammad Ali dan Ruhana Husein. Menempuh pendidikan dasar di MIN Cot Glumpang dan tamat pada tahun 1994, kemudian melanjutkan ke Pesantren Modern Terpadu Al Furqan Bambi selama tiga tahun. Tamat dari Al Furqan tahun 1997, melanjutkan sekolah di MAN 1 Sigli, dan lulus tahun 2000. Setelah lulus dari MAN, melanjutkan kuliah di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, IAIN Ar-Raniry dan selesai pada Tahun 2008.

an Islam, IAIN Ar-Raniry dan selesai pada Tahun 2008.

Kegiatan menulis sudah dialami sejak masih duduk dibangku MTs Al Furqan, dengan cara menulis di buku catatan sekolah. Ketika duduk di bangku MAN, cerpen dan puisi sudah dimuat di Harian Waspada Medan. Cerpen pertama yang dimuat di Waspada berjudul 'Potret Tua'. Ketertarikan terhadap dunia tulis menulis diperdalam lagi selama kuliah di IAIN dengan mencoba menulis opini untuk Harian Serambi Indonesia. Akhir 2001, tulisan pertama dengan judul 'Puasa dari Nafsu Jahat' dimuat di halaman opini Serambi. Setelah itu, berbagai tulisan dengan tema perdamaian semakin sering masuk di halaman opini Serambi Indonesia.

Sejak Tabloid Mahasiswa *Ar Raniry Post* terbit kembali akhir tahun 2000, ikut bergabung di dalamnya, setelah terlebih dahulu digembleng menulis oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEMA) IAIN Ar Raniry.

Selama kuliah, aktif di dunia aktivis dan mendirikan beberapa

buffer aksi bersama teman-teman, seperti Penyambung Aspirasi untuk Keadilan (PERAK), Himpunan Aktivis Antimiliterisme (HANTAM) yang aktif melakukan demo menentang kebijakan militeristik dalam penyelesaian konflik Aceh. Terakhir, bergabung dengan Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA).

Saat Darurat Militer, hijrah ke Jakarta sambil mengembangkan kemampuan tulis menulis, bergabung dengan Tabloid LACAK dan menjadi redaktur SATUVISI PBHI. Selain itu, juga menulis di situs AcehKita, Modus, dan di Koran sore SINAR HARAPAN.

Setelah damai kembali lagi ke Aceh, dan sempat bekerja di GTZ selama 8 bulan, selanjutnya mengikuti *e-media* training di Malaysia. Sepulang dari Malaysia menghidupkan kembali Tabloid SUWA sebagai media kampanye pasangan Irwandi-Nazar. Karena konflik internal, Tabloid SUWA tidak terbit lagi. Kegiatan menulis sempat vakum, sampai akhirnya bergabung dengan Harian Aceh sebagai Redaktur. Terakhir dipercayakan sebagai Redaktur Pelaksana di Harian tersebut sampai sekarang.

Berbagai workshop kepenulisan sudah diikuti seperti diklat jurnalis kampus se-Indonesia di Banjarmasin (2002), Pelatihan Jurnalistik "Journalistics Days" di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2004), Pelatihan Jurnalistik untuk Aktivis Aceh oleh ISAI Jakarta (2004), E-Media Training oleh SEACeM Malaysia (2006), Pelatihan Jurnalistik untuk Wartawan Aceh di LPDS Jakarta (2006), dan pelatihan Jurnalisisme Damai oleh KIPPAS Medan di Berastagi (2007). Penulis dapat dihubungi di tintamirah@gmail.com. Tulisan penulis dapat dibaca di <http://jumpueng.blogspot.com>.